



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



# MENCARI INDONESIA 3

*Esai-Esai Masa Pandemi*

Riwanto Tirtosudarmo

Buku ini tidak d...

# MENCARI INDONESIA 3

*Esai-Esai Masa Pandemi*



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.  
© Hak cipta dilindung oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014  
All Right Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

# MENCARI INDONESIA 3

*Esai-Esai Masa Pandemi*

Riwanto Tirtosudarmo



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2022 Riwanto Tirtosudarmo

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi/Riwanto Tirtosudarmo–Jakarta: Penerbit BRIN, 2021.

xx hlm. + 366 hlm.; 15 × 23 cm

ISBN: 978-623-99348-9-7 (no.jil.lengkap cetak)  
978-623-7425-62-5 (cetak)  
978-623-7425-34-2 (no.jil.lengkap *e-book*)  
978-623-7425-63-2 (*e-book*)

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Covid-19       | 2. Demografi    |
| 3. Sosial-politik | 4. Nasionalisme |

661.4

*Copy editor* : Muhammad Fadly Suhendra  
*Proofreader* : Anton Winarko dan Emsa Ayudia Putri  
*Penata isi* : Hilda Yunita  
*Desainer sampul* : Dhevi E.I.R. Mahelingga

*Cetakan pertama* : September 2021  
*Cetakan Edisi Revisi* : Mei 2022



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN

Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah

Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,


Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: 0811-8612-369

*E-mail*: penerbit@brin.go.id

*Website*: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN

 Penerbit\_BRIN


 penerbit\_brin

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



“Buku ini didedikasikan untuk Seno dan Djati  
serta generasinya”.

*aku mendengar suara jerit hewan yang terluka  
ada orang memanah rembulan  
ada anak burung terjatuh dari sangkarnya  
orang-orang harus dibangunkan  
kesaksian harus diberikan  
agar kehidupan bisa terjaga*

W.S. Rendra, 1974

Buku ini tidak diperjualbelikan.



# DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit .....	xi
Prakata Edisi Revisi .....	xiii
Prakata .....	xv
Prolog: Pandemi, Kecendekiaan, dan Masa Depan Bangsa .....	1
<b>BAGIAN 1. PANDEMI DAN DEMOGRAFI POLITIK .....</b>	<b>13</b>
1. Mobilitas Penduduk dan Penyebaran Covid-19 .....	14
2. Bias Kelas Covid-19.....	19
3. Covid-19 dan Politik Migrasi .....	23
4. PSBB, <i>Forced Migration</i> , dan Normal Baru .....	28
5. Pandemi, George Floyd, dan Marginalisasi Papua .....	34
6. Naik Kelas, Kelas Menengah, dan Pandemi: <i>Oxymoron</i> Negara Bangsa .....	40
7. Pandemi, <i>Centering the Margin</i> , dan <i>Re-Learning</i> .....	46
8. Mengamati Pengendalian Pandemi di Ibu Kota ...	51
9. Gerak, Suara, dan Rupa: Sebuah Pencarian.....	57
10. Renungan untuk Nadiem Makarim .....	64
11. Membaca Hatta dan Pasal 33 Itu .....	69
12. Daulat Rakyat: 76 Tahun Merdeka dari Belanda, 56 Tahun Dipasung Elite-nya Sendiri .....	78

Buku ini tidak diperjualbelikan.



<b>BAGIAN 2. NASIONALISME MASA KINI.....</b>	<b>85</b>
13. Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?.....	86
14. Kebangkitan Nasional dan <i>New Normal</i> .....	91
15. Hantu Komunisme: Sebuah Psikologi Politik .....	96
16. Lima Puluh Tahun Rekayasa Sosial: 5 Bias dan 5 Mitos.....	101
17. Tentang Mitos Politik dan Tabu-tabunya.....	107
18. Pancasila dan Ketakutan-Ketakutan Kita.....	113
19. Papua di Mata Pusat dan Indonesia <i>as a Common Project</i> .....	118
20. Studi Konflik dan Masih Tak terselesaikannya Masalah Kita .....	123
21. Kebebasan Akademis: Antara Kepentingan Nasional dan Akal Sehat .....	127
22. Pragmatisme, Proyekisme, dan Berhala-Berhala Itu .....	139
23. Ada yang Membusuk dalam Darah di Tubuh Kita .....	147
24. Jokowi dan Anies Baswedan.....	153
25. Borobudur, Medang, dan Keindonesiaan .....	157
 <b>BAGIAN 3. JEJAK TOKOH INTELEKTUAL INDONESIA..</b>	 <b>163</b>
26. Beberapa Kenangan dengan Bisry Effendy.....	164
27. Sejarah Kecil Bersama Taufik Abdullah .....	169
28. Jakob Oetama dan Indonesia yang Mencair.....	179
29. Pemikir dan Pejuang Agraria itu Telah Pergi .....	185
30. Mengenal Seorang Mentor, Jo Rumeser .....	189
31. Suko Bandiyono, Mentor Penelitian yang Sederhana .....	193
32. Rekuiem untuk Romo Herry.....	200
33. Itiningsih, Guru Bahasa Indonesiaku.....	205
34. Hersri, Trauma, dan Amnesia Sejarah .....	210
35. Fuad Hassan dan Teknokrasi .....	216
36. Muhamad Hisyam, Sejarahwan Islam yang Rendah Hati.....	221

37. Romo Kuntara dan Jawa Kuna .....	227
38. H.B. Jassin dan Diponegoro 82 .....	235
<b>BAGIAN 4. INDONESIA DALAM ULASAN .....</b>	<b>243</b>
39. Yudi Latif, Wawasan Pancasila, dan “Agama Sipil” .....	244
40. Laksmi Pamuntjak dan <i>Kekasih Musim</i> <i>Gugur-nya</i> .....	250
41. Ketika Umat Beriman Mencipta Tuhan .....	256
42. Jokowi, Sosok Penuh Kontradiksi? .....	262
43. Ruslan: Membaca Caping Goenawan Mohamad.....	269
44. Sejarah Intelektual, Membaca Ignas Kleden.....	274
45. Hariman Siregar dan Malari .....	283
46. Demokrasi Ternyata Bisa Mati, Juga di Amerika Serikat .....	289
47. Menyandingkan Ignas Kleden dengan Goenawan Mohamad.....	295
48. Telah Selesaikah Proses Kristenisasi Itu? .....	301
49. Dari <i>Cendekiawan dan Kekuasaan</i> ke <i>Unfinished Nation</i> .....	307
50. LIPI in <i>Memoriam</i> .....	314
Epilog 1. Kecendekiaan, Pandemi, dan Masa Depan Bangsa .....	325
Epilog 2. Sebuah Pencarian Tiada Henti.....	335
Daftar Pustaka.....	339
Indeks .....	359
Biodata Penulis.....	365

Buku ini tidak diperjualbelikan.



## PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku *Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi* hadir melanjutkan dua seri sebelumnya, *Mencari Indonesia 1: Demografi Politik Pasca-Soeharto* dan *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial*. Buku ini adalah edisi revisi yang kami terbitkan ulang dengan alasan yang sederhana: relevan dan menarik.

Buku ini dipicu dari keresahan-keresahan penulis yang muncul di masa pandemi COVID-19, yang telah memporandakan tatanan sosial, politik dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi memaksa beberapa negara di dunia memberlakukan *lockdown*. Adapun di Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah guna menekan laju penyebaran virus. PSBB ini menyebabkan kebebasan masyarakat dibatasi hingga kemudian timbul masalah-masalah yang menyeruak ke permukaan yang

Buku ini tidak diperjualbelikan.

menjadi keprihatinan kita bersama, diulas dari perspektif penulis sebagai cendekiawan sosial. Buku ini juga membahas di antaranya beberapa jejak tokoh intelektual Indonesia, dan resensi literatur yang ditulis pada masa pandemi. Mudah-mudahan esai-esai masa pandemi dalam buku ini dapat terus menginspirasi kita dalam sebuah proses pencarian tanpa henti, mencari Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.



## PRAKATA EDISI REVISI

Buku ini merupakan edisi revisi dari *Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi* yang pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Vidya Mandiri dan Kampung Limasan Tonjong pada September 2021. Edisi revisi ini diterbitkan oleh Penerbit BRIN melalui skema program akuisisi untuk membantu para penulis buku menerbitkan ulang buku-buku yang pernah diterbitkan dalam bentuk *e-book* agar menjangkau khalayak pembaca yang lebih luas. Dorongan untuk menerbitkan edisi revisi juga disebabkan adanya kritik tentang isi buku yang esai-esai di dalamnya (42 esai) disusun hanya berdasarkan kronologi penerbitannya di *kajanglako.com* sehingga menyulitkan pembaca untuk menemukan benang merah antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Dalam edisi revisi ini, esai-esai dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu dengan harapan memudahkan pembaca untuk mencerna isi buku. Selain dilakukan pengelompokan tulisan berdasarkan tema yang sama, dalam edisi revisi ini, ditambahkan delapan esai baru yang dianggap relevan dengan tema-tema yang ada.

Untuk meningkatkan kualitas akademik dari buku, Penerbit BRIN juga telah menambahkan pustaka dalam esai-esai yang ada dalam buku ini. Selain itu, atas pertimbangan menghargai

Buku ini tidak diperjualbelikan.

hak intelektual, foto-foto yang dipakai sebagai ilustrasi dalam setiap esai telah dikurasi keabsahannya dengan menyebutkan sumber foto. Sebagai penulis, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan, editor, dan ilustrator Penerbit BRIN, yaitu Prapti Sasiwi, Muhammad Fadly Suhendra, Noviasuti Putri Indrasari, Martinus Hemiawan, Anggy Denok Sukmawati, dan Dhevi Enlivena Irene Restia Mahelingga.

Kampung Limasan Tonjong, 20 Desember 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.



## PRAKATA

Esai-esai yang terkumpul dalam buku ini disebut “Esai-Esai Masa Pandemi” karena ditulis pada masa penyebaran koronavirus yang disebut sebagai Covid-19. Di Indonesia, menurut penuturan Dr. Pandu Riono, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI (FKM-UI), Covid-19 diduga sudah masuk pada Februari 2020. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan tentang adanya virus itu pada 2 Maret 2020 setelah dua orang warga yang terbukti telah tertular. Virus yang penyebarannya diduga berawal dari Wuhan, Tiongkok, itu segera menjadi wabah yang menjalar ke seluruh dunia dan mengancam seluruh penduduk dunia tanpa kecuali. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang telah mencapai lebih dari 270 juta jiwa, keempat terbesar setelah Tiongkok (1,44 miliar), India (1,37 miliar), dan Amerika Serikat (330 juta); jelas termasuk negara yang sangat rawan jika gagal mengendalikan penyebaran virus yang saat itu belum ditemukan vaksin penangkalnya.

Sebagai peneliti sosial yang menaruh minat pada migrasi penduduk, pandemi Covid-19 segera menjadi perhatian saya karena penyebarannya yang terjadi melalui mobilitas manusia. Mencegah penularan mau tidak mau berarti mencegah manusia untuk tidak

Buku ini tidak diperjualbelikan.



melakukan mobilitas. Sesuatu yang hampir-hampir mustahil dilakukan karena mobilitas atau migrasi adalah bagian dari kehidupan manusia, bahkan sejak manusia pertama kali ada di Bumi. Migrasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari manusia.

Jadi, bagaimana mengatasi dilema antara di satu sisi ingin memutus mata rantai penyebaran virus dan di sisi lain, mungkinkah mencegah manusia untuk tidak melakukan mobilitas? Merasa terpancing untuk mencari jalan keluar dari dilema yang sedang dihadapi ini, salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan mengekspresikan apa yang saya pikirkan melalui esai-esai yang awalnya hanya saya edarkan di kalangan teman dan kolega saya sendiri. Rekan saya yang berdomisili di Jambi sebelum masa pandemi, Jumardi Putra, telah meminta saya untuk menyumbangkan tulisan kepada media *online* yang dikelolanya, yaitu *Kajanglako.com*

Esai pertama dalam kumpulan tulisan ini berjudul “Mobilitas Penduduk dan Penyebaran Covid-19” terbit pada 6 Mei 2020. Saat itu, yang menjadi keprihatinan bersama adalah masuknya masa mudik Lebaran dan penyebaran virus mengikuti arah perjalanan penduduk yang mudik, begitu juga setelah mereka kembali dari mudik. Tidak hanya melihat fenomena pandemi dari kacamata saya sebagai seorang pemerhati migrasi, saya juga melihat isu yang secara sempit bisa dikatakan sebagai isu kesehatan dari sudut pandang yang lebih luas, dalam hal ini implikasinya secara sosial, ekonomi dan politik. Selama masa pandemi itu, saya juga memberikan komentar terhadap berbagai isu sosial lain yang muncul, yaitu tentang isu Papua, isu kebebasan akademik, dan berbagai isu lain yang menurut hemat saya menjadi keprihatinan publik.

Masa pandemi yang memaksa saya lebih banyak tinggal di rumah membuat saya memiliki waktu untuk membaca buku. Jika ada buku yang menurut pendapat saya perlu diketahui publik secara lebih luas, saya coba komentari dan saya kirim ke

*Kajanglako* untuk bisa disebarakan secara lebih luas. Beberapa tulisan juga saya buat untuk mengenang teman yang wafat dengan pertimbangan ada hal-hal yang menurut hemat saya penting diketahui oleh publik. Ada beberapa tulisan yang didorong oleh rasa ingin memberikan perspektif lain tentang sebuah isu yang sedang menjadi pembicaraan publik, misalnya isu komunisme, Pancasila, dan persoalan kebangsaan pada umumnya. Harus diakui bahwa esai-esai yang ditulis dalam waktu yang relatif cepat karena mengejar aktualitas, sering kali tidak didasari oleh perenungan yang mendalam. Esai-esai yang berjumlah 42 tulisan dan terentang dari tanggal 6 Mei 2020–20 Mei 2021 ini bisa dianggap sebagai komentar-komentar sosial pendek dari saya atas sebuah masalah yang menjadi keprihatinan bersama. Esai-esai itu jelas belum memberikan jawaban atau jalan keluar terhadap sebuah persoalan. Dalam banyak hal, nada esai-esai itu justru bertanyatanya, mencari sesuatu yang tampaknya tidak diperhatikan oleh publik, padahal menurut hemat saya ada yang penting di sana.

Sejak beberapa tahun yang lalu, saya menulis buku berjudul *Mencari Indonesia*. Buku pertama terbit tahun 2007 dengan judul *Mencari Indonesia: Demograf-Politik Pasca Soeharto*; dan tahun 2013 terbit buku kedua dengan judul *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial*. Bagi saya, “Mencari Indonesia” adalah sebuah metafora dari pencarian Indonesia sebagai tempat yang aman, tempat warga negara bisa berteduh, serta mendapatkan jaminan keselamatan dan keadilan. Esai-Esai yang saya tulis dalam masa pandemi ini—yang sampai hari belum bisa kita atasi—saya anggap juga merupakan bagian dari pencarian saya tentang Indonesia sebagai tempat berlindung yang aman bagi semua warga negara.

Pandemi—yang saat kata pengantar ini ditulis—sedang mengalami peningkatan jumlah kasus akibat mudik Lebaran tahun 2021. Hal ini seperti mengulang cerita lama saat tulisan pertama dalam buku ini ditulis, yaitu menjelang arus mudik Lebaran

tahun 2020. Meskipun sejak Januari 2021 vaksin telah mulai diperkenalkan dan memberikan harapan, mustahil mencegah manusia untuk tidak bergerak dari satu tempat ke tempat lain, apalagi dalam jumlah yang masif, seperti mudik Lebaran, yang makin menyulitkan upaya penanggulangan pandemi ini.

Sebagai tempat yang aman meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dari penjajahan 76 tahun yang lalu, ternyata kita masih harus mencari dan menemukan kehadirannya. Pandemi yang sampai hari ini masih mendera, memperlihatkan Indonesia belum menjadi tempat yang aman dan nyaman sehingga mendorong kita untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat yang benar-benar aman bagi warga negaranya.

Buku yang terbit dalam masa darurat ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan teman-teman yang boleh dikatakan telah sukarela memenuhi permintaan saya. Bung Jumardi Putra, rekan saya yang mengelola rubrik kebudayaan di *Kajanglako*, sebuah media *online* di Kota Jambi—seperti telah saya singgung di muka—adalah sahabat yang setiap saat membuka pintu bagi tulisan-tulisan yang saya kirimkan. Untuk semua bantuannya, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada Bung Wahyu Heriyadi dari Penerbit Vidya Mandiri yang telah menerbitkan buku ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Mas Prayogo yang telah mendesain dan *me-layout* dengan apik buku ini.

Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada kolega-kolega saya di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI yang di tengah kesibukan dan ancaman Covid-19 telah memenuhi permintaan saya untuk membaca naskah buku ini: pertama, Anggy Denok Sukmawati, yang telah mengoreksi bahasa saya yang sering kacau dan menulis tanpa memperhatikan tata bahasa; kedua, Ibnu Nadzir yang dengan kritis menulis prolog sehingga esai-esai dalam buku ini dapat

dikelompokkan dalam beberapa rumpun tematis dan terlihat koherensinya; ketiga, Thung Ju-Lan yang telah menuliskan komentar dan kritik sebagai epilog sehingga esai-esai dalam buku ini dapat dilihat sebagai sebuah pencarian yang masih jauh dari apa yang ingin ditemukannya. Dengan membaca prolog Ibnu Nadzir dan epilog Thung Ju-Lan, para pembaca buku ini mudah-mudahan akan memiliki perspektif kritis dan melihat keterbatasan-keterbatasan yang dikandung dalam esai-esai yang terkumpul dalam buku ini. Membaca prolog dan epilog ini, selain diingatkan pada bias-bias yang saya idap sebagai seorang penulis, saya yakin akan sangat membantu pembaca secara kritis menempatkan esai-esai yang terkumpul pada buku ini dalam konteksnya.

Menjelang finalisasi, saya menerima sebuah komentar dari Elvira Rumkabu—kolega muda dari Papua—yang sebelumnya telah saya minta untuk membaca draf buku ini. Komentar kritis Elvira tersebut menjadi Epilog 2, dan untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk rekan lama dari PDII-LIPI, Rosa Widyawan, yang telah membuatkan indeks untuk buku ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah saya ganggu dengan kiriman tulisan-tulisan saya yang terbit di *Kajanglako*. Berbagai tanggapan dari teman-teman dan sahabat-sahabat itu, membuat saya merasa memiliki *peer group*—sebuah komunitas epistemik—yang dengan itu, saya merasa menjadi bagian dari dunia dan zaman yang selalu bergerak.

Kampung Limasan Tonjong,

17 Agustus 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.



## Prolog: Pandemi, Kecendekiaan, dan Masa Depan Bangsa

Beberapa waktu lalu, Pak Riwanto menghubungi saya untuk memberikan catatan kritis atas buku ini. Sejujurnya, ini bukan perkara mudah bagi saya. Selain karena saya merasa masih jauh dari tingkat rutinitas menulis—tidak seperti Pak Riwanto—ia adalah salah satu senior di kantor yang paling saya hormati. Bagi saya, yang tumbuh bersentuhan dengan budaya Jawa, menjadi kritis pada sosok yang saya hormati—seperti yang lazim dalam tradisi keilmuan Barat—menjadi cukup rumit.

Ketika saya baru memulai perjalanan menjadi peneliti, Pak Riwanto sudah puluhan tahun berkarier di LIPI. Dalam lembaga penelitian pemerintah, seperti LIPI, berkarier dalam waktu yang lama memiliki kelebihan tersendiri, tetapi bisa juga berdampak buruk. Peneliti senior memang memiliki banyak jam terbang, tetapi tidak sedikit yang terlihat kelelahan didera pekerjaan penelitian yang amat birokratis. Oleh karena itu, dapat dipahami jika tidak banyak peneliti yang mampu mempertahankan antusiasmenya pada ilmu pengetahuan sampai akhir kariernya.

Dalam hal ini, Pak Riwanto adalah pengecualian. Di tahun-tahun terakhir masa aktifnya sebagai peneliti LIPI, Pak Riwanto kerap mengajak diskusi para peneliti muda. Tidak jarang,

obrolan-obrolan itu membahas buku-buku akademis terbaru yang sedang ia baca, buku-buku yang mungkin belum dibaca oleh para peneliti tersebut, tak terkecuali saya. Lebih dari itu, Pak Riwanto juga masih sangat aktif terlibat dan mewarnai arah kelompok-kelompok penelitian. Maka, tidaklah mengherankan ketika tidak sedang bekerja di kantor, Pak Riwanto masih sangat dihormati di lembaga kami, baik oleh sejawatnya maupun generasi peneliti yang baru.

Namun, menempatkan perjalanan intelektual Pak Riwanto sekadar sebagai peneliti LIPI tidaklah tepat. Pak Riwanto, setidaknya dalam pandangan saya, merupakan cendekiawan yang menjalankan kerja-kerja pengetahuan melampaui sekat-sekat formal akademik. Saya kira, hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perjalanan kariernya yang tumbuh dalam ekosistem pengetahuan yang belum begitu terfragmentasi.

Cerita Pak Riwanto tentang pertemuannya dengan Pak Taufik (*Sejarah Kecil Bersama Taufik Abdullah*, hlm. 121), sedikit memberikan gambaran terkait hal tersebut. Sekitar empat puluh tahun lalu, Pak Riwanto ikut bergabung dalam pesta kecil yang dihadiri Goenawan Mohammad, Nono Anwar Makarim, Melly G. Tan, Marsilam Simanjuntak, dan nama-nama besar lainnya. Diskusi ini intim, hanya dihadiri oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang diam-diam memiliki jejak besar dalam perkembangan sosial dan politik di Indonesia.

Ekosistem ini saya bayangkan tidak memiliki batas yang tegas antara seniman, intelektual, akademisi, bahkan mungkin pengusaha. Nono Anwar Makarim, misalnya, adalah salah satu tokoh penting di balik lahirnya LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial), tetapi belakangan dikenal sebagai salah satu pengacara termahal di Indonesia. Goenawan Mohammad adalah jurnalis sekaligus seniman yang sangat fasih berbicara literatur ilmiah, mungkin melampaui banyak koleganya di kampus.

Kaburnya batas-batas intelektual tersebut juga kerap saya dengar dari senior lain di LIPI. Pak Mochtar Pabottingi, misalnya, senior di LIPI yang merupakan seorang ilmuwan politik mumpuni yang juga aktif menulis puisi dan karya sastra. Pada masa yang relatif dekat dengan cerita Pak Riwanto, ia juga kerap berkisah tentang aktivitasnya “nongkrong” di TIM, atau rekan-rekan jurnalis di *Tempo*. Dalam ekosistem semacam ini, ganjil rasanya membayangkan akademisi yang dengan kaca mata kuda, memiliki fokus khusus untuk menulis jurnal atau konferensi, seperti yang banyak ditemukan saat ini. Gambaran ini, menurut saya, berlaku bagi banyak orang yang aktif di masa itu, termasuk Pak Riwanto.

Ekosistem seperti ini sedikit menimbulkan rasa iri bagi saya. Saya berandai-andai juga, kapan Nadiem Makarim (anak Nono Anwar Makarim), bisa meluangkan waktu untuk mendiskusikan sastra dengan Eka Kurniawan, bukan membicarakan pertumbuhan nilai pada aplikasi Gojek. Bukan sebuah peran yang mungkin dilakukan karena ia menteri, tetapi karena ia memang suka dan menaruh minat di sana.

Pengandaian saya mungkin agak terlalu romantik tentang masa lalu, tetapi tetap sulit dimungkiri bahwa ekosistem pengetahuan saat ini amat jauh terfragmentasi. Sekat-sekat seniman, akademisi, pengusaha, dan lainnya terlihat jauh lebih tegas dalam periode yang kerap disebut sebagai kapitalisme tingkat lanjut ini. Masing-masing disibukkan dengan mengejar angka-angka capaian yang menjadi target nyata di setiap waktu. Implikasinya, peran menjadi cendekiawan, seperti yang dijalankan Pak Riwanto rasanya memang makin langka.

Jika dibandingkan dengan peneliti-peneliti LIPI saat ini pada umumnya, Pak Riwanto tidak pernah cukup terkungkung dalam satu bidang akademik. Cakupan minat, bacaan, dan kiprahnya jauh melampaui bingkai peneliti demografi yang menjadi bidang kepakarannya semasa aktif. Tidaklah mengherankan jika Pak Riwanto tidak pernah berhenti bergerak setelah kariernya



selesai di LIPI. Ia masih terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi forum dan wilayah. Pak Riwanto juga mengikuti perkembangan karya-karya cendekia lainnya di dalam dan luar Indonesia. Tulisan-tulisan di *Kajanglako* yang dibukukan dalam buku ini juga merupakan manifestasi upayanya untuk tetap menjalankan peran sebagai cendekia. Dengan latar seperti ini, sekali lagi, tidak mudah membuat catatan kritis atas karya Pak Riwanto. Namun, saya tetap menyanggupi untuk setidaknya memberikan catatan pada tulisan ini sebagai bagian dari pembelajaran saya yang mencoba menapaki jalan kecendekiaan yang ditekuni Pak Riwanto sampai saat ini.

\*\*\*

Kumpulan tulisan dalam *Mencari Indonesia 3* ini, tampaknya dibangun dengan alur kronologis sesuai proses penerbitan tulisan. Pemilihan kronologi ini membantu dalam kesinambungan antara satu tulisan dengan tulisan lainnya. Namun, pada saat yang sama juga membuat pembaca tersesat, kalau bukan kewalahan karena melihat banyaknya tulisan. Saya tidak tahu apakah pilihan struktur ini terinspirasi oleh kolom Goenawan Mohamad yang memang sangat berpengaruh bagi pembaca esai di Indonesia termasuk Pak Riwanto (Lihat “Ruslan: Membaca Capping Goenawan Mohamad”, hlm. 137), atau sekadar merekam kronologis dari tulisan-tulisan ini. Namun, saya merasa, gagasan dalam kumpulan tulisan ini dapat lebih mudah ditelusuri pembaca jika dibuat ke dalam semacam rumpun untuk mengikat tulisan-tulisan dengan tema serupa.

Jika dibaca dengan saksama, rumpun-rumpun ini sebetulnya sudah ada meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Walaupun saya merasa harus membuat semacam apologi terdahulu karena upaya untuk mengajukan rumpun ini pasti memiliki banyak persoalan. Semua upaya kategorisasi secara inheren pasti memiliki sifat arbitrer, terutama karena satu tulisan bisa saja

beririsan dengan lebih dari satu rumpun. Dengan kesadaran semacam itu, saya tetap percaya pengajuan rumpun tulisan ini dapat mempermudah pembaca yang hendak menjelajah gagasan Pak Riwanto dalam buku ini.

Dalam kata pengantar sudah dikemukakan bahwa tulisan-tulisan di buku ini dipicu dari beragam keresahan Pak Riwanto yang muncul di masa pandemi. Keresahan yang saya kira dialami juga oleh jutaan orang lain di Indonesia. Adanya keharusan menetap di rumah, banyak orang kehilangan pekerjaan, berita kematian kerabat yang jadi rutinitas harian, adalah sebagian dari pengalaman yang hampir tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh sebagian besar dari kita. Terakhir kali, kita mengalami peristiwa semacam ini adalah seabad lalu ketika wabah Flu Spanyol datang ke Nusantara, dan diperkirakan merenggut korban lebih dari empat juta jiwa (Chandra, 2013).

Tidaklah mengherankan jika peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan. Pada masa awal pandemi, Zizek, salah satu filsuf modern paling berpengaruh di dunia, membayangkan bahwa Covid-19 yang dialami semua negara, akan mendorong bangsa-bangsa menuju solidaritas bersama (Zizek, 2020). Kita tahu proses ini tidak pernah terjadi, yang terlihat hanyalah amplifikasi masalah-masalah sosial-politik yang sudah lama mengendap. Fenomena ini diangkat dalam rumpun tulisan Covid-19 *dan Demografi Politik*. Dalam “Covid-19 dan Politik Migrasi” (hlm. 21), misalnya, terlihat kegagalan berulang negara setiap melakukan politik migrasi. Kondisi tersebut diperumit oleh Covid-19 yang menuntut upaya serius dalam melakukan pembatasan gerak manusia untuk mencegah penyebaran.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), makin menegaskan bahwa Covid-19 memperjelas wajah-wajah buruk politik di Indonesia. Kebijakan tersebut disorot Pak Riwanto sebagai kebijakan yang sejak awal mengandung bias kelas karena hanya kelas menengah yang sanggup untuk diam di rumah guna

memperkecil angka penyebaran Covid-19. Masyarakat yang berada di akar rumput tidak memiliki pilihan karena masih harus memikirkan kebutuhan hidup hariannya. Yang menjadi persoalan, bias kelas menengah itu pun tampaknya absen di mata politisi, cendekiawan, juga jurnalis. Absennya mereka tentang persoalan kelompok miskin, misalnya, digambarkan oleh Pak Riwanto dengan sangat baik tentang diskusi dan perdebatan mereka soal PSBB yang dilakukan di tempat makan dengan harga yang tidak terjangkau kelompok miskin (Lihat Bab 4).

Rumpun kedua yang saya kira dapat mengelompokkan beberapa tulisan adalah tentang *Papua dan Proses Marginalisasi*. Persoalan marginalisasi dan ketimpangan di Papua adalah salah satu isu yang tidak pernah selesai sejak bergabungnya provinsi tersebut ke Indonesia di masa Orde Baru. Namun, lebih dari itu, persoalan struktural yang ada di Papua juga sangat berkelindan dengan identitas ras. Maka seperti yang dibahas dalam “Pandemi, George Floyd, dan Marginalisasi Papua” (hlm. 51), protes ketidakadilan di Papua dapat beresonansi dengan gerakan “*Black Lives Matter*” di Amerika Serikat. Meskipun berangkat dari trajektori sejarah yang berbeda, orang Papua merasakan ketidakadilan sistemik, seperti kelompok kulit hitam Amerika yang juga dilanggangkan oleh negara.

Persoalan Papua juga tidak dapat dilepaskan dari cara pemerintah pusat memelihara paradigmanya soal penghuni wilayah ini. Dalam “Papua di Mata Pusat dan *Indonesia as a Common Project*” (hlm. 75), Pak Riwanto mengkritik cara pandang pemerintah Indonesia yang masih jauh dari melibatkan warga Papua dalam visi bersama mengenai Indonesia. Sebaliknya, seperti kolonial, daerah tersebut hanya dipandang karena kekayaan sumber daya alamnya, dan menafikan orang-orang yang hidup di dalamnya.

Berbicara soal manusia, kumpulan tulisan ini menaruh perhatian khusus pada kisah perseorangan. Tulisan-tulisan ini bagi saya merupakan kelompok ketiga yang mungkin bisa disebut

sebagai kategori *Tokoh dan Gagasan*. Pada bagian ini, Pak Riwanto banyak berbicara soal sosok maupun karya yang sedikit banyak berpengaruh pada perjalanan intelektualnya. Lewat cerita tentang sosok Jo Rumeser (Lihat “Mengenang Seorang Mentor, Jo Rumeser”, hlm. 147), seniornya di Fakultas Psikologi, pembaca artikel dapat sedikit membayangkan kehidupan di kampus pada momen-momen seputar tahun 70-an dan 80-an.

Dalam rumpun ini juga, Pak Riwanto secara terbuka mengkritik tradisi penulisan tokoh di Indonesia. Dalam “Setelah Puja-Puji Itu ...” (hlm. 183), ia mengkritik buku penulisan tentang Taufik Abdullah (seniornya di LIPI), yang belum bisa beranjak jauh dari cerita tentang pengalaman dan pujian. Padahal, jika kita memang menganggap Taufik Abdullah memberikan sumbangsih penting bagi dunia akademik, amat penting untuk mengulas karya-karyanya secara serius. Dalam tulisan ini, saya kira Pak Riwanto sedang mengingatkan dirinya sekaligus cendekia generasi berikutnya untuk tetap secara serius menaruh perhatian pada pembacaan akademik kritis. Bagi saya sendiri, tulisan ini agak menohok karena memang mengingatkan betapa jarang saya membaca karya-karya rekan saya sendiri apapun alasannya. Saya masih lebih sering baca karya-karya indonesianis luar daripada mencoba memahami kontribusi akademik penting dari rekan-rekan sendiri.

Hal lain yang saya catat dari bagian ini adalah sedikitnya figur perempuan yang muncul dalam pembahasan tokoh. Bias ini mungkin akan terlewat begitu saja kalau Pak Riwanto tidak menulis “Sejarah Intelektual, Membaca Ignas Kleden” (hlm. 191). Dalam tulisan ini, dibahas bagaimana Ignas Kleden dikritik karena bukunya tentang intelektual Indonesia tidak memuat satu pun tokoh perempuan Indonesia. Setelahnya, saya baru sadar bahwa tokoh perempuan juga jarang muncul dalam pembahasan buku ini. Saya tidak tahu apakah cendekia perempuan memang lebih sedikit berpengaruh pada perkembangan intelektual

Pak Riwanto. Jika demikian halnya, maka kenyataan itu justru menegaskan kritik bahwa perkembangan intelektual Indonesia memang masih sedikit memberi ruang bagi perempuan.

Topik terakhir yang saya kira juga menjadi pengikat yang relevan adalah soal “*Kebangsaan Indonesia.*” Bagian ini saya kira amat menegaskan posisi Pak Riwanto yang melampaui disiplin akademik yang dilaluinya. Pertanyaan-pertanyaan dalam tulisan ini bertautan dengan asumsi yang menjadi dasar dari seri buku *Mencari Indonesia*, yaitu proyek kebangsaan yang terus bergerak dan tidak pernah selesai. Dalam “Lima Puluh Tahun Rekayasa Sosial: 5 Bias dan 5 Mitos” (hlm. 39), Pak Riwanto mencatat bahwa mitos-mitos politik yang menjadi sumber persoalan bangsa, terus mengendap selama 50 tahun. Persoalan-persoalan ini terus berkumpul, bahkan lama setelah Reformasi berlangsung. Alih-alih membawa kebaruan, Reformasi malah meneguhkan mitos-mitos politik yang dalam kondisi pandemi makin memperburuk situasi.

Gugatan juga ditujukan Pak Riwanto pada kekuasaan yang bisa menekuk kebebasan akademik atas nama perlindungan kepentingan nasional. Dalam “Kebebasan Akademis: Antara Kepentingan Nasional dan Akal Sehat” (hlm. 151), Pak Riwanto mengkhawatirkan perkembangan dunia akademik di tengah kondisi kekuasaan yang makin dipengaruhi oleh para oligarki. Kekhawatiran ini makin mendapatkan relevansinya ketika dalam beberapa tahun terakhir dapat terlihat dengan gamblang bahwa pemerintah cenderung makin kuat mengontrol institusi akademik. Institusi ini, apakah kampus atau lembaga penelitian, selama ini mungkin dengan setengah naif, dipercaya oleh banyak akademisi sebagai ruang yang relatif independen.

Seperti yang saya sampaikan di awal, tema-tema ini tidak pernah betul-betul terpisah satu dengan lainnya. Dalam pembicaraan tentang tokoh, hampir menyeruak pertanyaan mengenai masa depan bangsa. Juga dalam pembicaraan soal marginalisasi bagi orang Papua dan kelompok lainnya saat ini sama sekali tidak bisa

dilepaskan dari Covid-19, terutama karena kemampuan menghadapi ancaman tersebut amat dipengaruhi akses yang timpang terhadap sumber daya ekonomi maupun perangkat kesehatan. Meskipun demikian, rumpun-rumpun ini saya kira tetap dapat membantu pembaca untuk mengenali daya jelajah gagasan Pak Riwanto yang memang terentang luas.

Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal tulisan, tulisan-tulisan pada buku ini adalah salah satu perwujudan laku Pak Riwanto Tirtosudarmo sebagai cendekia. Tulisan-tulisan ini, seperti yang disampaikan dalam kata pengantar penulisnya sendiri, memang tidak pernah ditujukan sebagai pemberi jawaban, melainkan untuk tetap mengajukan pertanyaan. Tindakan yang sepertinya sederhana, namun juga tidak mudah dilakukan oleh para cendekia di Indonesia. Kesulitan ini boleh jadi karena negara Indonesia yang konon bergerak makin mendekati corak otoritarian. Atau jika belum, energi cendekia hari ini mungkin sudah habis dikuras target angka akademik yang mengejar setiap waktu.

Di luar ekosistem akademik, rasanya juga sulit bagi saya untuk sepenuhnya melihat masa depan dengan optimis. Persoalan-persoalan nasional, yang hampir semuanya dibahas dalam buku ini, yaitu ketimpangan ekonomi yang memburuk, penguatan kekuasaan oligarki, pelemahan demokrasi, pelanggaran marginalisasi, hingga penyebaran pandemi yang tidak kunjung usai; menjadikan harapan saya soal masa depan bangsa jauh dari tinggi. Perkaranya lebih rumit lagi karena fenomena dunia juga terlihat sama muramnya, malah lebih gelap. Dalam beberapa waktu ini, setidaknya ada dua pembacaan tentang masa depan yang saya jumpai dan menguatkan kesan itu.

Prediksi pertama diajukan oleh Peter Turchin, seorang ahli serangga yang banting setir membuat analisis sejarah. Turchin tidak tertarik membuat analisis sejarah biasa, sebaliknya ia mengkompilasi sejarah manusia sekitar 10.000 tahun terakhir dari

berbagai peradaban ke dalam model matematika (Wood, 2021). Berangkat dari model tersebut, Turchin yakin bahwa situasi sosial dan politik Amerika Serikat (yang hampir pasti berimplikasi pada dunia), sedang memasuki *Age of Discord* dan memiliki peluang yang berujung pada Perang Sipil II. Meskipun pada mulanya banyak diragukan dengan kondisi sosial politik Amerika yang memanas, prediksi Turchin makin mendapat perhatian luas, terutama di antara sejarawan maupun ilmuwan politik.

Analisis kedua, berangkat dari model tentang keberlanjutan hidup manusia yang dibuat sekelompok peneliti MIT di tahun 70-an. Kelompok ilmuwan tersebut membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi jika model pertumbuhan ekonomi dunia tidak lagi dapat ditopang oleh kapasitas Bumi. Persoalannya, ekonom saat ini, Gaya Herrington, menemukan bahwa prediksi tersebut sesuai dengan data-data yang kita miliki hari ini dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia mungkin akan berhenti tidak lama dari sekarang (Helmores, 2021). Mengingat ekonomi dan sistem politik modern digerakkan dengan asumsi bahwa ekonomi akan tumbuh, hampir dipastikan berhentinya pertumbuhan akan membuka konflik sosial dan politik, mungkin di skala yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Sederhananya, sangat sulit untuk tetap menjaga pikiran positif dalam beberapa tahun terakhir dan mungkin masih dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, bagi saya, menarik ketika menemukan bahwa bahkan di tengah kritiknya yang tajam, Pak Riwanto masih menyisipkan sejumlah harapan-harapan terhadap pekerjaan, kecendekiaan, atau tentang kondisi Indonesia. Misalnya, Covid-19 meskipun menguatkan banyak persoalan, juga dilihat sebagai ujian bagi lahirnya pemimpin-pemimpin Indonesia di waktu mendatang (Lihat “Covid-19 dan Kepemimpinan Baru, hlm. 9).

Dalam bidang pendidikan, Pak Riwanto juga memahami sulitnya tantangan birokrasi dan kepentingan politiknya, namun

tetap berharap pada Nadiem Makarim yang dibayangkan menjunjung tinggi rasionalitas pengetahuan (Lihat “Renungan Untuk Nadiem Makarim”, hlm. 217). Harapan yang tentu saja naif dalam pandangan saya karena bagaimanapun, Nadiem adalah bagian dari oligarki yang banyak dipersoalkan oleh Pak Riwanto dalam tulisan-tulisan di buku ini.

Namun, harapan semacam ini mungkin memang mengakar bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia akademik. Akademisi atau cendekia percaya bahwa pengetahuan dan rasionalitas merupakan sumber dari transformasi. Tidak heran jika kita mungkin berharap pada sesama produk pencerahan yang kita yakini memiliki sudut pandang yang sama. Sebaliknya, kita menjadi lebih sering melewatkan bahwa banyak persoalan yang kita hadapi adalah anak kandung dari rasionalitas yang sama.

Sejujurnya, saya juga mempertanyakan apakah pandangan saya mungkin terlalu negatif? Apakah karena Pak Riwanto telah melalui jauh lebih banyak pergolakan sosial dan politik dalam hidupnya, beliau melihat riak-riak saat ini hanyalah episode yang berulang? Di sini, mungkin harapan-harapan yang disampaikan Pak Riwanto justru makin penting untuk dijaga. Di tengah banyaknya perubahan-perubahan ini, harapan-harapan yang disematkan itu mungkin dapat menjadi andil penting untuk menopang kecendekiaan atau bangsa yang harus selalu dipelihara sebagai proyek bersama.

Selasa, 10 Agustus 2021

Ibnu Nadzir  
Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bagian 1.

# Pandemi dan Demografi Politik

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Lotulong (2020)

## 1. Mobilitas Penduduk dan Penyebaran Covid-19<sup>1</sup>

Saat ini, sebagian warga Indonesia tidak dapat mudik Lebaran. Tradisi pulang kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan handai taulan di negeri dengan jumlah penduduk hampir 270 juta dan mayoritas muslim ini, terjadi setiap tahun pada saat Lebaran. Tahun ini, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tradisi mudik pertama kali akan mengalami *disruption* dan para pekerja migran merupakan golongan yang paling terkena dampaknya. Adakah hubungan antara mobilitas penduduk dan penyebaran virus koronavirus, dan apakah implikasi sosial-politik dari peristiwa *social disruption* yang telah melanda seluruh negara di dunia ini?

<sup>1</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 6 Mei 2020.

Ketika Covid-19 merebak di seluruh negara, mobilitas penduduk dipaksa berhenti karena pemerintah memberlakukan penutupan sementara (*lockdown*) atau yang lebih ringan, seperti yang dilakukan di Indonesia, PSBB. Kebijakan pemerintah ini diambil dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran koronavirus karena penyebaran virus ini berhubungan erat dengan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Meningkatnya mobilitas penduduk yang terjadi pada waktu bersamaan akan meningkatkan dan memperluas risiko-risiko penularan Covid-19.

Saya membaca harian *Kompas* tanggal 28 April 2020, yang memuat dua infografik terkait perkembangan dan penanganan Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Infografik yang pertama, pada hlm. 1, menunjukkan penurunan jumlah dari pasien positif, pasien sembuh, dan pasien meninggal sejak tanggal 16–27 April 2020. Sementara itu, infografik yang kedua, pada hlm. 12, menunjukkan penurunan jumlah bus dan jumlah penumpang bus yang berangkat dari semua terminal tipe A di Jabodetabek per bulan sejak Januari–April 2020. Dari dua infografik tersebut, indikasi apa yang kita bisa tarik dalam kaitan dengan pergerakan manusia dan penyebaran koronavirus?

Infografik yang pertama, mungkinkah penanganan penyebaran koronavirus telah berhasil, baik melalui usaha pemerintah atau pun masyarakat? Sementara itu, infografik yang kedua, apakah mengindikasikan keberhasilan pemerintah menekan laju pergerakan manusia keluar wilayah Jabodetabek? Untuk sementara, memang belum bisa kita simpulkan terlalu jauh meskipun secara sepintas kedua infografik itu mengindikasikan hal-hal yang menggembirakan dari upaya-upaya kita menekan laju penyebaran Covid-19.

Sebuah isu yang sejak awal menghantui kita, terutama para pengamat, adalah sejauh mana data-data resmi yang dilaporkan pemerintah cukup akurat. Meskipun kita bisa cukup

meyakini bahwa tingkat keakuratan itu makin baik, antara lain karena tekanan dari masyarakat bahwa pemerintah tidak dapat bermain-main dan bersifat manipulatif dalam persoalan yang menyangkut hidup dan mati warga negaranya. Dalam kaitannya dengan mobilitas penduduk atau pergerakan manusia yang ikut menentukan tinggi rendahnya tingkat penyebaran Covid-19 dan pemerintah Indonesia memutuskan PSBB, bukan *lockdown*, menjadi pertanyaan sejauh mana pergerakan manusia atau migrasi berkorelasi dengan penyebaran koronavirus di negara kepulauan terbesar ini? Untuk mendeteksi keterkaitan tersebut, kita dapat melihat pola mobilitas penduduk dan tingkat persebaran Covid-19 sejauh data yang ada.

### **Konsentrasi Penyebaran di Megapolitan**

Dari beberapa studi tentang migrasi internal di Indonesia, secara umum diperoleh gambaran bahwa tingkat mobilitas penduduk di Indonesia sejak tahun 2000 menunjukkan pola mobilitas yang makin didominasi oleh mobilitas dalam jarak dekat (seperti antarkabupaten dan antarkota), dibandingkan dengan pola mobilitas tradisional sebelumnya yang banyak dilakukan secara jarak jauh, seperti antarpulau. Tidak dilanjutkannya program transmigrasi sejak jatuhnya Soeharto, ikut berpengaruh terhadap berubahnya pola migrasi internal di Indonesia. Pola migrasi yang bersifat jangka pendek ini sesungguhnya telah terlihat sejak tahun 1990-an ketika pembangunan makin terkonsentrasi di Jawa, dan beberapa kota besar di luar Jawa, seperti Medan, Denpasar, dan Makassar. Gejala aglomerasi yang melahirkan megapolitan ini menjadi daya tarik bagi para pencari kerja untuk bermukim di kota-kota satelit dan mendorong pola transportasi *commuting*, seperti yang kita saksikan sekarang. Analisis data migrasi dari SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) tahun 2015, memperlihatkan hampir lebih dari 50% mobilitas penduduk

terjadi di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera sekitar 24% (Nuraini dkk., 2016).

Melihat data persebaran Covid-19 pada tingkat provinsi, terlihat adanya hubungan yang erat antara lokasi kasus Covid-19 yang tinggi dengan pusat-pusat aglomerasi yang penduduknya memiliki tingkat mobilitas tinggi. Sebagian besar temuan kasus terjadi di wilayah Jawa, yaitu 73%, dengan jumlah kasus terbanyak di Jakarta sebanyak 4.002 kasus atau 42% dari total kasus yang ada di Indonesia. Hal yang sama, terdapat pula di beberapa provinsi yang memiliki megapolitan, selain Jakarta (Jabodetabek), Bandung (Bandung Raya), Surabaya (Gerbangkertosusila), Medan (Mebidang), Makasar (Mamminasata), dan Denpasar (Sarbagita).

Hasil survei komuter yang dilakukan oleh BPS di beberapa kota metropolitan (periode 2015–2019), menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di komuter dalam sehari banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di sekitar ibu kota provinsi tadi. Tingkat mobilitas mereka cukup signifikan, berkisar antara 5–20%. Oleh karena itu, adanya keputusan pemerintah untuk melakukan PSBB, terutama di wilayah metropolitan dan sekitarnya, menjadi alternatif yang tepat dalam upaya mengurangi penyebaran koronavirus di wilayah tersebut. Untuk wilayah DKI, misalnya, infografik di *Kompas*, 28 April 2020 menunjukkan salah satu keberhasilannya. Dengan kata lain, hubungan antara mobilitas penduduk dan risiko penyebaran Covid-19, sangat signifikan.

Pengalaman Indonesia dengan Covid-19 akan menjadi pelajaran yang penting. Berbagai kajian telah menunjukkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang besar, namun dampak politik yang ada harus diantisipasi dan dicermati, terutama di kota-kota besar yang menjadi daerah tujuan migran. Dengan diberlakukannya PSBB akan berdampak pada polarisasi antara kelas menengah yang rata-rata masih mampu bekerja dari rumah (*Work From Home*, WFH), sedangkan kelas bawah, para

buruh, dan pekerja sektor informal harus tetap bekerja meskipun risiko tertular Covid-19 tinggi. Polarisasi yang didasarkan atas meningkatnya kesenjangan akses ekonomi dan perasaan diabaikan selama PSBB akan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah dan berdampak pada Pilkada dan Pilpres yang akan datang.



Sumber: 2p2play (2019)

## 2. Bias Kelas Covid-19<sup>2</sup>

Penyebaran Covid-19 berhubungan erat dengan salah satu dimensi penting dari globalisasi, yaitu mobilitas penduduk antarnegara atau antarbangsa. Paradoksnya adalah ketika saat ini digaungkan seruan untuk kerjasama internasional, masing-masing negara terpaksa harus memikirkan kepentingannya terlebih dahulu untuk bisa bertahan. Ironinya, setiap negara memiliki kemampuan bertahan (*survival*) sendiri, dan tidak sedikit negara yang akan menderita karena kemampuan melenting (*resilience*)nya rendah. Hukum Darwin, *survival of the fittest*, akan berlaku dalam pertempuran melawan Covid-19 ini.

Indonesia secara hipotesis memiliki kemampuan bertahan dan melenting yang rendah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak siap dan kita akan menderita dengan banyak korban

<sup>2</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 14 Mei 2020.



dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, pertempuran ini akan ada akhirnya, dan jika berangkat dari hipotesis bahwa kita akan mengalami banyak korban, pertanyaannya adalah seberapa parah sebetulnya akibat yang kita derita sebagai bangsa dan negara? Dengan pernyataan ini, saya ingin mengajak siapa saja untuk berpikir menyeluruh, tidak hanya implikasi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga tentang pemulihannya dari akibat terburuk gempuran musuh tidak terlihat yang bernama Covid-19.

Apabila kita melihat realitas sosial, ekonomi, dan politik yang ada, gempuran pandemi ini mau tidak mau akan masuk ke dalam struktur yang ada. Struktur sosial, ekonomi, dan politik yang kita miliki sebagai hasil dari perkembangan sejak awal tahun 1970-an menunjukkan kalau kita makin menjauh dari cita-cita kemerdekaan yang diraih dengan susah payah oleh para pendiri bangsa ini, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Secara sosial-ekonomi, saat ini ditandai oleh ketimpangan yang luar biasa antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki, begitu juga secara politik, yang ada adalah oligarki. Covid-19 memperlihatkan dengan jelas adanya bias kelas dari struktur sosial dan ketenagakerjaan kita. Kita harus mulai mengantisipasi *the weakest link* yang akan menghadapi dampak paling berat dari Covid-19 ini. Dapat dibayangkan mereka yang rentan adalah masyarakat-masyarakat pinggiran, kelompok marginal.

*Work from Home* (WFH) hanya diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di sektor jasa. Jalan-jalan dan perkantoran di Segi Tiga Emas Jakarta sepi karena kelas ekonomi ini mampu untuk WFH, sedangkan di perkampungan-perkampungan padat, pasar-pasar tradisional, adalah kelompok yang tidak mungkin bekerja dari rumah. Meskipun rata-rata mereka memiliki *handphone*, tetapi mereka tidak mungkin WFH dan bersembunyi dari sergapan Covid-19 di rumahnya. Mereka harus keluar rumah untuk bekerja, mencari uang, dan mencari sesuap nasi untuk hidup. Di daerah luar Jakarta, bagaimana nasib para petani,

nelayan, komunitas-komunitas adat yang selama ini sudah hidup terabaikan, jauh dari fasilitas kesehatan?

Covid-19 telah membuka kedok kita yang gagal memenuhi janji kemerdekaan; masyarakat adil dan makmur. Pemerintah, dengan segala hormat kepada Pak Jokowi dan pembantu-pembantunya, yang saya tidak ragukan niat baik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi gempuran Covid-19 ini, harus menerima kenyataan bahwa realitas sosial ekonomi dan politik merupakan akumulasi dari proses rekayasa sosial sejak awal tahun 1970-an. Hal ini merupakan kendala utama untuk memenangkan perang ini, jadi persoalan yang dihadapi bersifat struktural. Niat baik dan semangat yang tinggi tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang bersifat struktural ini.

Dalam observasi dan analisis saya, realitas struktural yang kita miliki, secara sosial, ekonomi maupun politik, dan bias kelas dari Covid-19 ini, kebijakan apa pun yang akan diambil—seperti PSBB bahkan *lockdown*—secara empiris hanya akan mampu mencegah secara terbatas mobilitas penduduk. Penduduk pada kelas atas mungkin bisa, tetapi untuk kelas menengah, terutama kelas bawah, akan mengalami kesulitan karena mereka harus keluar rumah untuk bekerja. Dari kelompok ini, sebagian adalah pekerja urban yang sebagian mungkin sudah pulang kampung dan sebagian masih harus bekerja, yang saya duga menunggu saat yang baik untuk mudik Lebaran.

Artinya, PSBB bahkan *lockdown*, akan gagal mencegah mobilitas penduduk, dan dengan demikian gagal mencegah penyebaran Covid-19. Pertanyaan besarnya, pemulihan sosial, ekonomi dan politik seperti apa yang akan terjadi pada level global, nasional, dan lokal? Spekulasi tentang bentuk dan struktur masyarakat dan negara bangsa seperti apa yang akan muncul pasca-Covid-19? Apakah pada tingkat global akan terjadi tatanan dunia baru? Begitu juga untuk Indonesia, pertanyaannya menurut saya adalah mungkinkah kita melakukan reorientasi struktur sosial, ekonomi,

dan politik yang sudah terakumulasi sejak awal tahun 1970-an, Orde Baru, dan diteruskan pasca-Orde Baru?

Terus terang saya agak kurang optimis akan terjadinya reorientasi secara drastis. Dugaan saya yang akan terjadi hanyalah reorganisasi kekuasaan (*reorganising power*) saja, seperti pada tahun 1998. Mungkin akan ada kesadaran baru tentang makna pembangunan seperti yang sudah banyak diimbau, yaitu pembangunan yang lebih proalam dan prolingkungan, tetapi struktur dasar sosial, ekonomi, dan politik, dugaan saya, tidak akan banyak berubah. Dugaan saya, reorientasi itu justru akan terjadi pada level lokal dan mikro, melalui inisiatif-inisiatif masyarakat sipil yang berkolaborasi dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan lokal yang progresif. Semoga.



Sumber: assontwocm (2021)

### 3. Covid-19 dan Politik Migrasi<sup>3</sup>

Gubernur DKI Anies Baswedan dengan yakin mengatakan telah mengeluarkan peraturan resmi berdasarkan hukum untuk mencegah mudik. Namun, berdasarkan hasil pantauan lapangan, terbukti peraturan itu sulit dieksekusi (Firmansyah, 2020). Tim peneliti dari FKM-UI juga pernah membuat pemodelan terkait angka kenaikan kasus Covid-19 dengan asumsi 20% penduduk Jabodetabek tetap mudik (Ariawan dkk., 2020). Pun arus balik diduga juga akan sulit dicegah. Dr. Pandu Riono (salah satu ahli epidemiologi yang terlibat dalam pemodelan dari FKM UI) pada sebuah acara di Metro TV tanggal 25 Mei 2020, memprediksi kasus Covid-19 akan meningkat kembali pasca-Lebaran, dan menyarankan PSBB DKI Jakarta diperpanjang selama 2 minggu lagi. Saya sendiri sudah menduga bahwa PSBB itu memang akan

<sup>3</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 26 Mei 2020.

gagal (lihat Bab 2). Bagaimanapun, seperti kita ketahui, Anies Baswedan berjanji akan mengakhiri PSBB pada tanggal 4 Juni 2020 jika angka kasus Covid-19 terbukti menurun.

Covid-19 telah memaksa kita untuk mengubah banyak hal, salah satunya dan mungkin yang paling mendasar adalah untuk menata atau mengatur mobilitas penduduk atau migrasi. Dapat dirasakan bersama ketika kita harus mengurangi, bahkan menghentikan kebiasaan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Penyebaran Covid-19 terjadi melalui pergerakan manusia dan virus itu berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain melalui pertemuan. Mobilitas penduduk antarnegara sebagai salah satu ciri globalisasi tiba-tiba harus dihentikan karena penyebaran Covid-19 antarnegara akan sulit dikendalikan. Tantangan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia memang menjadi jauh lebih berat karena bersamaan dengan tradisi mudik Lebaran yang terbukti sulit dicegah meskipun memang bisa dikurangi.

Politik migrasi (*the politics of migration*) menempatkan migrasi sebagai alat (*devices*) maupun sebagai arena politik. Migrasi sebagai alat dilakukan baik oleh aktor negara maupun nonnegara. Sebagai arena, migrasi menjadi tempat berlangsungnya kontestasi dari berbagai aktor dengan beragam kepentingan politiknya. Migrasi sebagai alat paling banyak dilakukan oleh negara, melalui kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur mobilitas penduduk. Kebijakan migrasi menjadi kebijakan yang sangat penting dalam masa pandemi Covid-19 maupun sesudahnya. Sebelum adanya pandemi, politik migrasi hampir tidak pernah menjadi isu. Mobilitas penduduk praktis tidak pernah diatur, penduduk bebas bergerak ke mana pun asal memiliki sarana untuk melakukan pergerakan itu.

Di Indonesia, ada masanya ketika pemerintah berusaha untuk memindahkan penduduk dalam jumlah besar dari pulau Jawa dan Bali melalui program transmigrasi ke pulau-pulau lain yang

dianggap masih kosong. Program itu saat ini sudah terhenti karena biayanya tinggi dan tidak efektif lagi. Kebijakan Presiden Jokowi justru mendahulukan pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara agar penduduk dapat melakukan mobilitas secara bebas mengikuti dinamika ekonomi pasar, sesuai dengan hukum *supply and demand* dari tenaga kerja maupun komoditas. Hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah *indirect politics of migration* melalui perluasan akses bagi warga negara untuk dengan leluasa melakukan mobilitas. Dengan memperluas akses, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan akan lebih merata ke seluruh pelosok tanah air.

Dalam studi migrasi, lazim dibedakan antara migrasi yang berlangsung di dalam sebuah negara dengan migrasi yang berlangsung antarnegara, yang pertama disebut migrasi internal dan yang kedua disebut migrasi internasional. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, kedua bentuk migrasi ini harus dihentikan guna keselamatan umat manusia. Hal inilah yang menarik, menghentikan mobilitas manusia, dalam skala global maupun nasional, mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia. Pertanyaannya, mungkinkah itu dilakukan? Mobilitas penduduk atau migrasi sudah ada bersamaan dengan adanya manusia, dia adalah salah satu ciri dari manusia itu sendiri. Menghentikan mobilitas penduduk merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat manusia karena cenderung akan mengalami kegagalan.

Tampaknya, pemerintah dari negara mana pun harus melihat secara realistis bahwa menghentikan mobilitas penduduk adalah sebuah kemustahilan, yang bisa dilakukan hanyalah mengatur lalu lintas manusia itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pada situasi normal, sudah seharusnya pemerintah memiliki politik migrasi agar mobilitas penduduk bisa diatur untuk mendukung tercapainya kehidupan bersama yang adil, merata, dan sejahtera. Namun, inilah yang tidak pernah dilakukan, kita tidak pernah

memiliki politik migrasi yang jelas. Meskipun di setiap gang di Jakarta selalu tertempel pengumuman “pendatang harus melaporkan dalam waktu 2 × 24 jam”, kenyataannya peraturan itu tidak pernah dijalankan.

Politik migrasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi mobilitas penduduk, melainkan untuk mengatur lalu lintas penduduk. Secara konkret, politik migrasi diwujudkan dalam bentuk registrasi atau pencatatan keluar masuk penduduk dalam suatu wilayah. DKI Jakarta sudah semestinya menjadi parameter dari politik migrasi bagi kota atau daerah lain di Indonesia. Bagi sebuah kota, migrasi merupakan satu komponen dari demografi, selain kematian (*mortality*) dan kelahiran (*fertility*) yang sangat penting untuk diketahui dinamikanya. Mengapa? Untuk Indonesia, migrasi ke perkotaan akan terus terjadi mengingat kesempatan kerja—di samping kesempatan melanjutkan pendidikan—masih terkonsentrasi di kota-kota.

Pemerintah kota harus memiliki politik migrasi jika ingin meningkatkan kegiatan ekonomi dan menyejahterakan warga kotanya. Untuk kota, seperti DKI Jakarta, politik migrasi bisa diterapkan pada tiga level, yaitu internasional, nasional, dan regional. Pada level internasional, politik migrasi diarahkan untuk mengatur lalu lintas manusia antarnegara; pada level nasional diarahkan untuk mengatur lalu lintas antarprovinsi; dan pada level regional diarahkan untuk mengatur lalu lintas manusia di DKI Jakarta dan dalam lingkup Jabodetabek. Dengan mengetahui jumlah, pola persebaran, tingkat kecepatan, dan kecenderungan migrasi pada ketiga level itu, pemerintah DKI Jakarta bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pergerakan manusia di DKI Jakarta. Sektor yang tak terpisahkan dengan mobilitas penduduk adalah sektor transportasi. Efektivitas dan efisiensi sektor transportasi sangat tergantung dari sejauh mana data mobilitas penduduk tersedia dengan keakuratan yang cukup bisa dipercaya.

Saat pandemi Covid-19 masih belum bisa dikendalikan ini, ada kebutuhan mendesak untuk mengendalikan mobilitas penduduk di tengah belum terbentuknya politik migrasi. Namun, untuk kepentingan jangka panjang, Covid-19 telah menyadarkan kita bahwa sebuah politik migrasi diperlukan agar kebijakan yang dipilih mencapai target sasarannya. Politik migrasi harus dibangun berdasarkan pemahaman bahwa pada dasarnya, tidak mungkin menghentikan arus mobilitas penduduk yang terjadi di ketiga level yang telah dikemukakan sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman buruk penanganan mobilitas dalam menghadapi Covid-19 sekarang ini, sudah saatnya mulai dipikirkan sebuah politik migrasi seperti apa yang sebaiknya dikembangkan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan kehidupan bersama yang adil dan sejahtera di masa yang akan datang, di masa *The New Normal*.





Sumber: Bambina (2020)

#### 4. PSBB, *Forced Migration*, dan Normal Baru<sup>4</sup>

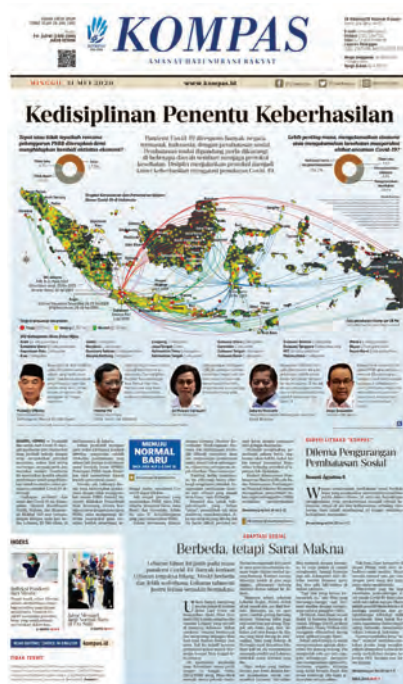
*Kompas*, Edisi Minggu, 31 Mei 2020, memperlihatkan peta Indonesia disertai pola penyebaran Covid-19 (Gambar 1). Terlihat dari peta itu bagaimana Covid-19 menyebar dari lokasi-lokasi yang menjadi titik awal penyebaran. Sebagai contoh, dari Bogor yang menjadi tempat Seminar “Masyarakat Tanpa Riba” pada 25–28 Februari 2020 dan Acara GPIB di Hotel Aston 28–29 Februari 2020, menyebabkan virus menyebar ke Samarinda, Timika, Merauke, Sumatra Selatan, dan Aceh. Contoh lain adalah dari Gowa, Sulawesi Selatan, yang menjadi tempat penyelenggaraan Ijtimak Ulama pada 19 Maret 2020, menyebabkan virus menyebar ke Sangihe, Sorong, Palangka Raya, dan Bangka.

<sup>4</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 4 Juni 2020.

Dari peta itu, terlihat pula hampir semua pulau telah tertular oleh Covid-19. Peta itu memberi pelajaran menarik tentang mobilitas penduduk antarpulau dan melalui mobilitas penduduk itulah Covid-19 disebarkan ke seantero Nusantara. Jika titik awal penyebaran virus berada di sekitar pertengahan Februari 2020, dan Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan Covid-19 telah menyebabkan dua korban meninggal pada 2 Maret 2020, memang masuk akal jika waktu dua minggu digunakan sebagai perkiraan masa inkubasi, dan estimasi koronavirus masuk ke Indonesia. Tidak begitu jelas siapa yang pertama kali membawa virus dari Wuhan itu ke Indonesia. Sampai 31 Mei 2020, kira-kira tiga bulan setelah pengumuman resmi, korban meninggal akibat Covid-19 tercatat sebanyak 1.613 orang.

Selain seruan untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker, pemerintah memberlakukan PSBB sebagai pilihan kebijakan, bukan karantina wilayah (*lockdown*). PSBB menekankan pada pembatasan sosial (*social distancing*) bagi penduduk untuk menjaga jarak fisik karena penularan virus memang terjadi akibat kedekatan fisik. Kebijakan PSBB maupun *lockdown* dilakukan pemerintah berbagai negara berdasarkan fakta bahwa penularan Covid-19 terjadi melalui pergerakan manusia, mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain.

PSBB, terlebih *lockdown* sebagai strategi mencegah penyebaran Covid-19 yang membatasi bahkan melarang orang untuk bepergian, adalah sebuah bentuk migrasi yang dalam



Gambar 1. Peta Penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

literatur disebut sebagai *forced migration*. *Forced migration*, bisa diterjemahkan sebagai migrasi terpaksa, pada intinya meng-*anjurkan* (PSBB) atau memaksa (*lockdown*) penduduk untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu. *Forced migration* berskala global mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia. *Forced migration* biasanya berhubungan dengan konflik sosial politik akibat perang atau konflik komunal berskala besar, penduduk terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya ke tempat lain yang aman untuk menyelamatkan diri dan keluarganya.

Sejarah umat manusia dan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa *forced migration* akibat konflik sosial-politik bukan hal yang baru. Konvensi Pengungsi PBB (UN Refugee Convention) yang dikeluarkan PBB tahun 1952 merupakan kesepakatan untuk melindungi para pengungsi yang hidup cerai-berai setelah Perang Dunia II. Konvensi ini memiliki bias politik karena memperlihatkan kepentingan negara-negara Barat untuk melindungi pengungsi-pengungsi yang lari dari negara-negara Blok Timur ke Blok Barat. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang pengungsi ini berkewajiban melindungi pengungsi yang lari karena adanya ancaman politik yang dialami di negara asalnya. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah lembaga PBB yang diberi otoritas untuk menangani persoalan pengungsi ini.

Fenomena ini cukup mencemaskan karena jumlah pengungsi sangat banyak pasca-Perang Irak dan terus bertambah ketika perang terjadi di Afghanistan, Sri Lanka, Suriah, dan Yaman Selatan. Selain pengungsi yang menyelamatkan diri dari perang, arus pengungsi juga terjadi akibat konflik komunal (etnis dan agama) yang banyak terjadi di Afrika dan Asia, contohnya pengungsi Rohingya yang lari dari Myanmar. Masalah yang dihadapi oleh lembaga, seperti UNHCR, akibat ketimpangan global yang makin meningkat menyebabkan makin sulitnya

membedakan pengungsi dengan mereka yang bermigrasi karena alasan ekonomi.

Korban konflik komunal yang tetap berada di dalam teritorial sebuah negara, misalnya, seperti yang kita saksikan di Indonesia setelah konflik komunal di Sambas, Sampit, Poso, dan Ambon tahun 1999–2000 disebut sebagai *Internally Displaced Persons* (IDPs). IDPs tidak dianggap sebagai *refugees* dan karena itu, tidak mendapat perlindungan dari UNHCR. *Forced migration* dalam literatur migrasi terus berkembang, misalnya, migrasi akibat adanya bencana alam (banjir, tsunami, gunung meletus) atau yang mulai juga terjadi akibat perubahan iklim (*climate change*), seperti penduduk yang terpaksa melakukan migrasi karena pemukimannya terendam akibat naiknya permukaan air laut. *Forced migration* juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat menyemburnya lumpur Lapindo yang menenggelamkan desa-desa di sekelilingnya. Migrasi terpaksa (*forced migration*) juga bisa terjadi akibat pembangunan, misalnya pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah yang memaksa penduduk pindah atau dipindahkan karena desanya akan terendam.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, yang memaksa pemerintah seluruh negara di dunia memberlakukan pembatasan atau penghentian mobilitas penduduk, adalah sebuah bentuk terbaru dari *forced migration*. Di tanah air, *forced migration* untuk mencegah penularan Covid-19 yang terjadi melalui pergerakan dan kerumunan manusia, menjadi fenomenal karena berlangsung bersamaan dengan tradisi mudik Lebaran. Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan mobilitas penduduk yang ingin mudik. Pemerintah juga akan mengalami kesulitan karena sebagian besar penduduk dari kelas ekonomi ke bawah tidak mungkin dipaksa untuk bekerja dari rumah (WFH) seperti yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di sektor jasa kelas menengah. PSBB sebagai sebuah migrasi terpaksa (*forced*

migration) memiliki implikasi tak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial dan politik.

Saat ini, pemerintah dihadapkan pada dilema antara tuntutan kalangan bisnis dan masyarakat yang terancam mengalami kerugian besar bahkan bangkrut akibat terhentinya arus pergerakan manusia dan barang, dan keharusan untuk mengendalikan penularan Covid-19 di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur dan NTB. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan kawasan sekitarnya sebagai sebuah aglomerasi (Jabodetabek) memiliki posisi yang krusial karena menjadi episentrum pemerintahan dan perekonomian nasional. Kegagalan atau keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 mau tidak mau sangat bergantung pada keberhasilan atau kegagalan yang terjadi di DKI Jakarta.

Kita juga akan melihat hasil evaluasi dari pemerintah DKI Jakarta yang menentukan apakah PSBB sebagai bentuk *forced migration* masih akan diberlakukan atau disudahi. Keputusan apa pun yang akan dibuat tampaknya tidak akan banyak arti untuk kelompok masyarakat yang selama ini memang tidak terlalu peduli dengan PSBB. Kelompok ini sebagian besar tinggal di kampung-kampung padat penduduk dan *social distancing* menjadi sesuatu yang tidak relevan bagi kehidupan mereka sehari-hari. PSBB sebagai sebuah bentuk *forced migration* mungkin hanya relevan untuk kelas menengah dan atas. Kelas bawah, *who cares?*

Pada Rabu malam, 3 Juni 2020, saya menonton sebuah acara di Metro TV yang dipandu oleh Wahyu (Metro TV, 2020). Di situ, saya lihat Wahyu melakukan wawancara *The New Normal* dengan Budiman Sudjatmiko, mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang sekarang menjadi petinggi PDIP dan anggota DPR-RI. Menariknya, wawancara itu dilakukan saat keduanya memotong rambut di salah satu *barbershop* berkelas. Terlihat Budiman dengan gayanya yang cerdas, seperti biasanya, menjelaskan makna normal baru bagi peradaban manusia.

Setelah wawancara itu, Wahyu digambarkan tengah membeli sayur dan mobil secara *online*, kemudian wawancara dilanjutkan dengan Rhenald Kasali, Pakar Manajemen dari UI. Rhenald Kasali menjelaskan bahwa biasanya, hanya 2% yang sadar akan adanya sebuah perubahan, atau jika dipaksa pun, sebesar 25–30% yang ingin perubahan. Tentulah yang dimaksud oleh profesor ini adalah kelas menengah dan atas. Kemudian, dengan mobil barunya, Wahyu mengakhiri acara itu dengan memesan sebuah steak *medium rare* di restoran *drive-thru*. Acara diakhiri oleh Wahyu dengan memakan *steak* pesannya di dalam mobil. *What a nice new normal life!*





Sumber: Eme Freethinker (2020)

## 5. Pandemi, George Floyd, dan Marginalisasi Papua<sup>5</sup>

Pandemi koronavirus yang menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok Bumi menjadi batu uji ketahanan semua negara tanpa kecuali. Pandemi ini membuka kotak pandora setiap bangsa ketika menyusup dalam sekat-sekat dan lapisan-lapisan sosial, membuka luka-luka lama yang dipendam, dan ketimpangan sosial-ekonomi antargolongan yang selama ini hendak disembunyikan. Energi negara yang terkuras untuk mengendalikan pandemi ini bertambah berat ketika ketimpangan struktural berubah menjadi perlawanan terhadap ketidakadilan yang menjadi tanggung jawab negara. Gelombang protes yang berawal dari kematian George Floyd, pemuda kulit hitam di tangan polisi di Minnesota, dan telah mengimbas gerakan antirasisme di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, adalah pantulan dari terbukanya kotak Pandora itu.

<sup>5</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 20 Juni 2020.

Pada Oktober 2016, saya berkunjung ke Cornell University untuk menghadiri seminar mengenang Ben Anderson yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa Indonesia di negeri Paman Sam itu. Setelah selesai seminar, saya pergi ke New York City dan Washington DC yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Ithaca, tempat Universitas Cornell berada. Saya memang telah berniat, dalam kunjungan yang relatif singkat itu, ingin melihat dua tempat, yaitu Ground Zero di New York dan The National Mall di Washington DC. The Mall adalah kompleks galeri dan museum yang berderet di kiri dan kanan sebuah *boulevard* lebar untuk pejalan kaki, tidak jauh dari Gedung Putih. Setelah berkeliling, tanpa sengaja saya melihat sebuah bangunan yang unik, seperti terbuat dari kayu karena warnanya yang cokelat; dan dalam kunjungan sebelumnya tidak saya lihat. Saya menyaksikan orang-orang berjalan ke gedung itu, sebagian besar berkulit hitam, dugaan saya Afro-American. Saya baru tahu kemudian setelah masuk ke lobinya yang luas bahwa bangunan dengan arsitektur unik itu adalah Museum of Afro-American History of Art and Culture dari Smithsonian Institute yang baru diresmikan oleh Presiden Barack Obama.

Di museum yang megah itu, periode sejarah dari masyarakat Afro-American sejak pertama kali mereka dibawa ke Benua Amerika sebagai budak, sampai periode paling mutakhir, yaitu ketika seorang Afro-American berhasil menjadi presiden Amerika Serikat ditampilkan dengan sangat menarik. Informasi tentang sejarah orang-orang Afrika yang dibawa dengan kapal-kapal sebagai budak belian untuk dipekerjakan di perkebunan itu digambarkan melalui berbagai media dengan sangat detail, atraktif, gamblang, dan tidak membosankan. Dalam sejarah itu, digambarkan dari mana orang-orang Afrika itu berasal, bagaimana mereka ditangkap dan diperdagangkan dengan nilai berapa, diberangkatkan dari pelabuhan mana, berapa orang, oleh perusahaan apa, dengan kapal apa, bagaimana suasana di





Sumber: Supriatma (2020)

**Gambar 2.** Ilustrasi Rasisme terhadap Orang Papua

kapal, berapa orang yang meninggal, tiba di pelabuhan apa dan kemudian dipekerjakan di mana, serta bagaimana mereka hidup di tempat yang baru. Perang Sipil yang kemudian terjadi di Amerika Serikat bersumber dari persoalan budak ini, yaitu antara ....mereka yang ingin melanjutkan perbudakan dan mereka yang ingin menghapus perbudakan ini. Perbudakan memiliki arti yang sangat penting bagi sejarah dan psikologi bangsa Amerika.

Bagi saya, yang paling menarik dari isi museum Afro-American ini adalah keterbukaan informasi disertai fakta-fakta yang digambarkan dengan sangat hidup tentang sejarah kelim yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam narasi sejarah pembentukan bangsa Amerika. Penderitaan, korban, perlakuan tidak manusiawi, perlawanan, perjuangan menegakkan keadilan, dan persamaan hak bagi orang Afro-American ini ditampilkan dengan lugas. Seandainya saya seorang kulit putih, mungkin akan merasa malu atau bisa juga marah karena di situ saya digambarkan sebagai penindas yang tidak memiliki rasa kemanusiaan dan memperlakukan para budak itu tidak ada bedanya dengan

hewan. Di museum itu digambarkan ironi dan hipokrisi dari para *founding fathers* bangsa Amerika yang membuat deklarasi bahwa *all human being is created equal*, tetapi pada saat yang bersamaan, orang-orang berkulit hitam itu masih menjadi warga negara kelas dua. Perjuangan persamaan hak yang dipimpin Marthin Luther King tahun 1968 yang mengakibatkan dia dibunuh memang telah banyak mengubah keadaan. Namun, kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu di tangan polisi yang memicu gelombang protes terbesar setelah 1968, menunjukkan bahwa diskriminasi rasial belum berakhir.

Hari ini, membaca dan melihat gelombang protes yang meluas dan masih terus terjadi di tengah pandemi yang belum terkendali, ingatan saya melayang ke ruang-ruang museum Afro-American di The Mall Washington DC itu. Saya tak habis pikir, kenapa masih ada diskrepansi yang besar dalam psikologi bangsa Amerika ini, antara pengakuan atas ketidakadilan yang terjadi pada masa lalu dan praktik diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam wawancara yang dilakukan CNBC (2020) dengan Paul Krugman, ekonom dari Princeton University, peraih Nobel tahun 2008, saya menemukan penjelasannya. Wawancara itu berkisar pada buku yang belum lama terbit, *Capital in the Twenty First Century*, yang ditulis oleh Thomas Piketty, seorang ekonom yang lebih senang menyebut dirinya sebagai ahli ilmu sosial, asal Prancis. Buku Piketty, menurut Krugman, telah berhasil menunjukkan dengan data statistik yang tak terbantahkan tentang ketimpangan sosial-ekonomi di Amerika Serikat yang menganga, antara segelintir orang kaya dan mayoritas warga negara yang miskin, dan dari proporsi yang miskin itu, sebagian besar adalah orang Afro-American.

Temuan penting dari Piketty, menurut Krugman adalah fakta sejarah panjang bagaimana kapitalisme telah bekerja dalam proses marginalisasi orang Afro-American. Marginalisasi itu

bersifat masif dan struktural, melekat (*embedded*), tidak saja dalam lembaga-lembaga ekonomi, tetapi juga pada institusi hukum, sosial, dan politik. Mendengarkan penjelasan Krugman, saya dapat memahami mengapa gelombang protes yang saat ini terjadi tidak dapat dipisahkan dari proses panjang marginalisasi yang dialami oleh komunitas Afro-American itu. Apa yang saya lihat di museum, yang menggambarkan telah diakuinya ketidakadilan dalam sejarah bangsa Amerika Serikat, terbukti tidak cukup untuk menghilangkan rasisme tanpa disertai perubahan yang bersifat struktural agar diskriminasi yang melekat dalam berbagai institusi sosial, hukum, dan politik yang sehari-hari dijalankan dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat itu terhapus. Gelombang protes anti rasisme itu sekarang berimbas ke Indonesia, lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik sebagai sebuah bangsa dari pengalaman sejarah bangsa Amerika Serikat?

Apa yang saya saksikan di Museum of Afro-American History of Art and Culture, menggambarkan telah diakuinya ketidakadilan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para budak belian yang diangkut dengan kapal-kapal dari benua Afrika itu, juga secara hukum para keturunan budak-budak itu sekarang sudah tidak lagi dibedakan hak-haknya sebagai warga negara, tetapi mengapa diskriminasi rasial itu tetap terjadi? Kita tentu bisa mencari penjelasan yang bersifat kultural tentang diskriminasi ras itu, tetapi yang tampaknya sulit dibantah adalah penjelasan struktural, seperti dikemukakan oleh Paul Krugman berdasarkan penelitian *longitudinal* Thomas Piketty tentang ketimpangan antar golongan yang makin menganga lebar.

Berkaca dari pengalaman Amerika, barangkali tidak terlalu sulit sebetulnya untuk menjelaskan mengapa begitu cepat reaksi antirasisme juga terjadi di Indonesia. Selama lima puluh tahun rekayasa sosial di Indonesia, salah satu hasil yang mungkin paling mencolok adalah kesenjangan sosial-ekonomi, dan di Papua, kesenjangan itu telah berimpit dengan pelapisan

dan identitas sosial (50 Tahun Rekayasa Sosial: 5 Bias dan 5 Mitos). Dalam sebuah tulisan di *The Jakarta Post* tahun 2012 *Papua and Problem of Structural Injustice* (Tirtosudarmo, 2012) saya telah menyinggung persoalan ini. Kita tidak akan pernah menemukan solusi bagi masalah Papua, termasuk isu rasisme ini jika kita sebagai bangsa tidak mampu memahami proses-proses marginalisasi dan ketimpangan sosial yang bersifat struktural yang terus berlangsung itu. Pandemi telah membuka kotak Pandora!



Sumber: Dylag (2018)

## 6. Naik Kelas, Kelas Menengah, dan Pandemi: Oxymoron Negara Bangsa<sup>6</sup>

Di tengah masih tinggi dan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk yang terjangkit Covid-19 serta krisis ekonomi yang membayangnya, menyeruak berita bahwa “Per 1 Juli 2020, Bank Dunia mengelompokkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah tinggi (*upper middle income*), “naik kelas” dari negara berpendapatan menengah rendah (*lower middle income*). Klasifikasi ini dihitung berdasarkan pendapatan nasional bruto atau PNB (*gross national income/GNI*) per kapita tahun 2019, yaitu 4.050 USD” (Fauzia, 2020). Dalam berita tersebut, juga ditampilkan figur yang menggambarkan proporsi kelas

<sup>6</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 6 Juli 2020.

menengah yang diprediksi meningkat dan grafik angka koefisien Gini yang memperlihatkan penurunan ketimpangan pendapatan antara 2015–2019.

Yang menimbulkan tanda tanya adalah kenapa berita itu baru dirilis Bank Dunia, ketika ekonomi sedang morat-marit seperti sekarang? Apakah gambaran yang tampak menggembirakan itu tidak berubah drastis setelah pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menjebol perekonomian nasional kita? Juga pertanyaan tentang sejauh mana estimasi yang digambarkan mengenai proporsi kelas menengah dan penurunan ketimpangan ekonomi itu mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya ada di masyarakat?

Membicarakan apa yang disebut kelas menengah, apalagi di tengah pandemi yang belum bisa dikendalikan oleh pemerintah, seperti membicarakan sebuah balon yang diterbangkan di udara, mudah terbawa angin dan setiap saat bisa kempis dan terkulai. Menggunakan GNP per kapita sebagai ukuran sudah sejak lama kita tahu itu ukuran yang ilusif karena tingginya tingkat ketimpangan pendapatan antara 1% penduduk yang sangat kaya dengan 99% yang sebagian besar sangat miskin. Apa yang digambarkan oleh *Kompas* tidak cukup meyakinkan untuk dipercaya sebagai keadaan yang sesungguhnya ada di masyarakat. Ketika pemerintah sendiri mengakui pertumbuhan ekonomi terus bergerak di bawah 0%, sedangkan anggaran yang ada terkuras untuk menghadapi Covid-19, kita tahu krisis telah menimbulkan pendarahan yang serius dalam tubuh pemerintah sendiri. Tersebarnya, atau sengaja disebarkannya, rekaman video Presiden Jokowi marah dalam rapat kabinet karena menteri-menterinya tidak sigap dalam menghadapi krisis akibat pandemi, menunjukkan adanya kepanikan, bahkan pada Presiden Jokowi sendiri.

Pandemi Covid-19 adalah sebuah tes kepemimpinan; apakah para menteri, para kepala daerah juga presiden sendiri mampu mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh pandemi ini

(lihat Bab 13). Secara umum, kita bisa melihat bahwa meskipun antara daerah yang satu dan daerah yang lain ada variasi dalam tingkat keberhasilan, tetapi bisa dikatakan bahwa pemerintah masih belum sepenuhnya berhasil mengendalikan keadaan, bahkan untuk beberapa daerah seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Bali, angkanya justru meningkat.<sup>7</sup> Melihat gelagatnya, pemimpin Indonesia masih harus menerima kenyataan pahit, belum mampu mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

Mengatakan Indonesia telah naik kelas dan proporsi kelas menengahnya meningkat ketika lonjakan kasus Covid-19 belum terkendalikan, bukankah termasuk *oxymoron*? *Oxymoron* adalah sebuah istilah yang sering dipakai dalam ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan sebuah keadaan yang di dalamnya mengandung kontradiksi, pertentangan, dan tidak jarang hal-hal yang bertentangan itu saling meniadakan. Kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam tubuh ekonomi negara-bangsa ini sangat berbahaya karena di satu sisi, seakan-akan ingin menunjukkan sebuah kedigdayaan, tetapi di sisi lain, tidak bisa ditutupi melekatnya sebuah kerapuhan dan potensi kegagalan mengempang menyebarkan virus mematikan yang belum ditemukan vaksin pembunuhnya ini. Melihat potensi kedigdayaan sebuah bangsa terbesar keempat dari jumlah penduduknya hanya dari GNP per kapita, sangat disesalkan karena hal tersebut menyembunyikan realitas sosial yang harus dipahami sepenuhnya untuk menyusun strategi penanggulangan sebuah bencana. Kontur Indonesia yang berbentuk kepulauan menuntut pemahaman tentang geografi-ekonomi yang sangat vital jika kebijakan yang berbasis wilayah ingin berhasil. Komposisi penduduk selain berdasarkan strata sosial-ekonomi juga beragam karena karakteristik sosial-budayanya.

---

<sup>7</sup> Situasi ketika tulisan ini terbit pertama kali pada 6 Juli 2020 (lihat juga Halim, 2020).



Sebagai contoh, *Kompas*, Sabtu, 4 Juli 2020, hlm. 11 memberitakan “Ratusan Pasien Covid-19 di Jayapura Tidak Dikarantina” (Agriesta, 2020). Kondisi fasilitas kesehatan di luar Jawa hampir bisa dipastikan sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan yang ada di Jawa, terutama Jakarta, Bandung, Semarang atau Surabaya. Kita tahu bahwa penyebaran virus ini melalui pergerakan manusia dan berdasarkan data yang ada, virus ini akan dengan mudah menyebar ke seluruh pulau di negeri ini dalam waktu yang relatif cepat. Papua adalah contoh yang baik untuk menggambarkan betapa rentannya sebuah masyarakat jika GNP per kapita dijadikan ukuran kemakmuran. Bukan rahasia lagi bahwa Papua dengan kekayaan alam yang dimiliki telah menyumbang dalam jumlah yang besar terhadap GNP Indonesia. Namun, kita juga tahu, dari tahun ke tahun Papua selalu menduduki ranking terbawah dalam indeks pembangunan manusianya. Indeks pembangunan manusia (*human development index*) masih dianggap ukuran terbaik untuk menilai kondisi sebuah masyarakat karena didasarkan pada tiga indikator, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Dalam pandemi ini, karena sifat kebencanaannya, yang disebabkan oleh virus, tidak ada cara lain untuk memahaminya selain melalui metode ilmiah. Penekanan menjadi sangat berlebihan pada aspek-aspek yang dianggap bersifat ilmiah dari kebijakan. Kebijakan yang bertumpu pada pertimbangan ilmiah biasa disebut dalam literatur sebagai teknokrasi. Seorang gubernur begitu yakin bahwa kebijakan yang telah atau akan diambilnya benar dan tepat karena sudah mengikuti nasihat tim konsultan kesehatan yang dipakainya. Meskipun apa yang dilakukan sang gubernur itu seolah-olah sudah tepat secara politis, tetapi bisa mengecoh publik karena tim kesehatan bisa menjadi kambing hitam jika terbukti kebijakan yang telah diputuskannya itu ternyata gagal.



Hal yang sering dilupakan kebanyakan orang adalah bahwa metode ilmiah selalu dalam posisi *trial and error*, tidak ada kepastian mutlak dalam ilmu pengetahuan (*science*). Vaksin yang saat ini sedang diuji coba untuk mendapatkan mana yang paling tepat adalah contoh paling baik untuk menunjukkan bagaimana *trial and error* itu sedang dilakukan. Jika vaksin ditemukan, tetap harus dipahami bahwa vaksin tetap bukan segala-galanya karena banyak faktor lain yang bisa memengaruhi proses kematian. Seorang gubernur, sebagai seseorang yang memiliki tingkat pendidikan di atas rata-rata, pastilah paham akan sifat kesementaraan sebuah temuan ilmiah. Sebuah kebijakan politik yang seolah-olah meyakini bahwa keputusan yang diambilnya tepat karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah bisa dipandang secara skeptis sebagai taktik untuk mengalihkan tanggung jawab jika kebijakannya nanti terbukti gagal.

Teknokrasi sebagai metode bagi sebuah kekuasaan untuk menjalankan otoritasnya, selain menggunakan ilmu pengetahuan, juga bersandar pada hukum sebagai alat untuk melegitimasi sebuah rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum pun sebenarnya bagian dari ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum. Undang-undang dan segala bentuk peraturan dibuat agar seorang pejabat publik merasa tenang karena kebijakan yang disusunnya telah memiliki landasan formal-yuridis yang tidak akan mudah digugat apabila kebijakan yang dijelankannya tidak berhasil mencapai tujuan, atau dalam konteks saat ini, gagal mengendalikan pandemi yang ternyata meningkat kasusnya di wilayah administrasi yang menjadi yurisdiksinya. Ketika virus—yang menjadi penyebab terjadinya wabah—bergerak tanpa peduli batas-batas yurisdiksi administratif, seorang penguasa daerah akan selalu dibuat kelabakan karena mengempang mobilitas penduduk adalah pekerjaan yang hampir mustahil bisa dilakukannya. Di sinilah, seruan Presiden Jokowi untuk menghilangkan ego-ego para pejabat publik agar bisa bekerja sama menjadi sesuatu yang

mutlak harus dilakukan. Namun, kita tahu di sana adalah letak kesulitannya.

*Oxymoron* sebagai kontradiksi yang bersifat internal tidak saja perlu dipahami karena potensi risiko yang dikandungnya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran akan ironi dan paradoks yang selalu menyertainya. Hal ini adalah ironi terbesar sebuah negara-bangsa yang dilahirkan dengan semangat nasionalisme, niat bersama untuk merdeka dan berdaulat jika kemudian disadari atau tidak disadari menjalankan praktik kolonialisme, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di negerinya sendiri. Adalah sebuah paradoks yang memilukan hati ketika sebuah negara-bangsa—atas nama prinsip negara kesatuan—memberangus kritik dan perbedaan pendapat yang ingin menyuarakan ketertindasan, marginalisasi, ketidakadilan sosial, dan ketimpangan ekonomi, seperti yang dialami Papua saat ini.



Sumber: Septiawan (2020)

## 7. Pandemi, *Centering the Margin*, dan *Re-Learning*<sup>8</sup>

Pada Rabu, 8 Juli 2020, di rumah, saya mendapatkan dua informasi menarik dan penting di tengah pandemi yang belum terkendali penyebarannya. Pertama, pada pagi hari, di halaman depan harian *kompas*, disajikan infografik lonjakan kasus Covid-19 di kota-kota sepanjang Pantura (Pantai Utara Jawa). Kedua, pada malam harinya, saya berkesempatan mendengarkan kisah Singgih Susilo Kartono tentang bagaimana “memuliakan desa” melalui YouTube yang disiarkan langsung oleh Salihara dan dipandu dengan baik oleh Zen Hae (Salihara Arts Center, 2020).

Dua informasi yang masuk ke kepala saya dalam waktu kurang dari 24 jam itu merangsang *insight* mengenai proses transformasi sosial, *centering the margin* dan *re-learning*. Berita

<sup>8</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 10 Juli 2020.

yang dilansir *Kompas* itu menunjukkan dengan jelas penyebaran dan peningkatan Covid-19 di kota-kota yang dihubungkan oleh jalan raya Daendels dan jalan tol Trans-Jawa. Angka dan lonjakan tertinggi terlihat di DKI Jakarta dan Surabaya sebagai pusat aglomerasi terbesar di Indonesia. Apa yang sedang terjadi membuktikan kebenaran bahwa penyebaran virus terjadi melalui mobilitas manusia. Pantura, yang oleh ahli planologi dari ITB, Tomy Firman, disebut sebagai *urban corridor* terpanjang di Asia Tenggara, merupakan jalur transportasi darat tersibuk di Jawa. Henk Schulte Nordholt, sejarawan dan antropolog Belanda, mungkin setengah bergurau, menceritakan para ilmuwan NASA terheran-heran karena melalui satelitnya melihat ada sebuah garis di permukaan planet Bumi yang selalu memancarkan sinar tanpa henti. Setelah diteliti, ternyata itu adalah Jalur Pantura.

Singgih Susilo Kartono, biasa dipanggil Singgih Kartono, pada Rabu malam menceritakan bagaimana di tengah pandemi Covid-19, dia melihat peluang untuk mengubah keadaan. Rupanya, keputusannya untuk kembali ke Kandangan, desanya di Temanggung, Jawa Tengah, telah membawa namanya dikenal tidak saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Melalui berbagai inisiatif di masa pandemi, ia membuat desain radio dari kayu yang diberi label Magno, membuat sepeda bambu yang diberi nama Spedagi, serta mengembangkan Pasar Papringan.

Hal menarik dari pengalaman hidupnya di desa adalah hasil perenungannya tentang pandemi yang justru menunjukkan kekeliruan dalam memandang hubungan antara desa dan kota yang diistilahkan sebagai *cyral* (*city-rural*). Menurut pengamatannya, sumber masalahnya adalah karena selama ini perkembangan desa selalu diabaikan. Akibatnya, banyak orang mengalir ke kota dan menganggap kota sebagai sumber segala hal yang berkaitan dengan kemajuan. Kunci perbaikan, menurutnya, adalah jika kita mengubah cara pandang, dengan melihat sumber masalah yang ada di desa. Artinya jika desa diperbaiki, kota juga

akan menjadi baik. Sebuah cara pandang yang betul-betul baru, *out of the box, think the unthinkable, centering the margin*.

Pandemi saat ini adalah peluang untuk melakukan refleksi tentang transformasi sosial yang dalam analisis Singgih Kartono berpusat pada ketidakseimbangan hubungan antara desa dan kota. Pandemi yang mewabah, terutama di kota, sebagaimana diperlihatkan angka-angkanya di kota-kota Pantura oleh *Kompas*, membuka kenyataan bahwa ada yang keliru dalam pembangunan kita. Kota-kota yang selama ini dianggap sebagai simbol kemajuan dan kemodernan, sebaliknya menunjukkan kerentanan dalam menghadapi serangan pandemi. Jelas ada yang salah dalam proses transformasi sosial yang selama ini kita jalani. Kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintahan, dan konsentrasi kelas menengah negeri ini, menjadi pusat penyebaran virus. Oleh karena itu, inilah saat yang tepat untuk mengubah cara pandang kita mengenai kemajuan.

Menurut Singgih Kartono, negara-negara maju saat ini sedang mencari tujuan baru, sementara kita masih ingin meniru mereka. Singgih Kartono, dari pengalaman bacaan maupun koneksinya dengan koleganya di dunia internasional, menyusun semacam paradigma baru yang menekankan kolaborasi dan tidak mendikotomikan antara desa dan kota.

Membaca berita *Kompas* yang memperlihatkan Jalur Pantura sebagai pusat penyebaran virus dan mencerna perenungan Singgih Kartono tentang desa sebagai pusat gravitasi baru dalam transformasi sosial yang akan datang, memberikan *insight* baru, menurut hemat saya, paling tidak tentang dua hal, *centering the margin* dan *re-learning*. Beberapa tahun terakhir ini, saya dan beberapa teman dari LIPI serta luar LIPI memperhatikan apa yang dalam literatur disebut sebagai *marginal communities*, yang kemudian mendorong saya untuk memperkenalkan konsep masyarakat pinggiran. Masyarakat pinggiran dalam konsep kami adalah warga negara yang melalui proses sosial-politik berada

dalam kondisi terpinggirkan, misalnya komunitas adat, agama minoritas, perempuan, buruh, petani, nelayan, difabel, LGBT, dan juga masyarakat desa.

Hal menarik dalam konteks pandemi yang telah membobol daya tahan tubuh terhadap penyakit; komunitas adat atau masyarakat desa, sebagai masyarakat pinggiran sesungguhnya telah memiliki mekanisme untuk menghadapi pandemi. Urang Kanekes, Sedulur Sikep, dan Orang Rimba yang pernah kami teliti selama dua tahun (2015–2016) memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi tradisi, yaitu selalu siap jika terjadi ancaman kelaparan, penyakit, atau bencana alam datang. Tradisi itu diturunkan dari generasi ke generasi dan sampai sekarang masih bisa dipelajari.

Berdasarkan hasil pengamatan, dari tiga komunitas adat yang kami teliti, orang Baduy lah yang paling mampu mempertahankan tradisi resiliensi untuk beradaptasi dan resistensi terhadap perubahan. Sedulur Sikep berbeda dengan orang Baduy yang memiliki teritorial tetap, kemampuan adaptasi dan resistensi yang dimilikinya bervariasi, tergantung lokasi. Komunitas Sedulur Sikep di Pati dan Rembang, misalnya, saat ini sedang mempertahankan lingkungan pertanian mereka dari kerusakan yang disebabkan oleh pabrik semen (Tirtosudarmo, 2019a). Orang Rimba saat ini menghadapi ancaman yang sangat serius karena hutan yang merupakan *life space* mereka makin menyempit akibat *logging*, ekspansi perkebunan sawit, dan program transmigrasi. Tradisi resiliensi terhadap pandemi dari Orang Rimba makin hilang karena tradisi mereka makin sulit untuk diteruskan bersamaan dengan hilangnya hutan yang menjadi lingkungan hidup mereka (Tirtosudarmo, 2019b).

Sebagai contoh, dalam tradisi Orang Rimba, orang yang sakit akan “dikarantina”. Saat kami berada di tengah Orang Rimba, salah seorang tetua adat yang ingin kami wawancarai sedang sakit meskipun dia masih bisa beraktivitas. Sebagai informan kunci, dia

bersedia untuk diwawancarai, dan wawancara tetap dilakukan. Hal menarik dari wawancara yang dilakukan di bawah rimbun pohon itu, kami melakukan *social distancing*, ada jarak yang cukup jauh antara tempat berjongkok tetua adat, rekan dari Orang Rimba yang menjadi penerjemah, dan kami. Menjadi adat mereka juga ketika ada warga yang meninggal, mayatnya dibuatkan keranda dari bambu dengan tiang cukup tinggi dan ditempatkan di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman mereka. Anggota keluarga yang ditinggalkan, kemudian melakukan perjalanan keluar desa (*melangun*) untuk beberapa waktu, seperti ingin menjauhkan diri untuk tidak menjadi sumber penularan.

Belajar dari pengalaman Singgih Kartono dalam “memuliakan desa” serta pengalaman kami meneliti komunitas menjadikan masyarakat pinggiran sebagai Pustaka untuk mencari alternatif di saat pandemi dan sesudahnya nanti, merupakan sesuatu yang perlu dilakukan. Dalam diskursus tentang transformasi sosial, kita harus mulai menempatkan masyarakat pinggiran sebagai “pusat” atau *centering the margin*. Paradigma dan cara pandang kita tentang kemajuan dan “modernitas” juga harus mulai diubah. Belajar kembali dari orang Baduy, Sedulur Sikep, dan Orang Rimba tentang kebiasaan-kebiasaan mereka yang telah menjadi tradisi resiliensi, kemampuan adaptasi, dan resistansi terhadap perubahan, tampaknya harus mulai kita lakukan. *Re-learning*, belajar kembali dari masyarakat-masyarakat pinggiran yang selama ini kita sisihkan sudah waktunya diperhatikan. Apa yang menjadi tujuan baru dari negara-negara maju, jangan-jangan merupakan prinsip yang sudah dilakukan oleh orang Baduy, Sedulur Sikep, Orang Rimba, dan orang-orang di desa.





Sumber: Tribun News (2020)

## 8. Mengamati Pengendalian Pandemi di Ibu Kota<sup>9</sup>

Pada 9 September 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, membuat konferensi pers bahwa PSBB akan diberlakukan lagi di wilayah DKI Jakarta. Keputusan itu diambil karena data korban Covid-19 di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang drastis, dan menunjukkan angka tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Peningkatan penderita Covid-19 itu diramalkan akan membuat rumah sakit di DKI Jakarta tidak mampu lagi menampung pasien Covid-19. Gubernur Anis Baswedan dengan keputusan ini menepati janji yang pernah diucapkannya saat mengumumkan masa PSBB Transisi pada 5 Juni 2020 bahwa dia terpaksa akan menginjak rem darurat jika warga DKI tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

<sup>9</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 14 September 2020.



Apa yang dikhawatirkan rupanya terjadi. Angka penularan Covid-19 pada awal September menunjukkan peningkatan yang tajam. Pada 13 September 2020, Gubernur Anis Baswedan mengadakan konferensi pers lagi dan menyampaikan keputusannya bahwa PSBB untuk wilayah DKI Jakarta, mulai 14 September 2020, akan diperketat. Dalam konferensi pers itu, hadir pula Kapolda, Pangdam, dan Wakil Kepala Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 Nasional, Profesor Dr. Wiku Adisasmito. Kehadiran para pejabat itu tampaknya untuk menepis rumor yang sejak awal telah berkembang akan adanya ketidakharmonisan antara Pemda DKI dan pemerintah pusat dalam mengendalikan wabah Covid-19.

Sejak awal Maret 2020, saya lebih banyak tinggal di rumah, di sebuah kelurahan di Jakarta Timur. Di dekat rumah kami ada sebuah pasar tradisional, yang hampir setiap Minggu kami kunjungi untuk membeli buah dan kebutuhan dapur. Pada 24 Juni 2020, sebelas pedagang di pasar itu positif tertular Covid-19 dan sejak itu, pasar ditutup selama tiga hari untuk disemprot disinfektan. Jika dihitung, warga tersebut terdeteksi positif Covid-19 persis dua minggu setelah Gubernur DKI Anies Baswedan memberlakukan PSBB Transisi pada Jumat, 5 Juni 2020. Dari pengamatan kasual saya, sejak sebelum adanya Covid-19 hingga hari ini, pasar itu tidak pernah sepi dan menjadi tempat kerumunan orang sehari-hari, baik ada atau tidak kebijakan terkait pandemi Covid-19 dari Pemda DKI, seperti PSBB atau pasca-PSBB yang disebut Anies Baswedan sebagai masa transisi itu.

Pada Bab 4, saya telah menuliskan tentang dugaan bahwa PSBB akan gagal mencegah pergerakan manusia karena mobilitas penduduk adalah sesuatu yang manusiawi, apalagi bagi mereka yang memang harus keluar rumah untuk bekerja mencari sesuap nasi. Saya juga menilai bahwa disiplin masyarakat secara sukarela untuk mematuhi peraturan, sesungguhnya juga rendah.

Selain itu, kemampuan aparat pemerintah untuk melakukan *law enforcement* juga rendah.

Pada tulisan itu, saya mengutip ucapan Dr. Pandu Riono, rekan saya dari FKM-UI, dalam wawancara di Metro TV Malam, 4 Juni 2020 yang menyarankan agar PSBB di DKI Jakarta sebaiknya diteruskan karena menurut prediksinya, angka Covid-19 akan terus meningkat (MetroTV, 2020). Namun, yang janggal bagi saya, Dr. Pandu Riono dan timnya dari FKM-UI ternyata menjadi rujukan Gubernur DKI Jakarta dalam mengambil keputusan untuk melonggarkan PSBB menjadi kebijakan transisi mulai 5 Juni 2020. Menurut Anies, keputusan untuk memulai kebijakan transisi pada 5 Juni 2020 didasari oleh kajian yang saintifik oleh Dr. Pandu Riono dan timnya dari FKM-UI. Mengapa ada diskrepansi antara saran untuk meneruskan PSBB saat bicara di Metro TV dan keputusan melonggarkan PSBB oleh Gubernur DKI? Apa yang telah terjadi di balik layar?

Dalam menjelaskan alasan untuk mulai melonggarkan PSBB yang disebutnya sebagai masa transisi mulai Jumat 5 Juni 2020, Anies Baswedan berkali-kali menekankan bahwa keputusan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan saintifik. Melalui grafik-grafik yang memperlihatkan penurunan jumlah warga yang terkena Covid-19, selama beberapa hari menjelang 5 Juni 2020, angkanya selalu berada di bawah 1 yaitu 0,9%; artinya, di DKI Jakarta sudah tidak terjadi lagi penularan, Anies Baswedan sampai pada keputusan untuk memulai masa transisi itu. Anis Baswedan juga terus menekankan fakta bahwa prestasi yang telah dicapai DKI Jakarta dalam menurunkan laju penularan Covid-19 adalah prestasi yang dicapai oleh semua warga, bukan hanya prestasi pemerintah DKI Jakarta.

Dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama di negara-negara maju, telah berkembang sebuah kajian yang disebut sebagai STS (*Science Technology and Society*). Kajian atau studi ini memberikan perhatian pada hubungan timbal balik antara ilmu,

teknologi, dan masyarakat. Ilmu, melalui riset dan eksperimen-eksperimen menghasilkan teknologi, dan teknologi digunakan oleh masyarakat, termasuk pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat, sebaliknya, dapat mendorong para ilmuwan untuk melakukan riset dan uji coba guna menemukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tertentu. Upaya berbagai negara untuk menemukan vaksin antivirus Covid-19 yang sangat dibutuhkan masyarakat dunia adalah contoh terbaik dari STS.

Kita pun dapat melihat apa yang terjadi di DKI Jakarta (juga di tempat-tempat lain), dalam perspektif kajian STS. Penekanan yang besar pada hasil studi Dr. Pandu Riono dan Tim FKM-UI sebagai pertimbangan utama Gubernur Anis Baswedan untuk memulai masa transisi pada 5 Juni 2020, bisa disoroti dengan perspektif STS. Sebagai seorang yang menyandang gelar doktor ilmu politik, Anies Baswedan adalah sosok yang memahami dunia riset dan ilmu pengetahuan.

Pandemi, yang bersumber dari virus yang menyebar melalui pergerakan dan pertemuan manusia, adalah sebuah peristiwa alam yang hanya dapat dimengerti oleh ilmu kedokteran, biologi, epidemiologi, dan kesehatan masyarakat. Bagi Anies, bersandar pada pendapat para ahli telah memberi legitimasi kuat bagi kebijakannya secara saintifik dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Bagi saya, angka 0,9% yang menjadi dasar keputusan Gubernur Anis Baswedan untuk melonggarkan PSBB menjadi PSBB Transisi, terkesan sebagai sebuah angka *borderline*, kalau tidak sebagai *magic number*, atau “angka politik”.

Kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus sekaligus ibu kota negara, mempunyai tantangan tersendiri karena dalam wilayah geografis yang berada di bawah otoritas gubernur, terdapat institusi-institusi pemerintah nasional, seperti istana negara, kantor-kantor departemen, dan kementerian. Sudah menjadi pengetahuan umum

pula bahwa sebagian besar peredaran uang terkonsentrasi di DKI Jakarta. Oleh karena itu, DKI Jakarta merupakan magnet terbesar yang menyedot manusia dari berbagai pelosok negeri untuk mengadu nasib.

Dalam sistem ekonomi yang kapitalistik, hanya sebagian kecil penduduk yang bisa mendapatkan pekerjaan formal, sementara sebagian besar terserap dalam pekerjaan-pekerjaan informal. Ketika pandemi merangsek ke dalam struktur sosial yang rapuh karena memiliki ketimpangan sosial yang tinggi, berbagai kebijakan gubernur dalam mengendalikan penyebaran virus dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih bersifat struktural daripada sosiokultural.

Mengikuti konferensi pers Gubernur Anis Baswedan, Minggu 13 September 2020 siang itu, saya melihat perubahan pada Anies Baswedan, dia tidak lagi menampilkan data-data saintifik, seperti saat konferensi pers 5 Juni 2020 lalu. Terus terang, saya tidak melihat adanya perubahan drastis. Saya membayangkan apa yang akan dikatakan, namun dia hanya mengatakan bahwa PSBB akan diperketat. Saya hanya menduga-duga, apakah Anies Baswedan memang harus melakukan kompromi dengan Menko Perekonomian, Erlangga Hartanto, yang meminta kegiatan dunia usaha jangan sampai mendapatkan pembatasan lagi? Sejak awal, saya memang telah menilai bahwa penanganan Covid-19 bukanlah persoalan kesehatan saja, tetapi telah menjadi persoalan politik, persisnya politik-ekonomi.

Sebagai warga DKI Jakarta, saya mengamati bagaimana Anies Baswedan harus bermanuver sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada di tangannya sejak mengalahkan Ahok dulu, yaitu mengendalikan Covid-19 yang terbukti tidak mudah ditaklukkan. Kebijakannya terbukti telah gagal dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Di akhir konferensi persnya, saya melihat Gubernur Anies Baswedan kembali menekankan keharusan warga DKI Jakarta untuk

memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta tetap tinggal di rumah, kecuali ada keperluan penting. Selain anjuran yang telah menjadi klise itu, Anies Baswedan juga menganjurkan warga untuk terus berdoa dan menyatakan keyakinannya bahwa suatu saat, Allah akan mengabulkan doa itu. Hal yang jadi pertanyaan saya, sejauh mana sesungguhnya kemampuan Anies Baswedan dalam menggerakkan aparat pemerintahannya untuk benar-benar menjalankan keputusan dan kebijakannya?



Sumber: Tirtosudarmo (2021)

## 9. Gerak, Suara, dan Rupa: Sebuah Pencarian<sup>10</sup>

Dalam salah satu bukunya, *An Essay on Man* (Sebuah Esai tentang Manusia), Ernst Cassirer, seorang filsuf Jerman yang kemudian pindah ke Amerika karena sebagai Yahudi hidupnya terancam oleh Nazi; mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu menciptakan simbol (*animal symbolicum*). Dengan kemampuannya menciptakan simbol itu, menurut Cassirer, manusia menciptakan seni, ilmu, mitos dan religi, bahasa, serta sejarah.

Filsafat manusia Ernst Cassirer menjadi penting untuk dibaca karena kemampuannya dalam menjelaskan eksistensi manusia secara utuh dan bagaimana hubungannya dengan berbagai aspek penting dalam masyarakat, seperti seni, ilmu, bahasa, sejarah, mitos dan religi. Di Indonesia, seperti juga terjadi di belahan dunia

<sup>10</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 20 April 2021.

yang lain, ada kecenderungan berbagai aspek yang disebutkan oleh Cassirer itu dipandang sebagai sesuatu yang terpisah antara satu dengan yang lain. Manusia tidak lagi dilihat secara holistik, tetapi terfragmentasi dalam kotak-kotak.

Bambang Dwiatmoko adalah seorang sarjana musik yang menaruh perhatian pada fenomena bunyi atau suara—dia menyebutnya sebagai *soundscape*. Bersama teman-temannya di Salatiga, Bambang Dwiatmoko membuat grup musik yang diberi nama Saung Swara. Kekhasan dari pemusik Saung Swara adalah alat-alat musiknya yang dibuat sendiri dari bahan-bahan lokal. Alat-alat musik itu antara lain, Siter Sapek, Suling Shakuhachi, Gambang Kecil, Bass Gitar, Perkusi Kendang, Kerinding Bambu, dan Digiridu—alat musik tiup Aborigin yang dibuat dari kayuangka; semua dibuat di dalam sanggar Pak Meng, pemain sitar dalam Saung Swara.

Saung Swara juga menciptakan lagu-lagunya sendiri, hibridisasi antara lagu berbahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Grup ini



Sumber: Tirtosudarmo (2021)

**Gambar 3.** *Workshop “Gerak, Suara, dan Rupa”*

Buku ini tidak diperjualbelikan.



memiliki anggota vokalis, Athan, seorang yang paling muda dalam grup ini, dengan bakat dan kemampuannya memperhatikan tradisi pewayangan Jawa klasik. Berbagai elemen unik yang dimiliki oleh Saung Swara menjadikan grup musik ini memiliki potensi untuk mengembangkan genre musik tersendiri, yaitu hibridisasi antara tradisi dan kontemporer.

Pada 13 dan 14 April 2021, sebuah *workshop* diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Mobilisasi Sumber Daya dan Pusat Studi Heritage Nusantara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) di Salatiga. *Workshop* yang dihadiri oleh sekitar dua puluh peserta dari berbagai latar belakang profesi di dunia seni dan akademi ini, bisa dilihat sebagai sebuah eksperimen sosial (Prass Production, 2021).

Dalam *workshop* ini, seni ditempatkan sebagai inspirasi bagi perubahan sosial dari masyarakat yang lebih luas. Perjumpaan dan perbincangan antara seniman, pegiat sosial, dan akademisi dalam *workshop* ini berusaha untuk melihat tiga ekspresi seni, yaitu gerak, suara, dan rupa sebagai sebuah kesatuan yang utuh. *Workshop* ini bukan berangkat dari sebuah konsep tertentu yang sudah matang, melainkan ingin mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang terkandung dalam kebudayaan sebagai inspirasi dan penggerak proses perubahan sosial. Perjumpaan yang terjadi melalui suara musik Saung Swara, gerak meditatif Joged Amerta, dan rupa lukis di kanvas, yang diselingi pula oleh perbincangan reflektif dari seluruh peserta, merupakan proses peristiwa kebudayaan itu sendiri.

Saung Swara sebagai sebuah grup pemusik yang menggunakan berbagai alat musik buatan sendiri dengan lagu-lagu yang diaransemen sendiri, seperti ingin menyuarakan keprihatinan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan, menjadi bagian penting dalam *workshop* ini. Secara khusus, dalam *workshop* ini, ditampilkan sebuah lagu yang berjudul *The Seekers* yang terinspirasi oleh kisah pewayangan Dewa Ruci. Lakon Dewa Ruci



menceritakan perjalanan Bima mencari Air Perwitasari, yang melambangkan sumber kehidupan. Menariknya, penampilan musik Saung Swara ini disertai dengan gerak meditasi Joged Amerta dari Atik Widayati, Christina Duque (Ekuador), Sitras Anjilin, dan kawan-kawan dari Padepokan Cipto Budoyo Tutup Ngisor Merapi.

Di tengah kolaborasi gerak dan suara ini, pelukis muda penuh talenta, Sogik Prima Yoga, menggelar kanvas dan melukiskan imajinasinya tentang pertemuan Bima dan Dewa Ruci. Kolaborasi gerak, suara, dan rupa, secara tak terduga tampil sebagai sebuah kesatuan dalam proses kreatif kesenian yang mengalir indah menghanyutkan yang dinikmati oleh seluruh peserta *workshop*.

Pada acara pembukaan *workshop*, Dr. Joseph Ernest Mambu, Pembantu Rektor IV UKSW Bidang Kerjasama, mengajak peserta *workshop* untuk membaca kembali pemikiran Ki Hadjar Dewantoro tentang makna pendidikan dan kebudayaan. Dalam kata sambutannya itu, disinggung juga apa yang dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai *serendipity*, sebuah peristiwa



Sumber: Tirtosudarmo (2021)

**Gambar 4.** Foto Bersama Setelah *Workshop*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kebetulan yang menentukan eksplorasi atau proses pencarian pengetahuan baru. Tampaknya, apa yang kemudian dialami bersama dalam upaya menampilkan musik, tari, dan lukis dalam sebuah kolaborasi tanpa skenario itu adalah sebuah *serendipity*, seperti di awal *workshop* disinggung oleh Dr. Joseph Ernest Mambu.

Sementara itu, pada sesi presentasinya, Dr. Agastya Rama Listya (Kelik) dari Jurusan Seni Musik UKSW menerangkan bahwa perpaduan antara bunyi, gerak, dan rupa merupakan hal yang biasa terjadi dalam seni tradisi sebagai bagian dari ritual keagamaan. Begitu juga dalam tradisi Yunani Kuno, musik selalu memiliki dimensi ketuhanan, sosial, dan keseharian dalam kehidupan manusia. Tentang kesatuan antara seni musik, seni tari, seni rupa, bahkan seni sastra, menurut salah satu peserta, Sitras Anjilin, paling jelas ditunjukkan dalam pertunjukan wayang orang. Jelaslah bahwa ketiga esensi kesenian, yaitu gerak, suara, dan rupa yang ingin ditelaah bukanlah fenomena kebudayaan yang baru.

Namun, hal yang menjadi menarik adalah perkembangan disiplin pendidikan kesenian sebagai bagian dari akademi, tampaknya menjadi makin terspesialisasi dan membuat berbagai cabang kesenian seolah-olah terpisah antara satu dengan lainnya. Seperti yang telah diketahui, setiap cabang dipelajari sendiri-sendiri, mulai dari seni musik, seni tari, seni rupa, hingga seni kriya; terkotak-kotak dalam dunianya masing-masing. Dalam kaitan ini, kehadiran Dr. Titi Susilo Prabawa, Dekan Fakultas Interdisiplin UKSW, di dalam *workshop* menjadi penting karena fakultas yang saat ini dipimpinnya memberi perspektif baru bahwa realitas sosial tak mungkin dipahami secara monodisiplin karena diharapkan adanya pemahaman yang utuh dan holistik. Ilmu pengetahuan, seperti seni, adalah dua aspek yang menjadi kreasi simbolik manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Ernst Cassirer di awal tulisan ini.

Keseluruhan rangkaian acara dalam *workshop* kecil ini bisa dipandang sebagai sebuah proses pencarian bersama akan makna kehidupan. Keterlibatan peserta, baik dalam mengekspresikan seni maupun dalam merefleksikan pengetahuan melalui diskusi dalam sesi-sesi atau perbincangan informal, merupakan penghayatan dan pengalaman bersama yang memberi arti personal bagi setiap peserta. Tanpa direncanakan, misalnya, kehadiran pasangan musisi kontemporer, Aday dan Bonita, memberi nuansa tersendiri dalam *workshop*. Penampilan bersama Aday dan Bonita dengan grup Saung Swara menjadi paduan yang mengasyikkan bagi semua yang hadir. Sekali lagi, sebuah momen *serendipity* terjadi tanpa didesain sebelumnya.

Barangkali bukan sebuah kebetulan jika energi kreatif hadir dengan leluasa karena ruang *workshop* dari Rumah Bambu *Dancing Mountain* di pinggiran Kota Salatiga, arsitek Budi Pradono dan dikelola kakaknya Esther, sengaja dipilih sebagai tempat *workshop*. Tidak dapat dimungkiri juga semangat yang selalu digaungkan oleh Ketua Pusat Studi Heritage Nusantara UKSW, Esthi Susanti Hudiono, telah menjadikan *workshop* kecil ini berjalan dengan ritme yang dinamis-provokatif sesuai dengan hasrat pencarian makna baru dari kehidupan sosial.

Di akhir *workshop*, sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah paguyuban—yang diberi nama Paguyuban Dewa Ruci—terjadi secara spontan karena didorong oleh hasrat untuk melanjutkan proses pencarian yang telah diayunkan langkah awalnya. Mungkin suatu saat nanti, tidak seni dan ilmu saja yang harus dipertautkan, tetapi juga mitos dan religi, serta sejarah dan bahasa—sebagai bentuk-bentuk kemampuan simbolik manusia—perlu dipertemukan dan diperbincangkan agar kehidupan menjadi lebih kaya dan bermakna.

Dalam lagu maskumambang yang dilantunkan dengan merdu oleh Athan, diiringi Saung Swara, terdengar nasihat Dewa Ruci kepada Bima:

*Sawangen cahya kang cumlorot mlengkung kae*  
(Lihatlah cahaya yang melesat terang meliuk itu)  
*Yo kae dzat kang murba sakabehing ngaurip*  
(Itulah zat yang mewadahi seluruh kehidupan)  
*Tanpa rupa, tanpa warna, tanpa wujud...*  
(tanpa rupa, tanpa warna, tanpa bentuk...)



Sumber: Kurniawan (2019)

## 10. Renungan untuk Nadiem Makarim<sup>11</sup>

Pembiaran oleh penguasa dunia pendidikan di negeri ini terhadap beberapa rektor yang terbukti melakukan plagiarasi, terutama Rektor Universitas Negeri Semarang, adalah sebuah persekongkolan tingkat tinggi untuk membunuh akal sehat. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang masih berusia 38 tahun, dan digadang-gadang oleh Jokowi untuk membenahi dunia pendidikan yang memang sangat semrawut, tampaknya telah terperosok dalam persekongkolan (*conspiracy*) membunuh akal sehat ini.

Suratnya, pada 27 Januari 2021, untuk membatalkan keputusan Rektor USU tentang tindakan plagiarasi Muryanto Amin yang terpilih sebagai rektor baru (Octaviani, 2021), mencerminkan sikapnya yang bisa dinilai tidak memandang penting

<sup>11</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 2 Februari 2021.

sebuah prinsip mendasar dalam dunia ilmu pengetahuan tentang keabsahan sebuah karya akademik. Begitu juga dalam pembiarannya terhadap seorang rektor untuk tetap menduduki jabatan meskipun berbagai pihak yang kredibel telah membuktikan bahwa disertasi doktornya adalah hasil plagiasi, menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap sebuah cacat yang sangat men-coreng integritas perguruan tinggi.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa sebuah konspirasi sedang bekerja di antara penguasa pendidikan di negeri ini untuk membunuh sebuah prinsip penting dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu akal sehat (*common sense*) yang intinya adalah nalar kritis (*critical thinking*). Jika dugaan ini benar, yaitu penguasa melakukan persekongkolan membunuh akal sehat, bukankah ini sebuah tindakan bunuh diri sebagai bangsa? Bangsa Indonesia tidak mungkin lahir jika para pemimpin bangsa waktu itu tidak terdidik untuk melatih akal sehatnya. Hanya dengan akal sehat yang menjadi prinsip pegangan, para pemimpin bangsa itu mampu merumuskan apa yang harus dilakukan untuk memerdekakan rakyatnya dari penjajahan bangsa lain. Jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terperangkap dalam sebuah konspirasi untuk membunuh akal sehat, bukankah dia telah melakukan sebuah laku tidak terpuji yang mengeliminasi prinsip mendasar, yang secara historis telah mendorong lahirnya bangsa ini?

Apa yang ingin dibanggakan oleh sebuah bangsa jika bukan integritasnya dalam menjunjung tinggi akal sehat sebagai prinsip untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kedaulatan bangsa yang merdeka dan bermartabat? Jika akal sehat sebagai pilar penting tegaknya bangsa ditebas oleh para penguasa yang seharusnya justru menegakkannya, bukankah ini pertanda dimatikannya Indonesia sebagai sebuah bangsa?

Nadiem Makarim yang dijagokan sebagai model pemimpin masa depan bangsa oleh Jokowi adalah sebuah produk dari

lingkungan dia dibesarkan. Sebuah lingkungan yang sangat mengunggulkan cara berpikir untuk mengejar kemajuan (*progress*). Universitas Brown dan Harvard yang telah mencetaknya adalah *Ivy League*, saat *creme de la crème*, kaum terpelajar kelas dunia, diproduksi. Dia adalah representasi dari pandangan klasik Weberian yang mengatakan bahwa untuk mencapai progres, tidak ada cara lain selain melalui jalan ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah rasionalitas. Bagi Weber, hanya di baratlah ilmu pengetahuan memiliki *universal significance and validity*. Sukar untuk tidak membayangkan bahwa Nadiem Makarim adalah orang yang diproduksi oleh lingkungan yang percaya bahwa progres hanya mungkin dicapai dengan mengadopsi cara berpikir barat, seperti ditegaskan oleh Weber. Tidak ada sistem berpikir lain di luar barat yang memiliki validitas dan signifikansi secara universal.

Begitu diangkat sebagai menteri, tidak mengherankan jika perintahnya yang pertama adalah agar siswa dilatih untuk pandai berbahasa Inggris dan diwajibkan untuk mempelajari algoritma. Bahasa Inggris dan algoritma, di mata Nadiem, adalah satu-satunya jalan pintas untuk menggapai progres yang dijanjikan oleh Barat. Dia sangat tahu, hanya segelintir orang yang beruntung untuk bisa berkuliah di Universitas Brown dan Harvard. Dia tahu, secerdas apa pun anak Indonesia, jika tanpa dukungan finansial yang kuat, tidak akan dapat berkuliah di Brown atau Harvard, seperti dirinya. Nadiem Makarim yang memilih berkarier sebagai pengusaha, telah melihat peluang besar dari pemanfaatan teknologi informasi digital, terutama dalam bisnis retail, terbukti dengan cepat mampu mengakumulasi kapital dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam konteks ini meskipun tidak setara, Nadiem Makarim dapat disejajarkan dengan Bill Gates, Mark Zukerberg, Jeff Besos, dan Jack Ma. Tidak heran kalau Nadiem pun mungkin kenal secara pribadi dengan Bill Gates dan Mark Zukerberg yang juga

belajar di seputar *Ivy League*, Pantai Timur Amerika. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang mampu mengendarai arus globalisasi dan mengakumulasi kapital secara cepat melalui daya ungkit teknologi informasi. Di sini, kembali tesis Weber (2000) berbicara tentang etika protestan dan spirit kapitalisme. Tentulah jika tesis Weber dikemukakan di sini, harus dibaca dalam metamorfosisnya, persis seabad setelah wafatnya pada tahun 1920. Seabad bukanlah waktu yang pendek untuk mengubah sesuatu, tetapi sulit untuk membantah masih berlakunya tesis dasar Weber yang mengatakan hanya melalui rasionalitas dan etika protestan yang ada di barat spirit kapitalisme, akan membawa umat manusia pada tingkat kesejahteraan dan peradaban baru.

Namun, bagaimana bisa seorang Nadiem Makarim yang jelas-jelas dicetak dengan tungku perapian Barat, yang mengagungkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan, terperosok dalam persekongkolan membunuh akal sehat?

Berdasarkan berbagai informasi yang bisa diakses, ada dugaan kuat bahwa seorang Nadiem, dan dalam kaitan ini juga bisa disebut Hilmar Faried yang memimpin sisi kebudayaan pada Kementerian Pendidikan—yang keduanya boleh dikatakan sebagai orang swasta dan memiliki semangat pencerahan—seperti terpinil dalam anyaman kepentingan-kepentingan politik-ekonomi jangka pendek birokrasinya sendiri. Weber juga yang mengatakan bahwa birokrasi adalah sebuah lembaga yang (semestinya) rasional (*rational bureaucracy*). Di sinilah barangkali kajian-kajian para ahli ilmu sosial terbukti benar, yaitu ketika birokrasi yang seharusnya rasional—seperti yang ditunjukkan oleh Weber di Barat—telah berubah menjadi birokrasi yang bersifat patrimonial (*patrimonial bureaucracy*) ketika diadopsi di Timur. Pertanyaannya, apakah Nadiem Makarim dan juga Hilmar Faried, yang lahir dan dibesarkan dalam tungku perapian Barat, dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan sebagai pilarnya,



bisa gugur apabila berhadapan dengan birokrasi patrimonial dan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi jangka pendeknya?

Persekongkolan membunuh akal sehat oleh para penguasa di dunia pendidikan kita adalah sebuah hasil aliansi tak terpuji (*unholy alliances*) dari berbagai pihak yang telah meluas dalam birokrasi pemerintahan saat ini. Mereka bekerja secara diam-diam untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi jangka pendek. Tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, dan Dirjen Kebudayaan, Hilmar Faried, selain menunjukkan *courage* mereka sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip rasionalitas, akal sehat, dan ilmu pengetahuan. Keterperosokan mereka dalam persekongkolan membunuh akal sehat harus segera dihentikan jika mereka tidak ingin menyaksikan bunuh diri sebagai bangsa terjadi ketika kekuasaan untuk mencegah ada di tangannya.



Sumber: Gischa (2021)

## 11. Membaca Hatta dan Pasal 33 Itu<sup>12</sup>

Saya mulai mengenal tulisan Hatta ketika meneliti sejarah transmigrasi akhir tahun 1980-an. Saat itu, saya sedikit terkejut karena Hatta menginginkan program *emigratie* (kolonisasi) diteruskan. Keinginan Hatta tecermin dari salah satu agenda Panitia Siasat Ekonomi yang dibentuk setelah kemerdekaan dan diketuai olehnya (Hatta, 1954).

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memulai politik etis untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat yang memburuk. Politik etis memiliki tiga program, yaitu *emigratie*, *irrigatie*, dan *educatie*. Program *emigratie*, menurut Hatta, harus diteruskan, tetapi dengan agenda yang baru. *Emigratie* yang kemudian berganti nama menjadi transmigrasi oleh Hatta, harus

<sup>12</sup> Tulisan ini disampaikan pada webinar “Bedah Pemikiran Bung Hatta: Keadilan Sosial dan Kemakmuran” yang diselenggarakan LP3ES, Selasa 22 Juni 2021.

diubah dengan tujuan melakukan industrialisasi di luar Jawa. Menurut Hatta, petani yang dipindahkan ke luar Jawa, akan menjadi pekerja industri.

Meskipun sejak itu program transmigrasi selalu ada dalam setiap pemerintahan, namun gagasan Hatta tidak pernah terealisasi. Ada tiga hal penting yang bisa dipetik dari kisah itu. Pertama, Hatta adalah ekonom yang rasional. Menurutnya, tidak semua yang menjadi warisan Belanda (atau Barat) adalah buruk. Kedua, bagi Hatta menciptakan kemakmuran bagi rakyat sangat penting. Ketiga, dan barangkali ini yang paling relevan dalam pembicaraan hari ini, dengan segala hormat kepada beliau, cita-cita merealisasikan kemakmuran rakyat itu makin menjauh dari harapan dan apa yang dibayangkan Hatta.

Saya mengucapkan terima kasih pada LP3ES karena diminta untuk ikut membedah buku ke-4 kumpulan tulisan Bung Hatta, seorang tokoh yang hanya bisa disejajarkan dengan Bung Karno dalam kiprah perjuangannya membebaskan Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bung Hatta juga terus mendampingi Bung Karno sebelum mengundurkan diri pada 1956. Meskipun tidak lagi menjabat dalam pemerintahan, Bung Hatta terus menyumbangkan pemikiran melalui tulisan-tulisannya, tidak sedikit juga tulisan itu merupakan kritik terhadap pemerintahan Soekarno.

Sama halnya dengan Bung Karno, Bung Hatta telah terbiasa menuliskan pikirannya sejak muda. Artikel pertamanya berjudul “Perjalanan Membikin Propaganda” (1918) dan yang terakhir “Pengembangan Pengusaha Kecil: Salah Satu Aspek Ekonomi Terpimpin” (1979). Tulisannya yang terakhir itu dibuat setahun sebelum beliau wafat. Tulisan-tulisan Bung Hatta meliputi beberapa aspek yang sangat luas. Adapun aspek ekonomi, yang tampaknya menjadi perhatian utama beliau, hanyalah salah satu aspek dari berbagai aspek lain yang menjadi pemikiran beliau.

Buku keempat yang diberi judul *Keadilan dan Kemakmuran* (2015), berkisar pada pemikiran beliau tentang ekonomi makro, politik ekonomi, dan ekonomi pembangunan. Buku ke-4 ini diberi kata pengantar oleh Emil Salim, yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Redaksi Buku *Karya Lengkap Bung Hatta*. Dalam pengantarnya, Emil Salim menyebutkan bahwa “Bung Hatta adalah contoh *par excellence*, seorang ilmuwan ekonomi yang berhasil mempengaruhi politik secara jujur dalam analisisnya dan mampu jelas membedakan wilayah politik dengan wilayah ekonomi” (Hatta, 2015, xxiii). Dalam bagian yang lain, dari kata pengantarnya, Emil Salim mengatakan, “Bung Hatta taat beragama dan sejak kecil sudah dilatih dan diajar beragama Islam. Penghayatannya beragama Islam ini pulalah yang menyebabkan ajaran Marxisme-Leninisme dan kemudian paham komunisme tidak bisa diterimanya” (Hatta, 2015, xxvii).

Kata pengantar Emil Salim yang ditulis 1 Agustus 2002 ini sangat membantu bagi para peminat buku keempat yang tebalnya mencapai 500-an halaman. Oleh redaksi buku, isi Buku ke-4 ini dibagi menjadi 4 Bab. Bab 1: Perkembangan Ekonomi Dunia; Bab 2: Ekonomi Kerakyatan; Bab 3: Kebijakan Ekonomi Indonesia; dan Bab 4: Bantuan Ekonomi dan Modal Asing.

Tulisan-tulisan Bung Hatta yang terentang dari tahun 20-an–70an dan oleh redaksi dikelompokkan ke dalam bab-bab di atas, tentu berdasarkan tafsir redaksi terhadap substansi tulisan-tulisan tersebut. Jadi, bisa saja tulisan tahun 30-an dijejerkan dengan tulisan tahun 50-an, 60-an, atau 70-an. Pembaca hanya perlu melihat secara teliti karena tulisan-tulisan itu dibuat dalam konteks politik yang berbeda-beda.

Hampir bisa dipastikan bahwa ada konteks yang berbeda antara tahun 30-an saat Bung Hatta menulis di kamp pembuangan Boven Digoel, misalnya, dengan tulisan yang dibuatnya tahun 70-an ketika Indonesia memasuki era Orde Baru—yang oleh Herbeth Feith disebut sebagai repressive developmentalist regime (Feith,

1980). Ketika kita tahu ada dua konteks yang berbeda dalam bab yang sama, hal tersebut menjadi problematik. Misalnya, Perang Dunia II dengan Perang Dingin yang dibahas dalam bab Perkembangan Ekonomi Dunia.

Sampai di sini, pertanyaan menariknya adalah, adakah benang merah yang secara substantif bersifat fundamental dalam tulisan-tulisan Hatta? Apakah benar “keadilan dan kemakmuran”, seperti judul Buku ke-4 ini, bisa dianggap sebagai benang merah yang bersifat substantif-fundamental? Membaca tulisan yang terkumpul dalam buku keempat ini, saya merasa bahwa tidak keliru jika redaksi memberi subjudul “Keadilan dan Kemakmuran” karena sejak tulisan pertama sampai terakhir, dua kata itu menjadi benang merah yang menyatukan kumpulan tulisan ini. Pada bab satu, saya menangkap bagaimana Hatta mengupas berbagai isu yang saat ini bisa disebut sebagai isu globalisasi (imperialisme, kolonialisme, kapitalisme dan sosialisme); pada bab dua, Hatta secara khusus membicarakan implikasi globalisasi terhadap mereka yang tertindas dan terpinggirkan (rakyat); sementara pada bab tiga dan empat, dia lebih melihat bagaimana keadaan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Sebuah isu yang selalu berulang pada tulisan-tulisan Hatta setelah proklamasi kemerdekaan, terkait dengan sesuatu yang saat ini telah menjadi mitos bangsa ini, yaitu Pasal 33 UUD 1945, sebuah pasal yang diusulkan oleh Bung Hatta. Tentang hal ini, uraian Bung Hatta yang paling eksplisit tertuang dalam tulisannya yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945” (hlm. 237–241), yang semula merupakan pidato pada Kongres ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), 15 Juni 1977. Dalam tulisan ini, Bung Hatta mengatakan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu, yang merupakan tugas terpenting ialah menjalankan peraturan Pasal 33. Pasal ini mengenai politik perekonomian menuju kemakmuran rakyat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dicantumkan bahwa

hendaklah menciptakan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita itu haruslah direalisasi dengan pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan dengan rencana yang teratur. Oleh sebab itu, direncanakan “Pembangunan Lima tahun” yang didasarkan pada kemakmuran rakyat. Di atas dasar kemakmuran rakyat itu, dapatlah dibangun berangsur-angsur segi lain dari penghidupan rakyat. Setiap lima tahun, pembangunan harus diulang untuk untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejatuhan Bung Karno menyusul tragedi politik tahun 1965, menurut dugaan saya, memberikan harapan baru bagi Bung Hatta. Naiknya para ekonom-teknokrat yang membantu Presiden Soeharto merancang strategi pembangunan ekonomi, melalui Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita), seperti dalam tulisan Hatta tersebut, menjanjikan akan direalisasikannya cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 sebagai politik perekonomian menuju kemakmuran rakyat. Hatta juga dengan jelas menunjukkan bahwa keadilan sosial akan tercapai apabila kemakmuran rakyat telah dipenuhi.

Sebagai ekonom, Hatta melihat bahwa hanya melalui pembangunan ekonomi yang dilakukan secara bertahap dan mengikuti prinsip-prinsip dalam Pasal 33, keadilan sosial akan terealisasi. Melihat waktu tulisan yang dibuat pada 1977, pemerintahan Orde-Baru telah memasuki Pembangunan Lima Tahun yang kedua dan Bung Hatta sudah melihat apa yang telah dihasilkan oleh politik perekonomian pemerintahan yang didukung oleh para ekonom-teknokrat ini, termasuk Emil Salim. Dalam tulisan untuk ISEI ini, Bung Hatta sebetulnya mengisyaratkan bahwa apa yang menjadi harapan sesungguhnya tidak terlaksana. Perhatikan apa yang ditulis Hatta di bawah ini.

“Perlu diperingatkan kembali bahwa sejak kita merdeka kira-kira 32 tahun yang lalu, berkali-kali tiap-tiap saya mengunjungi daerah di luar ibukota Republik Indonesia saya menganjurkan supaya

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berusaha dengan perintah dan peraturan, supaya pengusaha asing yang mendapat konsesi hendaknya memperbaharui kesuburan tanah dan hutan yang ditebang. Tiap batang pohon harus diganti sedikit-dikitnya dengan menanam tiga pohon baru. Di Kalimantan Timur dibiarkan saja si pemegang konsesi menebang hutan, semau-maunya dengan tidak menanam gantinya tiga pohon. Demikian juga di Riau, yang sudah ditinggalkan oleh si pemegang konsesi, sebelum habis masa konsesinya.”

Hatta wafat tiga tahun setelah tulisan itu dibuat. Dugaan saya, pemerintah Orde Baru yang didukung oleh para ekonom-teknokrat itu telah mengingkari prinsip-prinsip Pasal 33, seperti terpantul dari paragraf akhir tulisannya,

“Negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman. Berbagai barang yang penting bagi kehidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopoli oleh orang-orang Cina”.

Tulisan terakhir di *Buku ke-4: Keadilan dan Kemakmuran* ini berjudul “Pemerintah Harus Cari Bantuan Lebih Banyak”. Tulisan ini menurut keterangan yang ada, berasal dari “dokumen pribadi, tanpa tanggal, bulan, dan tahun”. Dalam tulisan yang saya duga dibuat pada awal Orde Baru ini, ada sebuah paragraf yang cukup membuat kening saya berkerut,

“Untuk memperoleh bantuan ini dapat dikemukakan alasan, bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang telah menumpas komunisme dengan kekuatan sendiri. Jika pembangunan tidak dibantu, maka komunisme akan berkuasa lagi di Indonesia. Negara-negara yang berkemungkinan besar mau membantu Indonesia adalah Amerika Serikat serta negara-negara Eropa Barat yang baik hubungannya dengan Indonesia, seperti Belanda. Akan tetapi

yang terpenting bagaimana meyakinkan negara-negara mengenai kesungguhan kita”.

Betapa pun trivial tampaknya sikap Hatta terhadap komunisme dan harapannya tentang bantuan dari Amerika dan Belanda, dalam tafsir saya, ini mencerminkan sebuah keputusan dari seseorang yang begitu lama menanggung beban. Mungkin Hatta sendiri merasa bahwa tulisan itu memang tidak semestinya dipublikasikan. Mungkin redaksi buku kumpulan tulisan Hatta tidak menyadari bahwa dengan adanya tulisan ini, apa yang dikatakan oleh Emil Salim dalam kata pengantarnya, yang menyebutkan kemampuannya untuk memisahkan antara wilayah ekonomi dan politik, seperti telah terkoreksi oleh sikapnya ini.

Membaca tulisan Hatta dalam kumpulan ini, saya menilai bahwa tulisan-tulisan yang dibuatnya pada masa pembuangannya di Boven Digoel dan Banda Neira, merupakan buah perenungan yang dalam dan bacaan yang luas dari khazanah literatur dunia, terutama pemahamannya tentang Marxisme dan Sosialisme. Menurut John Ingelson, Hatta mungkin tidak pernah menganggap dirinya seorang Marxis, tetapi Hatta, “melebihi orang Indonesia mana pun, telah mendekati usaha memadu apa yang ia pandang sebagai implikasi sosial Islam dengan wawasan sosiologisnya Marx” (Ingelson, 1982).

Setelah kembali dari pengasingan dan terlibat aktif dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan sebagai perunding unggul yang kemudian berhasil mengukuhkan kesatuan Republik Indonesia, saya kira kesempatan merenung menjadi makin terbatas, sementara rangkaian konflik dan krisis politik menuntut keterlibatannya secara total. Meskipun Hatta tidak pernah berhenti menulis, terasa tulisannya menjadi kurang mendalam, lebih bernada pragmatis guna menjawab berbagai persoalan yang teknis-spesifik.



Secara keseluruhan, pemikiran Bung Hatta menurut hemat saya, berpusat pada persoalan keadilan dan kemakmuran. Memahami pemikiran Bung Hatta tentang keadilan dan kemakmuran, tidak cukup hanya membaca Buku keempat ini karena dalam pembacaan saya, bagi Bung Hatta, keadilan tidak mungkin ada tanpa kemakmuran, begitu juga kemakmuran, tidak bisa bertahan tanpa keadilan. Hal itu juga yang membuat Bung Hatta tidak mungkin memisahkan ekonomi dan politik, baik secara teori maupun praktik.

Penting bagi kita saat ini untuk mencoba menganalisis mengapa harapannya, seperti tecermin dalam Pasal 33, makin jauh dari kenyataan yang ada. Paling tidak, ada dua hal yang saya tawarkan untuk didiskusikan lebih lanjut. Pertama, Hatta tidak memilih jalan perjuangan progresif meskipun—seperti pemimpin politik tahun 30-an yang lain—ia menganut ideologi kiri (sosialisme). Hatta percaya pada gradualisme, perubahan teratur dan menolak revolusi yang hanya akan melahirkan anarki. Sikap antikomunismenya, meskipun banyak yang menduga berasal dari ketaatannya pada agama, menurut pendapat saya, terjadi karena kekhawatirannya dengan aksi massa yang cenderung anarkis. Itulah mengapa, bersama Sjahrir, keduanya lebih menginginkan partai kader daripada partai massa. Kedua, keyakinannya yang bagi saya, cenderung romantis terhadap kolektifisme dan pandangannya bahwa pada dasarnya, individu itu baik. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 yang secara operasional diwujudkan dalam bentuk koperasi, berangkat dari paham yang berkarakter komunitarian. Pasca-1965 ketika liberalisme dan kapitalisme berkembang karena disponsori negara,<sup>13</sup> sosialisme versi Hatta yang percaya pada gradualisme dan berkarakter komunitarian, makin tersisih dan terpinggirkan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Untuk periode Orde Baru, lihat Robison (1986); untuk periode pasca Orde Baru, lihat Robison dan Hadiz (2004).

<sup>14</sup> Komunistofobia, seperti tecermin dalam sikap Hatta memiliki jejak sejarah yang panjang. Sebuah pemahaman tentang skisma yang diidap oleh golongan

Sebagai ekonom yang rasional dan politisi yang bekerja dengan hati nurani, saya kira Hatta mulai kecewa atas perkembangan ekonomi dan politik setelah gagalnya konstituante tahun 1955. Setelah resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden tahun 1956, Hatta menjadi seorang pengamat dan tokoh yang dihormati karena sifat-sifatnya yang arif. Sebagai pengamat, dia kecewa karena negerinya bergerak menuju arah yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pasca-tragedi politik 1965, pada awalnya dia menaruh harapan dengan pemerintahan yang baru meskipun kemudian terbukti dia dikecewakan oleh para ekonom-teknokrat yang semula menjadi harapannya. Sebagai ekonom, mungkin Hatta terlalu romantis dan percaya kolektifisme memiliki akar dan bisa tumbuh di negerinya. Sebagai politisi, barangkali Hatta terlalu bersih dan selalu berprasangka baik bahwa seorang musuh pun harus diberi kesempatan karena itulah nilai dasar demokrasi.<sup>15</sup>

Untuk mengakhiri pembacaan saya tentang Hatta, perkenankan saya mengutip pendapat Deliar Noer, penulis biografi politik Hatta, di akhir bukunya (2018).

“Mungkin ada yang melihat hidup Hatta ini berakhir secara tragis. Ia pejuang besar, orang kedua di Indonesia sesudah merdeka. Ia juga penuh cita-cita – yang baik dan mulia – tetapi ia tinggalkan segalanya tanpa hasil yang ia dambakan, sekurang-kurangnya tidak seperti yang ia harapkan. Ia pergi bagai dalam kesepian, malah tanpa ada jaminan bahwa cita-citanya ini akan ada yang melanjutkan”. (Noer, 2018: 114).

---

kiri di Indonesia perlu dilakukan secara sungguh-sungguh jika sosialisme sebagai penangkal kapitalisme ingin dikembangkan di Indonesia.

<sup>15</sup>George Kahin yang mengenal Hatta sejak zaman revolusi hingga zaman Orde Baru, dalam obituarinya menulis dengan subtil kualitas Hatta baik sebagai pribadi maupun sebagai figur publik. Kahin menunjukkan berbagai aspek dari Hatta yang menurutnya selama ini tidak diketahui oleh publik. Lihat “In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)”, Indonesia, Vol 30, October, pp. 113-119, 1980.



Sumber: Gromico (2019)

## 12. Daulat Rakyat: 76 Tahun Merdeka dari Belanda, 56 Tahun Dipasung Elite-nya Sendiri<sup>16</sup>

“Daulat Rakyat” adalah *state of the art* sebuah perpolitikan (*polity*) ketika negara dikendalikan oleh warga negaranya, dan warga negara mengatur tingkah laku elite politiknya. “Daulat Rakyat” adalah simbolisasi semua yang ideal tentang demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketika masih menjadi negeri jajahan, “Daulat Rakyat” oleh Mohamad Hatta telah dijadikan nama koran dari kaum pergerakan yang dipimpinnya. Mohamad Hatta, yang bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, adalah pemimpin politik yang mendedikasikan sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan tercapainya kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi bangsanya.

<sup>16</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 20 Agustus 2021.

Setelah kemerdekaan dari penjajahan Belanda dicapai, bagi Mohamad Hatta, kedaulatan harus ada di tangan rakyat yang telah memiliki hak sepenuhnya sebagai warga negara. Riwayat hidup Hatta, seperti riwayat para pemimpin kaum pergerakan lainnya—Soekarno, Sjahrir, Tan Malaka, dan Amir Sjarifuddiin, untuk menyebut nama-nama yang menonjol—sering berakhir tragis. Para pemimpin politik yang telah berjuang sejak usia muda untuk memerdekakan bangsanya itu seperti harus mengorbankan dirinya meskipun kemerdekaan telah diproklamasikan.

Dalam merayakan 76 tahun kemerdekaan (Tempo, 2021), ditampilkan sosok Hoegeng Iman Santoso, mantan kepala kepolisian yang jika wafat memilih tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Dalam kolom yang ditulisnya untuk mendudukan sosok Hoegeng dalam perpolitikan di negerinya, Robertus Robet, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, mengemukakan sebuah pengamatan yang sangat menarik. Robertus Robet di awal kolomnya menulis:

“Suatu gejala yang menonjol dalam kebudayaan politik kontemporer Indonesia adalah populisme dangkal disertai kebencian diam-diam kepada elitisme. Budaya populisme dangkal melahirkan elite yang hipokrit: di satu sisi mereka aktif dalam perebutan jabatan, kekayaan, dan sumber daya ekonomi-politik kekuasaan di atasnya; di sisi lain mereka mengembangkan citra merakyat. “ke-bawah”, nasionalistis, dan anti intelektualisme”. (Robet, 2021)

Bagi Robet, sosok Hoegeng mewakili tipe elite yang bertolak belakang dari umumnya elite saat ini yang dilahirkan dalam populisme dangkal menjadi kaum hipokrit itu. Hoegeng seperti menjadi “the last Mohicans” dari elite politik yang pernah ada di republik ini, yaitu sederhana, memiliki integritas, menghargai intelektualitas, dan memiliki gaya estetik yang mendahului komitmen politik dan ideologis.

Pengamatan Robert tentang situasi perpolitikan, atau dalam istilahnya kebudayaan politik kontemporer, mendapatkan pene-gasan dari Mochtar Pabottingi dalam artikelnya di *Kompas* yang terbit ketika 76 tahun kemerdekaan sedang dirayakan (18 Agustus 2021). Pabottingi, mantan peneliti senior LIPI, menunjukkan bahwa selama 56 tahun, terjadi pengkhianatan terhadap kemerdekaan oleh elite politik. Menjelang akhir artikelnya yang berjudul “Ke Mana Kita Merdeka” (Kompas, 2021), Mochtar Pabottingi menulis sebagai berikut:

“Ke mana kita merdeka? Sudah 56 tahun, yaitu sejak Orde Baru, bangsa kita tergiring ke dalam regresi kontinu dari ideal-ideal kemedekaan kita sehingga sudah menjadi tantangan yang meng-gunung. Namun, pernah beratus tahun bangsa kita dicekoki dan dipaksa percaya bahwa kemerdekaan adalah suatu kemustahilan. Dan bangsa kita bangkit menegaskannya. Kini, sanggupkah kita membalikkan pengkhianatan itu?” (Pabottingi, 2021)

Pada tanggal 16 Agustus 2020, diselenggarakan sebuah we-binar oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI yang bekerjasama dengan Pusat Studi Heritage Nusantara (PSHN) UKSW. Webinar yang merupakan bagian dari seri diskusi bulanan itu mengambil tema, “Mengawal Republik: Pilihan Politik, Resiko dan Prospek Masa Depan” (2021), dengan tiga narasumber, yaitu Grace Leksana, Manuel Kaisiepo, dan Max Lane. Mengikuti presentasi ketiga narasumber dan diskusi yang berlangsung, ada beberapa hal yang tersambung dalam tulisan Robertus Robert dan Mochtar Pabottingi.

Grace Leksana, sejarawan dari Universitas Negeri Malang yang menekuni tentang peristiwa 1965, menunjukkan bahwa ada dinamika politik lokal yang terpola di masyarakat seputar peristiwa 1965. Apa yang sering dikatakan sebagai konflik horizontal, yang mengakibatkan terbunuhnya anggota PKI dan simpatisannya di berbagai daerah, mengaburkan fakta adanya pusat komando

dan rantai instruksi yang datang dari atas. Sementara itu, Manuel Kaisiepo, seorang intelektual publik, mengupas khusus problem Papua yang menurut pengamatannya, mulai muncul tidak jauh dari tahun 1965.

Manuel Kaisiepo mengatakan bahwa tahun 1963–1969 adalah tahun yang menentukan masa depan Papua. Sebagai contoh, kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan perusahaan tambang Amerika Serikat untuk mengeksplorasi tambang emas di Freeport yang ditandatangani tahun 1967, yaitu sebelum Irian Barat secara resmi menjadi bagian dari Indonesia.

Max Lane, pengamat dan aktifis politik dari Australia menunjukkan bahwa periode 1949–1965 adalah periode penting dalam sejarah politik Indonesia. Menurut Max, dalam periode itu telah berlangsung pertarungan yang menjadi indikasi bahwa rakyat terlibat secara aktif dalam politik melalui berbagai bentuk organisasi. Namun, periode penting dalam proses pembentukan bangsa ini “dihentikan” pada tahun 1965, dan bangsa Indonesia menjadi *unfinished nation*.

Setelah 1965, menggunakan istilah Pabottingi, adalah pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Reformasi 1998 terbukti tidak cukup untuk menghentikan pengkhianatan itu. Kebebasan sipil dan politik yang begitu besar setelah Reformasi, hanya melahirkan elite yang teralienasi dari masanya. Ujung proses itu, mengutip pendapat Robet, adalah menggejalanya budaya populisme dangkal yang melahirkan elite politik yang hipokrit.

Hipokrisi mungkin sebuah *oximoron* dalam perpolitikan kita saat ini. Lantas bagaimana peran ilmuwan dan intelektual, atau dalam bahasa Daniel Dhakidae, kaum cendekiawan dalam relasinya dengan kekuasaan dan politik? Pada 1971, sebuah koin-sidensi atau bukan, lembaga-lembaga yang mewadahi kiprah cendekiawan pasca 1965 bermunculan, beberapa yang menonjol dan tahun ini merayakan usianya yang ke-50, di antaranya adalah LP3ES, CSIS, YLBHI, dan Majalah Mingguan *Tempo*. 50 tahun

perjalanan lembaga-lembaga ini cukup untuk memberikan penilaian bagaimana tingkat otonomi dan independensi masing-masing lembaga tersebut dalam relasinya dengan kekuasaan.

*Tempo* beberapa kali mengalami pemberedelan karena liputannya yang dianggap terlalu jauh bagi penguasa, dan dinilai sebagai media *mainstream* yang paling independen. Peran Goenawan Mohamad sebagai pendiri dan penyumbang Catatan Pinggir sampai saat ini, di usianya yang ke-80, mencerminkan posisi intelektual pasca 1965 yang unik karena memadukan sekaligus bersikap kritis terhadap kekuasaan, empati terhadap korban 1965, dan percaya pada kebajikan hidup bersama (*public virtue*).

LP3ES dengan *Prisma* sebagai jurnal yang menampung pemikiran para akademisi dan intelektual sulit dibantah karena masih didominasi oleh perspektif yang bersifat teknokratis-developmentalistik. Segelintir intelektual, seperti Farhan Bulkin, Arief Budiman, Adi Sasono, Dawam Rahardjo, dan Sritua Arief pernah mencoba mengembangkan perspektif strukturalis sebagai alternatif kritis, namun hanya mampu bermain di pinggiran. Pada suatu masa, beberapa intelektual di YLBHI, seperti Todung Mulya Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Fauzi Abdullah mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai bantuan hukum struktural karena menyadari bahwa persoalan yang dihadapi sesungguhnya bersifat struktural, namun upaya rintisan ini hilang, seperti tertelan zaman.

CSIS adalah salah satu yang paling konsisten dalam menjalin hubungan erat dengan kekuasaan, siapa pun penguasanya. Perayaan ulang tahun ke-50nya yang dimeriahkan oleh orasi politik Megawati dan Prabowo Subianto, komentar seorang teman, “memperlihatkan kembalinya CSIS ke *khitohnya*” (CSIS, 2021).

Sebuah lembaga yang secara tradisional menjadi tempat berkumpul para akademisi-intelektual adalah kampus, perguruan tinggi, dan universitas. Bagaimana hubungan para akademisi tradisional ini dengan kekuasaan? Sulit untuk dibantah bahwa



kedudukan para akademisi di universitas, apalagi universitas yang berada di bawah kewenangan pemerintah, umumnya bisa dikatakan harus tunduk kepada kekuasaan. Jika ada akademisi yang kritis, pastilah sebuah pengecualian. Seperti halnya akademisi yang berada di perguruan tinggi milik pemerintah, berbagai lembaga akademik, seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan anaknya Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang akan tergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan istilah seorang teman, adalah lembaga-lembaga akademik “Pelat Merah”.

Lembaga-lembaga tersebut jelas harus mendukung agenda pembangunan pemerintah. Bahkan, seperti ironi, tetapi itulah kenyataannya ketika Ketua AIPI juga bersedia menjabat sebagai staf khusus sebuah kementerian yang bersifat teknis. *Power/Knowledge*, kata Foucault, memang sebuah keniscayaan. Akademisi yang berumah di kampus tidak mungkin bersifat pasif dalam hubungan kekuasaan. Mereka menyadari perlunya ikut bermain dalam politik jika tidak ingin ditinggalkan. Dibentuknya berbagai forum yang berbasis di perguruan tinggi, seperti Forum Rektor dan Forum Guru Besar, merupakan keinginan berpolitik dari para insan akademik.

(Alm.) Daniel Dhakidae, akademisi sekaligus intelektual yang sampai akhir hayatnya setia menghidupkan Jurnal *Pemikiran Prisma*, dalam bukunya *Cendekiawan dan Kekuasaan* (Dhakidae, 2003), sempat melihat embrio cendekiawan kritis pada sekelompok anak muda yang di tengah kekuasaan represif, berani mendirikan sebuah partai yang berideologi kritis-progresif, Partai Rakyat Demokratik (PRD) meskipun kita tahu, kelompok anak muda ini diberangus dan pecah tercerai-berai.

Setelah keluar dari penjara, Budiman Sudjatmiko, Ketua PRD, melanjutkan sekolah ke luar negeri, dan sekarang menggabungkan diri ke PDIP. Pentolan-pentolan PRD yang lain, masih berusaha



untuk membangun partai kembali, dan sebagian yang lain mungkin mencari jalannya masing-masing untuk melanjutkan ideologi partai.

Salah satu contoh mantan pentolan PRD yang terus mencari alternatif adalah Coen Husein Pontoh yang bersama teman-temannya mendirikan media *online Indo-Progres*. *Indo-Progres* saat ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk lembaga intelektual-aktifis yang terus menyuarakan kritik terhadap *establishment*, baik yang ada di pemerintahan maupun dalam diskursus ilmu pengetahuan.

Bentuk dan suara kritis terhadap *establishment* kekuasaan dan politik bisa ditemukan dalam kelompok-kelompok yang melakukan praksis di lapangan, melalui riset aksi, dan pengorganisasian warga masyarakat yang terpinggirkan, seperti yang dilakukan oleh Sandyawan Sumardi dan Bosman Batubara (sekadar menyebut nama mereka sebagai contoh yang sedikit saya ketahui).

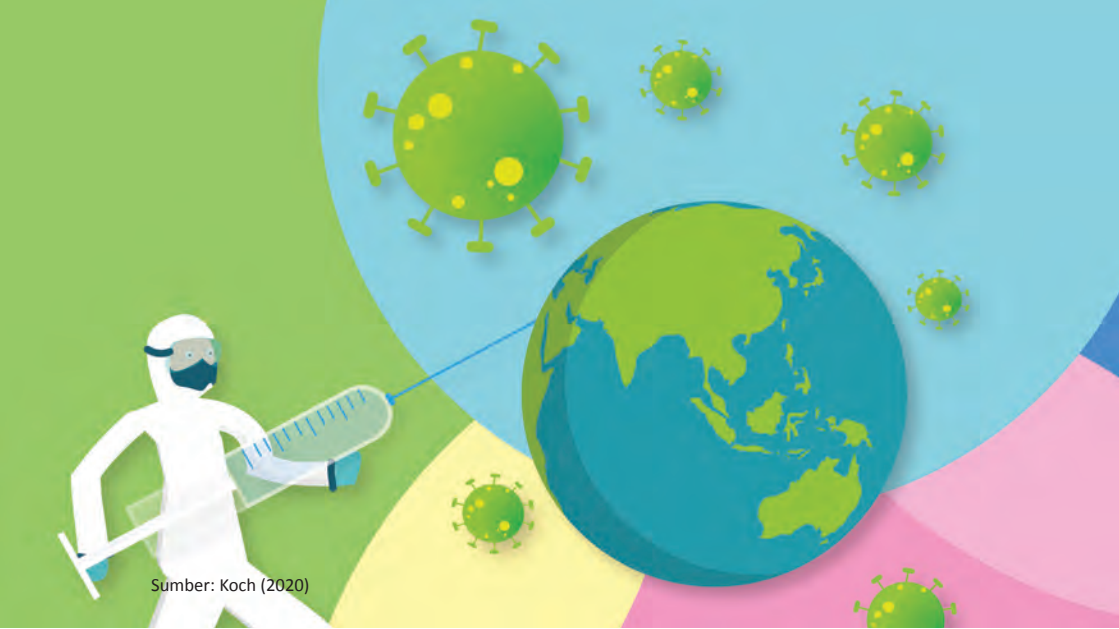
Mengutip kembali pernyataan Mochtar Pabottingi, 56 tahun pengkhianatan terhadap kemerdekaan bagi saya juga berarti dipasungnya “Daulat Rakyat” selama itu oleh elite-nya sendiri. Mungkin pada akhirnya, benar apa yang dikatakan Mochtar Pabottingi, di akhir artikelnya itu, “Dengan internalisasi dari semua modal yang nilainya tak terperikan itu, ajakannya pasti bukanlah sanggupkah kita, melainkan bersediakah kita?” (Pabottingi, 2021).



BAGIAN 2:

# Nasionalisme Masa Kini

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Koch (2020)

## 13. Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?<sup>17</sup>

Covid-19 merupakan sebuah tes bagi kepemimpinan politik. Kita saat ini bisa melihat model dan gaya kepemimpinan seperti apa yang tampil pada setiap level, mulai dari presiden, menko, menteri-menteri, anggota parlemen, pimpinan parpol, pemuka agama, gubernur, bupati, camat, dan kepala desa, dalam menangani masalah Covid-19 ini. Model atau gaya kepemimpinan tidak hanya menggambarkan cara berkomunikasi, tetapi yang paling penting adalah apakah bisa mengeksekusi kebijakan di lapangan secara efektif.

Ketika sebuah virus telah menjadi wabah yang menyerang seluruh masyarakat, dia bukan lagi sekadar masalah kesehatan, tetapi telah menjadi masalah politik. Seorang pemimpin harus menunjukkan apakah dia mampu mengatasi masalah ini atau

<sup>17</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 19 Mei 2020.

sebaliknya. Saat ini, terlihat para pemimpin dihadapkan pada keharusan menghentikan penyebaran virus yang jika dilakukan secara konsisten, berdampak pada ikut terhentinya aktivitas perekonomian sebagian besar warga, atau macetnya ekonomi pasar.

Pilihan rupanya telah diambil meskipun terkesan *trial and error*, yaitu dengan mulai melonggarkan pergerakan manusia untuk urusan-urusan yang esensial, disertai upaya mewajibkan mereka yang diizinkan bergerak untuk mematuhi protokol kesehatan. Pertanyaannya, sejauh mana protokol itu betul-betul bisa dijalankan mengingat rendahnya tingkat kepatuhan warga dan konsistensi ketegasan petugas? Dapatkah para pemimpin pemerintahan dalam setiap level memastikan efektivitas pilihan yang telah diambil ini?

Koronavirus menyerang siapa saja, mulai dari menteri, pe-sohor, sampai rakyat biasa. Namun, jangan menganggap orang biasa dan menteri sama nasibnya. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang terkena virus ini bisa sembuh karena memiliki fasilitas kesehatan kelas *VVIP*. Namun, berbeda halnya dengan tukang koran yang setiap pagi mengantar koran ke setiap rumah, dia belum tentu dapat sembuh karena harus mengantre masuk rumah sakit dan menunggu diobati, itu pun belum tentu mendapat tempat.

Pada Bab 2, saya sudah menunjukkan ada bias kelas dalam pandemi ini. Kenyataannya, Covid-19 menjadi masalah yang tidak berhenti pada mereka yang sakit, tetapi juga masyarakat luas. Masyarakat kelas bawah jelas yang paling rentan terkena virus dan dampak akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Jangan lupa juga, saat ini, proporsi penduduk dalam usia produktif (20–40 tahun), sedang besar-besarnya—yang disebut sebagai bonus demografi. Bayangkan jika mereka menganggur, bukankah akan terjadi malapetaka?

Koronavirus adalah makhluk buta yang akan menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Potensi terkena pun akan lebih

banyak pada mereka yang sehari-hari harus keluar rumah, seperti tukang koran, tukang sol sepatu, tukang sayur, pemulung sampah, tukang jok, atau tukang roti. Sementara itu, kita bisa WFH dan mengisolasi diri. Kelompok rentan inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari para pemimpin politik karena mereka juga warga negara, yang berdasarkan konstitusi harus dijamin memperoleh pekerjaan yang layak dan penghidupannya oleh negara.

Akibat Covid-19, banyak perusahaan mengurangi produktivitasnya, bahkan tidak sedikit yang bangkrut, kemudian para buruh dan pekerja informallah yang terkena imbasnya. Hampir bisa diduga, para ahli pun bisa menghitungnya, jumlah pengangguran atau setengah menganggur akan meningkat; penduduk miskin dan setengah miskin akan membengkak. Untuk menghindari bonus demografi, sebuah strategi yang radikal-struktural dibutuhkan, bukan strategi karitatif yang hanya berfungsi sebagai *pain killer*. Di sinilah letak tantangannya.

Menurut para ahli, hidup pasca-Covid-19 akan berubah. Akan ada *a new normality*, di tingkat global, nasional, dan lokal. Namun, hal tersebut dapat juga terjadi pada tingkat keluarga dan individu. *But, what kind of new normality?* Kita bisa berandai-andai tentu saja, tetapi *to be honest, we don't really know what the future will look like*. Namun, apa pun yang akan terjadi, sebagai sebuah masyarakat, sebuah bangsa, dan negara; masa depan itu mau tidak mau akan dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh model kepemimpinan seperti apa yang didapatkan pasca-Covid-19 ini.

Covid-19, di samping akan memakan ratusan atau bahkan ribuan korban meninggal, juga berdampak terhadap keuangan negara dan kehidupan perekonomian bangsa. Bagaimana negara akan mereorganisasi kekuasaannya di tengah krisis keuangan yang menerpa? Bagaimana krisis yang terjadi akan dimanfaatkan oleh mereka yang tidak suka dengan rezim Jokowi yang sedang berkuasa? Dan bagaimana mengubah krisis pandemi dan krisis keuangan menjadi krisis politik yang bisa menggulingkan Jokowi?

Inilah skenario terburuk dari dampak Covid-19, terjadinya pergantian kekuasaan politik. Selalu ada orang-orang yang ingin mengail di air keruh.

Selain mereka yang memang sudah lama menunggu momentum untuk menggulingkan Jokowi, mungkin jumlah mereka kecil, sebagian besar warga pada dasarnya ingin kembali hidup normal dan tenang, dan berharap para pemimpin politik dan agama, di setiap level, mampu mengatur kehidupan masyarakat kembali ke situasi sebagaimana semestinya. Di sinilah saya kira relevansi Covid-19 sebagai tes kepemimpinan. Akan terlihat mana pemimpin yang berhasil dan mana yang gagal; mana pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan masyarakatnya, dan mana yang memikirkan kepentingannya sendiri, terutama bagaimana kekuasaannya bisa *survive* di tengah krisis. Hal yang juga bisa terjadi adalah pemimpin yang menutupi kegagalan dengan menyalahkan pihak lain. Segala kemungkinan itu bisa terjadi, pada akhirnya kita harus realistis, *the real politics* yang akan bicara. Optimisme kita harus bertopang pada realisme.

Apa pun yang akan terjadi dan terlihat, masyarakat akan menjadi penilai keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Di era seperti saat ini, setiap detik informasi berseliweran di sekitar kita. Informasi sekarang bisa diproduksi dan direproduksi oleh siapa saja, dengan kecepatan yang tak terduga, tetapi dengan niat yang beragam juga, tidak sedikit dengan niat jahat untuk mendiskreditkan kepemimpinan seseorang. *Cyber war* sudah menjadi bagian dari kehidupan publik kita. *No free lunch!* Indonesia sudah sedari awal merupakan bangsa yang plural, beragam, dan aspirasi politik bisa bermacam-macam, tergantung identitas sosial, politik, dan budaya yang menjadi latar belakangnya. Sebagai masyarakat, apalagi yang mengaku berpendidikan, sudah seharusnya kita membaca berita secara cerdas, tidak *anut-grubyug* saja.

Covid-19, apakah akan berakhir cepat atau lambat, dampaknya sudah mulai bisa diduga dan dianalisis. Masyarakat kita sudah terbiasa dengan politik. Covid-19 ini pun akan berakhir pada bidang politik. Apakah Jokowi, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Sultan, Bu Risma, dan Khofifah—untuk menyebut beberapa pemimpin politik dan pemerintahan kita yang menonjol, dan semuanya di Jawa yang wilayahnya memiliki korban Covid-19 paling banyak—akan berhasil atau gagal menghadapi dan mengelola dampak serangan Covid-19 di wilayah kekuasaannya ini?

Covid-19 akan mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita. Covid-19 juga akan memaksa para pemimpin politik untuk mengubah gaya kepemimpinan mereka yang akan dibutuhkan saat transisi atau pasca-Covid-19 nanti. Pemimpin sejati harus visioner, dia harus mampu mengembangkan imajinasi untuk sebuah masyarakat baru pascapandemi. Kepemimpinan yang baru adalah kepemimpinan yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang.

Sementara itu, di luar Jawa, bukan berarti para pemimpin politiknya terbebas dari dampak Covid-19, kita tahu bahwa hampir seluruh provinsi saat ini telah terpapar oleh serangan virus yang mematikan ini. Sebagai warga negara, selain bersama-sama membangun kerja sama dan solidaritas melawan Covid-19—dan ini telah terlihat di mana-mana, sebagai bukti masyarakat kita bukan masyarakat yang pasif, melainkan aktif dan kreatif—kita harus menilai kiprah para pemimpin politik kita, apakah mereka pantas menjadi pemimpin saat ini dan di masa depan? Model kepemimpinan baru seperti apa yang akan menjadi pemenang? Tentu sebagai warga negara yang sadar, kita tidak bisa tinggal diam, dengan apa yang kita bisa, kita harus ikut membantu memikirkan dan mencari jalan keluar yang terbaik, meskipun pada akhirnya hanya waktu yang akan membuktikan.



Sumber: Buka (2020)

## 14. Kebangkitan Nasional dan *New Normal*<sup>18</sup>

Dua hari yang lalu, saya diminta oleh Forum Koordinasi Lintas Fakultas Alumni Universitas Indonesia (FOKAL UI) menjadi salah satu pembicara dalam acara webinar untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2020. Singkatnya waktu webinar membuat tidak adanya kesempatan untuk mendiskusikan materi yang saya sampaikan, selain beberapa pertanyaan melalui kolom *chat* dan sanggahan yang sangat penting untuk ditanggapi. Untuk kepentingan bersama, dalam tulisan ini, saya ingin sekali lagi menguraikan gagasan yang telah saya sampaikan dan menanggapi beberapa pertanyaan dari *audience* tentang permasalahan yang sedang dihadapi bersama.

Tema webinar yang diusung oleh FOKAL UI adalah “Kebangkitan Nasional Manusia Indonesia Memaknai *New Normal*”

<sup>18</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 22 Mei 2020.



(2020). Istilah *new normal* yang saya terjemahkan sebagai normal baru merupakan istilah baru yang muncul bersamaan dengan meluasnya pandemi Covid-19. Sejauh yang bisa saya tangkap, istilah dalam bahasa Inggris ini berasal dari Barat dan saya tidak tahu siapa yang memperkenalkannya pertama kali, tetapi tampaknya begitu saja diterima tanpa pernah dijelaskan duduk perkaranya. Meskipun demikian, ada semacam kesepakatan umum bahwa *new normal* adalah sebuah keadaan masyarakat yang sedang mengalami perubahan karena harus beradaptasi dalam tingkah lakunya sehari-hari, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Melihat faktanya, sampai hari ini, angka penduduk yang terjangkit Covid-19 terus bertambah, begitu juga dengan korban meninggal yang masih tinggi dan kita tidak tahu dengan pasti kapan keadaan ini akan berakhir.

Ketika saya diminta untuk mengaitkan normal baru dengan Kebangkitan Nasional, sebuah peristiwa politik yang sangat penting dalam sejarah bangsa ini, saya harus menempatkan normal baru dalam perspektif nasional, dalam level bangsa dan negara. Normal baru dalam perspektif ini berarti sebuah keadaan masyarakat yang baru, tidak saja dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang berkaitan dengan cara hidup sehat untuk menghindari Covid-19, tetapi lebih dari itu, saya memaknainya sebagai kebangkitan nasional baru. Hal itu karena dampak Covid-19 yang telah merasuk tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor-sektor vital lainnya, yang saya sederhanakan menjadi tiga, yaitu sektor politik, sektor ekonomi, dan sektor sosial-kebudayaan. Perubahan yang terjadi dalam ketiga sektor ini mencerminkan perubahan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru. Berubahnya ketiga sektor ini secara nasional akan mengakibatkan berubahnya kehidupan dalam level masyarakat, keluarga, dan individu.

Saya ingin memulai pembicaraan tentang kebangkitan nasional dan normal baru dengan mengingatkan kita semua akan dua tujuan yang melatarbelakangi berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perlu diketahui bahwa kedua tujuan ini kemudian menjadi tujuan yang dicantumkan dalam *Preamble* atau Pembukaan UUD 1945. Menurut saya, dua tujuan ini juga yang mendasari mengapa kita ingin merdeka dan menjadi bangsa yang berdaulat di tengah atau di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi, jika kita mendiskusikan tentang *new normal* akibat Covid-19, menurut hemat saya, normal baru yang kita imajinasikan itu, tidak terlepas dari *re-national awakening*, kebangkitan nasional baru dan *re-newing* dari niat kita mencapai dua tujuan itu. Dengan demikian, Covid-19 yang sedang kita hadapi dengan segala permasalahannya hari ini adalah sebuah *wakeup call* bagi bangsa ini untuk bangkit, tidak saja melawan Covid-19 tetapi juga sebuah *moment of truth* ingin menjadi bangsa dan negara macam apa kita ini sesungguhnya.

Dalam konteks kebangkitan nasional ini, “re-”, menjadi kunci untuk membicarakan normal baru. Ada tiga konsep yang saya usulkan di sini, yaitu re-organisasi, re-konstruksi dan re-strukturisasi. Dengan kata “re-”, berarti kita tidak bermaksud menciptakan sesuatu yang baru melainkan mereorganisasi, merestrukturisasi, dan merekonstruksi apa yang sudah ada. Namun, semua itu dipaksa berubah karena Covid-19 ini. normal baru, dengan demikian saya artikan sebagai “proses” dan “hasil” dari ketiga “re” ini. Perlu saya tegaskan di sini bahwa saya tidak mengusulkan sebuah re-orientasi karena orientasi kita masih tetap, yaitu dua tujuan mengapa kita mendirikan negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta seluruh warga negara tanpa kecuali.

Sebagai *wakeup call*, dampak Covid-19 ini akan mengubah sendi-sendi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa dan negara,

dan kita harus melihat tantangan besar ini sebagai peluang untuk *re-awakening* kebangkitan nasional. Ada dua kondisi objektif yang menurut saya paling mendesak untuk kita renungkan. Pertama, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dan kedua, rendahnya tingkat literasi bangsa kita dibandingkan bangsa lain. Kedua hal ini langsung memperlihatkan menjauhnya dua tujuan kebangkitan nasional tadi dengan realitas sosial yang kita miliki hari ini.

Dampak dan imbas Covid-19 ini akan terasa berat karena menusuk langsung pada kedua realitas sosial ini.

Dalam konteks normal baru ini, saya mengusulkan tiga hal sebagai kesimpulan, pertama, re-organisasi kekuasaan atau politik; kedua, re-strukturisasi perekonomian; dan ketiga, re-konstruksi sosial. Kekuasaan dan politik harus direorganisasi agar lebih mencerminkan kedaulatan rakyat, kehidupan perekonomian harus direstrukturisasi agar menciptakan kesejahteraan umum yang lebih adil, dan terakhir kehidupan bermasyarakat kita harus direkonstruksi agar lebih toleran, mampu bertenggang rasa antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat agar dalam normal baru, lebih terbangun rasa solidaritas sebagai sesama warga negara dan *sense of belonging*, rasa ikut memiliki bangsa dan negara ini.

Beberapa penanggap menanyakan apakah kita sesungguhnya memerlukan reformasi politik, dan bagaimana melakukan berbagai “re” yang diusulkan agar tidak menimbulkan masalah baru. Terkait sektor pendidikan, apakah yang dilakukan sebetulnya adalah merekonstruksi sistem pendidikan, terutama terkait rendahnya tingkat literasi bangsa ini? Berikut ini adalah tanggapan saya terhadap beberapa pertanyaan yang muncul dalam acara webinar FOKAL-UI tersebut.

Tanggapan saya, mengingat keterbatasan ruang dalam tulisan ini, saya rangkum menjadi satu, dan tentu tidak dapat memuaskan rekan-rekan yang bertanya tersebut. Jika ketiga “re”

yang saya usulkan dihubungkan dengan reformasi, reformasi kali ini berbeda dengan Reformasi '98 karena Reformasi '98 dipaksa oleh tekanan politik yang berasal dari luar (*exogenous*), sedangkan reformasi kali ini harus berangkat dari tekanan yang berasal dari dalam (*endogenous*). Menurut saya, reorganisasi kekuasaan dan politik haruslah berangkat dari kesadaran kita bahwa reformasi diperlukan untuk menjadikan politik benar-benar menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Dugaan saya, desakan dari dalam itu akan didorong oleh restrukturisasi ekonomi yang tampaknya harus dilakukan jika tidak ingin negara ini bangkrut.

Saya menyetujui rekonstruksi sistem pendidikan nasional karena saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengubah. Harapan saya, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, dengan *think-tank*-nya sudah menyusun agenda baru perubahan sistem pendidikan secara lebih mendasar dengan mempertimbangkan visi bangsa ini di masa depan.

Kebangkitan nasional yang baru harus tetap berorientasi pada dua tujuan awal kita sebagai bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Rendahnya tingkat literasi saat ini mencerminkan cita-cita kemerdekaan, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang selama ini telah terabaikan. Kesenjangan ekonomi yang menganga juga menunjukkan gagalnya pembangunan yang selama ini dilakukan. Jadi, kapan lagi untuk melakukan perubahan jika bukan sekarang? Dalam sebuah perubahan yang radikal, tentu akan muncul resistensi, tetapi ini juga tantangannya. Pemimpin politik sejati yang visioner adalah pemimpin yang mampu mengubah tantangan sebagai peluang.



Sumber: Getty Images (t.t.)

## 15. Hantu Komunisme: Sebuah Psikologi Politik<sup>19</sup>

Mengapa “hantu komunisme” masih diperdagangkan di negeri ini, sedangkan di negeri asalnya komunisme sudah dijual sebagai souvenir para turis? Bisri Effendy, di hampir penghujung tulisannya menuliskan, keuntungan politiklah yang menjadi tujuan perdagangan hantu komunisme ini (Effendy, 2020). Namun, karena tulisannya yang terlalu panjang, Bisri Effendy tidak menjelaskan mengapa perdagangan hantu itu diperdagangkan. Saya kira, pedagang hantu komunisme di negeri ini memang cukup cerdas, dengan sedikit ilmu psikologi, dia kemas komunisme yang memang sudah tidak ada lagi barangnya, menjadi barang yang kasat mata, seperti souvenir.

---

<sup>19</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 27 Mei 2020.

Dengan membicarakan hantu komunisme, kita sebenarnya memasuki sebuah wilayah yang bernama psikologi politik. Psikologi politik, secara sederhana bisa didefinisikan sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam bidang politik. Hantu (*demon*) selalu memiliki konotasi sebagai makhluk yang menakutkan, berbeda dengan bidadari (*angel*) yang selalu baik. Hantu adalah sebuah artefak yang dimiliki oleh semua kebudayaan. Setiap kebudayaan di dunia, juga di setiap daerah di Indonesia, memiliki hantunya masing-masing. Sebagai artefak, dia diciptakan oleh manusia sendiri, dia adalah bagian dari evolusi mental manusia. Hantu memiliki fungsi dalam setiap kebudayaan. Dia ada untuk melayani sebuah kepentingan bersama dari kelompok yang mendukungnya. Dia menjadi sesuatu yang riil dalam benak manusia-manusia yang memerlukannya.

Sebagai sebuah fenomena psikologi, hantu ada jika Anda membayangkan bahwa dia memang ada. Sekali lagi, dia ada di benak orang yang membayangkan bahwa dia ada. Apa yang ada di benak manusia menjadi objek kajian ilmu psikologi. Adanya tujuan politik di balik perdagangan hantu komunisme menjadikan isu ini masuk dalam ranah psikologi politik. Menempatkan hantu komunisme dalam ranah psikologi politik, membawa kita untuk meneropong dua hal: (1) motivasi yang mendorong mengapa hantu komunisme dijadikan komoditas perdagangan dan (2) motivasi politik apa yang ada di balik perdagangan hantu komunisme ini.

Menilik polanya, para pedagang hantu dibedakan ke dalam dua kelompok meskipun keduanya tidak terpisahkan. Kelompok pertama, adalah orang-orang yang memang secara sadar menciptakan hantu itu untuk menakut-nakuti orang. Sementara itu, kelompok kedua adalah orang-orang yang benar-benar ketakutan dengan hantu yang mereka ciptakan sendiri. Kelompok yang kedua ini mungkin memang memiliki pengalaman pribadi yang menakutkan mereka. Saat ini, yaitu ketika pengalaman

menakutkan telah menjadi bagian dari ingatan, akan membuat seseorang merasa takut jika membayangkan peristiwa yang telah menjadi hantu di benak mereka. Jika hantu ini berhubungan dengan peristiwa seputar tahun 1965, usia orang-orang ini sekarang sudah berusia 65 tahunan atau lebih, dengan asumsi, usia mereka 10 tahun atau lebih pada tahun 1965. Bagi kelompok ini, hantu komunisme bisa sangat kuat pengaruhnya karena rasa ketakutan (*guilty feeling*) akan kemungkinan balas dendam akibat perbuatan mereka dahulu.

Sebagai komoditas, hantu komunisme diperdagangkan oleh dua kelompok berbeda meskipun tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan sebuah iklim ketakutan (*climate of fear*) di masyarakat. Pedagang hantu yang kedua, jumlahnya tidak banyak lagi karena sebentar akan ditelan usia dan mati. Sementara itu, kelompok pedagang pertama, yang sebagian besar dilahirkan setelah tahun 1965, menjadi kelompok yang menarik untuk diperhatikan karena jumlah mereka lebih banyak dari kelompok yang kedua.

Kelompok pertama berbeda dengan kelompok kedua yang mengalami peristiwa 1965. Mereka sangat gencar dalam memperdagangkan hantu komunisme meskipun tidak pernah mengalami peristiwa 1965. Sangat mungkin kelompok pedagang hantu komunisme yang pertama, secara sosial-politik, berasal dari lingkungan yang sama dengan kelompok pedagang hantu kedua. Kelompok kedua yang sebentar lagi punah karena tidak mungkin menyelamatkan diri dari hukum alam, adalah kelompok yang paling berkepentingan untuk mewariskan kekayaan dari hasil perdagangan hantu ke kelompok pertama.

Hantu Komunisme sebetulnya bisa ditemukan di banyak negara dengan bentuk dan proses reproduksinya masing-masing sesuai dengan konteks psikologi politik yang ada dalam sejarah bangsa itu. Komunisme, seperti halnya sosialisme dan kapitalisme, merupakan ideologi yang bergerak pada tataran global dan

pada tahun 1950–1960-an menjadi bagian penting dari Perang Dingin (*Cold War*). Peristiwa 1965 bukanlah sekadar peristiwa lokal, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari Perang Dingin. Untuk bisa memahami Peristiwa 1965, akan keliru jika tidak menempatkannya dalam konteks geo-politik Perang Dingin. *Exogenous factors* jangan-jangan lebih kuat dari *endogenous factors* dalam peristiwa 1965.

Dilihat dari perspektif saat ini, perdagangan hantu komunisme, yang peristiwanya sendiri sudah lebih dari setengah abad lalu, secara umum mencerminkan masih kuatnya rasa tidak aman (*insecurity feeling*) dalam masyarakat. Rasa tidak aman ini adalah gejala psikologi politik yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan bisa dialami secara berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam masyarakat. Pembeli hantu komunisme mungkin adalah kelompok tertentu dengan latar belakang tertentu, tetapi yang perlu diperhatikan adalah imbasnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas. Sebagai bagian dari pengalaman yang traumatis dari bangsa ini, peristiwa 1965 telah menjadi ingatan kolektif bersama (*collective memory*) dan menjadi bagian dari *national psyche* bangsa ini.

Komunisme yang secara riil tidak ada lagi barangnya itu, oleh para pedagang (*ethnic enterpreuner*), hanya bisa direproduksi hantunya. Apa motivasi yang melatarbelakanginya? Effendy (2020) mengindikasikan adanya kepentingan politik di balik perdagangan hantu komunisme, tetapi kepentingan politik siapa dan untuk tujuan apa? Sebagai hantu, hantu komunisme diciptakan dan direproduksi oleh para pedagangnya sebagai *a portable political device* yang multifungsi. Selain untuk menciptakan *a climate of fear*, dalam saat-saat tertentu dia bisa dipakai untuk menggoyang kestabilan politik rezim yang sedang berkuasa. Sebagai *a portable political device* pun bisa efektif jika momentumnya pas dan psikologi politiknya mendukung.



Perdagangan hantu komunisme, seperti Covid-19, hanya bisa ditangkal jika masyarakat memiliki daya imunitas yang kuat karena merasa aman. Seperti Covid-19, hantu komunisme harus dilawan karena bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Para pedagang hantu komunisme dari kelompok kedua pasti akan habis dalam waktu paling lama sepuluh tahun ke depan, tetapi mutasinya ada pada kelompok pertama, dan harus mendapat perhatian. Jika diperhatikan lebih serius, para pedagang hantu komunisme ini jangan-jangan hanya pedagang perantara, semacam agen pemasaran dari sebuah perusahaan besar.

Dengan demikian, sebagai kesimpulan sementara, kita harus mulai meneliti siapa di belakang para pedagang perantara ini. Siapa yang sesungguhnya mempekerjakan para agen pemasaran ini. Mungkinkah itu sebuah ideologi yang takut dan antikomunisme meskipun yang ada hari ini hanya hantunya?



Sumber: Supri (2020)

## 16. Lima Puluh Tahun Rekayasa Sosial: 5 Bias dan 5 Mitos<sup>20</sup>

Peristiwa berdarah 1965 telah mengubah arah sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa yang menjadi *proxy war* Perang Dingin itu telah membuat Indonesia tidak lagi “mendayung di antara dua karang”, seperti diibaratkan Bung Hatta, tetapi telah kandas di salah satu karang. Pada Mei 1966, di kampus UI Salemba, Jakarta, digelar sebuah simposium bertajuk “Kebangkitan Semangat 66: Menjelajah Tracee Baru”. Perhelatan yang ditaja organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) ini, menjadi mimbar sebagian tokoh yang berperan penting dalam pemerintahan yang baru karena dari simposium inilah agenda pemerintahan diletakkan.

<sup>20</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 10 Juni 2020.

Di antara para tokoh yang rata-rata berusia muda itu, salah satunya adalah Widjojo Nitisastro, yang menyampaikan makalah berjudul “Menyusun Kembali Sendi-Sendi Ekonomi dengan Prinsip-prinsip Ekonomi”. Ketika Soeharto menjadi presiden, Widjojo Nitisastro menjadi arsitek utama pembangunan ekonomi dari pemerintahan baru yang bernama Orde Baru. Sejak 1969, dimulai pembangunan lima tahunan (Repelita) yang secara konsisten dijalankan sampai akhir Orde Baru (1998). Bersamaan dengan pembangunan ekonomi yang terencana, dilakukan reorganisasi politik dengan melebur partai-partai menjadi dua partai politik, yaitu PPP yang mewakili partai-partai Islam dan PDI yang mewakili kaum partai-partai nasionalis. Sementara itu, para penguasa membesarkan GOLKAR sebagai partai penguasa. Rekayasa sosial yang dilakukan Orde Baru terbukti berhasil bertahan sampai 32 tahun sebelum dilanda krisis yang mengakhirinya pada Mei 1998.

Meskipun pasca-Mei 1998—yang disebut sebagai Periode Reformasi—ditandai oleh reorganisasi kekuasaan, tetapi terbukti tidak menghasilkan perubahan yang berarti karena secara politik Indonesia tetap dikuasai oleh oligarki dan pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pemerataan. Pada awal Reformasi, memang ada beberapa inovasi politik yang dilakukan, antara lain dibukanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, tidak diperlukan lagi izin menerbitkan surat kabar, dan berbagai perubahan yang memberikan keterbukaan lebih luas bagi ruang publik.

Perubahan yang cukup penting meskipun terbukti juga tidak banyak mengubah keadaan masyarakat, adalah disusnya Undang-Undang Desentralisasi yang memberikan otonomi pada Pemerintah Tingkat II (Kabupaten/Kota), bukan pada Pemerintah Tingkat I (Provinsi). Kekhawatiran akan terjadinya pemisahan provinsi dari pemerintah nasional, menjadi dasar dari diberikannya otonomi ke tingkat II. Davidson (2018) membagi 20

tahun pasca-Reformasi 1998 menjadi tiga periode, yaitu Inovasi (1998–2004), Stagnasi (2004–2014), dan Polarisasi (2014–2018). Pergantian presiden yang berlangsung melalui cara yang lebih demokratis daripada masa sebelumnya, ternyata tidak mampu mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Transformasi sosial sebagai hasil dari rekayasa sosial (*social engineering*) yang berlangsung sejak tahun 1970 hingga sekarang ternyata telah menghasilkan struktur masyarakat yang penuh ketimpangan, kedaulatan masih belum menjadi milik rakyat, dan negara terus dikuasai oleh kartel dan oligarki politik.

Pandemi meluas melalui migrasi atau mobilitas penduduk yang berlangsung secara horizontal dalam ruang geografis, bisa antarkota, desa-kota atau sebaliknya, antarprovinsi, antarpulau atau antarnegara. Mobilitas penduduk secara horizontal dapat diikuti oleh mobilitas vertikal ketika migran meningkat status sosial-ekonominya. Transformasi sosial diartikan sebagai perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dan melibatkan banyak faktor, salah satunya migrasi. Transformasi sosial tidak selalu bersifat positif, dalam arti meningkatkan kualitas kehidupan sebuah masyarakat, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya, bahkan pada sebuah masyarakat yang diwarnai ketegangan dan konflik. Papua dan Papua Barat mungkin adalah contoh wilayah yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Migrasi merupakan faktor penting dalam transformasi sosial. Dalam sejarah umat manusia, migrasi menjadi faktor utama perkembangan peradaban. Dalam konteks Indonesia, dapat disaksikan hubungan timbal balik, antara migrasi dan transformasi sosial, dan saya ingin melihat hubungan ini secara historis, yaitu sejak awal Orde Baru hingga saat ini.

Dengan menggunakan migrasi sebagai lensa, saya mencatat ada lima isu ketimpangan yang juga merefleksikan “bias” yang mendominasi diskursus dan praktik transformasi sosial kita selama 50 tahun.

Ketimpangan desa-kota (*urban bias*): Migrasi penduduk dari desa ke kota, secara signifikan yang dimulai sejak awal Orde Baru, yaitu tahun 1970-an, bersamaan dengan masuknya modal asing, berkembangnya industri manufaktur di sekitar kota terutama Jakarta dan Surabaya, introduksi teknologi pertanian, bibit unggul, pestisida, dan *green revolution*. Jika dihitung, sejak hari ini, proses transformasi sosial besar ini telah berlangsung setengah abad, tanpa henti, tetapi hasilnya adalah sektor informal membengkak di perkotaan dan sektor pertanian yang makin tertinggal.

Ketimpangan Jawa-luar Jawa (*Java bias*): Selama Orde Baru, program pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa (transmigrasi) dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Transmigrasi juga dianggap solusi untuk swasembada pangan, antara lain melalui Program Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah untuk mencetak sawah, namun gagal. Luar Jawa terus dijadikan lokasi industri ekstraktif yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan peminggiran komunitas-komunitas adat yang hidupnya bergantung dari hasil hutan. Akibat bias ini, daerah luar Jawa akan menjadi makin miskin dan Jawa makin kaya. Putra-putra terbaik bangsa ini akan terkonsentrasi di Jawa dan meninggalkan luar Jawa.

Ketimpangan migran dan nonmigran (*migrant bias*): Selain melalui transmigrasi, penduduk melakukan migrasi secara spontan, terutama karena adanya tradisi merantau (*ethnic migration*), seperti yang dilakukan oleh orang Minangkabau, Banjar, Bugis, Buton, dan Madura. Tidak jarang, mobilitas horizontal diikuti oleh mobilitas vertikal karena akumulasi status ekonomi komunitas migran dianggap menggeser komunitas nonmigran (penduduk setempat). Konflik komunal 1999–2000 di Sambas, Sampit, Poso, dan Ambon adalah refleksi dari *migrant bias* ini.

Buruh migran (*remittance bias*): Mengalirnya buruh migran ke berbagai negara penerima untuk mengisi kekosongan kebutuhan tenaga kerja di 3D's Sectors (*dirty, dangerous, difficult*). Sejak awal tahun 1980-an sampai sekarang, negara gagal dalam menyediakan lapangan kerja dan melindungi warga negara dari *human trafficking* dan *human right abuse* yang sering dialami oleh buruh migran. Pertimbangan mendapatkan *remittance* yang jumlahnya besar, telah menyisihkan pertimbangan negara dalam melakukan perlindungan dan mengutamakan segi pengerahan yang jika tidak hati-hati, akan menjadikan negara sebagai bagian dari *human trafficking busines*.

Ketimpangan Papua (*racial bias*): Apa yang terjadi secara terus menerus di Papua, sejak Pepera tahun 1969 dan masuknya Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia tahun 1970, persis terjadi setengah abad yang lalu dan yang terakhir kita saksikan, protes besar antirasisme pada bulan Agustus–September 2018 di berbagai kota di Papua, memperlihatkan kompleksitas hubungan antara ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, rasisme, dan politik yang telah berlangsung lama dan menjadi sangat serius di Papua.

Kelima bias yang menghasilkan berbagai ketimpangan itu, didukung oleh lima mitos politik yang tampaknya hidup dalam *national psyche* kita bersamaan dengan berkembangnya lima bias di atas. Jika bias merupakan sebuah hasil dari proses sosial yang sifatnya empiris, mitos merupakan hasil dari proses psikologis yang lebih sering tidak memiliki dasar empiris. Kelima mitos itu adalah sebagai berikut:

- mitos kesatuan yang mematikan persatuan,
- mitos pertumbuhan yang menafikan pemerataan,
- mitos keharmonisan yang mengaburkan peminggiran,
- mitos demokrasi yang mengesampingkan kedaulatan rakyat, dan
- mitos negara hukum yang mengabaikan martabat kemanusiaan.

Permasalahannya, bias dan mitos ini dalam prosesnya telah menjadi bagian dari institusi atau menjadi institusi itu sendiri (*embedded institution*) dan sering kali mendasari pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan negara. Transformasi sosial, sebagai hasil dari rekayasa sosial kita selama setengah abad, sejak awal Orde Baru hingga saat ini, telah menghasilkan sebuah struktur sosial yang timpang. Covid-19 telah membuka mata terhadap ketimpangan itu. Struktur sosial yang timpang ini menjadikan masyarakat rentan (*vulnerable*) terhadap guncangan sosial, krisis ekonomi, dan gejolak politik. Ketahanan sosial kita saat ini, saya khawatir, sedang dalam tingkat yang rendah.





Sumber: BNA Photographic (1970)

## 17. Tentang Mitos Politik dan Tabu-tabunya<sup>21</sup>

Pada Bab 16, disebutkan adanya lima mitos tanpa memberikan elaborasi berkenaan dengan mitos-mitos itu. Dalam bab tersebut juga hanya dikemukakan secara singkat perbedaan antara bias dengan mitos. Pada bab ini, akan dikemukakan sebuah elaborasi yang sedikit lebih jauh tentang kelima mitos itu dan hubungannya dengan bias-bias yang muncul.

Mitos adalah sesuatu yang ada di benak manusia. Oleh karena itu, ia bukan sesuatu yang riil atau kasat mata. Mitos biasanya menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat; ada karena diperlukan; dan mempunyai fungsi tertentu dalam kebudayaan tersebut. Dalam tulisan ini, mitos yang dibicarakan adalah mitos politik (*political myth*) yang terbentuk atau sengaja dibentuk dalam

<sup>21</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 12 Juni 2020.



proses rekayasa sosial oleh pemerintah Orde Baru pasca-1965. Tudor (1972) dalam bukunya, *Political Myth*, mengemukakan hal sebagai berikut.

*“A political myth is an ideological narrative that is believe by social groups.”*

*“...myths are believed to be true even if they may be false, and they are divices with dramatis construction used in order to come to grip with reality”* (Tudor, 1972)

Jadi meskipun mitos merupakan keyakinan yang tidak memiliki basis empiris, namun dia dibentuk dalam kaitan yang riil dalam sebuah masyarakat. Orde Baru yang didirikan dari bangkai Orde Lama harus menciptakan mitos-mitos politik untuk menopang kekuasaannya. Mitos-mitos politik diperlukan oleh Soeharto dan Orde Baru karena kekuasaan yang ada di tangannya, diperoleh bukan melalui jalan damai, melainkan jalan yang penuh kekerasan dan memakan banyak korban. Mitos politik perlu dibangun untuk membenarkan tindakan brutal sekaligus menghapus rasa bersalah yang selalu menghantui akibat tindakan brutal tersebut.

Dalam sebuah seminar di Universitas Leiden beberapa tahun yang lalu tentang sejarah *political violence* di Indonesia, Bob Elson, seorang sejarawan Australia yang menulis buku tebal biografi politik Soeharto, menggambarkan bahwa Soeharto adalah seseorang yang takut dengan massa rakyat. Oleh karena itu, selama berkuasa, dia tidak pernah memberi ruang sedikit pun pada rakyat untuk membangun kekuatan massanya. Soeharto sangat berbeda dengan Bung Karno yang sangat dekat dengan massa rakyat.

Penggambaran Soeharto yang memiliki rasa takut dan tidak berempati, percaya terhadap dan dari rakyat, memerlukan dibangunnya mitos-mitos politik untuk mengukuhkan kekuasaannya yang antirakyat itu. Soeharto dan Orde Baru membangun

basis kekuasaannya berdasarkan dua paradigma utama. Pertama, pembangunan ekonomi, dan kedua, integrasi nasional. Kedua paradigma itu berakar dari kebutuhan untuk mencari legitimasi kekuasaan yang diperolehnya melalui jalan kekerasan.

Kelima mitos politik yang disebutkan dalam tulisan terdahulu hanya dapat dipahami dalam konteks kebutuhan akan sebuah narasi ideologi, *in order to come to grip with reality*. Soeharto menyadari bahwa kekuasaannya dibangun dari fondasi yang rapuh. Rakyat yang dalam politik memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpinnya, menjadi ancaman (*threats*) bagi Soeharto. Rakyat sebagai *the perceived threat*, harus diatasi oleh Soeharto dengan membangun mitos-mitos politik yang berisi narasi-narasi ideologis yang mampu mendekatkannya dengan realitas. Melalui dua paradigma yang dipilihnya, yaitu pembangunan ekonomi dan integrasi nasional, Soeharto, sampai tingkat tertentu, berhasil menepis ancaman yang dilihatnya, yaitu rakyat. Lima mitos politik yang kemudian dibangun bisa dipahami dalam konteks dua paradigma tersebut.

Mitos kesatuan yang mematkan persatuan. Mitos politik ini menarasikan tentang ancaman yang bersifat laten terhadap keutuhan “negara kesatuan” dari ideologi-ideologi lain, golongan ekstrem kiri maupun kanan, dan gerakan separatisme maupun kelompok-kelompok oposisi yang dipersepsi akan melakukan tindakan “makar” terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Ketika Orde Baru, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) merupakan tabu-tabu yang menjadi turunan dari mitos politik ini. Setelah Reformasi, turunan dari mitos politik yang sampai hari ini bergaung cukup kuat adalah “NKRI Harga Mati”, sebuah mantra yang diucapkan tanpa tahu makna dan implikasinya yang bisa membahayakan bangsa dan negara. Mitos politik kesatuan ini mungkin yang paling banyak melahirkan berbagai tabu, mulai dari bahaya laten PKI, separatisme, xenofobia, sampai LGBT sebagai ancaman terhadap kepribadian bangsa. Kita perlu melihat

secara kritis bahwa yang diperlukan adalah persatuan, saat keragaman dan perbedaan harus dirayakan untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang diam-diam terkikis dari bangsa dan negara ini.

**Mitos pertumbuhan yang menafikan pemerataan.** Mitos politik ini sangat kuat dianut oleh para ekonom-teknokrat Orde Baru. Meskipun setelah Era Reformasi ada modifikasi dalam kebijakan ekonomi, tetapi ideologi dasarnya tetap diteruskan, bahkan cenderung menguat bersamaan dengan menguatnya ideologi neo-liberal yang menguasai dunia. Agenda pertumbuhan mengakibatkan pemerataan pendapatan sesuatu yang tidak relevan karena negara tidak berdaya dalam memengaruhi mekanisme ekonomi pasar. Mungkinkah krisis akibat pandemi akan mendorong terjadinya restrukturisasi ekonomi? Mungkin tidak karena krisis akan mendorong para ekonom-teknokrat dalam pemerintahan Jokowi mencari cara bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar tidak terjerembap lebih dalam hingga di bawah 0%. Petani, buruh, dan nelayan makin kokoh menjadi bagian dari mitos negara agraris dan negara maritim.

**Mitos keharmonisan yang mengaburkan peminggiran.** . Mitos politik ini terus dianut sejak zaman Soeharto hingga sekarang karena memberikan rasa aman bagi penguasa dan elite politik. Kenyataannya, masih ada diskriminasi dan eksklusivitas terhadap kelompok-kelompok minoritas sebagai kelompok sesat atau menyimpang, seperti Ahmadiyah, Syiah, agama-agama lokal, dan mereka yang dianggap kelompok LGBT. Belum lama ini, mitos keharmonisan ini mendapatkan tantangan ketika penduduk Papua diperlakukan tidak adil karena dianggap berasal dari ras yang rendah dan berbeda. Apa yang terjadi di Amerika, dalam bentuk gelombang protes *Black Live Matters*, sesungguhnya bukan sesuatu yang tiba-tiba berpengaruh terhadap munculnya protes serupa di tanah air. Gelombang protes telah terjadi di Indonesia pada Agustus–September 2018, yaitu ketika kota-kota di Papua

berkobar sebagai gerakan perlawanan terhadap menguatnya rasisme dan perlakuan buruk mahasiswa Papua di Jawa. Meskipun politik SARA seperti telah ditinggalkan, namun ternyata, tabu-tabunya terus dihidupkan sampai sekarang.

### **Mitos demokrasi yang mengingkari kedaulatan rakyat.**

Demokrasi merupakan sebuah mitos politik yang terus dipercaya meskipun dalam praktiknya mengebiri prinsip dasarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Berbeda dengan pemilihan pada masa Orde Baru yang selalu dimenangkan oleh Golkar sebagai *the ruling party*, pada Masa Reformasi, sistem multipartai membuat partai-partai harus melakukan koalisi. Namun, akibat dari perpolitikan oligarki ini adalah menjamurnya transaksi-transaksi dan *money politics* yang makin kuat. Sebuah buku berjudul *Democracy for Sale* (2019) menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak berdaya dan kedaulatan rakyat sesungguhnya telah tergadaikan. Dalam situasi ketika politik seolah-olah sudah demokratis menjadi tabu, ada sekelompok orang yang ingin mendiskusikan hal-hal yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, baik dalam kebijakan negara, UU, atau konstitusi. Berpikir kritis sebagai prasyarat kebebasan mimbar akademis, makin dikerdilkan dan menjadi tabu bagi mahasiswa dan insan akademis untuk mendiskusikan berbagai isu yang dianggap sensitif dan ditafsirkan akan membahayakan negara.

**Mitos negara hukum yang mengabaikan martabat kemanusiaan.** Pasangan dari mitos demokrasi adalah negara hukum karena asumsinya masyarakat yang demokratis harus dilandasi oleh tegaknya hukum (*the rule of law*). Namun, bukan rahasia lagi negara hukum hanyalah sebuah mitos politik karena hukum hanya sekadar alat politik dari yang memiliki kekuasaan, baik berupa kuasa politik maupun kuasa modal (kapital). Selain pembuatan undang-undang telah dibuat menjadi proyek (Prolegnas) hampir setiap RUU yang diusulkan oleh presiden atau parlemen, selalu mengundang protes dari masyarakat. Dari situasi

itu, tidak sulit menengarai betapa UU yang dibuat selalu memiliki agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari kelompok kepentingan, terutama aliansi antara elite politik dan para pemilik modal, yang jelas tidak akan mewakili kepentingan rakyat banyak.

Mitos-mitos politik, sebagaimana diungkapkan oleh Tudor (1972), merupakan narasi ideologis yang digaungkan melalui berbagai cara untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Mitos ini diciptakan untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan untuk menjalankan otoritasnya. Setelah Reformasi, seharusnya terjadi perubahan karena pemerintahan pasca-Reformasi telah membangun legitimasinya berdasarkan pemilihan umum yang lebih demokratis. Namun, sebuah kenyataan tampak terlihat aneh karena mitos-mitos politik yang diciptakan Orde Baru terus digunakan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca-Reformasi. Mengacu pada analisis Robinson dan Hadiz (2004) pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke pasca-Orde Baru memang tidak mengubah secara fundamental basis politik Indonesia, tetapi menurut mereka, yang terjadi hanyalah sebuah “reorganisasi kekuasaan” belaka, yaitu pelakunya berganti, tetapi ideologinya tidak. Di tengah pandemi ini, mitos-mitos politik dan tabu-tabu bisa menguat, sebagai *defense mechanism* dari otoritas kekuasaan yang goyah. Sebagai warga negara, kita tidak ingin itu terjadi. Untuk itu, akal sehat (*common sense*) harus didahulukan agar kewarasan publik tetap terjaga.



Sumber:  
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

## 18. Pancasila dan Ketakutan-Ketakutan Kita<sup>22</sup>

Seorang teman mengirimkan rekaman orasi Yudi Latif yang disampaikan pada acara Haul ke-13 wafatnya intelektual Islam Indonesia paling terkemuka, Nurcholish Madjid (Cak Nur society, 2018). Di orasi yang cukup singkat itu, saya melihat dan mendengar bagaimana satu per satu dari kelima sila dalam Pancasila ditafsirkan melalui kacamata Islam, atau bisa juga dilihat sebaliknya, bagaimana Islam ditafsirkan melalui kacamata Pancasila.

Menurut pendapat saya, itu merupakan sebuah sintesis yang luar biasa mencerahkan. Sebagai seorang warga negara, saya bersyukur ada intelektual muda Islam yang menekuni Pancasila secara mendalam dengan komitmen pencarian agenda masa

<sup>22</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, tanggal 27 Juni 2020.

depan kebangsaan, seperti Yudi Latif. Bagi saya, substansi orasi Pancasila melalui YouTube itu menepis dan mengobati gejala ketakutan-ketakutan yang diam-diam kita idap sebagai sebuah bangsa. Kita mendapatkan pencerahan bahwa Pancasila bukanlah sekadar sebuah kompromi atau ideologi gado-gado untuk meredakan terjadinya konflik politik, terutama karena ada sebagian kalangan Islam yang masih menginginkan sebuah ideologi yang menonjolkan keislaman.

Orasi itu menegaskan bahwa keinginan untuk menolak Pancasila, sesungguhnya tidak lagi memiliki dasar pijakan. Namun, yang juga tidak kalah penting dari orasi itu adalah masih kuatnya kekhawatiran sebagian kalangan nasionalis bahwa Pancasila harus diwujudkan dalam sebuah undang-undang. Undang-undang yang menegaskannya sebagai haluan negara dan mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara dan pemerintah bekerja agar tidak menyeleweng dari Pancasila. Keinginan seperti ini adalah kekonyolan yang hanya akan berakibat pada pengerdilan dan pemfosilan Pancasila.

Orasi Yudi Latif sangat penting karena berhasil menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis Indonesia yang memiliki konfigurasi sosio-geografis dan sejarah politik yang berbeda dengan negara-negara lain. Islam adalah sebuah agama besar yang dianut oleh masyarakat dari berbagai bangsa dan negara. Meskipun Islam dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menurut Yudi Latief, tidak berarti membuatnya memiliki klaim untuk menentukan ideologi bangsa, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang mampu mempersatukan keragaman dalam sebuah landasan yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Uraianya tentang sila pertama, dengan memberi makna kata “esa”, dengan tafsirnya yang mengacu pada pandangan-pandangan berbagai tradisi agama, tidak hanya Islam, memperlihatkan

erudisinya yang menukik dalam sekaligus mengangkat ketinggian makna ketuhanan dari pemahaman yang saat ini terkesan *wantah* dan dangkal. Pancasila, sebagaimana pertama kali dipidatoken oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK, memang bergulir dan berproses sampai pada bentuk tekstualnya, yang dikenal dan dipakai sekarang. Proses perkembangan dan perubahan teks Pancasila memantulkan proses negosiasi politik yang terjadi dan penafsiran terhadap teks Pancasila, mau tidak mau mengharuskan kita untuk selalu kembali pada konteks negosiasi politik itu. Kelebihan Yudi Latif dalam memberikan penafsiran adalah dengan mengartikulasikannya sebagai sebuah tantangan yang dihadapi hari ini. Sebuah tantangan yang wajar jika tidak terbayangkan sepenuhnya oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tiga perempat abad yang lalu, yaitu sebelum terjadinya Perang Dingin, Peristiwa 1965, kejatuhan dirinya, Orde Baru, runtuhnya Tembok Berlin, *War on Terror*, revolusi teknologi informasi, *global warming*, dan krisis akibat pandemi Covid-19.

Kedangkalan dan kewantahan dalam menafsirkan Pancasila inilah yang ingin dijebol oleh Yudi Latif dalam orasi yang disampaikan dalam Haul ke-13 Nurcholish Madjid, yang mencetuskan salah satu kredonya pada awal tahun 1970-an, *Islam Yes and Partai Islam No*. Nurcholish Madjid sama seperti Yudi Latif, dia sangat menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh sebuah republik yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam. Keduanya—seperti mendiang Gus Dur dan intelektual Islam, Buya Syafii Maarif—mengerti dengan baik bahaya besar ketika Islam berubah menjadi ideologi politik yang diusung oleh partai Islam. Islam, bagi Nurcholish Madjid, Gus Dur, Buya, dan Yudi Latif harus diangkat ke ketinggian sehingga mampu melihat hutan, tidak hanya sibuk berkutat melihat pohon-pohon.

Partai Islam sebagai pengejawantahan Islam tidak lain hanyalah bentuk politisasi Islam dan pendergihan Islam sebagai alat mobilisasi politik. Islam sebagai partai politik ditolak oleh



Nurcholish Madjid dan Yudi Latif, juga saya kira Gus Dur dan Buya Syafii karena mencerminkan kedangkalan memaknai Islam dan kegagalan menempatkan Islam sebagai sumber nilai-nilai luhur yang memancar dari ketinggian dan mencerahkan siapa pun yang berada di bawahnya. Setiap upaya untuk menginstitusionalisasikan Islam sebagai bagian dari kerja-kerja politik dalam masyarakat, selalu berisiko meredusir Islam dalam fungsinya sebagai sebuah instrumen politik. Instrumentalisasi Islam mungkin memang tidak terhindarkan, tetapi, baik Nurcholish Madjid maupun Yudi Latif, selalu mengingatkan untuk menempatkan kembali Islam dalam kedudukannya sebagai sumber pencerahan di ketinggian itu.

Seperti halnya Islam sebagai sebuah sumber pencerahan yang harus ditarik ke atas, ke sebuah ketinggian, Pancasila, menurut Yudi Latif juga harus ditempatkan dalam ketinggian untuk bisa menerangi apa saja yang terletak di bawahnya. Sejak pertama kali dipidatokan, Pancasila akan selalu berada dalam berbagai tegangan politik, yaitu tegangan politik tertarik terlampaui ke kiri atau terlalu ke kanan. Dalam pergerakan pendulum politik yang bersifat horizontal itu, Pancasila akan selalu menghadapi risiko untuk didegradasi sebagai instrumen untuk kepentingan politik jangka pendek. Instrumentalisasi Pancasila bisa dilihat dalam dua bentuk, yaitu mengonstruksinya sebagai mitos dan petunjuk praktis dalam tingkah laku sehari-hari.

Sebagai mitos, Pancasila dipercaya mengandung mantra ke-saktian. Masyarakat tidak perlu repot-repot menafsirkan Pancasila karena mitos hanya butuh dipercaya. Tidak perlu penjelasan bagaimana kelima sila menjadi senjata ampuh yang telah menyelamatkan sebuah bangsa dari mereka yang dianggap oleh penguasa sebagai pengkhianat bangsa, atau mereka yang ingin mengubah dasar negara; ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan kaum separatis. Sebagai mitos yang sakti, Pancasila adalah palu gada yang siap menggebuk mereka yang dicap sebagai golongan anti-Pancasila.

Sementara itu, sebagai petunjuk praktis yang diharapkan bisa menjadi pedoman bertingkah laku sehari-hari warga negara, instrumentalisasi Pancasila diwujudkan melalui berbagai bentuk indoktrinasi, pedoman, dan peraturan perundang-undangan.

Kedua bentuk instrumentalisasi Pancasila itu, sebagai mitos atau pedoman praktis, bermuara dari adanya rasa khawatir dan ketakutan, terutama dari yang sedang berkuasa di republik ini, seolah-olah ada yang sedang mengancam Pancasila, ada yang ingin menyelewengkan, bahkan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Dalam psikologi politik, ada yang disebut sebagai *perceived threats*. *Perceived threats* adalah ancaman sebagai hasil persepsi, bukan ancaman sebagai sebuah realitas. Ancaman itu ada di benak para penguasa yang kebetulan sedang memegang kekuasaan di negeri ini, atau setidaknya merasa sedang menguasai negeri ini.

Sebagai hasil persepsi, ancaman itu sering sejatinya didasari oleh rasa ketakutan akan kehilangan kekuasaan yang sedang digenggamnya. Ada pencuri yang dibayangkan akan mencuri kekuasaan mereka. Ketakutan-ketakutan di sekitar kita sering kali bersifat ilusif, bersumber dari rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, dan ingin berlindung di balik Pancasila. Orasi Pancasila Yudi Latif itu mengingatkan kita, terutama yang sedang berkuasa, tentang bahaya pengerdilan dan pemfosilan Pancasila.



Sumber: Hakim (2015)

## 19. Papua di Mata Pusat dan Indonesia *as a Common Project*<sup>23</sup>

Di mata pusat, Papua adalah daerah pinggiran yang kaya sumber daya alam sehingga tidak boleh dilepaskan. Ketika Bung Karno berkuasa, Papua tidak boleh lepas, mungkin bukan karena kekayaannya, tapi karena orangnya. Orang Papua, di mata Bung Karno, harus dimerdekan dari Belanda, seperti orang Indonesia di wilayah republik yang lain. Seperti di daerah lain, Bung Karno memiliki afinitas dengan tokoh dan pemimpin daerah. Bung Karno selalu menyerahkan kepemimpinan daerah pada tokoh daerah. Sebelum Papua sepenuhnya menjadi wilayah republik, Soekarno pun sudah memilih Elias Jan Bonai, kemudian Frans Kaisiepo sebagai gubernur Irian Barat, nama Papua saat itu. Setahun setelah PBB secara resmi menyerahkan Papua ke Republik

<sup>23</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, tanggal 18 Juli 2020.

Indonesia (1969), Bung Karno wafat (1970). Setelah itu, saya kira, pusat melihat Papua bukan karena orangnya, tetapi karena kekayaannya. Sikap pusat yang memandang Papua seperti inilah yang menyebabkan mengapa selama lima puluh tahun Papua bersama Republik Indonesia, penduduknya tidak bahagia, dan selalu saja ada yang ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Akal sehat (*common sense*) pasti akan mengatakan persoalannya bukan pada orang Papua, tetapi bagaimana pusat memperlakukan Papua.

Selama pusat melihat Papua karena kekayaannya, bukan melihat orangnya, Papua akan terus resah karena penduduknya merasa “tidak diorangkan”; di bawah Republik Indonesia, hidup merasa tidak sejahtera; tidak aman karena ketegangan; dan konflik ada di mana-mana. Ada iklim ketakutan (*climate of fear*) yang membuat hidup terasa tidak nyaman. Saya merasakan iklim yang sama ketika melakukan penelitian di Timor Timur awal tahun 1990-an, dan keresahan itu paling terlihat pada anak-anak muda. Waktu 50 tahun bukan waktu yang pendek untuk membuat orang Papua memiliki *sense of belonging* terhadap Republik Indonesia, tetapi mengapa masih selalu terjadi protes terhadap pusat? Mengapa protes terhadap pusat setiap kali bisa mencapai titik didih yang tinggi dan Papua menjadi perhatian dunia internasional? Ketika gelombang protes terhadap tindakan rasialis terhadap mahasiswa Papua dilakukan merata di semua kota di Papua, nalar kita mengatakan pasti ada keresahan yang merata dirasakan oleh orang Papua. Gelombang protes itu mencerminkan adanya keresahan yang mendalam dan memperoleh kesempatan untuk diekspresikan ketika ada pemicu yang menggerakkannya.

Ketika gelombang protes terhadap rasisme, akibat meninggalnya George Floyd di tangan polisi berkulit putih, tidak hanya membakar kota-kota di Amerika, tetapi menjalar ke seantero dunia, kita tahu, ada keresahan yang bersifat global dan selama ini

tersembunyi di bawah sadar, yaitu kolonialisme dan perbudakan, yang mendapatkan kesempatan untuk diekspresikan. *White supremacy*, dalam arti yang sempit jelas tidak ada di Indonesia, namun dominasi dan represi dalam bentuknya yang lain, mudah ditemukan di negeri ini. Dalam konteks dominasi dan represi inilah, Papua, sangat wajar dan tidak sulit menjelaskannya menjadi yang paling *exposed*. Dominasi dan represi selalu dilakukan oleh pusat kekuasaan, baik yang bersifat politik maupun ekonomi, dan akan selalu menghasilkan marginalisasi dari mereka yang ada di pinggiran. Slogan *Black Live Matters* (BLM) yang di-echo, di sini menjadi *Papuan Live Matters* (PLM), hanyalah sebuah keinsidensi, marginalisasi karena dominasi dan represi yang telah lama dirasakan, hanya perlu sebuah pemicu untuk diekspresikan (lihat Bab 5).

Kemelut yang sedang berlangsung di Papua tentu menjadi perhatian pemerintah pusat dan pusat perlu membela diri untuk tidak begitu saja menjadi pihak yang dipersepsi sebagai sumber persoalan Papua. Sejauh yang bisa diikuti dari media massa, paling tidak ada dua teks yang bisa dibaca dan memperlihatkan bagaimana para birokrat yang mewakili pemerintah pusat berusaha membela kebijakan pemerintahnya. Teks yang pertama merupakan kolom opini yang ditulis oleh Teuku Faizasyah, Penasihat Menteri Luar Negeri dan Mantan Dubes di Kanada, di *The Jakarta Post*, 13 Juli 2020 dan yang kedua adalah kolom opini yang ditulis oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputy V Polhukhankam Kantor Staf Presiden, di *Kompas*, 16 Juli 2020.

Teuku Faizasyah (2020) dalam tulisan yang berjudul “Decoupling Global Movement for Equality with a Call for Separatism in Papua”, berharap bisa membantah bahwa BLM dan PLM merupakan dua hal yang seharusnya tidak dikaitkan karena merupakan dua isu dengan konteks sejarah sosial-politik yang berbeda. Menurut sang penulis, isu BLM adalah kesetaraan (*equality*), yang menurut pendapatnya, bukan masalah lagi

di Papua karena orang Papua adalah warga negara yang setara dengan etnis lain di Indonesia. Penulis ini juga menilai bahwa narasi rasisme yang bersifat struktural (*structured racism*), yang banyak dipakai oleh berbagai media, menurut dia juga sesuatu yang tidak benar. Pemerintah Indonesia, melalui paket otonomi khusus, membuktikan telah memberikan prioritas pembangunan untuk Papua. Agitasi separatisme yang dikandung oleh slogan PLM, menurut pendapatnya adalah sebuah ofensif yang berbahaya bagi integritas Indonesia. Sebagai *spokeperson* Kemenlu, memang menjadi tugasnya untuk membantah dan meng-*counter* tuduhan-tuduhan dari luar terhadap pemerintah Indonesia, tetapi mengatakan bahwa *equality* bukan masalah di Papua merupakan pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ketidaksetaraan (*Inequality*) menjadi makin nyata bersamaan dengan menguatnya istilah Orang Asli Papua (OAP) dalam diskursus kita tentang Papua. Istilah OAP adalah cerminan paling nyata dan tak terbantahkan dari marginalisasi orang Papua yang muncul dalam 10 terakhir ini. Mengapa istilah OAP muncul dan menguat? Itulah tugas bagi Teuku Faizasyah untuk merenungkannya agar bisa menjawab berbagai tuduhan dari luar dengan lebih berwibawa.

Dalam kolomnya yang berjudul “Melihat Papua dengan Mata Data”, Pramodhawardani (2020) berupaya membela pusat dengan pretensi argumentasinya yang ilmiah karena berdasarkan data. Data yang pertama bermaksud menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan orang Papua telah meningkat. Sang penulis memperlihatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik beberapa poin dalam kurun waktu 2014–2018. Namun, sang penulis tidak membandingkan angka IPM Papua dan Papua Barat dengan provinsi-provinsi lain. Mereka yang belajar indeks pada tingkat dasar pun tahu bahwa sebuah indeks akan memiliki arti jika dibandingkan dengan indeks yang lain. Papua dan Papua Barat selalu berada di peringkat paling bawah dibandingkan

provinsi-provinsi lain. Data yang kedua bermaksud menepis tuduhan bahwa pusat telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dengan menunjukkan bahwa Indonesia terbukti terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB (2020–2022), bahkan mengalahkan Jepang dan Korea Selatan. Mengatakan bahwa tuduhan adanya pelanggaran HAM di Papua sebagai tidak berdasar dengan argumentasi bahwa Indonesia terbukti terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, selain terasa dicari-cari, juga memperlihatkan ketidakberanian menerima kenyataan atas pelanggaran yang telah dipublikasikan oleh Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain. Penulis perlu melihat Papua dengan mata hatinya sebelum melihat melalui mata data.

Pada Maret 1999, Ben Anderson—yang diperbolehkan masuk lagi setelah dicekal oleh Orde Baru selama 26 tahun—diminta oleh Majalah *Tempo* untuk memberikan kuliah umum. Dalam kuliah umum yang diberikan ketika Indonesia sedang mulai memasuki masa transisi dan berbagai konflik komunal dan politik berkecamuk di mana-mana (Aceh, Riau, Sampit, Poso, Ambon, Timor Timur dan Papua), mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting. Menurut pendapatnya, Indonesia harus ditempatkan kembali sebagai proyek bersama (*a common project*), seperti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Meskipun Papua telah lima puluh tahun menjadi bagian dari Republik Indonesia, yang tampaknya terus terjadi adalah kegagalan kita mengajak orang Papua untuk menjadikan Indonesia sebagai proyek bersama. Orang Papua kehilangan rasa memiliki (*sense of belonging*) sebagai warga negara yang setara karena perlakuan kita yang tidak “mengorbankan” mereka. Kita hanya mempertimbangkan kekayaan Bumi Papua, bukan orangnya.





## 20. Studi Konflik dan Masih Tak Terselesaikannya Masalah Kita<sup>24</sup>

Pada suatu pagi, pada 27 Agustus 2020, saya ikut menyaksikan dan mendengarkan secara *online* orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor Riset Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI); Ahmad Najib Burhani dan Cahyo Pamungkas. Orasi kedua peneliti yang usianya relatif muda ini memperlihatkan kajian ilmu sosial di LIPI tidak mandek dan terus merambah ke wilayah-wilayah sosial yang selama ini dianggap sensitif, seperti konflik agama dan separatisme. Kedua orasi yang baru disampaikan ini telah menambah khazanah kajian konflik yang sebelumnya juga dikemukakan oleh Adam (2018) dalam orasi profesor risetnya tentang konflik politik 1965. Secara umum, bisa

<sup>24</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 27 Agustus 2020.



dikatakan bahwa kajian konflik sosial yang makin sistematis dan berani memasuki wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap tabu untuk didiskusikan secara terbuka, memberikan harapan akan berkembangnya ilmu-ilmu sosial secara lebih sehat di masa depan. Ilmu-ilmu sosial yang sehat memberikan harapan akan bisa diatasinya berbagai konflik sosial yang masih terus terjadi meskipun Reformasi politik pasca-Orde Baru telah dilewati selama dua dekade. Para pengamat di dalam maupun di luar negeri pun sepakat bahwa kualitas demokrasi kita saat ini sedang mengalami degradasi.

Keberanian para peneliti sosial di LIPI yang merupakan PNS atau ASN meskipun tidak lagi tertekan untuk mengungkapkan pikiran kritis, apalagi jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tingkah laku kelompok-kelompok nonnegara yang represif dan intoleran, haruslah diberi acungan jempol. Keberanian mereka untuk mengkaji secara akademik konflik sosial yang sesungguhnya masih jauh dari terselesaikan itu, seperti peristiwa '65, persekusi dan intoleransi terhadap berbagai kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah, dan anggapan bahwa masalah Papua adalah sekadar persoalan ekonomi dan bukan politik, adalah contoh-contoh bahwa sebagai bangsa, kita belum mencapai sebuah ekuilibrium sosial-politik yang diharapkan.

Orasi yang disampaikan Burhani (2020), "Agama, Kultur (In) Toleransi dan Dilema Minoritas di Indonesia" dan Pamungkas (2020), "Rekonstruksi Pendekatan dalam Kajian Konflik di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Thailand, Filipina dan Myanmar"; menunjukkan bahwa secara teoretis-konseptual, ilmuwan sosial Indonesia sebenarnya telah mampu mengembangkan berbagai pendekatan yang bersifat akademik untuk menyusun strategi untuk mitigasi maupun solusi dari konflik sosial yang sampai saat ini terus menghantui masyarakat yang secara langsung menjadi wilayah terjadinya konflik sosial itu. Melakukan kajian sosial tentang konflik sosial memang menjadi tugas dan tanggung jawab

para peneliti sosial. Sebagai peneliti, tugas mereka bisa dikatakan telah dianggap selesai dengan publikasi hasil penelitian yang telah mereka lakukan, baik dalam bentuk laporan penelitian, buku, artikel jurnal, kolom opini di koran, atau naskah orasi profesor riset.

Sebuah tindak lanjut berupa langkah konkret untuk memitigasi konflik yang sedang terjadi, dan mencari solusi untuk merintis jalan damai sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sosial itu, memang merupakan hal yang paling penting dan diharapkan. Seorang peneliti sosial dengan pemahaman mendalam yang diperolehnya dari pengkajiannya, merupakan pihak yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang bergerak pada tataran praktis, baik dalam konteks kebijakan pemerintah maupun kegiatan-kegiatan rekonsiliasi dan penguatan lembaga-lembaga advokasi di tataran akar rumput yang dilakukan oleh berbagai institusi masyarakat sipil.

Berbagai program strategis untuk solusi penyelesaian konflik sosial perlu disusun sebagai proyek kolaborasi antara berbagai pihak terkait, dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Sebuah kolaborasi juga hanya mungkin terjadi jika antara pihak- pihak yang terkait, seperti peneliti, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, memiliki sikap saling percaya dan keterbukaan satu sama lain (*mutual trust*). Harus diakui jika letak persoalannya ada dalam ketiadaan "*mutual trust*" ini.

Konflik sosial kajian Burhani (agama dan dilema minoritas), Pamungkas (nasionalisme dan separatisme), dan Adam (peristiwa 65) adalah isu-isu politik aktual yang masih harus diselesaikan jika bangsa ini tidak ingin terjebak dalam *protracted conflict* yang akan menjadi batu sandungan untuk melangkah ke depan (*move on*). Dari pengalaman yang selama ini bisa diamati, hasil kajian tentang konflik sosial sering kali terlambat selesai dilakukan, tetapi konflik sosial terus berlangsung, bahkan menjadi lebih rumit dan kompleks.

Sulit untuk dibantah bahwa penanganan sebuah konflik sosial, terutama bukan karena pemahaman akan proses dan dinamika yang terjadi belum ada, namun karena tidak adanya *trust*, terutama dari pihak pemerintah terhadap hasil kajian sosial yang secara kritis melihat keterlibatan aparat atau institusi pemerintah yang tidak jarang ikut menjadi bagian dari konflik sosial.

Oleh karena itu, betapa pun lengkap dan telitinya sebuah hasil kajian tentang konflik sosial dilakukan, tanpa adanya *mutual trust* dan *good will*, serta dihilangkannya sikap ingin menang dan benar sendiri dari pihak-pihak yang diharapkan dapat melakukan mitigasi maupun solusi, kajian itu hanya akan menjadi pengetahuan yang mungkin mengagumkan saja, sementara masyarakat akan terus menjadi korban dari konflik-konflik yang terus terjadi dan tak terselesaikan.



Sumber: Suarez (2015)

## 21. Kebebasan Akademis: Antara Kepentingan Nasional dan Akal Sehat<sup>25</sup>

Kepentingan nasional sering dianggap sebagai alasan bagi negara untuk membungkam ekspresi warga negara yang dianggap membahayakan, termasuk yang diekspresikan atas nama kebebasan akademik. Permasalahannya, bagaimana sebuah ke

<sup>25</sup> Tulisan ini merupakan bahan kuliah umum (*public lecture*) yang disampaikan Dr. Riwanto Tirtosudarmo pada 7 Desember 2020 dalam rangka memerigati ulang tahun ke-4 Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). KIKA yang telah berdiri sejak 2017, adalah sebuah *platform* bersama bagi siapa saja yang peduli dengan kebebasan akademik, para insan akademik yang selalu bekerja dengan akal sehat, *conscience* dan *compassion*; untuk selalu mempertanyakan, *re-thinking*, *re-imagining*, menguji kebenaran dengan prinsip dan kaidah saintifik, segala sesuatu, termasuk klaim atas kepentingan nasional atau klaim kebenaran atas nama keyakinan agama tertentu.

pentingan dianggap sebagai kepentingan nasional? Apakah ada ukuran untuk menilai sebuah kepentingan tertentu adalah sebuah kepentingan nasional ataukah bukan? Bagaimana menilai sebuah ekspresi dari warga negara yang dianggap sebagai mengancam atau membahayakan kepentingan nasional? Kapankah sebuah kebebasan akademik dapat dinilai sebagai bertentangan dengan kepentingan nasional? Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan, di manakah batas-batas sebuah kebebasan akademik? Mengapa kebebasan akademik bisa menjadi ancaman? Dan siapa yang paling merasa terancam oleh kebebasan akademik? Sampai di sini saya ingin menunjukkan posisi saya bahwa pembungkaman, represi, atau persekusi terhadap kebebasan akademik bersumber dari rasa terancam dari kekuasaan atau pemegang kekuasaan. Perasaan terancam berasal dari rasa tidak percaya diri atau adanya agenda tersembunyi di balik sebuah kepentingan nasional.

Berbagai pertanyaan yang pada dasarnya bersifat hipotetis di atas mengajak kita untuk merenung dan memikirkan guna mencari jawaban-jawabannya, dan ketika kita mulai merenung, itulah sebuah *state of mind* bernama akal sehat (*common sense*) yang menjadi instrumen vital yang sangat diperlukan. Akal sehat atau *common sense* adalah sebuah prasyarat utama yang mendasari perenungan dalam mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Akal sehat atau *common sense* adalah sebuah kapasitas dan kualitas mental yang dapat dimiliki oleh siapa saja yang selalu memikirkan dan memprihatinkan apa sesungguhnya kepentingan publik itu. Mereka yang menyebut dirinya sebagai insan akademik adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan akal sehatnya. Insan akademik adalah individu-individu, warga negara biasa, tidak selalu berada di dalam sebuah lembaga akademik, seperti perguruan tinggi atau universitas, bahkan tidak perlu bersarang di sebuah menara gading. Secara kategoris, insan akademik adalah bagian dari apa yang disebut masyarakat sipil (*civil society*). Sebuah kepentingan nasional seharusnya

identik dengan kepentingan publik yang merepresentasikan kemaslahatan banyak orang. Kepentingan nasional dan akal sehat seharusnya berjalan sejajar, yang satu berada di dalam yang lain, atau dalam bahasa Jawa adalah istilah *aloro-lorone atunggal*, dua yang menyatu.

Kebebasan akademik sebagai sebuah atribut, untuk tidak menyebutnya sebagai hak, yang disandang atau dimiliki oleh seorang insan akademik. Kebebasan akademik akan selalu bergerak, dalam realitasnya, seperti sebuah pendulum di antara apa yang disebut sebagai kepentingan nasional di satu sisi dan akal sehat di sisi yang lain. Mengapa demikian? Dalam realitas, yang disebut sebagai kepentingan nasional pada dasarnya baru merupakan klaim sepihak dari pemegang kekuasaan, belum *aloro-lorone atunggal*. Dengan demikian, batas-batas kebebasan akademik—menurut hemat saya—secara relatif juga terletak di antara kepentingan nasional dan akal sehat.

Marilah kita sekarang mencoba merenungkan pertanyaan, apakah itu kepentingan nasional? Adakah ukuran untuk menilai sebuah kepentingan sebagai sebuah kepentingan nasional? Akal sehat kita mengatakan bahwa konstitusi negara—atau Undang-Undang Dasar—seharusnya menjadi landasan dan sumber hukum dalam bernegara sekaligus sumber tempat kita mencari ukuran untuk menilai apakah sebuah kepentingan tertentu bisa dinilai sebagai kepentingan nasional atau hanya kepentingan segelintir orang yang kebetulan sedang berkuasa. Pada momen ini mungkin kita harus kembali pada *moment of truth* ketika para pemimpin bangsa dan pendiri negara ini menyepakati untuk membentuk sebuah negara. Sebuah momen yang merupakan terminal dari akumulasi sejarah perjuangan bangsa dan proses dekolonisasi yang sangat panjang. Para pemimpin bangsa itu dengan dilambari *conscience* telah berhasil menyusun landasan filosofis dan konstitusi negara yang disepakati sebagai konsensus bersama sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Apa yang saya maksudkan dengan *conscience* di sini? *Conscience* adalah hati nurani. Seperti akal sehat (*common sense*), *conscience* atau hati nurani juga merupakan sebuah kapasitas dan kualitas mental yang dimiliki oleh seseorang yang selalu memikirkan kondisi memperhatikan masyarakatnya. Akal sehat dan hati nurani adalah dua kualitas mental yang jika berjalan bersama, akan tecermin dalam sebuah sikap yang di dalam dirinya menyimpan kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).

Para pendiri bangsa adalah orang-orang yang memiliki kearifan. Sampai di sini, saya ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang sering kita ucapkan, tetapi jarang kita renungkan secara mendalam maknanya. Kalimat itu berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kata kunci dalam kalimat itu adalah “hikmat kebijaksanaan”, sebuah kearifan, sebuah kualitas mental yang semestinya dimiliki dan menjadi panduan dari seorang pemimpin negara. Sebuah kepentingan seharusnya dipandu oleh “hikmat kebijaksanaan”.

Setelah kejatuhan rezim otoriter Orde Baru, sebagai bagian dari Reformasi politik melalui sidang MPR, dibentuk Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan menjadi semacam wasit atau juri untuk menilai sebuah perbedaan pendapat apakah sebuah keputusan, baik yang berupa kebijakan atau peraturan yang diklaim merupakan kepentingan nasional telah sesuai atau melanggar konstitusi negara yang telah disepakati itu. *Trust* dari warga negara terhadap parlemen dan pemerintahnya menjadi persoalan krusial ketika pro-kontra yang bersifat publik (*public controversies*) terjadi atas sebuah keputusan negara. Dalam kontroversi ini, pertanyaan pokoknya adalah apakah keputusan yang dibuat telah mencerminkan atau dipandu oleh sebuah “hikmat kebijaksanaan”. Sebagai ilustrasi pertama, saya ingin mengajak Anda untuk meninjau kembali apa yang telah berlangsung dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja yang mengundang penolakan publik

cukup masif dan kritik tajam dari kalangan akademik. Mungkin nanti, kita bisa kembali membicarakan UU yang kontroversial ini.

Dalam sejarah sosial-politik, sering kita saksikan, pemerintah yang telah secara konstitusional dipilih, dibentuk, dan diberi mandat untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional, dinilai telah berdasarkan akal sehat, tetapi sesungguhnya melanggar konstitusi. Ketika akal sehat mengatakan betapa pun kuat dan sah sebuah keputusan untuk membunuh para preman jalanan, yang dinilai seorang presiden mengancam kepentingan orang banyak dan membahayakan kepentingan nasional, keputusan presiden itu, tanpa harus melalui sidang Mahkamah Konstitusi sekali pun dengan segera dapat dinilai melanggar konstitusi karena mengabaikan prinsip bahwa setiap warga negara harus dilindungi hak-haknya, dalam hal ini hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum. Indonesia oleh para pendirinya diniatkan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun, siapa yang berhak menafsirkan kebenaran sebuah hukum? Tidakkah dalam sejarah selalu menjadi fakta dan realitas sosial bahwa hukum tidak mungkin dilepaskan dengan kekuasaan, dan dalam banyak kasus, hukum sering kali di bawah kekuasaan?

Ilustrasi di atas memperlihatkan bahwa jika sebuah tindakan atau keputusan, bahkan dari seorang presiden sekali pun, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, sudah pada tempatnya dipertanyakan, bahkan jika perlu, ditentang dan dilawan. Kebebasan akademik merupakan sebuah kebebasan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan kaidah yang bersifat akademik atau saintifik. Pada dirinya melekat batas-batas yang tidak dapat dilanggar, yaitu dipenuhinya prinsip dan kaidah yang bersifat saintifik itu. Prinsip dan kaidah yang bersifat saintifik itu membatasi seorang insan akademik bergerak dalam dunia akademik dan mengekspresikan kebebasan akademiknya secara bertanggung jawab atau tidak mengindahkan kaidah-kaidah saintifik itu.



Jadi, poin penting yang ingin saya tekankan adalah apa yang disebut sebagai prinsip dan kaidah saintifik yang telah menjadi kesepakatan, konvensi atau konsensus di kalangan dunia akademik. Dengan ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa prinsip dan kaidah akademik yang menjadi kesepakatan itu bersifat final dan mutlak. Sebaliknya, di sinilah hal yang menarik dari dunia akademik karena tidak pernah ada yang final dan mutlak di sana, setiap klaim atas kebenaran ilmiah, harus setiap saat diuji, dipertanyakan, dibantah, didekonstruksi, ditafsirkan ulang, sampai kebenaran baru disepakati—lagi-lagi sampai kebenaran baru itu dibuktikan kesalahannya melalui bukti-bukti baru. Di dalam dunia akademik, tidak dikenal adanya mitos atau dogma yang mengklaim sebuah kebenaran tanpa adanya bukti-bukti. Dalam dunia akademik, kebenaran harus *evidence based*, berdasarkan fakta dan bukti yang nyata.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kepentingan nasional harus diukur berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi negara, sedangkan kebebasan akademik harus diukur dengan prinsip dan kaidah yang bersifat saintifik. Jika kepentingan nasional memiliki wilayah yurisdiksi yang dibatasi oleh batas-batas teritorial geografis yang menjadi kedaulatan (*sovereign*) sebuah negara, kebebasan akademik bersifat universal dan ruang gerak yang dimilikinya melampaui batas-batas yang bersifat teritorial-geografis dan kedaulatan sebuah negara. Ketika bukti-bukti saintifik tentang pemanasan global (*global warming*) yang mengakibatkan perubahan iklim (*climate change*) menjadi konsensus yang diterima oleh para ilmuwan di seluruh dunia tanpa memandang kewarganegaraan mereka, penebangan hutan tropis di Papua, Indonesia atau di Amazon, Brazil, atas nama kepentingan nasional kedua negeri ini harus ditentang melalui gerakan lingkungan yang bersifat global. Jika ditempatkan dalam perspektif akademik, kepentingan nasional dalam kaitan dengan pemanasan global dan perubahan iklim menjadi sesuatu

yang bersifat relatif, dan klaim nasional bisa membahayakan keselamatan Bumi dan umatnya.

Dalam kaitan ini, pengalaman Dr. Basuki Wasis dari IPB (2018), yang memberikan rekomendasi tentang kerugian akibat pencemaran dan kebakaran hutan yang menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah, menjadi ilustrasi menarik ketika seorang insan akademik yang telah bekerja berdasarkan keahlian yang dimilikinya, dianggap bersalah dan harus digugat di muka hukum. Kasus Dr. Basuki Wasis, salah seorang yang membidani KIKA, adalah contoh yang sangat pas untuk menggambarkan bagaimana sebuah analisis yang didasarkan oleh sebuah kebebasan akademik, secara nyata telah menimbulkan perasaan terancam dari seseorang yang sedang berkuasa. Jika ada waktu, kita bisa mendiskusikan, kenapa timbul perasaan terancam, apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sana?

Universalitas prinsip dan kaidah saintifik yang mendasari kebebasan akademik dapat menjadi ancaman bagi sebuah kekuasaan yang mengklaim dirinya telah menjalankan kepentingan nasional berdasarkan akal sehat dan kaidah-kaidah saintifik yang bersifat universal, tidak hanya dalam kasus pemanasan global dan perubahan iklim, tetapi juga untuk kasus-kasus yang berskala nasional atau lokal. Sebagai contoh, setelah dilakukan sebuah penelitian dan terbukti bahwa rencana undang-undang dalam pasal-pasalannya akan merugikan warga masyarakat—yang selama ini tidak memiliki akses ke berbagai layanan publik karena tempat pemukimannya terisolasi secara geografis—harus ditentang dan ditinjau kembali. Atau, dari hasil sebuah kajian sosial memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan nasional tertentu dalam pelaksanaannya makin meminggirkan peran kaum perempuan alih-alih memperkuat, ini pun cukup menjadi alasan untuk ditentang, dipertanyakan, dan ditinjau ulang berdasarkan akal sehat karena berlawanan, serta merugikan kepentingan publik, terutama kaum perempuan.

Secara implisit maupun eksplisit, dalam menjalankan prinsip dan kaidah saintifik, sebuah kebebasan akademik mengandung karakteristik sosial yang bersifat humanistik, yaitu prinsip keadilan. Keadilan (*justice*) juga merupakan prinsip yang bersifat universal. *Declaration of Independence* di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap manusia harus diakui setara tanpa memandang latar belakang, asal-usul kelahiran, agama, etnis, ras, maupun gendernya menjadi dasar dari *Declaration of Human Right* atau dikenal sebagai hak-hak asasi manusia yang tidak mungkin dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negaranya sendiri.

Dalam kaitan inilah, kita melihat bahwa akal sehat (*common sense*) dan kebebasan akademik tidak terpisahkan dengan hak-hak asasi manusia yang terejawantah dalam keadilan sosial (*social justice*). Dengan kata lain, seperti yang telah disinggung tadi, dalam akal sehat (*common sense*) sebagai jangkar dari kebebasan akademik, hampir selalu ada *conscience* yang *embedded*, terutama terkait rasa prihatin terhadap kondisi keadilan, dan juga ketidakadilan, yang sedang dirasakan publik. Sebetulnya, ada sebuah kapasitas dan kualitas mental lain yang disebut sebagai rasa welas asih (*compassion*) yang memungkinkan seseorang, lebih-lebih seorang insan akademik, untuk dapat melakukan empati terhadap penderitaan orang lain. Seorang intelektual publik adalah seseorang yang bergerak, berpikir, dan melakukan aksinya karena memiliki *compassion* ini.

Ketika sebuah ketidakadilan terjadi pada warga negara atau sekelompok warga negara dari sebuah negara tertentu, *conscience* dan *compassion* kita seperti berbunyi bahwa ada orang yang menjadi korban kesewenang-wenangan dari sebuah kekuasaan.

Perkenankan saya membacakan sebuah puisi yang mudah-mudahan dapat menggambarkan apa yang saya maksud dengan *conscience* dan *compassion* dalam pembicaraan ini.

*Aku mendengar suara*

*Jerit hewan yang terluka  
Ada orang memanah rembulan  
Ada anak burung terjatuh dari sangkarnya  
Orang-orang harus dibangunkan  
Kesaksian harus diberikan  
Agar kehidupan bisa terjaga  
(W.S. Rendra, 1974)*

Dengan kebebasan akademik yang dimilikinya, melalui hasil analisisnya, seorang insan akademik harus menyampaikan kebenaran yang diyakininya. Dia harus berani menyatakan sebuah kebenaran kepada pemegang kekuasaan, *speak truth to power* dengan segala risiko yang harus ditanggungnya. Dalam sejarah intelektual, ada yang disebut sebagai “pelacuran intelektual” ketika seorang intelektual mengabdikan dan melacurkan dirinya pada kekuasaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang menjalankan otoritasnya secara sewenang-wenang meskipun telah mengklaim dirinya mewakili kepentingan nasional, tetapi terbukti memperlakukan warga negaranya secara tidak adil, sudah bisa dipastikan berdasarkan akal sehat, *conscience* dan *compassion* bahwa tindakan itu bertentangan dengan konstitusi yang mengandung “hikmat kebijaksanaan”. Jika ini yang terjadi, seorang akademisi wajib menentanginya dengan kebebasan akademik yang dimiliki.

Sekarang, saya ingin masuk pada ilustrasi yang kedua, yaitu apa yang saat ini sedang terjadi di Papua. Sebagai rentetan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sebelumnya terjadi, Papua merupakan gambaran yang sangat aktual dari klaim negara atas kebijakan yang dilakukan atas nama kepentingan nasional—yang secara retorik direpresentasikan dalam slogan yang selalu didengungkan “NKRI Harga Mati”. Contohnya adalah sebuah hasil penelitian dari LIPI yang menunjukkan dengan jelas apa sesungguhnya masalah mendasar di Tanah Papua. Saya kutipkan sedikit apa yang ditemukan oleh Tim Penelitian LIPI tersebut.

Konflik berkepanjangan di Papua juga mengakibatkan munculnya persoalan trauma dan psikologis di antara masyarakat, terutama para korban yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami penderitaan dan kekerasan politik. Meskipun kekerasan politik yang dialami masyarakat Papua tidak pernah tercatat (atau sengaja dilupakan) dalam sejarah bangsa Indonesia, pengalaman traumatis ini dapat diingat dengan sangat jelas oleh para korban. Pengalaman buruk yang diceritakan turun temurun telah membentuk *Memoria Passionis* yang sulit dihapuskan. *Memoria Passionis* ini menimbulkan masalah psikologis yang serius, berupa ketidakpercayaan dan kecurigaan orang Papua terhadap hampir setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi persoalan di Papua (Elisabeth dkk., 2005).

Para sejarawan adalah akademisi yang terus bergelut untuk mencari kebenaran sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang mereka gali dari berbagai sumber. Kebenaran sejarah, seperti halnya kebenaran hukum, betapa pun relatifnya, sangat wajar selalu diperdebatkan di antara para ahli sejarah sendiri. Kepentingan kekuasaan atas klaim, demi kepentingan nasional untuk memonopoli kebenaran sejarah, juga merupakan tantangan tersendiri bagi para akademisi yang berusaha membuktikan bahwa monopoli kebenaran sejarah oleh negara meskipun sah secara hukum, belum tentu sah secara akal sehat maupun *conscience, compassion*, dan keadilan sosial (*social justice*).

Apa yang terjadi di Papua, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Pepera tahun 1969. Begitu juga halnya dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1965 yang sampai hari ini, kalau kita mau jujur, masih menjadi ketegangan yang selalu menghantui kita sebagai bangsa. Baik kasus Pepera tahun 1969 maupun peristiwa traumatis 1965, adalah ilustrasi yang sangat baik dari perbenturan, antara klaim kepentingan nasional dan klaim para akademisi yang berusaha menunjukkan

temuan-temuan baru yang menguak sesungguhnya terjadi pada momen-momen sejarah itu.

Sejarah sosial politik kita menunjukkan bahwa ancaman terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat dalam setiap warga negara, tidak hanya berasal dari arogansi dan kesewenang-wenangan kekuasaan yang mengklaim sebagai mewakili kepentingan nasional, akan tetapi juga datang atau berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengklaim tindakannya mewakili kepentingan umat dan keyakinan agama tertentu. Tindakan yang melanggar hak-hak warga negara yang diklaim berdasarkan keyakinan akan kebenaran agama tertentu, jelas menjadi ancaman bagi akal sehat, kebebasan akademik, dan *conscience*.

Klaim kebenaran yang didasarkan pada dogma-dogma yang diyakini oleh penganut agama tertentu bisa berpotensi mengancam kehidupan bersama yang telah diatur di dalam konstitusi. Insan akademik dengan kebebasan akademik, akal sehat, *conscience*, dan *compassion* yang dimiliki akan keadilan sosial, juga harus berani menyatakan kebenaran; dan dengan demikian, menunjukkan sikap keberpihakan yang dilandasi oleh humanisme dan rasa keadilan terhadap mereka yang telah menjadi korban persekusi atas nama keyakinan agama. Akal sehat, *conscience*, dan kebebasan akademik, niscaya akan selalu berhadapan dengan kekuasaan yang korup dan sewenang-wenang yang seringkali bersembunyi dalam klaim kepentingan nasional maupun klaim kebenaran dogmatis, berdasarkan keyakinan agama tertentu.

Ketika perkembangan sebuah negara makin memperlihatkan telah kekuatan ekonomi-politik yang bersifat oligarki, klaim-klaim pengatasnamaan kepentingan nasional maupun kebenaran dogmatis keyakinan agama tertentu, patut dicurigai karena kemungkinan telah beroperasi dalam bingkai kepentingan politik-ekonomi para oligarki. Lagi-lagi, di sinilah tantangan terbesar bagi para insan akademik untuk menganalisis kaitan

sebab-akibat dan jaringan tidak terlihat yang bisa menyimpan agenda politik-ekonomi tersembunyi pelanggaran konstitusi dan akan berdampak luas terhadap makin jauhnya realisasi tercapainya sebuah masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana dijanjikan oleh proklamasi kemerdekaan dan konstitusi.



## 22. Pragmatisme, Proyekisme, dan Berhala-Berhala Itu

<sup>26</sup>Dalam sebuah wawancara dengan Thee Kian Wie (2003: 22), Mohamad Sadli, satu-satunya teknokrat dalam tim ekonomi Widjojo Nitisastro yang mungkin paling ideologis, mengatakan bahwa *what is good is what works*. Sadli dalam wawancara itu menjelaskan bahwa dalam bekerja, para teknokrat tidak didasari oleh ideologi apapun, melainkan berdasarkan pedoman yang disebutnya sebagai “pragmatisme”. Saya kira apa yang dikatakan Mohamad Sadli adalah sebuah revelasi yang jujur. Muhamad Sadli di antara para teknokrat lainnya, barangkali juga yang paling intelektual, dan mungkin juga paling bersih secara moral. Dia bekerja karena harus bekerja, bukan untuk mencari kekayaan, kekuasaan atau ketenaran.

<sup>26</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 25 Desember 2020.



Namun, hampir semua teknokrat anggota tim ekonomi Widjojo sudah tidak ada lagi, kecuali Emil Salim. Mungkin Emil Salim yang masih bisa bercerita, dan ia selalu dimajukan oleh Widjojo untuk menghadapi pers karena dia pandai bicara. Emil Salim juga teknokrat Orde Baru yang terbukti berhasil melewati periode Reformasi, bahkan sempat diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden zaman SBY berkuasa. Orde Baru memang telah menjadi sejarah, namun *legacy*-nya tentang “pragmatisme” sebagai sebuah ideologi kerja (*working ideology*), diakui atau tidak diakui terus menjadi pedoman pemerintah hingga saat ini. Sebuah contoh pragmatisme baru kita saksikan belum lama ini ketika Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama baru dalam kabinetnya. Diangkatnya Sandiaga Uno, menyusul sebelumnya Prabowo Subianto, yang notabene adalah rivalnya dalam pilpres setahun lalu, memperlihatkan betapa pragmatisnya partai politik di negeri ini. Bagi Jokowi, seperti adagium Sadli, yang penting adalah yang bisa bekerja, *what is good is what works!*

Buku *Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus* (2020), yang berisi lima bab: (1) “Muasal Bara Konflik dan Kerusakan Lingkungan di Kampung Tobati Enggros dan Nafri: Penelitian Awal Dampak Pembangunan *Ring Road* dan Jembatan Youtefa di Kota Jayapura” (Yason Ngelia dan Yuliana Lantipo); (2) “Desing Pesawat di Tengah Konflik Adat: Studi Atas Pembangunan Bandara Stevanus Rumbewas, Kampung Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua” (Pilipus Robaha); (3) “Janji Manfaat di Balik Pengabaian Hak Masyarakat Adat Abun” (Yohanis Mambrasar); (4) “Harapan Kesejahteraan, Tuntutan dan Kecemasan Orang-Orang Mbaham-Matta: Laporan Dampak Pembangunan Jalan TransBomberai di Kabupaten Fak-Fak” (Waldine Praxedes Meak); dan (5) “Menukar Tanah Keramat dengan Piala Dunia: Studi Kasus Pembangunan Menara Palapa Ring Timur di Distrik

Kurulu dan Distrik Itlay Hisage, Kabupaten Jayawijaya” (Benny Mawel). Semuanya ditulis oleh anak-anak muda Papua.

Sebelum masuk ke lima bab yang menjadi isi dari buku, ada kata pengantar yang ditulis oleh Elvira Rumkabu (Papua dalam Jerat Pembangunan) dan catatan dari editor (I Ngruh Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza). Buku ini menarik dan penting untuk dibaca karena ditulis oleh anak-anak muda Papua yang lahir sekitar tahun 1990-an ketika Orde Baru mulai redup, dan dibesarkan dalam periode Reformasi ketika ruang publik mulai terbuka dan ekspresi kritis mendapatkan salurannya, antara lain melalui media massa dan media sosial. Dari latar belakang penulisnya, sebagian adalah jurnalis dan sebagian lainnya adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat sipil. Anak-anak muda ini bisa dianggap sebagai wakil terdepan dari intelektual publik Papua terkini. Jika ada bara api yang belum padam di kepulauan Nusantara ini, itu adalah Papua, dan karena itu, Papua menjadi penting untuk mendapatkan perhatian kita.

Buku ini juga menjadi menarik karena ditulis dengan pendekatan semi etnografis, dengan semangat *investigative journalism* mendeskripsikan apa adanya proses dan pengalaman yang terjadi di situs penelitian yang dipilihnya. Situs-situs penelitian (*research sites*) yang dipilih memang merupakan lokasi tempat tinggal komunitas-komunitas lokal yang secara langsung terpapar dengan pembangunan infrastruktur, seperti *ring road*, jembatan, bandara, dan menara palapa di berbagai tempat di Papua. Dari sudut penyebaran lokasi penelitian yang meskipun tidak sepenuhnya bisa mewakili apa yang telah terjadi di Tanah Papua, tetapi cukup untuk bisa menunjukkan masalah mendasar dan dilema-dilema yang saat ini dirasakan oleh komunitas-komunitas lokal di Papua. Singkatnya, saya bisa mengatakan bahwa buku ini telah berhasil menampilkan sisi *suffering* dari masyarakat-masyarakat yang menjadi korban pembangunan fisik yang dikelola dan diarahkan dari pusat.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

*Suffering*, menurut pendapat saya, menjadi kata kunci di sini karena dengan keberhasilan menunjukkan *suffering*, tulisan-tulisan dalam buku ini telah menampilkan bentuk lain dari pengalaman penderitaan eksistensial orang Papua. Jika selama ini dalam kosakata Papua ada yang disebut sebagai *memoria passionis*, ingatan kolektif tentang pengalaman yang bersifat traumatis yang terjadi pada masa lalu, buku ini menemukan trauma-trauma baru yang bersifat kontemporer. Dengan mengambil pengalaman pembangunan yang terjadi pada periode Otonomi Khusus (OTSUS), tulisan-tulisan dalam buku ini menunjukkan bukti-bukti empiris bahwa asumsi dibuatnya OTSUS sebagai pilihan untuk menyejahterakan penduduk Papua, dalam kenyataannya keliru. Bukan kesejahteraan yang didapat tetapi *sufferings*.

*Sufferings* saat ini merupakan sebuah isu yang bersifat global. Penulis terkenal, Yuval Noah Harari, dalam sebuah wawancara mengatakan tidak ada yang lebih riil saat ini bagi umat manusia (*Homo sapiens* yang kemudian berubah menjadi *Homo deus*), selain *sufferings* (Kapadia, 2018). Dalam kata pengantarnya, Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM, yang tampaknya menjadi sponsor dari penelitian yang dilakukan, di awal buku telah mencatat fenomena *sufferings* ini sebagai berikut.

Tragedi kesehatan di Asmat pada 2018 seolah diputar ulang. Sebelum Asmat, daerah lain juga mengalami tragedi kesehatan, dalam waktu yang berulang juga. Dari tahun ke tahun, Tanah Papua diselimuti tragedi kematian karena warganya terserang wabah penyakit dan kelaparan (Suryawan, I. N. & Fahrizka, M. A., 2020: vi).

Sementara itu, Elvira Rumbaku dalam kata pengantarnya memulai dengan asumsi bahwa ada ideologi yang dijadikan landasan Orde Baru. Berikut adalah salah satu pernyataannya, “Tujuan yang hendak dicapai oleh Soeharto saat itu adalah mengintegrasikan Indonesia ke dalam sistem kapitalisme Modern” (Suryawan, I. N.

& Fahrizka, M. A., 2020: ix). Kemudian kita juga membaca, apa yang ternyata terjadi:

Paradigma pembangunan yang diimplementasikan pemerintah dipaksakan merasuk bahkan ke dalam tubuh dan pikiran orang Papua. Pandangan ini dijustifikasi karena konstruksi rasisme terhadap budaya dan orang Papua yang dianggap “terbelakang” dan “primitif” sehingga perlu untuk digantikan dengan budaya Indonesia yang dianggap lebih beradab dan modern. Strategi mempermalukan (*humiliation strategy*) digunakan menjadi cara sehingga masyarakat Papua merasakan *inferiority complex* dalam proses perubahan sosial itu (Suryawan, I. N. & Fahrizka, M. A., 2020: xi).

Pertanyaannya jika benar ada asumsi ideologi (kapitalisme?) yang menjadi dasar pembangunan, mengapa kemudian yang berlangsung adalah represi, persekusi dan marginalisasi? Dengan kata lain, mengapa orang Papua mengalami *sufferings*?

Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza, dalam catatan editornya, mencoba berteori mengenai lima hasil penelitian yang menjadi isi utama buku ini, tentu ini sebuah upaya terpuji yang seharusnya dilakukan para akademisi. Dari catatan mereka, saya kemudian tahu mengapa dipakai istilah “berhala-berhala”. Dengan mengutip tulisan para antropolog, mulai dari Taussig, Dove, dan lainnya meskipun dalam konteks Indonesia ada satu buku penting yang terlupakan. Buku yang saya maksud adalah *Friction: An Ethnography of Global Connection* karya Anna Lowenhaupt Tsing tentang kasus orang Dayak Meratus di Kalimantan Selatan yang *entangled* dan dideskripsikan oleh Tsing (2004) sebagai *Global Local Connection*. Saya kira, apa yang dicoba diteorikan oleh kedua editor ini tentang komunitas lokal di Papua, agak mirip dengan yang dialami oleh Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Coba kita simak kutipan berikut ini.

Berhala-berhala pembangunan dalam wajah infrastruktur tersebut menunjukkan secara gamblang betapa kita menjadi

tergantung pada suatu proses yang sumber-sumber kekuatannya dari luar kuasa kita. Pada titik inilah negara, pemerintah (pusat dan daerah) seolah-olah terpaku dan kehilangan dinamikanya. Perlunya partisipasi sesama warga sebagai partner menjalani pembangunan pun sering dianggap tidak ada. Lingkungan alam dan komunitas-komunitas tempatan kemudian dijadikan semata-mata sebagai garis depan yang harus ditaklukkan dan bukan sebagai partner menjalani sejarah peradaban (Suryawan, I. N. & Fahrizka, M. A., 2020: xx).

Dalam konteks ini, yang menarik adalah deskripsi tentang “garis depan” atau oleh Tsing disebut sebagai *frontiers*, sebuah kawasan yang harus didomestikasi dan ditaklukkan untuk dieksploitasi kekayaan alamnya. Dalam buku *Friction*, Tsing, seperti para ahli ilmu sosial lain, mulai meletakkan *my village*—situs penelitiannya—tidak lagi sebagai etnografi yang terisolasi, namun hampir selalu menjadi bagian dari sebuah koneksi yang bersifat global. Memang, para ahli ilmu sosial itu melihat kapitalisme dan ekonomi pasar yang tidak mengenal nasionalisme menjadi penggerak utama dari eksploitasi dan marginalisasi komunitas-komunitas lokal yang pemukimannya mengandung kekayaan alam. Dalam konteks ini, Indonesia pasca-1965 memang *entangled* dalam *global local connection* itu. Kasus-kasus dari berbagai komunitas lokal di Papua yang ditampilkan dalam buku jika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, menjadi cermin yang menarik karena di sana kita melihat langsung *suffering* pada tingkat akar rumput. Kasus-kasus itu telah menaraskan dengan baik sebuah diskrepansi, jurang, ketimpangan antara segala sesuatu yang dirancang dari atas dan yang dirasakan oleh komunitas yang hidup di situs berhala-berhala itu didirikan.

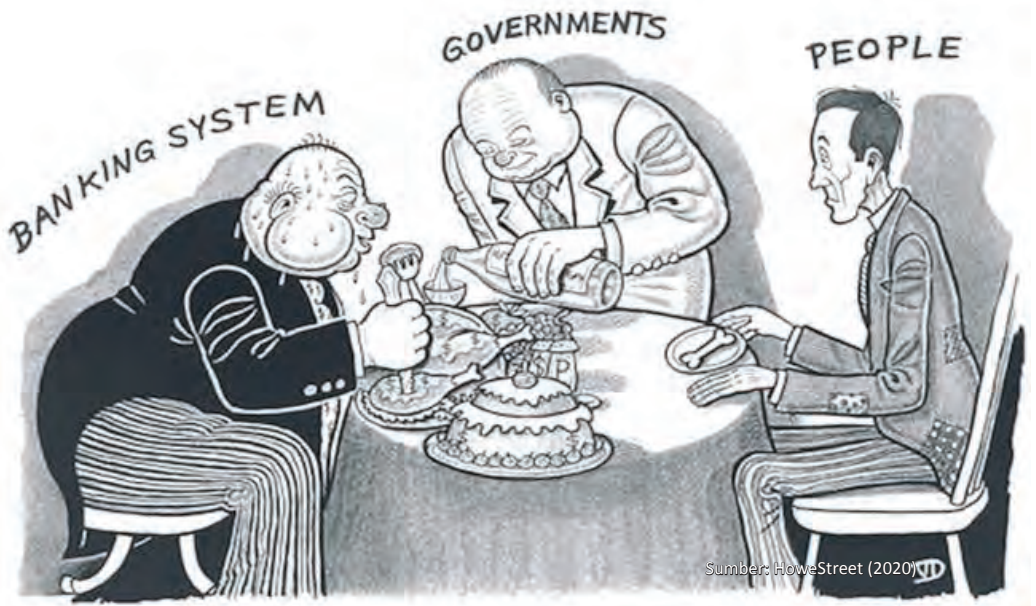
Pertanyaannya adalah, kapitalisme seperti apa yang sesungguhnya dipraktikkan di Indonesia? Kapitalisme seperti apa yang sepertinya menjadi Pustaka para penulis dalam buku ini dan menjadi kambing hitam dari semua yang terjadi? Jika di negeri

induknya, kapitalisme tumbuh bersamaan dengan liberalisme yang melahirkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, di dunia ketiga seperti Indonesia, kapitalisme yang berkembang adalah “kapitalisme malu-malu kucing”, sebuah istilah yang dipakai oleh Arief Budiman pada tahun 1980-an ketika berdebat dengan Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila. Saya kira dalam konteks ini, pengakuan jujur Sadli yang saya kutip di atas tentang pragmatisme, bisa menjadi penjelas. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang disebut sebagai *good* di sini. *Good* bagi siapa? Jika infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan Presiden Jokowi sesuai dengan prinsip pragmatisme, merefleksikan apa yang dikatakan Sadli sebagai *what is good is what works*, apa yang bisa terbaca dari kelima kasus dari Papua ini dengan gamblang menunjukkan bahwa *what is work not necessarily good*, bahkan yang terjadi *what is work is marginalizing the local communities*.

Berbicara tentang pembangunan dan masyarakat lokal, sebuah buku yang seharusnya juga menjadi Pustaka para penulis kasus-kasus ini adalah karya Tania Li, seorang antropolog yang lama bekerja di berbagai komunitas lokal di Sulawesi Tengah, yaitu *The Will to Improve: Governmentality, Development, and Practice of Politics* (Li, 2007). Bukunya melengkapi studi Tsing yang telah saya sebutkan sebelumnya, juga karya monumental James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed* (Scott, 1998), merupakan sebuah kritik pembangunan yang dilandasi ideologi-ideologi besar, seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Mungkin, temuan Li (2016) yang masih berupa artikel jurnal tentang bagaimana sesungguhnya dinamika internal dari apa yang disebut sebagai “proyek” dan melahirkan apa yang disebutnya sebagai “proyekisme”, paling bisa menjelaskan secara meyakinkan, dalam konteks mikro, bagaimana rasionalitas bekerjanya sebuah proyek yang melahirkan behala-berhala itu.

Menariknya buku “berhala-berhala” ini adalah potret *suffering* pada level mikro yang secara riil dialami oleh komunitas-komunitas lokal di akar rumput. Meskipun potret itu diperoleh dari Papua, sebuah wilayah yang dipandang sebagai daerah *frontiers* dari Jakarta, namun potret-potret itu harus dilihat sebagai bagian dari proses-proses yang berlangsung secara global dan bisa ditemukan di mana saja, di pelosok Asia, Eropa, Afrika atau pun Amerika. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tidak ada komunitas yang terisolasi dari *global connection* dan menjadi *entangled* di dalamnya. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran akan gerakan dan solidaritas global untuk mengatasinya. Pandemi Covid-19 selama setahun ini menjadi bukti paling nyata bagaimana sebuah *global connection* merupakan sesuatu yang nyata, seperti juga *suffering*, yang kemudian diakibatkannya.





## 23. Ada yang Membusuk dalam Darah di Tubuh Kita<sup>27</sup>

Mungkin di tubuh saya dan sebagian dari kita sudah ada koronavirus penyebab Covid-19, tetapi tidak ada gejala yang tampak dari luar. Kita tergolong sebagai OTG atau orang tanpa gejala, salah satu kata dalam kamus seputar Covid-19 yang berkembang pesat dalam setahun terakhir ini.

Vaksinasi telah dimulai, tetapi menurut ahli kesehatan, Covid-19 masih belum akan hilang dalam beberapa tahun ke depan. Namun, seperti kata kebanyakan orang, *we have seen the light at the end of the tunnel*, sesuatu yang melegakan.

Bagi saya meskipun Covid-19 tidak dalam waktu cepat bisa selesai ditangani, pada dasarnya sudah diketahui bagaimana

<sup>27</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 22 Februari 2021.



skenario dan strategi untuk mengatasinya. Memang sudah pasti kita masih akan menemukan gejala salah urus, salah tata kelola, dan juga kontroversi-kontroversi seputar penanggulangan Covid-19 ini, di samping korban berjatuh yang makin dekat di sekitar kita. Dibandingkan Covid-19, ada sebuah virus lain yang menurut hemat saya memiliki dampak merusak lebih dalam dan lebih luas dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Ada yang secara diam-diam, pelan-pelan tapi pasti, sedang membusuk dalam darah yang mengalir pada tubuh kita.

Virus ini mungkin bisa disamakan dengan virus kanker yang sampai hari ini belum mampu ditemukan vaksin untuk menangkalnya. Jika kanker menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang yang mengidapnya, virus ini bekerja dengan cara membusukkan daya-daya vital dari hidup kita sebagai sebuah bangsa. Virus yang mampu membusukkan ini meresap dan mengalir dalam darah kita sebagai sebuah bangsa.

Sebagai bangsa, kita lahir dari semangat untuk memerdekakan diri dari penindasan dan kolonialisme yang menjajah kita. Ketika kita mencapai kemerdekaan dan telah melewatinya selama lebih dari tujuh puluh tahun, elan vital kemerdekaan itu seperti mengalami kelumpuhan. Sebagai bangsa, kita sedang mengalami paralisis yang bersifat sistemis, *inertia*, ada kekuatan yang hilang untuk menghidupkan dan menegakkan diri kita sebagai bangsa. Mungkin, hanya sebagian kecil dari bangsa kita yang benar-benar menyadari hilangnya elan vital yang pernah dimiliki oleh para pendiri bangsa kita. Bagi saya, gejala paling jelas dari hilangnya elan vital itu adalah rusaknya institusi yang merupakan tempat terpenting bagi pemupukan elan vital, yaitu dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan tinggi.

Dalam beberapa tulisan sebelumnya, saya telah mencoba mengemukakan hal ini (lihat “Kebebasan Akademis: Antara Kepentingan Nasional dan Akal Sehat” (2020), “Persekongkolan Membunuh Akal Sehat: Renungan untuk Nadiem Makarim”

(2021), “Slamet Iman Santoso” (2021) dan saya tidak akan mengulanginya di sini. Sekarang, saya akan sedikit berefleksi guna memberikan konteks dari apa yang saya katakan sebagai “ada yang membusuk dalam darah yang mengalir di tubuh kita”.

Seorang sejarawan Australia, Bob Elson, dalam bukunya yang berjudul *The idea of Indonesia: A history* mengatakan bahwa “*Indonesia is unlikely nation*” karena tidak terbayangkan bisa lahir di tengah berbagai paradoks yang menyertainya dan tetap eksis hingga hari ini (Elson, 2008). Dalam penilaiannya, tentu kita bisa setuju atau menolak argumentasi dan pendapatnya. Elson mengatakan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia memiliki beberapa kali kesempatan untuk menjadi bangsa yang besar, tetapi kesempatan itu, salah satunya adalah Reformasi politik 1998, terlewatkan begitu saja.

Seorang pengamat Indonesia lain, Jeffrey Winters, seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat yang telah mengamati perkembangan politik-ekonomi Indonesia pasca-1965 dengan baik, menyimpulkan bahwa telah lahir para oligarki yang dengan kekayaannya, mampu melumpuhkan *rule of law*, pilar utama bagi tegaknya demokrasi. Winters yang telah melakukan riset secara terperinci melalui disertasi doktor yang kemudian dibukukan dengan judul *Power in Motion: Capital Movement and the Indonesian State* (Winters, 1996), adalah orang yang dapat menjelaskan mengapa Indonesia menjadi negara dengan ketimpangan pendapatan penduduk yang sangat tajam, saat segelintir oligarki menguasai mayoritas sumber daya ekonomi bangsa Indonesia.

Belum lama ini, 7 Februari 2021, dalam sebuah seri webinar *Mencari Indonesia dari Aceh sampai Papua* dengan tema “Masihkah Kita Percaya Partai Politik?”, enam pembicara (Fatma Susanti, Guru SMA, Banda Aceh; Rudi Rohi, Dosen, Undana, Kupang; Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik, LIPI; Stephani, Wakil Ketua DPW PSI, Kalsel; Muhammad Kafrawi,

Peneliti LSKP, Makasar; dan Aiesh Rumbekwan, WALHI, Papua) yang sebagian besar merupakan generasi pasca Orde Baru, sepakat bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi telah berkembang menjadi firma yang membentuk kartel-kartel yang hanya melayani kepentingannya sendiri. Kesimpulan diskusi informal ini sejalan dengan analisis Winters (2021) dalam orasi ilmiahnya yang berjudul *Reflections on Oligarchy, Democracy, and the Rule of Law in Indonesia* di FH-UGM yang mengatakan bahwa partai-partai politik saat ini yang membuat hukum dan mengatur warga negara secara setara telah dikuasai oleh para oligarki.

Winters, seperti juga Elson, adalah orang asing, indonesianis, yang menjadikan Indonesia sebagai objek kajiannya. Namun, saya mengakui bahwa ada rasa simpati yang mendalam dari mereka tentang apa yang dialami oleh orang-orang di Indonesia. Winters dalam kuliahnya itu mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dengan susah payah untuk memerdekakan Indonesia dan kemudian berusaha menegakkan negara hukum, tidak boleh dilupakan dan disiasikan. Meskipun kedengarannya aneh, dia mengatakan dalam kuliahnya yang disampaikan dalam bahasa Indonesia bahwa sudah seharusnya perjuangan untuk menjadikan Indonesia negara hukum itu dilanjutkan.

Sebagai seorang ilmuwan politik, dia telah memberikan analisis yang jernih terhadap proses, bagaimana sumber daya politik dan sumber daya ekonomi di Indonesia berada ditangan para oligarki. Analisis kritisnya telah mampu mendiagnosis letak kegagalan Reformasi politik 1998 dan menunjukkan pelajaran apa yang bisa dipetik dari kegagalan itu. Kegagalan dari menggunakan sebuah kesempatan yang dalam bahasa Elson, telah terlewatkan begitu saja. Bencana ekologis yang saat ini melanda segenap pelosok negeri tak lain hanyalah akibat dari kegagalan Reformasi 1998, menghentikan tatanan politik lama yang terus melanggengkan industri ekstraktif yang merusak lingkungan.

Pada Jumat malam, 22 Februari 2021, pengurus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)—saya pun ikut di dalamnya—mengadakan sebuah perbincangan informal dengan Peter Carey, seorang sejarawan berkebangsaan Inggris yang memutuskan pensiun dini, meninggalkan kehidupan nyamannya sebagai peneliti dan pengajar di Universitas Oxford, dan memilih tinggal dan berkiprah di Indonesia. Peter Carey menganggap bahwa panen yang harus dipetik dari kerja kerasnya selama ini sebagai akademisi, harus juga dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Bukunya tentang Pangeran Diponegoro yang semula merupakan tesis doktornya setelah diterbitkan, *The Power of Prophecy: Prince Diponegoro and the End of an Old Order in Java 1785-1855* (Carey, 2007), dia usahakan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855 (Carey, 2012), sebanyak tiga jilid. Selain membentuk yayasan yang merintis pembuatan kaki palsu bagi para korban perang, dia terus meneliti dan menerbitkan buku, antara lain tentang sejarah korupsi. Korupsi, menurut pendapatnya menjadi salah satu penyebab Indonesia kehilangan kesempatan untuk menjadi negara dan bangsa yang besar.

Peter Carey juga menunjukkan, antara lain dari kasus sejarah yang dipilihnya, Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa yang berlangsung dari 1825–1830; ada yang dia katakan sebagai *free soul* yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia, bahkan pada zaman prakolonial. Orang-orang yang memiliki *free soul*, menurut Peter Carey ada dalam setiap zaman. Mereka yang memiliki *free soul* sering tenggelam atau dikalahkan oleh *the dominant authority*, yang memegang kekuasaan.

Bagi Peter Carey, yang dilawan dan diperangi oleh Pangeran Diponegoro bukanlah individu-individu, tetapi “tatanan-lama” yang bersifat opresif. Dengan kata lain, lawan dari *free soul* adalah *corruptive mind*, yang mencengkeram tatanan sosial-politik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

masyarakat dan membuat sebuah bangsa menjadi terjajah, pikirannya terkolonisasi, menderita kelumpuhan sistemis, dan *inertia*.

Dalam konteks saat ini ketika *inertia*, *corruptive mind*, dan berkuasanya para oligarki yang telah menggerogoti tegaknya negara hukum dan *rule of law*, secara metaforik saya ungkapkan sebagai “ada yang membusuk dalam darah di tubuh kita”. Jika ada yang harus dibangkitkan, itu adalah *free souls*—jiwa-jiwa merdeka—yang mampu menggunakan akal sehat dan daya kritisnya untuk membongkar tatanan sosial yang telah melumpuhkan elan vital kita sebagai bangsa berdaulat, berintegritas, dan bermartabat.



## 24. Jokowi dan Anies Baswedan<sup>28</sup>

Mungkin ada banyak perbedaan antara Jokowi dan Anies. Gaya bicaranya, blusukannya, taktik melobinya, politik identitasnya, dan capaian kinerjanya. Sebagai sarjana, keduanya lulusan dari universitas yang sama, UGM; keduanya juga punya klaim sebagai orang yang terbebas dari *leletan* Orde Baru dan berhak mengatakan tidak punya sambungan dengan agenda Orde Baru. Namun, belakangan ini mencuat persamaan yang mencolok mata. Argumentasi keduanya sama ketika ditanya apa penyebab banjir, yaitu curah hujan yang tinggi.

Persamaan yang kelihatan “trivial” dan tampak sepele ini, dan banyak orang yang kemudian melupakannya, sesungguhnya memantulkan sebuah masalah yang berakar dalam. Argumentasi penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, baik dari

<sup>28</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 24 Februari 2021.

Jokowi maupun Anies Baswedan, tidak saja memperlihatkan cara berkilah yang jauh dari cerdas, tetapi yang lebih penting, menunjukkan adanya keengganan untuk mengakui kegagalan dan ketidakberanian menyatakan bahwa di balik banjir itu ada persoalan serius menyangkut paradigma pembangunan yang secara struktural salah.

Dalam kaitan ini, klaim keduanya bahwa mereka tidak ke-*leletan* Orde Baru dan apa yang dikerjakan bukan “bablasan” Orde Baru, merupakan dalih berkilah yang lemah dasarnya. Mereka, dalam istilah sahabat saya, Mochtar Pabottingi, memang hanya “bablasan” Orde Baru, artinya sekadar penerus agenda atau proyek Orde Baru. Apa itu proyek Orde Baru?

Pada Bab 16, saya berpendapat bahwa lima puluh tahun pembangunan pasca-1965 telah menghasilkan berbagai bias dan mitos yang makin menjauhkan dari cita-cita kemerdekaan, yaitu tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi mayoritas warga Indonesia. Bukti-bukti statistik menunjukkan dengan gamblang bahwa ketidakadilan sosial makin menganga karena kekayaan hanya digenggam oleh segelintir orang, sementara mayoritas warga masih hidup dalam keterbatasan pangan dan papan.

Pengerukan kekayaan alam Indonesia yang dimulai dengan alasan tidak punya uang, para pemimpin Orde Baru pasca kejatuhan Soekarno, tanpa malu telah meminta-minta ke negara-negara Barat dan para pemimpin perusahaan multinasional untuk memberikan utangan kepada Indonesia yang dianggap telah bangkrut. Inilah sebuah periode ketika ekonomi Indonesia, oleh para ekonom Barat dan para teknokrat bangsa sendiri, dinilai berada pada titik nadir. Gambaran tentang buruknya ekonomi Indonesia itu, secara grafis ditunjukkan dengan angka inflasi yang mencapai 600%, sebuah *magic number* yang sampai hari ini tidak pernah terverifikasi.

Sebuah jalan pintas dalam tikungan sejarah bangsa Indonesia yang terbukti menentukan apa yang kemudian terjadi hingga hari

ini pada momen sejarah itu diputuskan. Melalui UU Penanaman Modal Asing yang disusun atas bantuan konsultan dan staf kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta, menjadi awal dikeruknya kekayaan alam Indonesia sampai habis hingga hari ini. Widjojo Nitisastro dan tim ekonom-teknokratnya mungkin bisa dianggap telah berjasa dalam membangun ekonomi Indonesia dan mengangkat jutaan orang miskin menjadi hidup lebih baik. Namun, dilihat dari situasi saat ini, apakah bangsa Indonesia menjadi lebih adil dan sejahtera, seperti yang dijanjikan dalam proklamasi kemerdekaan?

Almarhum Gunawan Wiradi, seorang intelektual yang mengalami kehidupan di berbagai zaman peralihan antara masa Soekarno, masa Soeharto, dan masa Reformasi, mengungkapkan secara plastis kerisauannya tentang nasib lingkungan yang rusak akibat industri ekstraktif yang sangat ganas mengeruk kekayaan alam Indonesia, “pada zaman Soekarno, tidak ada sebatang pohon pun ditebang” ujarnya sambil tersenyum sinis (pembicaraan pribadi dengan penulis).

Bagi yang tertarik untuk mengetahui secara terperinci bagaimana rombongan pemimpin Orde Baru melakukan kunjungan ke negara-negara Barat untuk mencari utang, dan proses penyusunan UU Penanaman Modal Asing, bisa membaca buku *Power in Motion: Capital in Mobility and the Indonesian State*, (Winters, 1996).

Pencarian utang dan diundangnya modal asing yang berlangsung setelah jatuhnya Soekarno itu, ironisnya, terjadi bersamaan dengan pembunuhan massal anggota PKI, orang-orang yang dianggap PKI, para Soekarno; penahanan dan pemenjaraan, serta pembuangan mereka yang masih hidup, antara lain ke Pulau Buru. Sejarah kelam bangsa Indonesia ini harus diingat kembali sebagai pelajaran yang sangat penting jika tidak ingin mengulangnya di masa depan. *Learning the hard way*, kata orang, untuk mendewasakan diri. Berbagai buku



tentang peristiwa sejarah yang penting ini sudah bisa dibaca oleh generasi muda dan generasi muda harus menilai sendiri dengan hati nurani dan mata hati mereka apa yang telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsanya. Ketika peristiwa sejarah di dalam negeri sendiri tidak dapat dibaca dengan kepala dingin karena mudah tersulut emosi oleh mereka yang masih ingin menanggung keuntungan ekonomi dan politik dari peristiwa ini, jangan heran jika tulisan-tulisan dengan penelitian yang baik masih dihasilkan oleh pengamat-pengamat asing. Buku *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965–1966 in Indonesia*, (Rossa, 2020), adalah salah satu contohnya.

Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika berkilah bahwa penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, sedang melupakan sejarah panjang negerinya yang selama 50 tahun telah dibangun tanpa memedulikan lingkungan alam. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia bukan disebabkan oleh pekerjaannya yang makin produktif, melainkan masih diteruskannya ekonomi ekstraktif dengan mengeruk habis kekayaan alam.

Banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya memiliki hubungan langsung dengan kerusakan lingkungan yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun ini dan tidak ada tanda-tanda akan dihentikan. Bukti-bukti empiris menunjukkan jika Pulau Jawa mulai tenggelam ke lautan, Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, hutan tropisnya sudah gundul, dan Papua pasti akan menyusul. Bencana ekologis yang makin nyata ini ternyata masih dimungkiri oleh para pemimpin resmi negeri ini. Dalam konteks ini, Jokowi dan Anies Baswedan tidak ada bedanya, banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi.



Sumber: Lestari (2021)

## 25. Borobudur, Medang, dan Keindonesiaan<sup>29</sup>

Mas Bagiono Djokosumbogo, seorang yang lama berkecimpung di dunia pendidikan kejuruan, dan pertama kali saya kenal melalui Pak Benny Hoed, rupanya telah membawa saya mengenal sebuah komunitas yang untuk sementara saya sebut saja sebagai Komunitas Medang. Pak Benny Hoed adalah seorang profesor linguistik di Jurusan Sastra Prancis UI, dan menjadi sahabat Pak Edi Masinambow, senior saya di LIPI yang ahli tentang etnolinguistik.

Sebelum wafat, keduanya menjadi mentor tim LIPI yang sedang mengumpulkan data tentang bahasa-bahasa yang hampir punah (*endangered languages*) di berbagai tempat di kawasan timur Indonesia. Mungkin karena sering terlibat dalam diskusi-diskusi di LIPI itu, suatu hari Pak Benny Hoed meminta saya untuk

<sup>29</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 9 Agustus 2021.

menghadiri sebuah *workshop* di Bandung, katanya menyangkut kebudayaan dan saya cocok untuk mengikutinya.

Pada 18 November 2015, selang tidak lama setelah *workshop* di Bandung itu, Pak Benny Hoed wafat. Mengenang Pak Benny Hoed, menengahkan seorang yang sangat terpelajar dan mentor berdiskusi yang selalu menghargai perbedaan pendapat, tanpa ada sikap melecehkan sedikit pun.

*Workshop* itu diadakan selama dua hari di sebuah hotel, yang saya duga tadinya sebuah rumah besar di sekitar Jalan Dipati Ukur, Bandung. *Workshop* itu dihadiri tidak lebih dari dua puluh peserta, kebanyakan dari Bandung. Sesuai dengan minat Mas Bagiono, *workshop* itu mendiskusikan tentang situasi pendidikan nasional yang dianggap sedang mengalami semacam ketidakjelasan arah.

Semua peserta diminta untuk menyampaikan pandangannya masing-masing dalam format *roundtable discussion*. Seperti biasa, membicarakan pendidikan selalu mengasyikkan, kita seperti memasuki sebuah labirin, tidak tahu jalan masuk dan jalan keluar. Tetapi, menariknya adalah obrolan-obrolan *off-sessions* ketika sarapan pagi atau saat rehat kopi.

Saya baru mengetahui bahwa Pak Benny Hoed, Mas Bagiono, dan beberapa peserta sepuh lain yang berkumpul dalam *workshop* itu, antara lain Profesor Bambang Hidayat, astronom senior ITB, Pak Hadiwaratama, seseorang yang juga menekuni pendidikan kejuruan, dan beberapa peserta lain yang baru saya kenal adalah komunitas epistemik.

Sebagian dari mereka, misalnya, pernah sama-sama belajar di Prancis dan tetap menjalin hubungan baik meskipun sudah terpisah karena bekerja di tempat yang berbeda. Di situlah saya mengenal sebuah komunitas yang meminati arkeologi, tidak sekadar sebagai ilmu, tetapi lebih sebagai bagian dari apa yang ada pada masa kini. Masa kini adalah sebuah kesempatan untuk

memahami apa yang telah terjadi pada masa lalu. Masa lalu perlu dipahami untuk memberi makna bagi masa kini dan memberi inspirasi bagi masa yang akan datang. Pada tahun 2010, kelompok ini berhasil mendaftarkan aksara Jawa, Hanacaraka, ke Unicode Consortium setelah tiga tahun berjuang, dibantu *expert* dari UNESCO agar aksara Jawa itu tidak punah.

Komunitas epistemik adalah komunitas yang direkat oleh kesamaan minat terhadap ilmu pengetahuan. Dalam komunitas yang saya lihat ini, pengetahuan tentang berbagai artefakinggalan masa lalu, seperti bahasa, keris, juga candi-candi tidak sekadar didiskusikan dengan niat untuk menganalisis, tetapi juga dengan rasa gairah mencintai dan menghormati yang telah dicapai oleh mereka yang berasal dari masa lalu.

Belum lama ini, saya dikirim sebuah rekaman video oleh Mas Bagiono tentang kegiatan komunitas epistemik yang bernama *Medang Heritage Society* (Ki Demang Sokowaten, 2013). Dalam video itu, antara lain ditampilkan presentasi Dr. Budiono Santoso, yang ternyata adalah adik dari Pak Hadiwaratama, yang saya kenal di *workshop* Bandung. Dr. Budiono adalah seorang ahli farmakologi klinik dari UGM, tetapi presentasinya adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di balik artefak Borobudur dan Prambanan.

Menurut Dr. Budiono, kedua artefak yang dibangun sekitar abad ke-9 itu dikerjakan selama 70 tahun oleh sebuah kerajaan yang bernama Medang. Dr. Budiono Santoso menunjukkan bahwa bangunan-bangunan itu tidak saja merefleksikan sebuah tingkat dan kualitas masyarakat yang memiliki penguasaan ilmu dan teknologi yang tinggi pada masanya, tetapi juga masyarakat dengan tatanan sosial politik yang stabil dan diduga menghargai kesetaraan warganya.

Sejak ditemukan oleh Belanda dalam bentuk reruntuhan, mengalami restorasi, sampai menjadi bentuknya yang sekarang, Borobudur dan Prambanan menjadi warisan dunia (*world*

*heritage*) dan terus menjadi rebutan banyak pihak. Dalam situasi melihat Borobudur, dan juga Prambanan sebagai warisan yang terus diperebutkan itu, kita sesungguhnya telah melupakan apa yang telah diungkapkan oleh Dr. Budiono Santoso tentang peradaban Medang yang telah membangun Borobudur dan Prambanan itu. Kita melupakan bahwa peradaban Medang pada abad ke-9 itu telah menunjukkan sebuah masyarakat yang telah memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi untuk zamannya.

Setelah Borobudur yang semula bernama Taman Purbakala diubah menjadi Taman Wisata, memang terjadi pergeseran yang mendasar dari makna artefak ini bagi pemerintah dan implikasinya bagi masyarakat. Peralihan masa Presiden Soekarno dan Profesor Soekmono, perancang Taman Purbakala, ke Presiden Soeharto dan Menteri Budiardjo, yang menjadikannya Taman Wisata, merupakan bagian dari komoditas perekonomian nasional. Namun, seperti yang kita ketahui, Borobudur menyimpan daya-daya enigmatik di dalam dirinya yang dapat menembus batas ruang maupun waktu. Peradaban Medang, sama seperti peradaban-peradaban besar dunia lainnya, adalah pantulan pencapaian kebudayaan tertinggi dari sebuah masyarakat pada masanya.

Daya enigmatik yang mampu menembus batas-batas ruang dan waktu ini menjadi tantangan bagi setiap generasi pasca Medang, namun terbukti mampu atau gagal dalam menangkap pesan utama yang tersimpan dalam bentuk wadah Burobudur dan Prambanan sebagai sebuah artefak arkeologis dan warisan budaya.

Kegagalan atau keberhasilan dalam menangkap daya-daya enigmatik Borobudur pada setiap masa, akan terpantul pada berbagai bentuk ekspresi dari komunitas-komunitas yang memberikan respons terhadap berbagai makna dan arti Borobudur, sebagaimana atau seperti apa komunitas-komunitas

itu—baik lokal, nasional, maupun global—meresapi dan mengartikulasikannya.

Dalam pengamatan saya yang terbatas, berbagai bentuk resepsi dan artikulasi dari komunitas-komunitas lokal di sekitar Borobudur dapat dianggap sebagai petunjuk sejauh mana daya-daya enigmatik Borobudur telah ditangkap dan dimaknai kemampuan sumber daya lokal, baik yang bersifat material maupun imajinatif.

Bentuk serta kualitas resepsi dan artikulasi komunitas-komunitas lokal itu juga akan ditentukan oleh sejauh mana otonomi dan independensi yang mereka miliki, terutama dalam relasinya dengan kekuatan politik negara dan kekuatan ekonomi pasar yang antara keduanya tidak jarang saling berkelindan.

Dalam pengamatan saya, dua komunitas lokal yang berbasis tradisi dan budaya telah membuktikan kemampuannya untuk terus menjaga resepsi dan artikulasi mereka terhadap Borobudur. Komunitas lokal yang pertama adalah Komunitas Lima Gunung dan komunitas kedua adalah Komunitas Ruwat Rawat Borobudur. Kedua komunitas lokal dua dekade itu telah membuktikan bahwa dirinya selaku *watchdog* dari makna dan marwah Borobudur sebagai pusat kebudayaan rakyat dan orang-orang biasa. Makna dan muruah Borobudur oleh kedua komunitas lokal ini diterima dalam artinya yang bersifat keseharian, bukan dalam makna keadilan.

Apabila Komunitas Lima Gunung melakukan aktivitasnya dari lereng-lereng Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Menoreh, dan Sumbing; Komunitas Ruwat Rawat selalu menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat kegiatannya. Secara metafora, Komunitas Lima Gunung bisa dianggap sebagai lingkaran luar (*outer circle*), sementara Komunitas Ruwat Rawat sebagai lingkaran dalam (*inner circle*) dari Candi Borobudur, dalam posisinya sebagai artefak arkeologis dan warisan budaya peradaban Medang yang telah berusia lebih dari satu milenium itu.

Sampai di sini, mungkin perlu disadari bahwa dalam konteks Nusantara, peradaban Medang hanyalah salah satu dari puluhan, bahkan ratusan peradaban lain yang tumbuh dan berkembang di berbagai tempat di Indonesia.

Oleh karena itu jika dalam tulisan pendek ini disebutkan adanya komunitas epistemik Medang, komunitas lokal Lima Gunung, dan Ruwat Rawat Borobudur; hampir bisa dipastikan bahwa komunitas-komunitas itu hanyalah sebagian kecil dari puluhan, bahkan mungkin ratusan komunitas-komunitas lain yang juga berusaha memberi arti dan makna dari berbagai artefak arkeologis dan warisan budaya yang berserakan di berbagai pelosok.

Seorang antropolog tingkat dunia yang mendalami tentang Indonesia, Clifford Geertz, dalam sebuah refleksinya menyatakan bahwa peradaban Indonesia akan tumbuh dan berkembang dengan subur jika bertolak dari karakternya yang penuh keragaman. Sebaliknya, peradaban Indonesia akan mati dan memudar jika terlalu menekankan pada dimensi kesatuan dan homogenitasnya (Mackie, 1980).

Mungkin, saat ini, waktunya kita mempertanyakan, apa yang sesungguhnya sedang kita cari bersama sebagai sebuah bangsa? Sebuah jati diri dan identitas keindonesiaan tunggalkah atau beragam dan penuh warna? Dalam bentuk pertanyaan yang diformulasikan secara berbeda, pertanyaannya menjadi, keindonesiaan seperti apa yang akan kita bangun, apakah bersifat sinkretik atau sintesis?

Dirgahayu Indonesia!



BAGIAN 3

# Jejak Tokoh Intelektual Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.





## 26. Beberapa Kenangan dengan Bisri Effendy<sup>30</sup>

Menjelang memasuki usia 70 tahun, makin sering kita mendapatkan kabar teman sebaya meninggal dunia karena sakit, “dan kematian semakin akrab”, kata penyair Subagio Sastrowardjo. Semalam, seorang rekan mengabarkan, Bisri Effendy teman sekantor di LIPI dulu, wafat. Saya bukan orang yang tergolong dekat, tetapi dalam kesempatan yang tidak terlalu banyak bergaul dengan almarhum, saya memiliki pengalaman tersendiri yang penting untuk dikenang.

Ada sebuah kualitas kemanusiaan tersendiri, yang saya kira, mereka yang mengenal Bisri harus mengakui kecerdasannya, seperti sesuatu yang bersifat bawaan, bukan karena pendidikan formalnya terlantar atau sengaja dia telantarkan. Berbeda dengan

<sup>30</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 18 Agustus 2020.

rekan-rekan di kantor resminya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pendidikan formal adalah sesuatu yang harus dikejar, dan menjadi doktor adalah standar minimal untuk diakui eksistensinya sebagai peneliti, atau bahkan harus mengejar status sebagai profesor riset. Bagi Bisri, semua itu sepertinya tidak penting, atau dengan gaya bicara, *guyonannya* yang khas, dan senyumnya yang setengah dikulum, dia mengatakan “enggak penting-penting amatlah”. Mungkin karena dia orang Jawa Timur (Jember), seperti tokoh NU yang dekat dengannya, Gus Dur (Jombang), *guyon* (bercanda), menjadi bagian dari kesehariannya, *playful*, menurut Londo.

Dalam pergaulan saya yang cukup terbatas, saya tidak mengetahui apa yang Bisri anggap paling penting dalam hidupnya. Dengan caranya sendiri, saya tidak meragukan keseriusannya dalam memikirkan hal-hal substansial bagi kemajuan bangsanya. Sebagai orang yang dibesarkan dalam tradisi Islam tradisional, kemudian bekerja sebagai peneliti bidang keagamaan dan kebudayaan di LIPI, kecerdasan bawaan yang dimilikinya telah membuat posisi intelektualnya sulit dicari bandingannya, dan perlu mendapatkan catatan panjang tersendiri.

Pada pertengahan tahun 90-an ketika dunia intelektual berada dalam situasi kegerahan karena kehidupan publik yang represif dan pencarian alternatif untuk mengekspresikan kebebasan, kami di LIPI juga merasa perlu melakukan sesuatu. Saya ingat, saat itu Bisri, Mohamad Sobary, dan saya berinisiatif untuk menyelenggarakan semacam forum yang bisa merefleksikan keresahan intelektual yang ada pada saat itu. Tanpa dukungan sepeser pun dari LIPI, kecuali dukungan izin untuk menyelenggarakan kegiatan dari Deputy Ketua LIPI Bidang Ilmu Sosial dan Kebudayaan saat itu, Pak Edi Masinambow, kami bergerak mencari dana dan pembicara untuk merealisasikan forum itu.

Sobary dengan kemampuan hubungan baiknya, berhasil meminta sumbangan dari *Kompas*, *Tempo*, dan *Harian Republika* yang saat itu baru terbit. Dalam pencarian itu, kami hanya bermodalkan semangat, dan menemui tokoh-tokoh yang kami anggap penting untuk menyuarakan keprihatinannya tentang keadaan yang terasa sumpek itu. Gayanya yang informal dan menyenangkan, dia tunjukkan dengan membawa buah cempedak ketika tengah rapat mempersiapkan acara itu dengan Pak Masinambow, saat itu datang juga Kiki Hermawan Sulisty, yang masih belum terkenal. Saya ingat, bersama Bisri menemui Todung Mulya Lubis di kantornya, di kawasan Sudirman, bersama Sobary menemui Romo Mangun yang sedang menjadi pembicara di *Kompas*. Lalu, pada hari itu, kami berhasil mengundang antara lain Todung Mulya Lubis, Romo Mangun, Goenawan Mohamad, Asrul Sani, Emha Ainun Najib, Rizal Ramli, Mochtar Pabottingi, dan Parni Hadi, dalam sebuah forum yang kami namakan “Refleksi Akhir Tahun”. Kami merasa puas karena berhasil membuat acara itu dan yang kami lakukan selebihnya hanya candaan.

Setelah Soeharto lengser sekitar akhir tahun 1990-an dan euforia kebebasan memenuhi udara, lagi-lagi Bisri memiliki gagasan yang menarik. Dia berhasil untuk mengajak Ford Foundation, yang saat itu, *program officer* untuk bidang kebudayaannya adalah Jeniffer Lindsay. Tanpa kerumitan birokrasi, Ford Foundation mendukung penelitian tentang kebijakan kebudayaan yang dilakukan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dengan dana yang sangat besar. Kembali Bisri dan Mohamad Sobary bergerak, dibantu oleh Thung Julan, Anas Saidi, Dedi Adhuri, Suwarsono, Sutamat Aribowo, Fadjar Ibnu Thufail, Muridan Widjojo, Antariksa, dan Makmuri Soekarno, mengolah rencana penelitian, menyelenggarakan *workshop*, dan mengajak para peneliti dari luar LIPI, antara lain Endo Suanda, Nirwan Dewanto, Nirwan Arsuka, Amrih Widodo, Daniel Dhakidae, Umar Kayam, Gadis Arivia,

Melani Budianta, Manneke Budiman, Hairus Salim, dan Abdul Mun'im, untuk mengeroyok beberapa aspek kebudayaan yang kami pilih yaitu agama, sastra, seni pertunjukan, bahasa, etnisitas, dan pendidikan. Sebuah laporan yang lebih dari seribu halaman tebalnya menjadi bukti tuntasnya penelitian itu. Alan Feinstein, orang yang sangat berpengalaman dalam berbagai Foundation di Indonesia, dalam emailnya memuji hasil penelitian itu.

Awal tahun 2000-an, saya tahu Bisri bersama Sutamat Aribowo dan beberapa orang dari luar LIPI mengikuti program doktor kerja sama UI dan Universitas Leiden dalam kajian tradisi lisan. Para kandidat doktor ini diberi kesempatan mengikuti kuliah dan studi kepustakaan di Universitas Leiden, di bawah bimbingan Henk Meijer, seorang profesor di Leiden yang ahli tentang sastra Melayu. Entah mengapa, Bisri tidak sampai menyelesaikan studi doktornya ini. Pada sebuah kesempatan menghadiri seminar yang diadakan oleh Museum Ethnologi di Osaka, Jepang, saya sempat bertemu dengan Henk Meijer. Pembicaraan kami menyinggung orang-orang LIPI yang belajar di Leiden, terutama yang menjadi bimbingannya karena dia tahu saya dari LIPI juga. Saat itu, Henk Meijer mengatakan bahwa di antara tiga orang yang dia bimbing, Bisri yang paling pintar.

Sekitar pertengahan tahun 2000-an, saya mendengar bahwa Bisri mengajukan pensiun dini dari LIPI dan mendirikan sebuah LSM yang bergerak di bidang kebudayaan, Desantara. Saya tidak tahu apa arti Desantara, tetapi dugaan saya, itu pilihan kata dari Bisri. Sejak itu, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Bisri Effendy, tetapi saya tahu dia masih terus menggeluti aktivitasnya di persilangan antara keislaman dan kebudayaan. Mungkin sekitar tahun 2015-an ketika sektarianisme mulai dirasakan mengancam kehidupan bersama, saya sempat bertemu dengan Bisri di sebuah kafe di Kemang, yang dijadikan tempat pertemuan teman-teman ikatan kekerabatan antropologi yang digagas oleh Yando Zakaria untuk menggalang respons terhadap meningkatnya ancaman

sektarianisme bagi kehidupan publik. Dalam pertemuan itu, tentu saya dan Bisri berjanji untuk bertemu kembali, namun itu menjadi pertemuan tatap muka yang terakhir dengan Bisri.

Sekitar bulan Mei, Bisri mengirimkan sebuah tulisan lamanya tentang komunisme. Saat itu, di luar sana sedang ramai dibicarakan mengenai bangkitnya hantu komunisme. Umumnya, isu komunisme ramai dibicarakan menjelang bulan September. Atas izinnya, tulisan lama Bisri yang menurut pendapat saya masih relevan itu, saya bagikan ke beberapa teman dekat. Karena banyaknya pembaca yang berminat, Jumardi Putra yang mengelola rubrik budaya di *Kajanglako*, memuat tulisan itu. Kemudian, terbitlah tulisan Bisri yang berjudul “Komunisme, Siapa Takut” (2020). Bisri tampak senang karena tulisannya menjadi perbincangan di media sosial. Saya sendiri ikut merespons tulisan Bisri di *Kajanglako* yang berjudul “Hantu Komunisme: Sebuah Psikologi Politik” (lihat Bab 15).

Melalui aplikasi *WhatsApp*, saya mengatakan agar Bisri menulis kembali. Ia berjanji akan menulis kembali setelah dua tulisan yang dia janjikan kepada orang lain selesai. Dia juga menceritakan bahwa ia sering mengunjungi kampungnya, Jember. Kami juga berjanji akan bertemu karena setelah pensiun, saya sering berkunjung ke Malang. Namun, janji-janji itu belum sempat terpenuhi. Sang Khalik yang mencintainya meminta Bisri Effendy untuk segera kembali. Ada rasa kehilangan yang menyesak hati ketika mendengar dia pergi untuk selamanya. Selamat jalan Bung Bisri, sampai ketemu lagi!



Sumber: Pambudy & Khoiri (2009)

## 27. Sejarah Kecil Bersama Taufik Abdullah<sup>31</sup>

Saya yakin beliau tidak ingat. Saat itu, sekitar pertengahan Desember 1979, saya duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat lelah, lesu tidak bersemangat, mungkin baru pulang dari luar negeri dan masih *jetlag*. Saya tidak yakin kalau dia ikut minum bir atau menenggak sake yang malam itu *mbanyu mili*. Malam itu, Mitsuo Nakamura mengadakan pesta perpisahan. Saya hadir bersama Wikrama, teman seasrama di Daksinapati Rawamangun, mahasiswa Fakultas Hukum dan Pujiyanto mahasiswa Fakultas Sastra. Kami diundang Mitsuo Nakamura yang berakhir masa tugasnya sebagai representatif Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University, di Indonesia. Pesta itu diadakan di rumah sekaligus kantornya di Jl. Kebon Binatang, Cikini. Ketika tahu orang yang duduk di sebelah saya adalah Pak Taufik

<sup>31</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 17 September 2020.

Abdullah, saya beranikan diri bertanya bagaimana jika ingin masuk Leknas LIPI. Seingat saya, dia menjawab ogah-ogahan, sambil menyelonjorkan kakinya, “masukin lamaran saja”.

Mitsuo Nakamura, saat itu saya kenal sebagai orang Jepang dengan penampilan yang ramah, tidak tahu dia sebenarnya siapa. Bertemu Mitsuo pun secara kebetulan, saat sama-sama hadir mendengarkan ceramah Sutan Takdir Alisjahbana, yang diselenggarakan oleh Japan Foundation. Dihitung sampai dengan hari ini, artinya sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Seingat saya, yang hadir dalam ceramah STA itu tidak terlalu banyak dan topiknya seputar masa depan umat manusia. Ketika ceramah itu usai, saya dan beberapa teman dari UI sempat berdiskusi dengan STA dan Mitsuo. STA sempat bertanya di mana saya kuliah, dan ketika saya mengatakan di Fakultas Psikologi UI, STA berujar, “kalau begitu, bisa jadi penulis nanti”. Mungkin yang dia maksud adalah menjadi pengarang atau lainnya. Mitsuo—saya kemudian tahu merupakan kebiasaan orang Jepang—membagikan kartu namanya dan mencatatkan sebuah tanggal di baliknya, sambil mengatakan akan ada pesta kecil di tanggal itu.

Di pesta kecil Mitsuo Nakamura, yang di kemudian hari saya ketahui sebagai seorang ahli tentang Muhammadiyah, takdir telah menentukan saya. Rumah sekaligus kantor perwakilan CSEAS itu tipikal rumah lama di kawasan Menteng, tidak terlalu besar, dengan halaman depan yang agak luas—seingat saya—untuk tempat pesta kecil, makan, minum, dan mengobrol santai. Saya lihat, malam itu Goenawan Mohamad seperti berbisik dengan Ismid Hadad. Ada pula Onghokham, Nono Anwar Makarim, Marsilam Simanjuntak, Alfian, Thee Kian Wie, Melly G. Tan, Edi Masinambow, Lopian, dan masih banyak lagi yang tidak saya kenal. Malam itu menjadi malam yang penting karena dapat melihat begitu banyak orang yang selama ini hanya saya ketahui nama dan tulisannya. Akhir tahun 1970-an, dunia intelektual belum besar.



“Cuma ada saya dan Alfian, kalau soal politik”, begitu ucapan Pak Taufik yang saya dengar setelah saya bekerja di Leknas. Pesta itu meriah, kami, mahasiswa undangan nggak penting, hanya makan dan banyak sekali minum bir. Malam itu, kami pulang naik bemo dengan kepala pusing setengah mabuk.

Januari 1980, saya memasukkan lamaran tulis tangan ke Leknas-LIPI dengan rekomendasi dua dosen saya di Fakultas Psikologi UI, Pak A.S. Munandar dan Bu Suwarsih Warnaen. Beberapa hari sebelum memasukkan lamaran itu, saya mendatangi kantor Leknas LIPI untuk memastikan cara pelamaran. Saat memasuki kantor itu, di bagian tengah, ada taman kecil dan satu pintu terbuka yang merupakan ruang kerja Pak Edi Masinambow.

Pak Edi, saat itu menjabat sebagai Sekretaris Leknas-LIPI, menyarankan mengirimkan lamaran tertulis saja. Ketika tahu saya berasal dari Fakultas Psikologi UI, menurutnya, saya bisa mengikuti penelitian Pak Lopian tentang maritim di Maluku. Tidak lama, saya menerima surat yang ditandatangani oleh Pak Sinaga, Kepala Bagian Kepegawaian Leknas, isinya pendek, yang menyatakan lamaran saya diterima dan harus datang ke Leknas pada hari, tanggal, dan jam yang disebutkan.

Ketika saya datang, saya diterima oleh Pak Suharso, Direktur Leknas LIPI, dan diminta untuk mulai masuk kerja. Saya meminta waktu sekitar dua minggu karena masih harus mengerjakan tugas dari Koran *Salemba* untuk meliput kehidupan kampus di beberapa negara ASEAN.

Pada awal Januari 1980, bersama Mohamad Sobary, teman seasrama dari FISIP UI, kami ditugaskan oleh Koran *Salemba* untuk menulis tentang kehidupan mahasiswa ASEAN. Tugas itu diberikan oleh Wikrama, Pemimpin Redaksi Koran *Salemba*. Kami dibuatkan paspor dan dicarikan tiket PP ke Singapura. Sesampainya di Singapura, kami naik kereta api ke Kuala Lumpur, kemudian ke Bangkok, Thailand. Di Kuala Lumpur, kami menginap di rumah Umar Junus, ahli kritik sastra Indonesia yang



menjadi pembicara di University Malaya. Di Singapura, kami menumpang di apartemen Pak Onghokham yang saat itu menjadi *visiting fellow* di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Sepulang dari *lawatan* itu, saya langsung bekerja di Leknas LIPI. *Lawatan* itu ditulis berseri oleh Sobary di *Majalah Gadis*. Sobary memang telah menjadi penulis terkenal sejak mahasiswa, sementara saya hanya menyukai jalan-jalan. Tidak lama setelah saya masuk LIPI, Sobary menyusul di LIPI, dia masuk di Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN). Pada tahun 1986, Leknas dan LRKN dilebur dan menjadi empat pusat penelitian (politik, ekonomi, kemasyarakatan-kebudayaan, dan kependudukan).

Oleh Pak Suharso, Direktur Leknas-LIPI, tanpa ditanya apa saya inginkan, saya ditempatkan sebagai calon peneliti di Pusat Penelitian Penduduk yang dikepalainya. Saya mendapat kursi di kantor Leknas LIPI, di Jln. Raden Saleh, tidak jauh dari RS Cikini. Di bagian kependudukan itu, ada teman nakal. Ia adalah Miftah Wirahadikusumah yang selalu mengajak saya untuk ikut seminar di Leknas Jln. Gondangdia Lama 39. Seminar yang hampir setiap minggu diadakan itu, bagi saya, bagian penting dalam ritual untuk menjadi peneliti di Leknas. Untuk itu, saya harus mengucapkan terima kasih pada Miftah Wirahadikusumah, teman di kependudukan yang sedikit urakan itu.

Seminar mingguan di kantor Leknas itu selalu diadakan di ruang seminar yang tidak terlalu luas di bagian depan kantor. Pembicara seminar ini selalu menarik, tidak jarang juga mengundang peneliti asing. Dalam seminar itu, saya sering melihat Pak Taufik, Bu Melly G. Tan, Pak Thee Kian Wie, Pak Lopian, Pak Alfian, juga Bung Mochtar Pabottingi, dan Rusdi Muchtar. Seminar dan diskusi dilakukan informal dengan suasana yang kolegial.

Adakalanya, yang menjadi pembicara adalah Sabam Siagian dan Fikri Jufri, keduanya wartawan senior, mereka menceritakan kunjungannya ke Vietnam. Leknas saat itu memiliki daya tarik

tersendiri yang dapat mempertemukan intelektual dari berbagai latar belakang. Jadi, tidak mengherankan jika Ignas Kleden bertemu calon istrinya, Mbak Ninuk, peneliti Leknas yang dekat dengan Pak Taufik; dan Daniel Dhakidae bertemu Mbak Lily, sekretaris Pak Taufik, di Leknas LIPI. Di kantor Leknas Jln. Gondangia itu juga terdapat perpustakaan yang cukup lengkap untuk ilmu-ilmu sosial.

Waktu saya dalam menjadi calon peneliti tidak lama, pada awal tahun 1982, saya berangkat dengan beasiswa dari pemerintah Australia untuk mengikuti program master di bidang demografi sosial di Australian National University (ANU), Canberra. Awal tahun 1984, saya kembali, dan menjelang akhir 1986, kembali lagi ke ANU untuk menulis disertasi program doktor, juga di bidang demografi sosial. Pada pertengahan 1990-an, kesempatan berhubungan dengan Pak Taufik tidak banyak, kecuali dalam seminar-seminar. Setelah saya menyelesaikan program doktor pada tahun 1990 dan kembali ke LIPI tahun 1991, sempat diminta Pak Taufik untuk mengerjakan sebuah penelitian kecil melalui Yayasan Ilmu Ilmu Sosial (YIIS) yang diketuai oleh Profesor Selo Sumardjan. Rapat YIIS biasanya dilakukan di kantor YIIS atau di rumah Pak Selo Sumardjan, di Jl. Kebumen, Menteng. Dalam rapat-rapat YIIS, saya melihat Pak Taufik, yang biasanya garang, terlihat lebih jinak di hadapan Pak Selo, seniornya di Cornell University. Selain dengan Pak Selo, orang yang tampak disegani Pak Taufik adalah Profesor Sartono Kartodirdjo, gurunya sejak memasuki jurusan sejarah di UGM.

Menjelang dan setelah 1998, saya menjadi lebih sering bertemu dengan Pak Taufik karena menjadi Kapus Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), saat Pak Taufik selalu berkamar di sana meskipun telah pensiun. Di PMB ini, kamar Pak Taufik juga dijadikan kantor Southeast Asian Studies Program (SEASP) yang dipimpinnya. Melalui bendera SEASP ini, Pak Taufik melakukan kerja sama penelitian dengan berbagai

lembaga dari luar negeri. Setelah Pak Taufik menjadi Ketua LIPI, SEASP menjadi Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR), sebuah nama lain dari pusat kajian wilayah (*area studies*). Ketika masih bernama SEASP, saya beberapa kali diajak ikut serta, salah satunya pada penelitian tentang demokrasi pasca-Soeharto bekerja sama dengan Universitas Goteborg, Swedia. Pak Taufik mengatakan bahwa riset yang dia pimpin adalah riset dengan anggota para bintang. Tim riset dengan Swedia ini anggotanya merupakan tokoh-tokoh menarik, antara lain, Ryaas Rasyid, Arbi Sanit, A.S. Hikam, Mochtar Pabottingi, Haris Syamsuddin, dan Hans Antlov. Riset ini berjalan beberapa tahun dan setiap bulannya, kami mengambil gaji melalui bendahara Pak Taufik, Pak Sukri Abdurrachman, yang mencatat dengan teliti uang kami, berupa mata uang Swedia, Kronos.

Hal yang menyenangkan dari menjadi anggota tim riset Pak Taufik adalah kesempatan mengikuti seminar di luar negeri yang setiap tahun berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya ingat, kami beberapa kali ke Eropa, antara lain, ke Hamburg, Jerman dan Goteborg, Swedia. Dalam kesempatan seminar ke luar negeri inilah, saya sedikit mengenal lebih jauh Pak Taufik. Salah satu pengalaman tak terlupakan bersama Pak Taufik adalah ketika kami (Pak Taufik, Bung Mochtar, AS Hikam, dan saya) oleh sang tuan rumah, Profesor Sven Cederroth, di tengah udara malam yang dingin diajak menonton opera di sebuah gedung teater di Goteborg. Selama opera berlangsung, saya menjadi orang udik yang memasuki dunia lain, sebuah dunia yang sangat beradab, dan kami bukanlah bagiannya.

Akhir 1998 ketika udara Jakarta masih dipenuhi euforia Reformasi, saya mendapat undangan dari Profesor Myron Weiner untuk menghadiri *workshop* tentang *political demography* di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Amerika Serikat. Saat itu, Pak Edi Masinambow sedang menjadi *fellow* di International Institute of Asian Studies (IIAS), Leiden.

Pak Edi meminta saya singgah di Leiden untuk bertemu dengan Wim Stokhof, Direktur IIAS dan Jos Platenkamp Direktur Southeast Asian Studies, Departement of Ethnology Munster University, Jerman. Pak Edi menggagas kerja sama PMB dengan IIAS tentang penelitian di Papua dan pengiriman mahasiswa Indonesia ke Munster University. Ketika Pak Taufik tahu saya akan ke Leiden, ia menyarankan saya untuk menginap di Hotel Mayflower. “Sebelahnya McDonald, jadi mudah cari makan”, ujarnya. Saya mengikuti saran Pak Taufik karena saya belum pernah ke Belanda. Setelah itu jika saya ke Leiden, saya selalu menginap di Hotel Mayflower.

Tidak lama setelah Pak Taufik menjabat sebagai Ketua LIPI, saya pamit karena lamaran saya untuk menjadi *visiting fellow* di Netherland Institute for Advance Studies (NIAS) untuk periode 2000–2001, diterima. Saya telah menyampaikan kepada Pak Ardjuno Brojonegoro—yang saat itu menjadi Deputy IPSK—juga kepada Pak Taufik, sebelum saya menerima jabatan sebagai Kapus PMB bahwa jabatan sebagai Kapus akan saya tinggalkan jika lamaran saya di NIAS diterima. Ketika saya datang ke kamarnya sebelum berangkat ke NIAS untuk pamitan, beliau sedang bersama Sukri Abdurrchman, menghadapi setumpuk surat yang satu per satu harus ditandatangani. Beliau tampak cuek ketika saya pamiti, kesan saya, dia nggak senang saya meninggalkan jabatan sebagai Kapus. Mungkin juga, dia tidak senang saya diterima di NIAS. Tidak banyak orang Indonesia diterima di NIAS, hanya Anak Agung Gede Agung, Koesnadi Hardjasoemantri, Sartono Kartodirdjo; dan dari LIPI hanya Pak Taufik dan Pak Thee. Saya bisa ke NIAS atas rekomendasi Pak Thee Kian Wie. NIAS terletak di sebuah kota kecil Wasennar, antara Leiden dan Den Hague, dan terkenal sebagai daerah elite yang tenang. Di NIAS selain saya yang dari Indonesia, ada pula Irwan Abdullah dari UGM yang berpasangan dengan Profesor Benjamin White dari Institut of Social Studies (ISS), Den Haag.

Sepulang dari NIAS, saya kembali ke PMB karena status kepegawaian saya rupanya sudah dipindah ke PMB. Kapus pengganti saya adalah Mas Muhamad Hisyam yang baru menyelesaikan doktornya di Leiden University. Oleh Pak Taufik, dia telah dipersiapkan untuk menduduki jabatan itu. Sebelum saya pulang, rupanya ada pemungutan suara untuk memilih Kapus baru dan nama saya diikutkan. Konon, dalam pemungutan suara itu angka saya lebih tinggi dari Mas Hisyam, tetapi Pak Taufik memilih menetapkan Mas Hisyam sebagai Kapus. Sebagai Ketua LIPI, tentu Pak Taufik memiliki hak prerogatif memilih Kapus. Mendengar hal itu, saya tidak merasa masalah.

Mas Hisyam memberi saya kamar kerja di bekas kamarnya, di Lantai 9 Gedung Widyagraha. Kamar itu sebelumnya adalah kamar Bu Melly G. Tan. Di Lantai 9 itu juga, Pak Taufik yang sebagai Ketua LIPI, rupanya sudah digantikan oleh Pak Umar Anggoro Jenie dari UGM. Setahu saya, beliau sibuk menjadi koordinator Asian Public Intellectuals (API), *fellowship program* dari Nippon Foundation, dibantu sahabat saya, John Haba.

Setelah Soedjatmoko, mungkin ilmuwan sosial Indonesia yang paling banyak memperoleh penghargaan di luar negeri adalah Pak Taufik, di antaranya hadiah paling bergengsi di Asia, *Fukuoka Prize*. Dibandingkan kami yang lebih muda, aktivitas Pak Taufik sulit ditandingi. Dia pernah mengatakan, saat di Leknas, “hanya ada saya dan Alfian”. Setelah pensiun, dia juga mengatakan “hanya Thee Kian Wie yang bisa menandingi dalam jumlah publikasi”. Pak Taufik adalah sedikit orang yang berhak menyombongkan diri dan semua yang mengenalnya juga sangat memahami kebiasaannya marah-marah dalam seminar-seminar. Profesor Bambang Hidayat dari ITB yang sama-sama menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), sedikit bercerita, “Saya gemeteran jika Pak Taufik sudah mulai bicara”. Saya bukan orang yang dekat dengan Pak Taufik meskipun dia orang yang telah mendorong saya memilih bekerja di Leknas LIPI.

Pertemuan tidak disengaja di pesta kecil Mitsuo Nakamura lebih dari 40 tahun yang lalu sesungguhnya menjadi kesempatan saya untuk bisa berbicara banyak dengan Pak Taufik. Sejak malam itu, rupanya sejarah kecil saya bersama Pak Taufik Abdullah dimulai.

Pada tahun 1977–78 ketika mahasiswa melakukan demo-demo menentang Orde Baru, Pak Taufik, Pak Thee Kian Wie, dan Bu Melly G. Tan, adalah peneliti Leknas LIPI yang ikut menandatangani Surat Keprihatinan. Melalui Pak Abdulrahman Surjomihardjo, saya dengar saat itu, W.S. Rendra dan Adnan Buyung Nasution datang ke Leknas membawa draf Surat Keprihatinan untuk meminta dukungan. Penandatanganan Surat Keprihatinan membuat ketiga peneliti Leknas itu mendapatkan teguran dan sanksi dari Ketua LIPI, Bachtiar Rivai. Pak Taufik yang saat itu menjabat sebagai Direktur Leknas dicopot dari jabatannya.

Dalam pesta kecil di rumah Profesor Mitsuo Nakamura, sekitar pertengahan Desember 1979 ketika para intelektual Jakarta berkumpul dan Pak Taufik terkesan lesu dan tidak bersemangat, apakah mencerminkan mendung tebal di udara Jakarta? Apakah hari-hari kelam itu awal dendam dan sakit hatinya terhadap kekuasaan yang telah memperlakukannya secara sewenang-wenang? Pada suatu hari ketika hendak memimpin rapat penelitian, dengan nada geram dia berkata “Kalian nggak tahu saya dijadikan anjing kurap”, suaranya bergetar. Rupanya, sehari sebelumnya, dalam acara peluncuran buku *Menjinakkan Sang Kuli* karya Profesor Jan Breman, ada insiden yang membuatnya tersinggung. Gus Dur ketika mengangkat Pak Taufik sebagai Ketua LIPI sesungguhnya telah mengembalikan kehormatan yang tahun 1978 terenggut itu, tapi bagi Pak Taufik tampaknya itu tidak cukup, ada yang baginya *unbearable*.

Suatu saat ketika sedang mencari-cari buku bekas koleksi Institut Javanologi di perpustakaan Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), di Ndalem Yosodipuran, Yogyakarta, tanpa

sengaja, saya menemukan tulisan Pak Taufik di buku untuk menghormati Profesor Ibrahim Alfian, mantan guru besar sejarah UGM. Tulisan Pak Taufik di buku itu berjudul “Wijilan”. Rupanya, Ibrahim Alfian adalah kakak kelasnya. Mereka sama-sama “anak seberang”, Pak Taufik dari Sumatra Barat, Ibrahim Alfian dari Aceh. Tulisan itu antara lain mengisahkan kenangannya sebagai anak rantau di kota Yogya dan sama-sama kuliah di jurusan sejarah di akhir tahun 50-an atau awal 60-an.

Bagi Pak Taufik, Ibrahim Alfian yang lebih tua itu, betul-betul menjadi seorang Abang yang sering kali menjadi tempat berlindung. Tempat kuliah mereka di Wijilan dan dosen-dosen mereka sebagian masih profesor-profesor Belanda, di samping dosen senior, seperti Profesor Purbatjaraka. Tulisan-tulisan Pak Taufik memang selalu bagus dan enak dibaca, tetapi tulisannya yang berjudul “Wijilan” itu bagi saya sangat indah. Ketika bertemu beliau, saya sampaikan kalau saya baru membaca tulisannya, dan saya menikmatinya. Pak Taufik terlihat senang, sambil tersenyum dia bilang, “bagus ya, puitis...”

Pak Taufik Abdullah sudah berusia 85 tahun, umur yang panjang bagi rata-rata usia orang Indonesia. Saya menduga, Pak Taufik adalah orang yang tidak pernah memikirkan soal umur karena baginya tidak ada hari tanpa bekerja. Setahu saya, selain menjadi anggota AIPI, beliau juga menjadi Ketua Akademi Jakarta, jabatan-jabatan yang akan disandang seumur hidupnya. Selain di dua lembaga itu, saya tidak tahu apa kegiatan beliau yang lain. Saya mendoakan Pak Taufik Abdullah tetap sehat dan terus berkarya, bisa membuat memoir, seperti Deliar Noer, Ahmad Sjaifi Maarif, dan Ajip Rosidi, seperti juga pernah disarankannya sendiri pada sahabatnya Umar Kayam.



Sumber: Hardiyanti (2020)

## 28. Jakob Oetama dan Indonesia yang Mencair<sup>32</sup>

Suatu hari ketika melakukan penelitian tentang masyarakat di sekitar Candi Borobudur, dalam perjalanan menemui Romo Warso, seorang pastor yang meninggalkan jubahnya dan memilih memimpin sebuah aliran kejawen di desa asalnya, Mas Coro yang menemani saya, menunjuk sebuah rumah cukup besar dengan halaman yang luas dibandingkan rumah-rumah di sekelilingnya, “Ini rumah Pak Jakob Oetama”, ujar Mas Coro (Tirtosudarmo, 2019c). Rumah itu terlihat sepi dengan pintu dan jendela-jendela yang tertutup dan halamannya bersih. Saya membayangkan bagaimana hubungan Pak Jakob dengan rumah masa kecilnya itu dan hubungan beliau dengan keluarga besarnya. Tentu, seperti kebanyakan orang, saya mengenal Jakob Oetama, yang

<sup>32</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 14 Oktober 2020.



nama besarnya tidak lepas dari Harian *Kompas*. Tidak seperti sahabat saya, Mohamad Sobary dan mereka yang beruntung karena dekat dengan Jakob Oetama, imajinasi saya tentang Pak Jakob sangat terbatas, sebagian saya peroleh dari obrolan dengan Sobary. Sebagian lainnya yang saya dengar adalah tentang kedermawanannya yang telah melegenda dalam memberikan bantuan finansial bagi koleganya yang kesulitan.

Dalam *Kompas*, St. Sularto, mantan wartawan senior dan Pemred Kompas, yang saya duga, paling dekat dengan Jakob Oetama, menuliskan artikel berjudul “Humanisme, Soedjatmoko, Widjojo, dan Jakob Oetama” (2020). Tulisan itu tampaknya untuk menyambut peringatan 40 hari wafatnya Pak Jakob.

Beberapa buku tentang JO, demikian beliau dipanggil di lingkungan kerjanya, hampir selalu ditulis oleh Mas Larto sehingga tidak mengherankan jika dia bisa menceritakan kedekatan JO dengan tokoh terkenal, Soedjatmoko dan Widjojo Nitisastro—yang kebetulan seperti JO, berlatarbelakang Jawa. “Saya melihat ada titik-titik temu yang subtil di antara ketiganya, hati, dan pemikiran mereka tentang humanisme”, tulis Mas Larto. Dalam tulisan pendek itu, Mas Larto menilai jika JO lebih intensif bergaul dengan Widjojo daripada Soedjatmoko. Kedekatan Widjojo, arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, dengan JO dan *Kompasnya*, digambarkan dengan baik dalam artikel pendek Mas Larto itu, dan ini penting bagi mereka yang tertarik dengan sejarah intelektual publik di negeri ini.

Harian *Kompas* meskipun lahir ketika Soekarno masih menjadi presiden (28 Juni 1965), tetapi setelah beberapa bulan kemudian, Soekarno mulai dipreteli kekuasaannya. Soehartolah yang antara lain didukung oleh Widjojo dengan gerak cepat telah mengonsolidasi kekuasaannya. *Sebuah kudeta merangkak*, tutur Asvi Warman. *Kompas*, dengan kata lain, tumbuh bersama menguatnya Soeharto dan Orde Baru. Widjojo adalah orang yang

membangun sisi ekonomi Orde Baru, sementara dari sisi politik, mula-mula didesain oleh Ali Moertopo dan para pembantunya.

Apa yang digambarkan oleh St. Sularto barulah sekelumit sisi ekonomi pembangunan Orde Baru. JO dalam tafsir saya adalah seorang tokoh nasional yang hidup dan bergulat dalam kedua sisi Orde Baru, baik di sisi politik maupun ekonomi. Jika sisi pembangunan ekonomi telah cukup banyak digambarkan, diperlukan penjelasan bagaimana JO bergumul dalam sisi politik Orde Baru. Pergumulan JO dalam sisi politik Orde Baru pastilah sangat menarik.

Sebagai media yang diterbitkan oleh orang-orang Katolik dalam sebuah masyarakat muslim, tentu banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi, tidak saja untuk bisa eksis, tetapi mampu menjadi kelompok bisnis yang besar. Bukan rahasia lagi jika banyak insiden sentimen keagamaan yang melibatkan *Kompas* sepanjang hayatnya. Bagaimana Jakob Oetama mendayung perahu di antara karang-karang yang tajam ini, mungkin hanya dia dan orang-orang dekatnya yang tahu.

Dalam sebuah konferensi besar tentang Orde Baru pada tahun 1988 di Australian National University, Canberra, Australia, tidak hanya puluhan ahli tentang Indonesia yang hadir, tetapi juga tokoh-tokoh nasional penting, termasuk JO. Dalam konferensi besar ini, Mohamad Sadli, anggota tim ekonomi Widjojo, menjadi pembicara kunci. Pada sesi tanya jawab, JO mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup menarik, “Apakah Pak Harto mempertimbangkan kritik dari pers?” dan dijawab oleh Pak Sadli, “Tidak, Pak Harto tidak mendengarkan kritik, dia memiliki pertimbangan sendiri”. Saya kira, JO kecewa mendengar jawaban itu, mungkin kemudian dia berpikir, dalam hidupnya, JO juga berusaha dekat dengan Soeharto, seperti dia juga dekat dengan Widjojo, tetapi Soeharto saya kira adalah sebuah enigma dalam politik Indonesia yang sulit didekati. Mungkin, di pemerintahan Orde Baru, JO juga dekat dengan pejabat tinggi lainnya seperti

Moerdiono, orang yang lama bekerja menjadi pembantu terdekat Pak Harto. Seperti halnya Soeharto, Widjojo juga sebuah enigma, pribadi yang menimbulkan banyak pertanyaan di dalam dirinya, ada aura yang terus tersembunyi di sana.

Soeharto dan Widjojo Nitisastro adalah dua tokoh yang cukup lama bekerja sama, tetapi kita tidak tahu hubungan personal antara keduanya. Hubungan antara keduanya meskipun secara resmi terputus sejak 1983, tetapi secara tidak resmi terus berlangsung. Dalam sebuah riset kecil tentang Widjojo, dari beberapa narasumber yang dekat dengan Widjojo, saya mendapatkan sisi *secretive* dari Widjojo. Widjojo dikenal sebagai orang yang jarang berbicara di depan pers, sampai akhir hayatnya tidak ada biografi yang berhasil ditulis tentang dirinya (Tirtosudarmo, 2020).

Kedekatan Widjojo dengan siapa pun selalu menimbulkan dugaan bahwa kedekatan itu bisa jadi lebih bersifat transaksional, atau dalam bahasa St. Sularto, dikenal dengan hubungan yang bersifat “simbiosis mutualis” karena saling menguntungkan. Apakah JO juga memiliki sisi *secretive*, seperti Widjojo dan Soeharto? Saya menduga begitu. JO menurut St. Sularto lebih dekat dengan Widjojo daripada dengan Soedjatmoko. Seperti dikatakan St. Sularto, selain mengenai pertumbuhan dan pemerataan, kebebasan menjadi perhatian Soedjatmoko. Saya kira, itu yang membedakan antara Soedjatmoko dengan Widjojo dan Soeharto.

Soedjatmoko, Widjojo, Soeharto, dan Jakob Oetama adalah tokoh-tokoh besar pasca-Soekarno dan pasca-1965. Kebesaran mereka menjulang pasca penghilangan golongan kiri di Indonesia. Tahun 2007, dalam peluncuran dua buku yang berisi kumpulan tulisan para sahabat dan kolega sebagai *tribute* untuk 70 tahun Widjojo Nitisastro. Peluncuran buku ini seharusnya dilakukan pada tahun 1997, tetapi diminta ditunda peluncurannya oleh Widjojo karena waktunya belum tepat.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Hotel Santika, Slipi, Jakarta, di tengah suasana penuh kegembiraan itu, sebuah suara sumbang terdengar. Dalam sesi penyampaian pendapat, Mochtar Pabottingi mengingatkan tentang ribuan orang yang menjadi korban persekusi politik dalam peristiwa 1965. Menurut Mochtar, dalam merayakan keberhasilan Orde Baru, jangan dilupakan bahwa keberhasilan itu dibangun dengan bertumpu pada ribuan korban itu. Sebuah peringatan yang sungguh menyengat para tokoh besar yang hadir saat itu, yang saya lihat, menganggap pernyataan Mochtar Pabottingi sebagai angin lalu saja, menyengat sesaat, tetapi harus dilupakan, sesuatu yang tidak pantas dibicarakan dalam sebuah perayaan suka-cita. Saya kira, apa yang disampaikan oleh Mochtar Pabottingi berkaitan dengan sesuatu yang bagi Widjojo, dan Soeharto, ditabukan, sesuatu yang berkaitan dengan makna kebebasan.

Pengenalan saya tentang JO, yang berhasil membesarkan sebuah usaha penerbitan harian menjadi konglomerasi bisnis, sangatlah sedikit. Mungkin secara akademik, Daniel Dhakidae, yang menulis disertasi di Universitas Cornell tentang “The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry”, memahami penjelasan mengenai terjadinya dinamika proses konglomerasi. Daniel yang pernah bekerja sebagai Kepala Litbang Kompas (1994–2004), menggantikan Parakitri Tahi Simbolon, tidak hanya melihat *Kompas* dan JO dari luar, tetapi juga dari dalam. JO, seperti Soedjatmoko, Soeharto dan Widjojo telah menjadi sejarah, bagian dari masa lalu sebuah bangsa yang penting untuk dijadikan cerminan dan pelajaran. Dalam dunia pers, menarik untuk menilai bagaimana JO berpolitik dan memaknai kebebasan berekspresi, dibandingkan dengan Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, dan Goenawan Mohamad, misalnya.

Dalam sebuah makalah pendek yang dipresentasikan pada Simposium Hari Lahir Pancasila, 2006 di kampus UI, Jakob

Oetama menguraikan gagasannya yang dia beri judul “Indonesia, Identitas, dan Modernitas”. Meskipun cukup pendek, dalam makalah itu, JO menyebutkan banyak penulis buku, seperti Huntington, Giddens, Erickson, dan Schiler—refleksi dari bacaannya yang sangat luas. Ada bagian dari isi makalah itu yang memperlihatkan kegelisahan dalam melihat bangsanya. Salah satu kutipannya berbunyi,

“Perasaan gamang disertai munculnya semacam kecemasan dan serba pertanyaan, serta suasana keprihatinan itulah yang umumnya kita rasakan akhir-akhir ini. Pertanyaan pun muncul seperti: Siapakah kita ini? Kenapa sebagai bangsa terasa cair? Mengapa persoalan susul menyusul? Kenapa marak kembali daya dan ekspresi yang cenderung menegangkan sesama komunitas warga?”

Tidak banyak tokoh saya kira, seperti Pak Jakob, konsisten sebagai intelektual publik dan membangun imperium bisnis.

Jakob Oetama, seperti pendahulunya, Soedjatmoko, Soeharto, dan Widjojo, adalah enigma dalam proses pembentukan bangsa yang tak ada terminasinya. Saat ini, kita bisa menilai *legacy* Jakob Oetama, tidak saja dalam kaitan dengan jurnalisme, tetapi juga dalam *entrepreneurship*, dan perannya sebagai guru bangsa. Guru bangsa, sebuah istilah yang digunakan selain bapak dan ibu bangsa, yang lebih dulu kita kenal. Jakob Oetama menjadi besar, pasca-krisis 1965, melewati krisis 1998, dan wafat ketika Indonesia memasuki sebuah krisis baru. Sebuah krisis terjadi tidak saja karena pandemi yang belum teratasi, tetapi juga karena berbagai masalah politik dan ekonomi yang membuat masyarakat, mengutip pernyataan Pak Jakob, menjadi “Indonesia yang mencair”.

Bagaimana nasib *Kompas* tanpa JO di era krisis yang baru ini? Semoga *legacy* JO telah tertanam dan menjadi pemandu para penerusnya. Saya tidak membayangkan sebuah pagi tanpa *Kompas* yang selalu dilempar loper koran melewati pagar rumah.



Sumber: Serikat Petani Indonesia (2010)

## 29. Pemikir dan Pejuang Agraria itu Telah Pergi<sup>33</sup>

Meskipun kita sudah merencanakan kehidupan dengan baik, sering kali terjadi hal-hal tak terduga. SMS terakhir saya dengan Pak Wiradi adalah tentang resensi bukunya oleh Pak Edi Swasono yang dimuat di *Kompas.id*, “Sayangnya hanya dimuat di *kompas.id* jadi tidak tersebar luas”, ujarnya, ada nada kecewa di sana. Buku biografinya yang ditulis oleh Saluang (2019), yang terbit ketika usianya menginjak angka 87, saya kira memang bagian penting dari hidupnya. Wajar jika beliau ingin buku itu diketahui banyak orang. Buku itu, selain buku-buku atau artikel-artikel yang ditulisnya sendiri, merupakan warisan terindah dari seseorang yang sebagian besar hidupnya mengabdikan untuk memikirkan dan memperjuangkan Reformasi Agraria, sebuah rekayasa sosial,

<sup>33</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 1 Desember 2020.

yang menurut keyakinannya bisa menyejahterakan mayoritas penduduk Indonesia. Kekecewaan yang terus dirasakannya sejak 1965 adalah makin menjauhnya rekayasa sosial yang berlangsung dari cita-cita Reformasi Agraria, dan membuatnya tidak bisa menutupi rasa getir melihat situasi bangsanya.

Meskipun jarang bertemu, kecuali di masa-masa akhir hidup beliau, Pak Wiradi selalu ingat kapan kami pertama kali bertemu. Ingatannya kuat dan jernih di usianya yang sudah sepuh itu. Mungkin, peristiwa itu sekitar tahun 1982 atau 1983 ketika saya menempuh pendidikan master di Australian National University, Canberra Australia, dan beliau menjadi peneliti tamu di Departemen Human Geography yang saat itu dipimpin oleh Profesor Harold Brookfield. Profesor Harold Brookfield juga yang mengundang beliau untuk menyampaikan hasil penelitiannya tentang perubahan agraria di Jawa. Perawakannya yang kecil, membedakannya dengan peserta *workshop* yang mayoritas bule, juga peserta pelatihan dari Indonesia lainnya, misalnya Profesor A.T. Birowo, yang bertubuh tinggi besar. Pak Wiradi terlihat seperti kancil yang cerdas di tengah koleganya yang rata-rata bertubuh besar.

Saat kami sering bertemu dalam acara-acara diskusi dan seminar, membaca buku biografinya, diam-diam saya merasa heran sekaligus kagum karena di tengah kekecewaan dan rasa getir yang menumpuk, tidak hilang komitmen dan antusiasmenya untuk terus bergaul dengan anak-anak muda yang menghargai, menghormati, dan mengidolakannya. Mungkin anak-muda yang selalu berada di sekitarnya itulah yang membuatnya tetap optimis, di samping rasa getir yang tidak bisa disembunyikan setiap kali harus berbicara di seminar atau diskusi-diskusi kecil.

Melihat perkembangan rekayasa sosial yang telah berjalan selama setengah abad terakhir (1970–2020), saya bisa memahami kekecewaan dan rasa getirnya melihat Reformasi Agraria makin jauh dari harapan. Ketika berbicara tentang Reformasi Agraria

(agrarian reform), sebagai seorang akademisi, dia akan selalu bertolak dari definisi dan konsep yang dipahaminya secara mendalam tentang topik yang terus digelutinya itu. Jika sudah berbicara mengenai definisi dan konsep Reformasi Agraria, sebagaimana yang dia pahami itu, ibarat memegang sebuah kunci, terbukalah kotak pandora dengan segala isinya.

Kepergian Pak Wiradi jelas sebuah kehilangan besar bagi dunia pemikiran dan perjuangan Reformasi Agraria. Rasa kehilangan akan sangat dirasakan oleh anak-anak muda yang tertular idealismenya, terutama kaum tani yang bisa hidup layak dan sejahtera. Namun, kita yang ditinggalkan, yang tergolong generasi milenial, sesungguhnya telah hidup dalam sebuah dunia, yang bagi Pak Gunawan Wiradi bukan menjadi tempatnya. Sebuah dunia yang merupakan hasil dari perkembangan rekayasa sosial yang berkembang dan berubah tanpa bisa dia kendalikan meskipun dia memiliki daya resistensi yang kuat. Sebagai ilmuwan sosial yang dibesarkan dalam tradisi berpikir struktural, Pak Wiradi mungkin juga tidak membayangkan dan di luar fokus perhatiannya ketika isu kelas tergeser oleh isu identitas kultural, seperti agama dan etnisitas.

*Social change* dan *social transformation* selama 50 tahun terakhir yang sedang kita alami saat ini, adalah sebuah dunia yang lain meskipun dengan keprihatinan yang sama. Sebuah dunia yang secara struktural makin timpang, tetapi dengan harapan yang makin tipis, kita bisa mengubahnya. Apa yang terjadi di negeri ini, hari ini, yaitu ketika globalisasi ekonomi dan teknologi informasi telah menjadi *the order of the day*, sebenarnya tidaklah unik. Mungkin, di sana kita mendengar sebuah gaung yang lama pernah terdengar, yaitu ketika solidaritas yang bersifat global dicetuskan di Kota Bandung tahun 1955 ketika sebuah konferensi diselenggarakan atas nama keprihatinan bersama, Konferensi Asia Afrika. Tahun 1955, Pak Gunawan Wiradi telah menjadi aktivis mahasiswa yang ikut terbakar semangatnya oleh pidato presiden



pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pak Gunawan Wiradi sejak mahasiswa telah menjadi bagian dari sebuah kosmopolit dan sudah terbiasa dengan gerakan solidaritas global.

Sosok yang kita hormati karena integritas pribadinya sebagai seorang pemikir dan pejuang Reformasi Agraria itu pergi setelah menyelesaikan warisan terindahinya, buku biografi sekaligus memoarnya. Bagi mereka yang tidak mengenalnya dari dekat, buku biografinya dapat menjadi sumber pustaka tentang seseorang yang tidak pernah berhenti bergerak dalam memikirkan dan memperjuangkan sebuah cita-cita, yang jika dilaksanakan secara konsekuen, akan membebaskan jutaan penduduk yang menggantungkan nasib dan hidupnya pada tanah, pada agraria. Meskipun tampaknya harapan untuk mencapai cita-cita itu sulit, buku biografi, buku-buku, serta tulisan-tulisan lain yang telah dibuatnya, menjadi sumur pengetahuan yang tak akan habis airnya untuk kita timba. Teks-teks itu seperti telah sengaja dia siapkan untuk generasi muda yang baginya adalah pemilik masa depan. Di balik rasa getir yang tak bisa disembunyikannya—itu pun jika memang ada yang berhasil disembunyikannya—mungkin adalah rasa puasnya melihat anak muda secara diam-diam telah berhasil dia tulari sikap untuk memihak kepada mereka yang terpinggirkan.



## 30. Mengenal Seorang Mentor, Jo Rumeser<sup>34</sup>

Semalam, seorang teman, senior dan mentor politik saya semasa mahasiswa, Jo Rumeser, meninggal dunia. Sejak pagi, berita kepergiannya dari teman-teman saya yang masih hidup, terus masuk ke gawai saya, hampir semuanya dari para veteran aktivis mahasiswa tahun 1970-an dan 1980-an, sebuah generasi aktivis pasca-Soe Hok Gie dan pra-Budiman Sudjatmiko.

Generasi aktivis masa itu pastilah mengenal Jo, begitu dia biasa dipanggil. Jo masuk Fakultas Psikologi UI dua tahun lebih dulu dari saya. Ketika saya masuk, tahun 1971, Jo telah menjadi senior saya, di samping Djodi Wurjantoro, senior saya yang lain. Keduanya aktivis dengan gaya yang berbeda, Jo lebih intelektual dan Djodi lebih *nyeniman*. Di samping kedua senior yang dari

<sup>34</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 6 Desember 2020.

keduanya saya merasa cukup banyak belajar ini, ada Husein Prijanto—panggilannya Totok, mungkin setahun lebih tua, yang dekat dengan saya. Dari ketiga orang yang saya anggap sebagai mentor itu, mungkin tinggal Totok yang masih ada karena Djodi telah meninggal lebih dulu.

Awal tahun 1970-an adalah masa ketika bulan madu mahasiswa dengan tentara mulai retak. Sepeninggal Soe Hok Gie, Desember 1969, panggung kritik dalam beberapa waktu diisi oleh eks tokoh 66, seperti Arief Budiman dan Asmara Nababan, dan keresahan mahasiswa di kampus UI mulai menampilkan Hariman Siregar, Jo, Djodi, dan Husein Prijanto; di samping banyak tokoh mahasiswa yang lain. Kulminasi aktivisme mahasiswa awal tahun 1970-an adalah demonstrasi besar menentang masuknya modal asing, yang berujung pada peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Sebagai mahasiswa, saya mengikuti arahan para mentor saya berpawai dari Salemba ke Monas. Beberapa hari setelah demo besar yang digagalkan oleh anak buah Jenderal Ali Moertopo yang membakar Pasar Senen dan *Show Room* Astra di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta itu, Hariman Siregar dan Aini Chalid, aktivis mahasiswa UGM ditangkap, bersamaan dengan tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), seperti Sarbini Soemawinata, Aini Chalid, Sjahrir (Ciil), Juwono Sudarsono, Dorajatun Kuntjorojakti, Soebadio Sastrosatomo, dan Soedjatmoko. Tuduhan yang dipakai kelompok Ali Moertopo yang menjadi patron dan pendiri Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah *think tank* Orde Baru, adalah bahwa PSI yang mendalangi Malari.

Akibat Malari, Husein Prijanto (Totok) yang saat itu menjadi salah satu Wakil Sekjen DMUI yang diketuai Hariman Siregar, harus melarikan diri dari kejaran intel tentara. Totok yang ayahnya konon tersangkut G30S, disembunyikan oleh teman-temannya agar demo mahasiswa 1974 tidak dikaitkan dengan PKI. Totok menghilang cukup lama dan harus berganti nama. Ia baru berani

muncul secara terbuka setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998. Jo dan Djodi tidak termasuk yang ditangkap akibat Peristiwa Malari 1974, dan mereka terus aktif menggalang mahasiswa untuk melawan Soeharto.

Momen perlawanan pasca-Malari, kembali terakumulasi pada tahun 1977–78 yang berakhir dengan penangkapan mahasiswa. Saat aksi mahasiswa tahun 1977–78, saya menjadi Ketua Senat Mahasiswa, tetapi tidak termasuk yang ditangkap dan dipenjara di Kampus Kuning. Jo yang saat itu menjabat sebagai Sekjen DMUI yang diketuai oleh Lukman Hakim, termasuk yang ditangkap bersama puluhan pimpinan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Setelah meninggalkan UI awal tahun 1980 dan mulai bekerja di LIPI, saya tidak pernah lagi bertemu dengan senior dan mentor politik saya, Jo Rumeser.

Ketika mendengar berita Jo meninggal, ingatan saya melayang ke era tahun 1970-an dan 1980-an, dan mengenang sosok Jo yang meskipun tidak melalui kaderisasi yang sistematis, telah berperan dalam membentuk kesadaran dan aktivitas politik saya. Jika ada yang ingin disebut sebagai tradisi politik, mungkin tradisi itu beraktivitas atas nama kelompok independen yang tidak berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, seperti HMI, GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI.

Setahu saya, kelompok mahasiswa independen di UI bisa dikatakan menjadi penerus generasi Soe Hok Gie yang secara organisasi, memiliki corak tersendiri dan terekspresi melalui dua organisasi mahasiswa, Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) UI dan GDUI (Grup Diskusi UI). Setahu saya, Jo dan Totok aktif di GDUI, sedangkan Djodi dengan gaya urakannya, lebih dekat ke Mapala UI. Bersama Rudi Badil dan Warkop, ia juga aktif di Radio Prambors. Meskipun saya didorong oleh para mentor, namun saya tidak pernah menjadi anggota resmi GDUI maupun Mapala UI.

Setelah bekerja di LIPI awal tahun 1980-an, melanjutkan studi keluar negeri, dan kembali ke tanah air awal tahun 1990-an, saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Jo. Saya hanya tahu jika dia mendirikan Iradat (sebuah biro konsultan psikologi), aktif di dunia olahraga, dan konon sempat membantu KONI. Belakangan, saya mendengar Jo menjadi pengajar di BINUS, bahkan sempat menjadi Dekan Fakultas Humaniora. Beberapa kali, saya mencoba untuk berkomunikasi, tetapi gagal. Ketika para alumni UI berkumpul dan mendukung Jokowi, saya dengar Jo juga aktif di sana. Sebelum meninggal tadi malam, saya berharap masih bisa berkomunikasi lagi dengan mantan mentor politik saya itu.

Namun, takdir rupanya berkata lain. Membayangkan Jo berarti membayangkan seorang yang berbicara teratur sistematis, murah senyum, dan memiliki sikap penyayang. Pertemuan terakhir kami mungkin saat pulang dari pemutaran perdana film Eros Djarot, *Rembulan dan Matahari*, di TIM, kami berjalan kaki santai sembari mengobrol ke pondokannya, di sekitar Proklamasi. Saya ingat, Jo setengah bertanya mengapa saya belajar demografi. Seingat saya, jawaban saya asal saja, saya mengatakan jika saya dulu mempelajari psikologi tentang manusia dalam posisinya sebagai individu, kemudian belajar demografi, yaitu tentang manusia dalam posisinya sebagai massa.

Itulah sekelumit kenangan saya tentang Jo Rumeser, senior dan saya anggap mentor politik saya. Ketika dia tiada, baru terasa saya berutang padanya. Banyak teman yang masih hidup pasti merasa kehilangan dengan kepergiannya. Selamat jalan Jo!



Sumber: Tirtosudarmo (2020b)

## 31. Suko Bandiyono, Mentor Penelitian yang Sederhana<sup>35</sup>

Mas Suko—panggilan akrab untuk senior kami, Drs. Suko Bandiyono, MA. di Pusat Penelitian Penduduk LIPI—wafat secara mengejutkan pada hari Sabtu dini hari, 12 Desember 2020, seperti menyusul satu jam kemudian setelah istri tercintanya, Mbak Rukmini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebuah peristiwa yang jarang terjadi, kematian sepasang manusia yang indah.

Bagi kami, keluarga besar Pusat Penelitian Penduduk di LIPI, berita kepergian mereka sangat mengejutkan karena sehari sebelumnya, pada Jumat 11 Desember 2020, baru dirayakan 80 tahun usia Dr. Yulfita Rahardjo, senior dan kolega dekat Suko Bandiyono. Bu Yulfita dan Mas Suko adalah dua senior yang

<sup>35</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 16 Desember 2020.

boleh dikatakan bahu-,membahu mengembangkan penelitian-penelitian kependudukan di LIPI. Bu Yulfita menekuni studi gender dan pendekatan kualitatif, sedangkan Mas Suko menekuni studi migrasi atau mobilitas penduduk. Kedua senior ini dengan gaya dan caranya masing-masing telah berkiprah tanpa henti sejak tahun 1970-an–2000-an, sebuah rentang waktu yang meliputi lebih dari tiga dekade, bergulat sebagai peneliti-peneliti sosial dalam ranah ilmu kependudukan. Dalam perayaan 80 tahun usia Dr. Yulfita Rahardjo, diluncurkan sebuah buku berjudul *Penduduk dan Pembangunan di Indonesia* (Rahadian, 2020). Buku tersebut merupakan persembahan untuk beliau, yang merupakan kumpulan tulisan para peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, termasuk di dalamnya tulisan Drs. Suko Bandiyono, MA. tentang penelitian migrasi di LIPI. Meskipun keduanya telah sama-sama pensiun sebagai pegawai negeri di LIPI, namun bagi para peneliti kependudukan yang lebih muda, sangat dirasakan jejak yang telah ditinggalkannya.

Saya masih ingat dengan jelas hari pertama saya di Leknas, awal tahun 1980 setelah diajak berkeliling untuk diperkenalkan dengan para peneliti senior di Jln. Gondangdia Lama 39, oleh Dr. Suharso (almarhum), Direktur Leknas saat itu, saya kemudian diantar ke kantor Leknas yang lain, di Jln. Raden Saleh 10, yang letaknya tidak seberapa jauh. Pusat Penelitian Penduduk (*Population Studies Center*), merupakan salah satu pusat penelitian di bawah Leknas LIPI yang menempati kantor di Jln. Raden Saleh itu. Oleh Pak Harso, panggilan Dr. Suharso sehari-hari, saya diberitahu kamar kerja saya, meja, serta kursi, tempat saya sebagai seorang peneliti baru akan bekerja. Kamar, mungkin lebih tepat disebut ruangan karena cukup luas, selain berisi meja dan kursi, terdapat sebuah meja dengan ukuran sangat besar, dibandingkan meja saya yang kecil. Beberapa rak buku besar berdiri di belakang meja itu. Ada pula stiker di rak itu yang berbunyi *nobody perfect*.

Meja itu penuh dengan tumpukan buku, kertas-kertas, mungkin makalah-makalah yang terserak agak kurang teratur.

Pagi itu setelah saya duduk sendiri dan ditinggalkan oleh Pak Harso, sekretarisnya, Mbak Dien (Blandina Florensi), sopir (Herman), dan stafnya (Siahaan), tiba-tiba masuk seseorang yang berperawakan agak pendek, badannya gemuk gempal, dan memakai baju *cowboy* dengan tanda seperti segitiga di punggungnya. Pria bertubuh subur itu tidak banyak berkata-kata. Setelah berkenalan dan menaruh atau mengambil sesuatu di mejanya, dia bergegas pergi, samar-samar, saya dengar dia mengatakan ada seminar migrasi di Hotel Indonesia. Kemudian, saya tahu rupanya saat itu ada Widya Karya Nasional Migrasi dan semua orang di Pusat Penelitian Penduduk mengikuti acara itu. Itulah perkenalan pertama saya dengan Mas Suko yang diam-diam telah menjadi mentor saya dalam penelitian migrasi.

Periode tahun 1980-an adalah periode ketika isu kependudukan sedang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Orde Baru. Dua program kependudukan utama, yaitu Keluarga Berencana dan Transmigrasi, sedang gencargencarnya dilakukan pemerintah. Pemerintah Orde Baru bertekad menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan memindahkan penduduk sebanyak-banyaknya dari pulau Jawa dan Bali ke pulau-pulau di luar Jawa yang dianggap masih kosong. Leknas LIPI, yang direktur pertamanya adalah Profesor Widjojo Nitisastro, seorang ahli demografi-ekonomi, dan menjadi arsitek utama pembangunan ekonomi Orde Baru, juga merupakan pendiri Lembaga Demografi UI, bersama Prof. Nathanael Iskandar dan Dr. Kartomo Wirosuhardjo, yang juga ahli migrasi.

Kebutuhan akan data statistik demografi, meningkat sejalan dengan kepentingan perencanaan pembangunan, yang sejak Orde Baru bersifat teknokratik. Selain Lembaga Demografi UI dan Pusat Penelitian Penduduk Leknas LIPI, di UGM, didirikan Pusat Studi Kependudukan yang dipimpin oleh Dr. Masri Singarimbun,





Sumber: Tirtosudarmo (2020)

**Gambar 5.** Suko Bandiyono (berbaju putih) bersama Miftah, Riwanto, dan kolega dari Rasau Yaja, Kalimantan Barat.

seorang ahli antropologi yang lama menjadi *research fellow*, dan bekerja sama dengan Prof. John Caldwell di Departemen Demografi ANU, Australia.

Di Leknas-LIPI, selain Dr. Suharso, senior lain yang juga menaruh perhatian pada penelitian kependudukan adalah Han Redmana, Dr. Melly G. Tan, dan Mayling Oey. Bersama Yulfitra Rahardjo, Mayling Oey meneruskan studi pascasarjana di ANU. Yulfitra, bersama suaminya, Rahardjo Suwandi, di Departemen Antropologi dan Mayling Oey, di Departemen Demografi. Suko Bandiyono, seperti pendahulunya, Dr. Suharso adalah alumni Fakultas Geografi UGM dan mendapatkan gelar MA. dari Florida State University, USA. Ketika pertama kali bertemu dengan Mas Suko, beliau belum lama pulang dari Amerika, tidak heran jika baju yang dipakainya baju *cowboy*.

Ketika saya masuk Leknas-LIPI, selain Mas Suko, di kependudukan ada Mbak Laila Nagib, Mas Daliyo (almarhum),

dan Miftah Wirahadikusumah (almarhum). Mereka yang bekerja di staf administrasi, antara lain adalah Nova, Nati, Pujo, dan Nani. Setelah saya masuk, tidak lama kemudian, menyusul peneliti kependudukan lain, yaitu Aswatini, Wartoyo, Yayu, Y.B. Widodo, Sumono, dan Sukarna Wikanta. Jumlah peneliti di Pusat Studi Kependudukan Leknas-LIPI saat itu masih sedikit sehingga kami menjadi sering ditugaskan ke lapangan karena cukup banyak proyek penelitian yang dijalankan. Mungkin karena minat Dr. Suharso sebagai Kepala Pusat Penelitian Kependudukan adalah migrasi dan ketenagakerjaan, penelitian-penelitian yang kami lakukan banyak berhubungan dengan isu migrasi dan ketenagakerjaan. Penelitian migrasi banyak dipimpin oleh Mas Suko, sedangkan penelitian ketenagakerjaan dipimpin oleh Mas Daliyo dan Mbak Laila Nagib. Saat saya masuk, Bu Yulfita sudah berada di Australia meskipun sempat pulang untuk melakukan penelitian di Blitar, saat kami diikutkan untuk melakukan survei ketenagakerjaan di Desa Bajang dan Modangan.

Pengalaman penelitian lapangan saya yang pertama adalah bersama Mas Suko Bandiyono dan Miftah Wirahadikusumah ke lokasi transmigrasi Rasau Jaya, Kalimantan Barat. Sejak penelitian itu, migrasi atau mobilitas penduduk perlahan menjadi fokus penelitian saya, dan harus saya akui bahwa Mas Suko Bandiyono adalah mentor migrasi saya yang pertama. Setelah ke Kalimantan Barat bersama Mas Suko, saya mengikuti penelitian transmigrasi di Sungai Pagar, Riau, dan kami pun sempat ke Bengkalis dengan kapal dari Pekanbaru, menyusur sungai dan laut. Pengalaman ke lapangan dengan Mas Suko kemudian tak terhitung lagi, antara lain, yang sangat mengesankan adalah ke berbagai tempat di Indonesia bagian timur. Ketika di Rasau Jaya, Kalimantan barat, saya masih ingat, Mas Suko hampir tenggelam di Sungai Kapuas karena perahu yang kami tumpangi oleng, mungkin karena badan beliau yang terlalu berat.

Tidak sedikit kenangan saya dengan almarhum Mas Suko, mentor pertama saya di bidang penelitian migrasi. Beliau adalah orang yang tidak pernah menunjukkan rasa marah, hidup seperti dijalani dengan rasa damai dan ikhlas. Setiap kali memasuki daerah penelitian baru, Mas Sukolah yang selalu memberikan sambutan jika diminta oleh kepala desa, dan istilah yang dipakai oleh Mas Suko adalah memberikan “ular-ular”. Sebagai peneliti junior, saya selalu merasa nyaman melakukan penelitian lapangan dengan Mas Suko karena beliau tidak pernah mengeluh, dan saya banyak belajar dari beliau bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan, menghargai mereka yang kita teliti sebagai subjek, juga bagaimana kita menerima kondisi tanpa mengeluh karena harus tidur di rumah penduduk yang sangat sederhana, dengan makanan yang juga seadanya.

Sejak itu, melakukan penelitian lapangan, sebuah kegiatan utama kami sebagai peneliti di LIPI, menjadi sesuatu yang selalu menyenangkan dan kami terbiasa dengan kondisi medan yang ada, situasi seperti apa pun yang dihadapi, seperti tidak pernah kami risaukan. Mas Suko Bandiyono, Mas Daliyo, Pak Han Redmana dan Mbak Laila Nagib, adalah mentor-mentor saya pertama di Leknas-LIPI pada awal tahun 1980-an itu.

Sebagai seorang peneliti migrasi, pencapaiannya telah dibuktikan hingga ke puncak karier tertingginya sebagai Ahli Peneliti Utama. Orasinya tentang migrasi membuatnya memiliki hak untuk memakai gelar sebagai profesor riset, sebuah puncak karier seorang peneliti di lembaga penelitian pemerintah. Bagi para peneliti migrasi yang lebih muda, rekam-jejak penelitian panjang Mas Suko Bandiyono tidak mungkin diabaikan. Tapi di atas semua itu, mengingat Mas Suko adalah mengingat sebuah kesederhanaan sikap seorang peneliti sekali pun berada di sebuah lembaga yang memiliki embel-embel nasional seperti LIPI. Kesederhanaan sikap itu mengagumkan ketika godaan untuk merasa diri penting atau telah menyumbangkan sesuatu

yang berharga bagi publik, begitu mudah muncul. Ketika sikap jemawa dan ego yang menggelembung sebetulnya hanya buih, betapa sulit sesungguhnya bersikap sederhana seperti Mas Suko. Kepada Mas Suko Bandiyono dan Mbak Rukmini, pendamping sehidup-sematinya, saya hanya bisa memanjatkan doa, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan tempat yang damai dan lapang bagi keduanya disisi-Nya. Amin.



Sumber: Satria (2006)

## 32. Rekuiem untuk Romo Herry<sup>36</sup>

Selama satu jam, secara *online*, saya mengikuti Misa Rekuiem untuk Romo Bernadinus Herry Priyono, mulai pukul 19.00–20.00 di Kapel Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta. Misa Rekuiem itu dilakukan sekitar delapan jam setelah Romo Herry mengembuskan nafasnya yang terakhir tanggal 21 Desember 2020 di RS St. Carolus, Jakarta. Rangkaian acara dalam misa itu diawali dengan pembacaan riwayat karier Romo Herry yang menggambarkan keterlibatannya yang dalam antara aksi dan refleksinya sebagai seorang Romo Jesuit, yang sejak awal kariernya sudah menaruh minat pada ranah ilmu-ilmu sosial. Setelah pembacaan riwayat hidupnya, seorang romo yang menjadi sahabat dekat karena tinggal bersama di Kolese Kanisius, menceritakan kesan dan pengalamannya bersama Romo Herry

<sup>36</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 23 Desember 2020.

di hari terakhirnya. Selain romo ini berbicara, Bu Augustine—yang mencatat pembicaraannya dengan Romo Herry, persis sehari sebelum meninggal—turut memberikan testimoni. Dua testimoni itu memperlihatkan, menjelang wafatnya, Romo Herry seperti berada dalam kegundahan dan berkali-kali menyatakan rasa rindunya pada Tuhan. Rasa rindu yang menggundahkan jiwanya itu tertebuskan ketika beliau seperti dipeluk pulang oleh Tuhannya.

Berbeda dengan romo-romo yang lain, yang menekuni studi teologi dan filsafat, Romo Herry memilih studi ilmu-ilmu sosial, dengan puncak pencapaiannya melalui disertasi yang dituliskannya di London School of Economics. Pilihan studi pascasarjana dari seorang Romo di LSE juga menarik karena untuk ilmuwan Indonesia, LSE dikenal menjadi tempat mereka yang dekat dengan dunia kebijakan dan politik internasional, seperti Juwono Sudarsono dan Rizal Sukma, keduanya juga pernah menjadi duta besar Indonesia di Inggris. Profesor Michael Leifer, seorang ahli politik internasional dan banyak menulis tentang ASEAN, mungkin menjadi pembimbing dua orang intelektual-diplomat ini. Saya dengar, Romo Herry lebih dekat dengan Profesor Anthony Giddens, seorang ahli sosiologi yang banyak menulis tentang globalisasi dan salah satu bukunya yang terkenal adalah *The Third Way*. Profesor Anthony Giddens dikenal dekat dengan Tony Blair, politisi dan Perdana Menteri dari Partai Buruh Inggris. Seperti diketahui, Tony Blair dianggap berhasil menggantikan Margareth Thatcher, yang bersama Ronald Reagan memelopori model pembangunan, yang dikenal sebagai *neoliberal*. Melihat kiprahnya, Romo Herry adalah tipe ilmuwan sosial yang memihak, dan sebagai Romo Jesuit, ia telah memutuskan untuk mengabdikan diri di jalan Yesus dan menjadi gembala bagi mereka yang lemah.

Sembari mengikuti Misa Rekuiem Romo Herry, ingatan saya melayang pada sebuah perjumpaan saya dengan Romo

Herry setelah diskusi yang diadakan oleh ilmuwan muda *Kompas* di Bentara Budaya, Palmerah. Seingat saya, selain Romo Herry, narasumber lainnya adalah Yudi Latif. Mungkin pertemuan singkat itu terjadi tanpa sengaja saat saya berada di dekat Romo Herry saat sama-sama mengambil kopi dan jajanan pasar yang disajikan. Saat itu, saya mengatakan, setengah mendesak, sepertinya Romo Herry perlu menulis secara lebih utuh percikan-percikan pemikirannya, mungkin dalam bentuk buku. Selama ini, tidak sedikit ilmuwan sosial yang pemikirannya bagus, tetapi artikulasinya hanya muncul dalam bentuk makalah seminar atau tulisan kolom, tidak dalam bentuk buku yang utuh. Romo Herry seingat saya membalas, “*Itu betul, cuma saya sangat sibuk dengan tugas mengajar*”. Saat itu, saya balas kembali, “*Masa Romo Magnis tidak bisa memberikan Anda waktu untuk menulis buku?*”.

Itulah pertemuan singkat saya dengan Romo Herry, selebihnya, saya mengenal beliau melalui tulisan kolomnya di *Kompas* atau makalah-makalahnya yang diterbitkan dalam sebuah buku. Dalam tulisan-tulisannya itu, selalu ada ide yang segar dan berusaha menunjukkan sebuah masalah dan konteksnya. Beberapa tulisan terlihat menyinggung soal kewargaan dan kewarganegaraan, yang saya kira merupakan sebuah isu penting, tetapi tidak pernah dibicarakan secara serius oleh ilmuwan sosial Indonesia. Dalam sebuah resensi terhadap buku *Ilmu-Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, saya ingat dia tergelitik untuk melakukan riset setelah membaca bab yang ditulis Ben White tentang agraria dalam buku yang disunting Vedi Hadiz dan Daniel Dhakidae itu.

Saya hanya mengenal Romo Herry dari jauh. Saya ikut menghormatinya setelah membaca tulisan-tulisan dan mendengar kiprahnya. Wafatnya ia di usia yang relatif muda, meninggalkan kekosongan tersendiri dalam dunia pemikiran ilmu-ilmu sosial dan dunia pergerakan para aktivis, terutama

kaum muda. Dalam sebuah kesempatan, saat menunggu Maria Pakpahan yang masih mengikuti kuliah umum Romo Herry di Sanata Dharma Jogja, Wahyu Susilo, aktivis pembela buruh migran yang kebetulan menemani saya, mengatakan jika banyak anak muda yang mengidolakan Romo Herry. Saya kira itu betul, dalam Misa Rekuiem yang disiarkan secara langsung melalui YouTube, pada kolom *chat* dalam waktu cepat partisipannya telah mencapai seribu lebih, dugaan saya sebagian besar dari mereka anak-anak muda. Mungkin juga orang-orang seperti saya, yang meskipun hanya mengenalnya dari jauh, tetapi tersengat pemikirannya dan sangat menghormatinya. Sebelum itu, saya juga mendengar bahwa kuliah umum yang diadakan di Teater Utan Kayu (TUK), Rawamangun, Jakarta, dihadiri banyak peminat.

Sebagai seorang Jesuit, Romo Herry menjadi bagian dari orang-orang yang memilih jalan hidup tidak seperti orang kebanyakan. Pengabdian kepada mereka yang terpinggirkan tidak hanya karena sikap memihaknya, namun bagian dari iman Kristen yang percaya bahwa mengabdikan secara total untuk mereka yang terpinggirkan adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan.

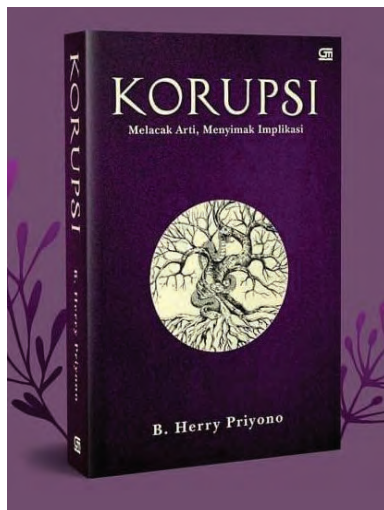
Sekitar dua tahun sebelum wafat, Romo Herry menerbitkan sebuah buku berjudul *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Priyono, 2018). Dari judulnya yang singkat tetapi padat itu, kita mengetahui bahwa buku yang ditulisnya dengan sungguh-sungguh dan melalui riset literatur yang komprehensif, pastilah ia telah berusaha menggali sedalam-dalamnya fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya korupsi. Dari banyaknya masalah akut yang dihadapi oleh bangsa ini secara serius, Romo Herry telah memilih salah satu yang dianggapnya paling krusial, yaitu fenomena korupsi. Tidak perlu menalar terlalu jauh, betapa tepatnya pilihan yang diambil oleh Romo Herry tentang fenomena korupsi sebagai



fokus untuk membongkar centang perenang perpolitikan dan tantangan besar yang dihadapi dalam perkembangan bangsa ini.

Persis dua tahun setelah buku yang bisa dikatakan sebagai *magnum opus* beliau itu beredar, beliau mengembuskan napas terakhirnya. Jika ada peninggalan penting dari Romo Herry, selain karya dan kiprahnya yang tak terhitung banyaknya bagi peradaban dan kemanusiaan itu, mungkin adalah buku itu. Kita tahu, selalu ada jarak antara diskursus dan praktiknya dalam sebuah masyarakat. Melalui buku itu, tak pelak lagi Romo Herry telah menyajikan sebuah diskursus penting tentang sebuah isu paling akut kita. Dalam hati kecil saya berkata, ternyata Romo Herry telah berhasil menyisihkan waktu di tengah kesibukannya mengajar yang sangat padat itu.

Sebagai ilmuwan sosial, Romo Herry telah membuktikan bahwa tugas seorang dosen tidak hanya memenuhi tugas jam mengajar melalui teks-teks lapuk, tetapi juga menulis buku baru. Rasa kehilangan itu menjadi berlipat-lipat ketika kita tahu betapa sedikitnya dosen yang bisa berkiprah dengan total, seperti Romo Herry. Buku itu mungkin buku paling *exhaustive* yang menganalisis tentang fenomena korupsi, mungkin tidak hanya untuk kalangan pembaca di Indonesia, tetapi di dunia.



Sumber: Gramedia Pustaka Utama (2019)

**Gambar 6.** Sampul Buku *Korupsi* Karya Romo B. Herry Priyono

Buku ini tidak diperjualbelikan.



### 33. Itiningsih, Guru Bahasa Indonesiaku<sup>37</sup>

Bu Itiningsih adalah guru Bahasa Indonesia kami di SMA Negeri, satu-satunya SMA Negeri di kota kami menjelang akhir tahun 1960-an itu. Beliau juga biasa dipanggil Bu Piek, mengikuti nama suaminya, Piek Ardijanto Soeprijadi, guru Bahasa Indonesia kami juga. Pak Piek selain guru, dikenal juga sebagai seorang penyair, salah seorang yang dimasukkan dalam Angkatan 66 oleh H.B. Jassin. Bu Piek dan Pak Piek, saya ingat sebagai dua orang yang halus tutur katanya, sangat terkontrol bahasa Indonesianya karena keduanya guru Bahasa Indonesia. Profesi sebagai guru tampaknya dilakoninya tanpa pamrih untuk mendapatkan tanda jasa, namun lebih sebagai pilihan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi saya, keduanya adalah contoh orang yang terpelajar dalam arti yang sesungguhnya. Terpelajar bukan karena

<sup>37</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 25 Mei 2020.

deretan gelar yang disandangnya, tetapi karena sikap, laku, dan cara pandangnya terhadap hidup dan kehidupan.

Kehalusan budi bahasa dan keterpelajaran itu seperti berasal dari sebuah kedalaman hati, keteduhan jiwa, dan penghayatan akan hidup dalam kesederhanaan yang sesungguhnya. Saya ingat mereka selalu naik sepeda beriringan dari rumahnya yang tidak begitu jauh dari sekolah kami. Masa itu, akhir tahun 1960-an, kota kami, dan mungkin kota-kota lain di Indonesia, masih sepi, orang bisa naik sepeda dengan nyaman, jalan belum banyak hiruk pikuk motor dan mobil seperti sekarang. Awal tahun 1970-an, investasi modal asing memang mulai dibuka, tetapi ibarat aliran air, baru, belum meluap menjadi banjir seperti sekarang, melahap segalanya. Ternyata, hanya perlu waktu 50 tahun setelah Orde Baru membuka keran modal asing, hutan, minyak Bumi, dan kekayaan alam lainnya, kota-kota tumbuh tanpa rencana, mungkin desa-desa yang masih jernih mata airnya hanya sedikit.

Bu Itiningsih dan Pak Piek bersama putra-putrinya mendiami sebuah rumah besar dengan model lama, halaman yang luas dengan beberapa pohon sawo dan mangga lokal yang rindang meneduhkan. Keduanya selalu ramah menerima anak-anak muda yang bertandang dan bersilaturahmi, tidak hanya mereka yang menjadi muridnya, tetapi juga anak-anak muda dari mana saja, termasuk dari Jakarta. Pembicaraan tentu saja selalu berkisar tentang bahasa dan sastra, saat itu dunia belum penuh sesak dengan media sosial seperti sekarang. Dalam suasana seperti saat itu ketika belum ada ponsel, menulis hanya bisa dengan mesin tik, betapa sulitnya jika dibandingkan dengan kemudahan-kemudahan saat ini. Namun, apakah tulisan kita saat ini lebih baik dibandingkan saat itu? Mampukah kita menulis puisi seindah *Biarkan Angin Itu* yang digoreskan Piek Ardijanto Soeprijadi?

Kemurahan hati dan keluasan wawasan membuat rumah mereka menjadi sumbu tempat menimba air inspirasi dan gagasan yang akan terbit dalam berbagai bentuk tulisan dari anak-anak muda itu, seperti cerpen, esai, dan puisi. Senang rasanya apabila bisa dimuat di ruang budaya surat kabar lokal, apalagi jika mampu menembus koran nasional. Tidak kurang dari Handrawan Nadesul, Adri Darmaji Woko, Kurniawan Junaedi, Pamusuk Eneste, Prijono Tjiptoherijanto, untuk menyebut beberapa nama anak Jakarta yang sering berhubungan dengan Bu dan Pak Piek. Beberapa penerbitan berupa kumpulan tulisan, antara lain terbit dalam seri buku yang diberi judul *Dari Negeri Poci*. Ada kegembiraan dan harga diri dalam mengekspresikan dan merayakan sesuatu yang lokal, jauh dari kegenitan yang sok kosmopolitan. Ketika globalisasi saat ini betul-betul jadi gombalisasi, kerinduan pada yang lokal terasa betul di hati. Namun, yang lokal juga hanya tersisa beberapa yang ketika semua hampir luluh dalam sergapan komodifikasi.

“Negeri Poci”, julukan kota kami yang terletak di Pantura itu, memang terkenal dengan teh pocinya yang kental ditambah gula batu, membuat teh itu terasa pahit sepat manis jika disesap. Apalagi jika diminum sembari menyantap sate kambing muda yang khas dari kota kami, sebuah kenikmatan duniawi yang sempurna. Masyarakat kota kami dikenal sebagai masyarakat yang egaliter, tidak biasa menggunakan kromo inggil sehingga bahasa kami sering jadi bahan ejekan teman-teman dari kota lain meskipun kami tetap bangga memilikinya. Mungkin karena egaliternya, di suatu masa kami menjadi sangat antipriayi dan antifodalisme. Ketika proklamasi telah diikrarkan di Jakarta dan rasa merdeka merayap ke mana-mana, warga kota kami dan dua kota tetangga mengamuk, menurunkan para pejabat feodal yang ketika itu masih dianggap antek Belanda, konon tidak sedikit juga yang terbunuh. Kejadian yang dikenal dalam



Sumber: Tirtosudarmo (2020)

**Gambar 7.** Piek Ardijianto Soeprijadi (Alm.) dan Itiningsih

sejarah Indonesia sebagai “Peristiwa Tiga Daerah” itu dianggap sebagai bagian dari revolusi sosial pascakemerdekaan, serupa dengan peristiwa yang terjadi di Sumatra Timur. “Peristiwa Tiga Daerah” telah dijadikan bahan kajian dan dibukukan oleh sejarawan Australia, Anton Lucas.

Selain Pak Piek yang penyair, guru Fisika kami, juga seorang penulis cerpen yang juga dimasukkan dalam Angkatan 66 oleh H.B. Jassin, SN Ratmana, atau kami biasa memanggil beliau Pak Sutji. Beliau mengampu mata pelajaran Fisika, dan pelajaran yang serius itu menjadi menyenangkan di tangan beliau. Kota kami diam-diam memiliki tidak sedikit seniman. Ada Yono Daryono yang setia mengembangkan kelompok teater dan Atmo Tan Sidik yang terus menekuni dan “*nguri-uri*” bahasa lokal kami. Juga, tidak jauh dari kota kami, ada dua dalang muda kontemporer, tetapi keduanya kini sudah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

meninggal, yaitu Slamet Gundono dan Enthus Susmono. Sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya bagaimana mungkin dari kota yang jauh dari keraton, yang menjadi pusat kebudayaan Jawa, bahasanya dianggap kasar, bisa melahirkan dua dalang yang menguasai seluk-beluk pewayangan dengan begitu piawai. Kantong-kantong kesenian rakyat memang banyak di kota kami, dan mungkin itu juga yang menjadi sumber inspirasi dari para penyair, perupa, dan penulis yang berasal dari Negeri Poci.

Bu Itiningsih, telah lama ditinggal oleh Pak Piek yang wafat karena paru-parunya bermasalah sejak muda, mungkin beliau sendiri juga sudah makin uzur karena usianya, tetapi saya dengar beliau masih sehat, dan masih menerima kunjungan bekas murid-murid dan anak-anak muda yang dulu sering berdiskusi di rumahnya. Karena kecintaan dan dedikasinya terhadap bahasa dan sastra, konon, rumahnya dijadikan sebagai Rumah Sastra yang dikelola oleh salah satu putranya. Dalam hal bahasa dan sastra, beliau masih menjadi panutan. Mungkin bagi anak-anak muda yang dulu sering menimba ilmu dan inspirasi dari sumur di rumahnya, sudah saatnya untuk mempersembahkan bingkisan berharga untuknya, tidak tahu dalam bentuk apa.

Zaman memang terus berubah dan tidak ada gunanya meratapi hilangnya masa lalu yang indah. Generasi baru menyongsong harinya sendiri, mengolahnya menjadi sesuatu yang berarti. Wajahnya yang teduh tenang membuat kita merasa damai di dekatnya. Saya ingat di kelas, dalam sebuah pelajaran Bahasa Indonesia yang diasuhnya, beliau mengatakan dengan suaranya yang tidak pernah keras, kira-kira demikian, *“Orang harus membaca untuk bisa menulis. Orang tidak bisa menulis kalau tidak membaca”*. Semua penulis yang baik saya kira setuju dengan ucapan guru Bahasa Indonesia saya itu, Bu Itiningsih.



Sumber: Social Movement Institute (2019)

## 34. Hersri, Trauma, dan Amnesia Sejarah<sup>38</sup>

Ketika mengunjunginya bersama Sisco, sejarawan muda dari Malang sekitar dua tahun yang lalu di Yogya, Hersri sebetulnya sudah terlihat segar, hanya pendengarannya yang bermasalah. Hersri menjadi tuli karena seekor jangkrik dimasukkan penyiksanya ke salah satu lubang telinganya saat dia di penjara. Oleh karena itu, pertanyaanku harus diucapkan lagi oleh Mbak Ita Nadia, istrinya, dengan mendekatkan mulutnya ke telinga Hersri. Meskipun sulit, tetapi komunikasi dengannya masih dapat dilakukan. Ketika itu, mereka sebetulnya berencana pindah ke rumahnya yang baru, di Brosot, yang dikerjakan oleh Yoshi, arsitek yang selalu memanfaatkan barang bekas dan material lokal, tetapi karena Hersri belum kuat, rencana pindah itu ditanggguhkan. Saya belum bertanya apakah sekarang mereka sudah menempati

<sup>38</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 13 Maret 2021.

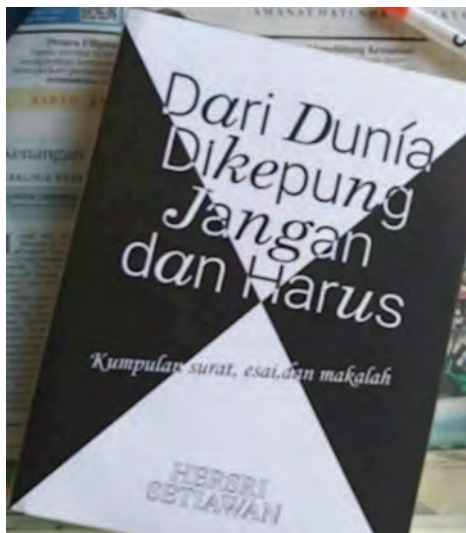


rumah barunya di Brosot. Semoga sudah, dan Hersri bisa menikmati lingkungan alam yang pasti lebih nyaman.

Sekitar dua minggu lalu, saya menerima kiriman bukunya yang baru, *Dari Dunia Dikepung Jangan dan Harus*. Melalui aplikasi *WhatsApp*, Mbak Ita menyampaikan pesan dari Hersri agar saya membacanya dengan baik. Saya berusaha membaca buku dengan sepenuh hati saya dan bagi saya tidak mudah.

Saya telanjur terbawa emosi saat membayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh Hersri, seorang warga negara yang melakukan aktivitas-aktivitasnya yang biasa sebagai seorang jurnalis dan menjadi anggota organisasi yang progresif pada masanya, kemudian ditangkap dan dibuang bersama ribuan orang di Buru.

Ketika peristiwa 1965 yang traumatis itu terjadi, saya sebetulnya sudah cukup besar, sudah kelas 2 SMP di kota kecil, di pesisir utara Jawa, tetapi aneh, begitu sedikit ingatan saya tentang peristiwa yang telah mengubah nasib bangsa dan negara. Baru setelah membaca buku-buku yang berbicara tentang peristiwa, itu saya mulai menyadari betapa beratnya penderitaan orang-orang yang senasib dengan Hersri, yaitu Pramoedya Ananta Tour, Oey Hiem Hwie, dan Tedjabayu, untuk menyebut beberapa nama yang saya kenal. Hersri, Pram, dan Tedjabayu, juga ibunya Mia Bustam, adalah orang-orang yang mampu menuliskan pengalamannya selama dipenjara dalam *gula* Orde Baru. Namun,



Sumber: Sularto (2021)

**Gambar 8.** Sampul Buku *Dari Dunia Dikepung Jangan dan Harus* Karya Hersri Setiawan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



bagaimana nasib ribuan teman-teman mereka yang tidak mampu menuliskan apa yang dialaminya, apa yang telah dideritanya?

Membaca buku baru Hersri ini, saya merasakan seperti mendengar suara-suara yang terbekap meskipun akhirnya seperti menghirup udara bebas. Suara-suara yang muncul adalah suara-suara yang menggemakan sebuah trauma. Dalam sebuah bab, Hersri menceritakan dengan jernih bagaimana trauma itu setiap kali muncul meskipun dia telah menjadi manusia bebas. Trauma itu diam-diam seperti menempel di paspor Belandanya ketika dengan leluasa dia melewati imigrasi Amerika, sebuah negeri yang berperan dalam mengubah nasib diri dan bangsanya. Sebagai seorang yang memiliki ingatan tipis tentang peristiwa 1965, kisah perjalanan Hersri ke Amerika itu tidak bisa dibaca selain menggunakan empati saya, betapa menyakitkan sesungguhnya pengalaman itu. Rasa sakit, pedih, dan *suffering* itu yang tidak mungkin bisa saya rasakan sepenuhnya. Simpati dan empati sebesar apa pun yang saya punya, hanya bisa menjangkau rasa pedih, sakit, dan *sufferings* akibat trauma-trauma yang tertanam di benaknya dan seperti ikut menempel di paspor Belanda-nya.

Buku kumpulan surat, esai, dan makalah itu adalah ekspresi dari suara-suara yang dibekap dari penulisnya, Hersri Setiawan. Kegigihan dan sikap pantang menyerah telah membuatnya bertahan dan terus menulis, kemampuan yang telah terasah sejak masa mudanya. Di bagian akhir buku, Mbak Ita Nadia menceritakan dengan baik bagaimana ritme kebiasaan Hersri yang secara teratur menulis setiap harinya. Menulis dan menulis, membuka kembali catatan-catatan lama yang terselamatkan, membaca lagi ingatan yang lama dipendam; mungkin satu-satunya cara untuk memelihara daya hidup, menyeimbangkan batin. Sebuah ritual *trauma healing* yang harus dijalani agar tetap sehat dan memelihara cita-cita hidup bersama yang lebih bermartabat. Saya dan orang-orang lain seperti saya, yang

memiliki ingatan tipis tentang peristiwa yang traumatis itu, dengan simpati dan empati yang masih tersisa, seharusnya bersyukur dan berterimakasih pada Hersri, Pram, dan Tedjabayu—yang belum lama ini wafat setelah menyelesaikan memoarnya, *Mutiara di Padang Ilalang* (Tedjabayu, 2020), juga pada mereka yang lain yang telah menuliskan pengalamannya. Dari membaca tulisan-tulisan itu, saya dan mereka yang memiliki ingatan tipis dan sedikit empati, bisa membayangkan apa yang telah terjadi dan sedikit merasakan *sufferings* yang telah mereka alami.

Hersri sepanjang hidupnya telah menulis banyak buku, dan buku *Dari Dunia Dikepung Jangan dan Harus* (2021) ini merupakan karya tulisnya yang paling mutakhir dan pastilah bukan bukunya yang terakhir. Jika dilihat dari isinya, secara garis besar, buku ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, berisi tulisan-tulisan reflektif tentang berbagai hal, sebagian ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah di lalui.

Tulisan-tulisan bagian pertama ini adalah etnografi ditulis dengan gaya bahasa tutur yang terperinci dan lancar. Hersri memang seseorang yang menulis dengan gaya realisme, mendeskripsikan apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan tanpa sedikit pun pretensi untuk menggurui pembaca atau berlagak *sok* pandai dan berpengetahuan. Kekuatan tulisan Hersri adalah pada narasinya yang jujur dan logikanya yang jelas, tidak berliku-liku. Jika ada yang ingin disasanya, dengan tulisan-tulisan dalam bagian pertama dari bukunya, ada ajakan untuk bertarung memperebutkan sejarah dalam ruang publik yang makin terbuka. Tulisan-tulisan dalam bagian pertama bukunya adalah bagian dari strateginya untuk membawa pembaca mulai mengenal potongan-potongan sejarah yang dikisahkannya berdasarkan pengalaman pribadinya. Pembaca diajak untuk melihat realitas sebagai kenyataan, bukan sebagai mitos, dogma, atau propaganda dari mereka yang telah memalsukan sejarah.

Bagian kedua dari bukunya, yang secara eksplisit diberi judul *Seri Sejarah LEKRA*, berisi tulisan-tulisannya tentang LEKRA. Apa yang dikemukakannya di bagian pertama tentang perlunya merebut sejarah dalam ruang publik yang makin terbuka, diperagakannya dengan menyodorkan secara terbuka ke ruang publik sebuah sejarah dari organisasi atau lembaga yang ikut dia bangun. Tanpa teori yang berlebihan, Hersri langsung mengeksekusi apa yang dia yakini sebagai perlunya merebut ruang publik sejarah.

*Seri Sejarah LEKRA* dalam bagian kedua buku ini, terdiri dari tujuh bab yang merupakan pengalamannya sebagai pengurus dan aktivis LEKRA di Jawa Tengah. Saya yakin, seri sejarah ini masih akan dilanjutkan dalam buku-bukunya yang akan datang. Sebagai pembaca, kita tentu berhak setuju atau tidak dengan apa yang dikemukakan oleh Hersri. Namun, menjadi sebuah sikap yang sehat jika sebagai sebuah bangsa, kita tidak berangkat dari sebuah prasangka, dan tanpa berpikir jernih, langsung menghakimi bahwa apa yang disampaikan Hersri sebagai sesuatu yang berbahaya dan perlu dilarang. Sikap seperti ini yang harus diakui masih cukup kuat dan harus dilawan bahwa sebuah bangsa yang ingin tumbuh sehat harus berani membuka diri terhadap perbedaan dalam melihat sejarah masa lalunya.

Hersri dan Pram, sekadar untuk menyebutkannya sebagai contoh dari kaum intelektual. Dengan kegigihannya, mereka bisa bertahan dari *gulag* Orde Baru dan saat ini, melalui tulisan-tulisannya, menyodorkan narasi sejarah dari dunia yang selama ini dibekap, menjadi sangat penting bagi orang-orang seperti saya yang memiliki ingatan tipis tentang peristiwa 1965 dan sejarah yang mengitarinya.

Tulisan-tulisan dari kaum intelektual, seperti Hersri dan Pram, serta Tedjabayu, yang meskipun intonasinya keras dan getir, dengan sedikit empati dan simpati yang masih tersisa di diri kita, seharusnya kita terima dengan hati yang lapang. Kita dan

orang-orang seperti saya, yang berada di simpang kanan jalan, adalah orang-orang yang disadari atau tidak disadari berada di sisi mereka yang menang, mereka yang berhasil menumbangkan Bung Karno dan meskipun tidak ikut berlumur darah, telah berperan dalam penyingkiran dan pembungkaman ribuan, mungkin jutaan orang-orang seperti Hersri dan Pram.

Namun, kuatnya kemampuan empati kita masih tak akan mampu merasakan sakitnya telinga yang menjadi tuli karena dipukul popor bedil atau dimasukkan seekor jangkrik ke dalam lubangnya. Kesakitan, kepedihan, dan *sufferings* adalah pengalaman paling riil, menurut Yuval Noah Harari. Bagaimana mungkin sebagai bangsa, kita bisa tega membunuh sesama bangsa sendiri, memenjarakan, dan mengasingkannya selama bertahun-tahun?

Dalam sebuah kesempatan, saya pernah bertanya pada Andrew Beaty, seorang antropolog yang lama melakukan riset di komunitas Osing, di Banyuwangi. Bagaimana kekejaman itu bisa terjadi. Setelah diam sejenak, dia menjawab lirih, “Ada kekuatan luar yang besar, orang-orang desa itu tidak bergerak sendiri”. Kenapa harus membunuh dan memenjarakan ribuan orang-orang yang sejatinya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa tidak cukup menangkap mereka yang benar-benar dinilai bersalah dan membuktikan bahwa mereka memang bersalah. Mengapa harus mengorbankan begitu banyak orang? Strategi dan skenario siapa sesungguhnya yang telah diadopsi dalam peristiwa yang menjadi trauma terbesar bangsa ini?

Bangsa ini sudah seharusnya mengingat kembali apa yang terjadi dengan mata yang bening dan hati yang bersih. Trauma ini harus dingat dan dituliskan jika amnesia sejarah tidak ingin terjadi. Buku Hersri Setiawan adalah bagian dari penyembuhan trauma dan upayanya agar bangsa ini tidak menderita amnesia sejarah dan tersesat dalam labirin masa depan yang makin kompleks ini.



Sumber: Suratno (1991)

## 35. Fuad Hassan dan Teknokrasi<sup>39</sup>

Fuad Hassan, guru besar psikologi Universitas Indonesia, wafat pada 7 Desember 2007, 15 tahun yang lalu, dalam usia 78 tahun. Fuad Hassan yang wafat pada hari yang sama dengan wafatnya guru besar sejarah UGM Sartono Kartodirdjo, adalah generasi pertama ilmuwan sosial Indonesia pasca kemerdekaan.

Segenerasi dengan mereka adalah Koentjaraningrat, guru besar antropologi, dan Selo Sumarjan, guru besar sosiologi; keduanya dari UI dan juga telah meninggalkan kita. Saat ini, dunia ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan Indonesia memang telah ditinggalkan oleh sarjana-sarjananya yang terbaik; seperti Ong Hok Ham, Masri Singarimbun, Muhyarto, Umar Kayam, dan juga Parsudi Suparlan. Generasi pertama ahli ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan pasca kemerdekaan ini diam-diam telah meletakkan sebuah tradisi ilmuwan sosial yang selalu terlibat dalam menggumuli masalah-masalah bangsanya.

---

<sup>39</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com), 2 Januari 2022.

Fuad Hassan, murid pertama dan penerus Slamet Iman Santoso, pendiri Fakultas Psikologi UI, harus dicatat sebagai seorang ahli ilmu sosial non-ekonomi yang sejak zaman pra-Orde Baru telah aktif menjadi bagian dari sekelompok akademisi-intelektual yang secara serius memikirkan arah politik dan pembangunan di Indonesia.

Kelompok akademisi-intelektual yang secara longgar berada dalam lingkaran yang berpusat pada pemikir pembangunan Indonesia Widjojo Nitisastro ini bisa dikatakan sebagai sebuah kekuatan teknokrasi yang pernah ada di Indonesia. Kelompok akademisi-intelektual inilah yang jauh sebelum runtuhnya kekuasaan Presiden Sukarno di pertengahan tahun 1965 telah melakukan analisa-analisa sosial, ekonomi maupun politik tentang perkembangan yang sedang terjadi dan merancang skenario-skenario apa yang mungkin dilakukan setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno.

Secara resmi, kegiatan para akademisi-intelektual ini dilakukan di kantor Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas), sebuah lembaga yang bernaung di bawah Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dari Departemen Urusan Research Nasional, yang berlokasi di Jalan Gondangdia Lama 39, Jakarta Pusat. Widjojo Nitisastro, selain sebagai guru besar di FEUI adalah juga direktur Leknas—sebuah *think tank* yang pertama kali ada di Indonesia setelah kemerdekaan.

Salah satu hasil kajian dari kelompok teknokrat ini adalah sebuah buku kecil berjudul *Masalah-Masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor IPOL-SOS* (Ideologi, Politik, Sosial). Dalam buku yang dicetak sederhana dan relatif tipis ini (139 halaman), kelompok akademis-intelektual di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro menuangkan pemikirannya tentang berbagai isu strategis yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat itu.

Widjojo Nitisastro dalam bab pertama buku ini menulis ulasan berjudul “Persoalan-Persoalan Ekonomis-Tehnis dan Ekonomi-Politis Dalam Menanggulangi Masalah-Masalah Ekonomi”; Ali Wardhana menulis “Masalah Inflasi Di Indonesia”; Emil Salim tentang “Politik dan Ekonomi Pancasila”. Selain mereka, beberapa ahli ekonomi lain juga ikut menulis, yaitu Subroto, Barli Halim, Kartomo dll. Fuad

Hassan, menulis dua bab dalam buku ini, yang pertama memiliki judul sangat panjang, “Beberapa Pertimbangan Untuk Mengkonkritkan Cara hidup Yang Teladan Bagi Para Pemimpin dan Tokoh Negara, pada Khususnya Para Pimpinan ABRI”, dan yang kedua berjudul “Ungkapan Seni-Budaya Sebagai Refleksi Penghayatan Kondisi Sosial Umumnya”. Selain Fuad Hassan, ahli ilmu sosial lain yang ikut menulis adalah Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi.

Sebuah peristiwa strategis lain saat Fuad Hassan memerankan peran penting sebagai bagian kekuatan kelompok akademis-intelektual sebelum lahirnya Orde Baru adalah sebuah seminar besar yang mengambil tema “Menjelang Tracee Baru”, di kampus UI Samba pada tanggal 10 Januari 1966.

Seminar ini sangat penting karena merupakan akumulasi dari kekuatan kelompok akademis-intelektual yang berbasis kampus dalam memberikan sumbangan pemikirannya untuk keluar dari impase politik dan ekonomi yang sedang melanda Indonesia menyusul tragedi politik besar pada tahun 1965.

Fuad Hassan adalah seorang “*concerned intellectual*” yang secara aktif terlibat dalam ikut mempengaruhi arah politik bangsanya pada saat-saat yang sangat genting. Indonesia pasca-1965 memasuki sebuah periode politik baru, yaitu kita menyaksikan munculnya kekuatan politik yang tidak merepresentasikan partai politik atau kelompok sosial tertentu dalam masyarakat.

Kekuatan politik baru yang muncul bersamaan dengan lahirnya Orde Baru ini bersumber pada kekuatan pemikiran yang berdasar pada pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Inilah yang saya sebutkan sebagai kekuatan teknokrasi, yakni orang-orang yang berada di dalamnya dikenal sebagai para teknokrat yang menjadikan pembangunan sebagai satu-satunya ideologi mereka.

Bukanlah sebuah kebetulan jika sebagian besar anggota kelompok teknokrat ini adalah para ahli ekonomi. Ilmu ekonomi—khususnya ekonomi pembangunan—adalah ilmu pengetahuan yang harus diakui sebagai ilmu sosial yang paling siap untuk menerjemahkan pemikiran dan pengetahuan kedalam berbagai bentuk kebijakan pemerintah untuk keluar dari berbagai kemelut ekonomi yang dihadapi saat itu.

Tingkat inflasi yang mencapai 600 persen misalnya, adalah salah satu masalah yang hanya bisa dimengerti dan dipecahkan oleh para ahli ekonomi. Kebutuhan akan modal untuk membangun juga merupakan sebuah masalah yang hanya para ahli ekonomi yang memahami kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangnya.

Adalah hal yang sangat menarik untuk melihat peran dan sikap Fuad Hassan sebagai seorang ahli ilmu sosial non-ekonomi ketika menghadapi kenyataan bahwa dominasi peranan ahli ekonomi menjadi sangat besar dalam kekuatan teknokrasi awal periode Orde Baru. Pada masa ini, kita mulai melihat munculnya kritik terhadap arah pembangunan yang sangat menekankan pertumbuhan ekonomi, di samping mulai dirasakannya peranan militer yang represif dalam menentukan arah pembangunan politik.

Kita mencatat mulai munculnya gerakan-gerakan mahasiswa dan intelektual yang mempertanyakan arah pembangunan dan berbagai isu yang muncul, yaitu isu korupsi, pengerdilan partai politik, pembangunan TMII dan sebagainya. Menghadapi perkembangan politik bangsanya, sikap Fuad Hassan terlihat dengan jelas dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar ilmu psikologi di Fakultas Psikologi UI pada tahun 1972. Isi pidato Fuad Hassan di samping memperlihatkan kecerdasannya sebagai seorang pengamat sosial yang tajam, juga menunjukkan sikapnya sebagai *committed scholars* yang sangat menyadari akan kewajibannya untuk tidak berpangku tangan dan berhenti pada analisis namun harus turun ke lapangan memberikan sumbangan bagi koleganya, yaitu para ahli ekonomi yang telah terlibat mendalam dalam pembangunan Indonesia.

Ilmu psikologi dan ilmu sosial non-ekonomi lainnya—menurut Fuad Hassan—harus mampu memberikan analisis dan jalan keluar dari berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pembangunan ekonomi. Sebagai seorang pengamat sosial yang tajam, Fuad Hassan telah menyadari bahwa pembangunan ekonomi harus diimbangi oleh pembangunan sosial dan politik yang memadai dan sejalan dengan pembangunan ekonomi. Sikap semacam ini juga secara jelas diperlihatkan oleh seorang pemikir besar Indonesia lainnya, Soedjatmoko, yang



pada awal Orde Baru sempat menjabat sebagai deputi ketua Bappenas bidang sosial-budaya dan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat.

Fuad Hassan adalah seorang ilmuwan sosial nonekonomi yang secara sadar melakukan pilihan politik untuk bekerja bagi pemerintah Indonesia—kendatipun mungkin dia melihat betapa sulitnya medan yang dihadapi. Barangkali menarik untuk mengenang Fuad Hassan sebagai seorang intelektual yang tidak pernah menghujat secara terbuka mereka yang sedang berkuasa pada era Orde-Baru. Beberapa tahun yang silam, dalam sebuah kesempatan diskusi yang membicarakan situasi masyarakat setelah turunnya Soeharto, ketika mereka yang lebih muda seperti melakukan penghujatan terhadap rezim Soeharto, Fuad Hassan berusaha mengingatkan untuk melihat kenyataan dari sisi yang lain. Sebuah suara yang terdengar agak menyimpang ketika semua orang seperti berlomba menyalahkan Soeharto. Mungkin inilah kualitas lain dari Fuad Hassan yang harus dikenang, pendekatannya yang *holistic* dalam melihat persoalan masyarakat dan wawasannya yang humanis.

Sejauh yang kita ingat, sampai akhir hayatnya, Fuad Hassan tidak pernah mengubah sikapnya dalam berhadapan dengan pemerintah Orde-Baru. Selain sebagai Menteri Pendidikan (1985–1993), jabatan publik yang pernah diembannya adalah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Fuad Hassan mungkin adalah contoh bagian dari kekuatan teknokrasi yang loyal dan mencurahkan segenap pemikiran dan tenaganya bagi perbaikan masyarakat melalui negara. Fuad Hassan adalah salah satu tipe dan model ilmuwan sosial yang berusaha menjawab tantangan zamannya. Adalah hak sekaligus kewajiban setiap ilmuwan sosial penerusnya untuk merumuskan apa yang menjadi tantangan zamannya dan memilih jalannya sendiri dalam ikut menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bangsanya. Dalam lingkungan dekatnya di Fakultas Psikologi UI, belum lama ini, Bagus Takwin, seorang yang mungkin menjadi murid terakhir yang dibimbingnya ketika menulis tesis doktornya, terpilih sebagai Dekan. Hal ini menandai estafet akan pentingnya ilmu psikologi bagi pemecahan masalah-masalah bangsa yang semakin kompleks.



## 36. Muhamad Hisyam, Sejarawan Islam yang Rendah Hati<sup>40</sup>

Muhamad Hisyam adalah sejarawan LIPI yang menekuni Sejarah Islam. Beliau wafat Minggu pagi, 18 Juli 2021 karena tertular Covid-19. Kepergiannya merupakan kehilangan yang besar bagi dunia ilmu sosial Indonesia dan pengkaji Sejarah Islam. Tesis doktor yang diselesaikannya di Universitas Leiden, Belanda, tahun 2000 mengupas peran penghulu di Jawa pada Zaman Kolonial (Hisyam, 2001).

Tesis itu kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku oleh INIS, Jakarta–Leiden pada tahun 2001 dengan judul *Caught Between Three Fires, The Javanese Pangulu under the Dutch Colonial Administration 1882–1942*. Kajiannya yang didasarkan pada pembacaan arsip-arsip Belanda itu, memperlihatkan krusialnya

<sup>40</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 21 Juli 2021.

posisi penghulu pada masa itu karena selain mengemban tugas sebagai birokrat yang diberi kewenangan administrasi mengurus soal keagamaan, penghulu juga merupakan seorang pemimpin umat Islam.

Periode pengkajiannya yang berhenti persis sebelum pendudukan tentara Jepang di Indonesia yang berlangsung cukup singkat itu (1942–1945), menjadi pendahulu kajian Harry J. Benda tentang Islam di zaman Jepang, yang kemudian terbit sebagai buku *The Crescent and Rising Sun: Indonesian Islam under Japanese Occupation, 1942-1945* (Benda, 1958).

Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1958 oleh penerbit W. Van Hoeve, Bandung. Studi yang dilakukan oleh Muhamad Hisyam dan Harry J. Benda merupakan studi hubungan Islam dan negara, yang hingga hari ini masih menjadi persoalan yang terus perlu dikaji.

Dr. Muhammad Hisyam, yang telah dikukuhkan sebagai profesor riset pada 18 September 2012 setelah memberikan orasi ilmiah yang berjudul “Dinamika Pelaksanaan Syariah Islam di Indonesia”, adalah seorang peneliti yang telah menunjukkan komitmen akademiknya untuk terus menekuni hubungan antara Islam dan negara.

Profesor Muhammad Hisyam, yang biasa kami panggil Mas Hisyam, di antara kolega peneliti di LIPI adalah seorang yang selalu membawa rasa teduh meskipun terkadang, bagi yang mengenalnya dari dekat, ia sering mengeluarkan guyonan yang mengejutkan. Ketika mendengar beliau sakit beberapa waktu lalu karena tertular Covid-19, saya mengirimkan pesan singkat menanyakan keadaannya. Namun, pesan saya tidak dibalas. Saya merasa, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya karena biasanya, dia selalu membalas pesan singkat saya meskipun sekadar untuk “say hello”.

Ketika Dedi Adhuri, salah satu kolega LIPI, memberi kabar jika Mas Hisyam *mangkat*, sesuatu yang saya rasakan tidak pada tempatnya itu, menjadi jelas duduk perkaranya. Mangkatnya Mas Hisyam menambah panjang korban Covid-19 yang susul menyusul dalam pekan-pekan terakhir ini. Di kampung saya, di Rawamangun, Jakarta Timur, hampir setiap hari ada pengumuman dari Masjid tentang warga yang meninggal. Keadaannya memang kritis karena kita makin terkepung oleh wabah yang mematikan ini. Teman dan saudara dekat kita makin banyak yang tertular, sebagian melakukan isolasi mandiri, sebagian di rumah sakit, dan sebagian meninggal.

Mangkatnya Mas Hisyam, sahabat dekat kita, menambah besarnya rasa kehilangan itu. Saya tidak mungkin melewatkan momen mangkatnya Mas Hisyam begitu saja. Meskipun di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI saya tidak pernah satu tim penelitian bersama Mas Hisyam, tetapi hubungan kami dekat. Saya menghormati beliau karena kesantunan dan kesabarannya, yang bagi saya mengagumkan. Saya hampir tidak pernah melihat Mas Hisyam emosi atau marah. Kehadirannya selalu membawa kesejukan, dia bisa mengatasi persoalan yang bagi saya sudah menjengkelkan atau menyebalkan, ditinggalkan saja. Namun, Mas Hisyam dengan caranya, selalu bisa mencari jalan yang aman dan damai.

Saya menjadi dekat dengan Mas Hisyam karena dia adalah orang yang seharusnya menjadi Kapus,—yang kemudian jabatan tersebut terpaksa saya duduki—ketika tahun 1998 Pak Hilman Adil sakit dan memerlukan pengganti. Mas Hisyam, saat itu masih menyelesaikan penulisan tesis doktornya di Universitas Leiden, Belanda. Pak Ardjuno Brodjonegoro, Deputy Ketua LIPI Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) saat itu, meminta saya menggantikan Pak Hilman Adil sebagai Kapus PMB. Setelah Mas Hisyam pulang dari Belanda, saya merasa lega karena Kapus PMB yang sedang ditunggu-tunggu telah tiba.

Saya tidak saja bertukar peran dengan Mas Hisyam sebagai Kapus, tetapi juga bertukar kamar kerja. Mas Hisyam dengan baik hati menawari kamarnya di Lantai 9, Gedung Widya Graha LIPI untuk saya, dan dia pindah ke ruang Kapus di Lantai 6. Sebagai pemimpin lokal, Mas Hisyam berhasil melanjutkan apa yang telah menjadi tradisi di PMB, antara lain perhatiannya yang besar pada penelitian agama dan kebudayaan pada umumnya.

Tesis doktornya tentang penghulu di zaman Kolonial yang dibimbing oleh sejarawan terkenal, Profesor Cornelis van Dijk, penulis buku tentang Darul Islam, membuktikan kualitas Mas Hisyam sebagai akademisi mumpuni dalam studi Islam. Saya beruntung dapat menghadiri sidang promosi doktornya di Universitas Leiden, sekitar tahun 2000.

Sebelum sidang dimulai, saya bertemu dengan Dijk van der Meij yang akan mendampingi Mas Hisyam saat diuji secara oral itu. Dijk memberitahu saya dengan gaya lucu bahwa dia telah memberi tahu para profesor penguji untuk berteriak saat mengajukan pertanyaan karena pendengaran Mas Hisyam bermasalah. Ujian itu berjalan lancar dan diakhiri makan bersama yang diiringi *klenengan*. Saya melihat Mas Hisyam menari dengan *sampur* berduet dengan promotornya, van Dijk. Belakangan, saya diberitahu bahwa masalah pendengaran itu disebabkan oleh penggunaan *electric heater* yang berdengung bunyinya.

Sebagai Kapus PMB yang cukup lama memimpin (2001–2008), Mas Hisyam cukup kenyang makan asam garam kehidupan lembaga penelitian pemerintah. Ketekunan dan kesabarannya juga tecermin dalam menghadapi keragaman gaya dan kepribadian para peneliti, senior maupun junior, dan staf administrasi yang dibawahinya. Ketekunan dan ketelitian dalam menulis merupakan kualitas tersendiri yang dimilikinya. Berbagai penulisan laporan penelitian dikerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pandangan bahwa Mas Hisyam adalah seseorang yang akan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dalam penglihatan

saya, tidak jarang sebetulnya telah membuat pekerjaannya melampaui batas-batas kemampuan yang dimilikinya. Ketika LIPI mendapatkan sebuah proyek pesanan dari Bappenas tentang sebuah topik penelitian, yang menurut saya tidak begitu jelas tujuannya, Mas Hisyam seperti terpaksa harus ikut mengerjakannya karena ada instruksi dari atas. Proyek pesanan itu disebut sebagai penelitian Global Village yang sampai sekarang tidak tahu telah menghasilkan apa. Proyek itu adalah proyek besar karena pengumpulan datanya tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di Australia, Jepang, dan Belanda, serta melibatkan tidak sedikit peneliti. Dalam proyek itu, Mas Hisyam diberikan tugas yang cukup penting dan terlihat sebagai peneliti senior yang sibuk.

Dengan dana yang cukup banyak dari proyek Global Village, sampai-sampai ada alokasi dana yang diperuntukkan bagi sebuah subproyek khusus penulisan buku bagi lima peneliti senior di PMB-LIPI yang sebentar lagi pensiun—saya dan Mas Hisyam termasuk di dalamnya. Sebagai orang yang sejak awal skeptis dengan proyek penelitian Global Village itu, saya sebetulnya enggan terlibat dalam proyek penulisan. Namun, honorarium telah saya terima sehingga saya terpaksa harus ikut dalam proyek itu. Memang terbukti, saya adalah orang yang paling lama menyerahkan pekerjaan penulisan itu. Saya merasa harus menyelesaikan tulisan setelah dua kolega dari lima pensiunan itu meninggal karena sakit. Besarnya rasa tanggung jawab, membuat koordinasi pengeditan tulisan diambil alih oleh Mas Hisyam, dan berita terakhir yang saya peroleh dari Mas Hisyam adalah naskah itu sedang dalam proses *review* di Penerbit Kompas Gramedia. Tidak disangka, Mas Hisyam wafat, dan saya tidak tahu kapan buku itu akan terbit. Tiga dari lima para penulis buku itu telah mangkat.

Mengenang Mas Hisyam, berarti tidak sekadar mengenang seorang sahabat yang sepanjang hidupnya mencerminkan

kedamaian dan keteduhan, tetapi juga seorang pakar Sejarah Islam yang rendah hati. Sebagai orang yang mendalami Sejarah Islam dan memahami dinamika hubungan antara negara dan Islam, Mas Hisyam memiliki kapasitas pengetahuan yang mencukupi untuk berbicara di ruang publik tentang sebuah isu yang makin krusial karena ketegangan-ketegangan yang muncul terkait dengan isu radikalisasi, terorisme, dan politik identitas pada umumnya.

Buku yang ditulis bersama tim penelitiannya yang berjudul *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Afadlal dkk., 2004), termasuk yang laris di pasaran, mungkin karena topiknya yang aktual. Sebagai peneliti Sejarah Islam, kepakaran Mas Hisyam tidak perlu diragukan lagi. Sifatnya yang rendah hati membuatnya tidak ingin menonjolkan diri meskipun kita tahu persoalan agama dan negara yang menjadi keahliannya, bisa menjadikannya intelektual publik yang akan dikenal luas. Oleh karena itu, kepergian Mas Hisyam tentu merupakan kehilangan besar bagi kalangan pengkaji agama dan kebudayaan, yang tentu masih membutuhkan kepakarannya.

Selamat jalan Mas Hisyam. Selamat menyongsong keteduhan dan kedamaian yang abadi.



Sumber: Hartana (2021)

## 37. Romo Kuntara dan Jawa Kuna<sup>41</sup>

Secara kebetulan, saat menjadi profesor tamu di Institute for Language and Culture of Asia and Africa-Tokyo University of Foreign Studies (ILCAA-TUFS) di Tokyo tahun 2003–2004, *host* professor saya, Koji Miyazaki memiliki koleksi buku-buku tentang Jawa yang sangat lengkap. Profesor Koji Miyazaki memang seorang antropolog ahli Jawa lulusan Leiden University. Disertasi doktornya tentang Keraton Jogya, berjudul “The King and the People: The Conceptual Structure of Javanese Kingdom”, 1988, di bawah bimbingan Profesor Josselin de Jong yang terkenal dengan mazhab strukturalisnya.

Di ILCAA, setiap peneliti memiliki kamar kerjanya sendiri yang luas. Saat itu, penelitian yang saya lakukan adalah tentang migrasi di dunia Melayu, bukan tentang Jawa. Ruang kerja

<sup>41</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 28 Juli 2021.



Profesor Koji Miyazaki dipenuhi oleh buku-buku yang tersusun rapi di rak-rak yang mendominasi sebagian besar ruang kerjanya. Saat mengundang saya sebagai profesor tamu, Profesor Miyazaki tengah menjabat sebagai direktur ILCAA sehingga sehari-hari lebih banyak berada di ruang kerjanya sebagai direktur. Profesor Miyazaki mempersilakan saya menggunakan ruang kerja dan membaca buku-bukunya kapan saja saya mau dan saya diberi kunci ruang kerjanya. Pada saat di ILCAA itulah, saya banyak membaca buku-buku tentang Jawa.

Sebuah buku yang saya baca dengan antusias adalah buku karya Romo Zoetmulder (1995), berjudul *Pantheism and Monism in Javanese Suluk Literature*, yang merupakan terjemahan dari disertasi doktornya di Universitas Nijmegen (1935) dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris oleh sejarawan Australia, Ricklef. Disertasi itu sebelumnya telah diterjemahkan Romo Dick Hartoko ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Manunggaling Kawulo Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa” tahun 1991. Saya masih ingat uraian terakhir buku itu membicarakan tentang Syekh Siti Jenar, yang oleh Romo Zoetmulder disebut sebagai sebuah enigma. Romo Zoetmulder menyatakan apakah Syekh Siti Jenar benar-benar ada atau hanya tokoh imajiner, namun menurutnya tidak penting karena pengaruhnya tetap sangat besar.

Telah lama saya mendengar bahwa Romo Kuntara Wiryamartana adalah penerus Romo Zoetmulder sebagai seorang ahli bahasa Jawa Kuna, sebuah keahlian yang saya tidak tahu apakah ada penerusnya di Indonesia sepeninggal keduanya. Nama Romo Kuntara telah lama masuk dalam daftar di benak imajinasi saya dari orang-orang yang ingin saya temui jika ada kesempatan. Kesempatan bertemu Romo Kuntara hampir saja saya peroleh meskipun kemudian gagal.

Saat itu, Amin Mudzakkir, kolega muda saya di LIPI yang sering mengobrol dengan saya, mengatakan bahwa Romo Kuntara

sedang ada di STF Dryarkara. Amin yang sedang mengambil program pascasarjana di STF membuat janji mempertemukan saya dengan Romo Kuntara. Saya ingat waktunya setelah jam kerja dan tempatnya di kampus STF Dryarkara, di Rawasari, Jakarta Timur, tidak jauh dari rumah saya. Sekitar jam 5 sore, saya berangkat dari kantor saya di Jln. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan, menuju STF. Ternyata, sore menjelang malam itu, Jln. Sudirman dan Thamrin, macet total. Persis sebelum bundaran HI, saya menelpon Amin bahwa rasanya tidak mungkin mencapai STF dalam waktu cepat. Saya minta disampaikan maaf dan salam untuk Romo Kuntara dan berharap ada kesempatan lain untuk bisa bertemu Romo Kuntara. Namun, kesempatan itu tidak pernah datang. Romo Kuntara wafat sebelum saya dapat menemuinya.

Jumat, 23 Juli 2021 lalu, saya mengikuti webinar untuk memperingati sewindu wafatnya Romo Kuntara. Webinar itu mengajak pesertanya untuk mengenal Romo Kuntara melalui buku kumpulan tulisannya yang berjudul *Sraddha Jalan Mulia: Dunia Sunyi Jawa Kuna* (Wiryamartana, 2016). Romo Subanar dalam webinar itu menjelaskan tentang isi buku yang selain berisi makalah dan artikel, juga berisi puisi-puisi yang ditulis oleh Romo Kuntara. Buku itu, sekitar tiga ratus halaman, merupakan kumpulan terlengkap dari tulisan Romo Kuntara. Di buku itu, beberapa tulisan Romo Kuntara, bahkan hanya berupa catatan pendek, satu atau dua lembar.

Beberapa tulisan yang bisa dikatakan panjang dan lengkap merupakan resensinya yang sangat kritis dan detail terhadap buku-buku yang ditulis oleh para ahli filologi Jawa, seperti Soebardi, *The Book of Cebolek* (1975), Soepomo yang menulis buku *Arjuna Wijaya, A Kakawin of Mpu Tantular* (1977), dan disertasi W. van der Molen tentang “Kunjarakarna” (1983). Beberapa ulasan panjang yang ada dalam buku itu sebelumnya dimuat di majalah *Basis*.

Menurut Romo Subanar, ada beberapa tulisan Romo Kuntara yang belum bisa ditemukan sehingga belum bisa disertakan dalam buku itu. Sebagai orang yang ingin bertemu dengan Romo Kuntara, mengikuti webinar dan membaca buku itu saya bersyukur bisa sedikit mengetahui pemikiran-pemikiran beliau tentang Jawa Kuna. Romo Kuntara sendiri menyelesaikan studi doktornya di UGM dengan disertasi tentang Kakawin Arjunawiwaha (1987) gubahan Empu Kanwa pada abad ke-XI. Selain berisi tulisan-tulisan yang mencerminkan kualitas kesarjanaan Romo Kuntara sebagai pakar bahasa Jawa Kuna, Romo Subanar juga menyertakan karya puisi Jawa yang pernah ditulis Romo Kuntara. Beberapa puisi dituliskannya saat terbaring sakit di RS Panti Rapih tahun 1968, antara lain puisi yang berjudul “Panyuwunan”. Versi pendek puisi “Panyuwunan” inilah yang kemudian menjadi viral karena ditayangkan oleh berbagai kalangan dan dirasakan pas untuk situasi pandemi saat ini

Dua orang yang bukunya dikritisi oleh Romo Kuntara adalah Dr. Soebardi dan Dr. Supomo, yang saya kenal ketika saya menjadi mahasiswa pascasarjana di Australian National University (ANU), Canberra tahun 1982–84 dan 1986–90. Pak Bardi dan Pak Pomo, di samping Pak Wito dan Pak Achdiat Karta Miharja adalah dosen-dosen yang mengajar di Faculty of Asian Studies yang saat itu dipimpin oleh Profesor Anthony Johns, seorang ahli kesusastraan Melayu dan Indonesia.

Pak Wito (Dr. Soewito Santoso), seperti Pak Bardi dan Pak Pomo adalah ahli bahasa Jawa, sementara Pak Achdiat kita tahu adalah sastrawan terkenal, salah satu bukunya berjudul *Atheis*. Saya tidak tahu mengapa buku Pak Wito tidak dirensi oleh Romo Kuntara. Pak Wito adalah penulis buku *Boddhakawya-Sutasoma* dan sebelum wafatnya, telah menyelesaikan terjemahan *Serat Centhini* ke dalam bahasa Inggris, *The Centhini Story: The Javanese Journey of Life*, 2006. Komunitas mahasiswa pascasarjana dari Indonesia yang cukup besar di ANU tahun 80-an itu

menjadikan kami sering berkumpul dengan para sesepuh itu. Setelah pension, Pak Wito memutuskan untuk menetap di sebuah desa, Ngledegan, di pinggiran Klaten, Jawa Tengah. Di halaman rumahnya, Pak Wito membangun masjid kecil (surau). Beliau sempat saya kunjungi di padepokannya itu, namun karena sakit, beliau kembali menetap di Canberra sampai wafatnya.

Upaya Romo Subanar dari Universitas Sanata Dharma beserta timya membukukan tulisan Romo Kuntara yang tersebar itu, adalah sebuah jalan mulia Sraddha. Tanpa usahanya itu, sebagian besar dari kita mungkin hanya akan mendengar nama beliau dan kisah-kisah tentang beliau yang telah menjadi legenda. Salah satu kisah yang telah melegenda tentang beliau adalah kebiasaannya membawa wayang kulit Petruk ke mana pun beliau pergi. Dalam webinar untuk mengenangnya itu, Dr. Risa Permanadeli menceritakan bagaimana Romo Kuntara menguji disertasi doktornya tentang perempuan Jawa di EHESS, Paris. Sebagai salah satu penguji yang dihadirkan karena ahli tentang Jawa, Romo Kuntara menguji dengan cara *nembang* melalui mulut Petruk dalam bahasa Prancis. Emanuel Subangun, dalam epilog buku kumpulan tulisan itu mengatakan bahwa Romo Kuntara sering digosipkan orang-orang disekitarnya sebagai “Romo Klenik”, sebutan yang kemudian dibuktikan oleh Emanuel Subangun hanya isapan jempol belaka.

Namun, bagi saya, seperti segala hal yang berkaitan dengan Jawa Kuna merupakan sesuatu yang selalu diliputi misteri, mungkin juga sebuah enigma yang mengundang banyak pertanyaan sekaligus menggetarkan. Kisah tentang ditemukannya naskah-naskah kuno dalam *lempir-lempir* lontar di lereng Gunung Merapi Merbabu yang diduga ditulis oleh para petapa, mungkin sejak zaman Mataram Kuna, merupakan kisah yang menarik. Romo Kuntara merupakan salah seorang yang berhasil melakukan pembacaan terhadap teks-teks dalam lontar yang sebagian tersimpan di berbagai tempat, antara lain di Paris dan

Inggris. Dalam tulisannya yang berjudul “Poerbatjaraka dan Naskah Merapi-Merbabu: Catatan Singkat” (hlm.119–123), Romo Kuntoro menyebutkan bahwa para ahli literatur Keraton Surakarta diduga merupakan orang-orang yang menggunakan teks-teks Merapi Merbabu sebagai Pustaka penting ketika mengubah karya-karya mereka, termasuk Pujangga Jawa yang paling terkenal, Ronggowarsito.

Cerita tentang skriptorium-skriptorium di lereng Merapi dan Merbabu itu, dalam webinar untuk mengenang Romo Kuntara, dikisahkan kembali oleh Rendra Agusta, anak muda yang menekuni bahasa Jawa Kuna bersama teman-temannya. Mereka melakukan pelacakan ke tempat-tempat yang dulunya menjadi pertapaan para resi yang memilih jalan sunyi untuk mendekatkan diri dengan alam. Rendra Agusta dan teman-temannya yang tergabung dalam Sradha Institute, merupakan contoh atas mereka yang menganggap penting untuk terus menghidupkan semangat mempelajari Jawa Kuna.

Contoh lainnya adalah kelompok yang tergabung dalam Yayasan Sastra Lestari, di mana John Paterson dan rekan-rekannya terus melakukan digitalisasi naskah-naskah Nusantara yang makin sulit ditemukan. Tulisan tentang para petapa penulis lontar di lereng Merapi Merbabu ini menjadi tulisan pertama (hlm. 1–8) yang semula merupakan artikelnya di majalah *Rohani* tahun 1973 dengan judul “Alam, Keindahan dan Kakawin”. Tulisannya yang hanya satu seperempat halaman itu berjudul “Cara Pikir Jawa dalam Sastra Suluk: Panduan Pembacaan” (hlm. 105–106). Melalui tulisan itu, pembaca pasti akan kecewa karena apa yang dibayangkan sebagai penjelasan penting dari apa yang disebut “cara pikir Jawa”, Romo Kuntara begitu ringkas menuliskannya. Romo Kuntara menulis sebagai berikut.

“Cara pikir Jawa – seperti juga tampak dalam bahasa Jawa – dapat dikatakan cara pikir konkrit. Yang utama bukan definisi, melainkan deskripsi, contoh, perumpamaan, paradoks, dll” (Wiryamartana, 2014).

Mengapa Jawa telah menyedot perhatian banyak orang asing, dalam hal bahasa Jawa Kuna, bisa diurut nama-nama, seperti Kats, Uhlenbeck, Teeuw, Kern, Winters, Brandes, Drewes, Pigeaud, Hooykaas, Juynboll, Zoetmulder, dan van der Mollen. Belum termasuk yang berasal dari luar Belanda, di antaranya Ricklefs, Ann Kumar, Ben Anderson, Tim Behren, Nancy Florida, George Quinn, dan lain-lain.

Di antara semua nama itu, mungkin Romo Zoetmulder, yang kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia, bisa dianggap terpenting. Romo Zoetmulder selama tiga puluh tahun menekuni penyusunan kamus Jawa Kuna-Inggris dan diterjemahkan menjadi kamus Jawa Kuna-Indonesia. Romo Kuntara mengulas terbitnya kamus itu dalam sebuah tulisan berjudul "Menyambut terbitnya *Old Javanese-English Dictionary*" (hlm. 107–116). Dalam tulisan yang dimuat majalah *Basis*, November 1982 itu, terlihat rasa hormat Romo Kuntara yang begitu dalam terhadap gurunya (Wiryamartana, 1982). Kita menjadi tahu mengapa Romo Zoetmulder menghabiskan sebagian masa hidupnya untuk menyelesaikan kamus Jawa Kuna itu, juga mengapa memilih untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bersama Stuart Robson, dari Belanda.

Kamus ini telah menjadi pustaka utama dan kunci pembuka pintu salah satu peradaban dunia yang penting. Damae Shasangka, mungkin penulis fiksi Jawa paling produktif saat ini, dalam sebuah percakapan bersama saya menyatakan menggunakan Kamus Jawa Kuna Romo Zoetmulder sebagai acuannya. Pilihan Romo Zoetmulder untuk menerjemahkan bahasa Jawa Kuna ke dalam bahasa Inggris (2.368 halaman), memperlihatkan pandangan dan keyakinannya bahwa Jawa Kuna harus diketahui dunia.

Pada tahun 1974–1975, Romo Zoetmulder menjadi peneliti tamu di Netherlands Institute for Advance Studies (NIAS) dan kesempatan itu dipakai untuk menyusun kamusnya. Ketika kamus itu selesai dan diterbitkan, acara peluncuran pertama

dilakukan di NIAS pada 19 Oktober 1982. NIAS yang saat itu berada di Wassenaar, sebuah kota kecil antara Leiden dan Den Haag, yang setiap tahun mengundang sekitar duapuluh peneliti dari berbagai belahan dunia, merupakan sebuah kompleks yang mirip biara karena para penelitinya diharapkan bisa melakukan kontemplasi.

Ketika saya menjadi peneliti tamu di NIAS tahun 2000–2001, saya baru mengetahui bahwa direktur pertama NIAS adalah Profesor Uhlenbeck, seorang ahli linguistik yang mendalami bahasa Jawa Kuna. Jadi, tidak mengherankan jika Romo Zoetmulder memilih perpustakaan NIAS untuk meluncurkan kamusnya. Nama Uhlenbeck juga telah diabadikan dengan diselenggarakannya Uhlenbeck Lecture setiap tahun di NIAS. Hasil kontemplasi saya di NIAS adalah sebuah buku *From Colonization to Nation-State: The Political Demography of Indonesia*, telah diterbitkan oleh LIPI Press pada 2013, saat ini akan diterbitkan edisi barunya oleh Springer.

Dalam kata pengantarnya, Romo Subanar mengatakan bahwa sebelum sakit, Romo Kuntara sebetulnya sedang merencanakan untuk bergabung dengan sebuah tim penelitian dari Tokyo University. Dapat dipastikan bahwa tim penelitian itu adalah tim dari ILCAA-TUFS, yang sebelumnya telah dirintis oleh Profesor Koji Miyazaki. Dalam sebuah percakapan, Profesor Koji Miyazaki mengatakan keinginannya untuk mengupas tentang *Serat Kandha* dan ingin menulis tentang *Pawukon*. Setelah saya kembali ke Indonesia, Professor Koji Miyazaki memang mengundang dua orang filolog, yang pertama adalah Dr. Titiek Pudjiastuti dari UI dan yang kedua adalah Dr. Oman Fathurrahman dari UIN, Jakarta. Seandainya saja Romo Kuntara belum wafat, pastilah kita akan membaca tulisan Romo Kuntara sepulang dari Tokyo itu.





## 38. H.B. Jassin dan Diponegoro 82<sup>42</sup>

Saya sering melihat pria setengah baya itu, gemuk-gempal, tidak begitu tinggi, sering berbaju putih lengan pendek agak lusuh, dibiarkan bebas, dan tidak dimasukkan ke dalam celana yang biasanya berwarna hitam. Wajahnya agak bulat, ada tahi lalat cukup besar persis di ujung bibir sebelah kiri, rambutnya hitam tebal, sepertinya hanya disisir dengan jari-jari tangannya. Kantornya, mungkin salah satu tempat kegiatannya, pusat dokumentasi sastra, terletak di *hook* lantai dua sebuah gedung tua, di Jln. Diponegoro 82, persis berhadapan dengan RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Gedung itu sekarang menjadi bagian dari Universitas Kristen Indonesia (UKI). Saya sering melihatnya karena lantai satu gedung itu adalah ruang-ruang kuliah Fakultas Psikologi UI, yang

<sup>42</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, tanggal 5 Agustus 2021.



pada tahun 1971, saya mulai berkuliah di sana sebelum pindah ke Salemba 4, dan pindah lagi ke Rawamangun. Selain sebagai tempat kuliah, di lantai satu itu juga memiliki beberapa bangunan dari papan yang menjadi kamar-kamar dan semacam tempat tinggal sementara mahasiswa psikologi yang kerap melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bawah Senat Mahasiswa. Sebagai mahasiswa baru, saya sering ikut *kongkow-kongkow* dengan para senior saya, bahkan ikut menginap di “rumpan” (rumah papan) itu. Hampir setiap hari, di tempat itu, pada 1971–1972, saya agak sering melihat lelaki yang biasanya datang atau pergi, berjalan gontai, sambil menenteng tas kulit hitam besar yang tampak berat itu.

Entah karena dorongan apa, saya kemudian sering naik ke lantai dua, ke pusat dokumentasi sastra itu. Di sana, saya bisa membaca apa saja yang menarik perhatian saya, terutama surat-surat pribadi, misalnya surat-surat dari penyair Chairil Anwar dan W.S. Rendra. Di ruangan yang terbuka dengan meja-meja besar tempat menampilkan karya para pengarang dan lemari-lemari kaca besar yang menutup semua dinding ruangan segi empat yang cukup luas itulah, laki-lagi gemuk yang ternyata H.B. Jassin, berkantor. Selain H.B. Jassin yang memiliki meja khusus, saya selalu melihat dua atau tiga staf yang selalu tampak bekerja membantu H.B. Jassin dalam mengurus koleksi dokumen-dokumen sastra itu. Orang-orang yang membantu H.B. Jassin itu sangat ramah, saya senang mengobrol dengan mereka.

Saya tidak tahu apakah ketika Goenawan Mohamad dan Soe Hok Djinn (Arief Budiman) tahun 1960 masuk Fakultas Psikologi UI, H.B. Jassin sudah berkantor di Diponegoro 82. Ketika mengenang Toeti Heraty, seniornya di Fakultas Psikologi UI, dalam *Catatan Pinggirnya*, 8 Agustus yang lalu, Goenawan hanya mengatakan “Saya berkisar di halaman dalam fakultas yang sempit... sementara Toeti lebih sering di salah satu ruang di mana buku tebal ada di meja-meja”. Goenawan, Jassin dan Arief dan

setahu saya Toeti Heraty tidak ikut, adalah para penandatanganan Manifesto Kebudayaan yang konon oleh lawannya, Lekra, dipelesetkan menjadi Manikebu, sebuah pernyataan sikap tentang posisi politik mereka sebagai penerus tradisi kebebasan berpikir dan mencipta yang bersifat universal.

Salah satu konseptor Manifesto Kebudayaan adalah Wiratmo Soekito yang dikenal cukup dekat dengan militer. Selain Wiratmo, ada Mochtar Lubis seorang wartawan kawakan yang korannya, *Indonesia Raya*, selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah sehingga kenyang dipenjara, baik oleh Soekarno maupun Soeharto. David Hill, seorang ilmuwan sosial dari Australia yang menulis disertasi doktornya tentang Mochtar Lubis, menceritakan jika Mochtar Lubis marah besar kepadanya ketika dalam sebuah wawancara, disinggung hubungannya dengan CIA.

Pada tahun 1968, H.B. Jassin menerbitkan buku tebal berjudul *Angkatan 66: Prosa dan Puisi*, yang menghimpun sejumlah sastrawan dan karyanya yang mau tidak mau mencirikan sikap politik para penandatanganan manifesto itu (Jassin, 1968). Pertengahan tahun '60-an memang periode kritis dalam sejarah politik Indonesia. Imbas Perang Dingin tidak bisa dihindari dan dunia seni-budaya ikut menjadi ajang persengketaan ideologis itu.

Saat ini, bisa dibaca buku-buku yang mengungkap bagaimana kedua blok yang bertempur dalam menguasai negeri-negeri netral itu menggunakan berbagai cara untuk memenangkan perang. Bung Karno, kita tahu, adalah seorang pemimpin yang berusaha membangun kekuatan nonblok melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 ketika Perang Dingin berlangsung.

Ketika perang telah berkecamuk, terbukti tidak mudah untuk netral. Operasi intelijen dengan *covert action*-nya, yang telah menyusup ke berbagai kelompok masyarakat, bukan rahasia lagi. Makin sulit untuk dibantah keterlibatan agen-agen CIA

dalam upaya menumbangkan Bung Karno dan memengaruhi arah politik dalam negeri Indonesia. Keterlibatan Profesor Guy Pauker dari Rand Corporation yang bekerjasama dengan Brigjen Soewarto dari SESKOAD Bandung, misalnya, telah banyak diungkap.

Begitu juga peran dari Congress for Cultural Freedom (CCF), sebuah lembaga antikomunisme yang ternyata juga bagian dari operasi CIA, mulai diungkap keterlibatannya dalam mensponsori kegiatan kaum intelektual di berbagai tempat, termasuk di Indonesia yang anti-Soekarno. Bukanlah sebuah kebetulan jika 5 tahun setelah 1965, tepatnya pada tahun 1971, bermunculan lembaga-lembaga intelektual yang sedikit atau banyak adalah buah dari kemenangan salah satu pihak dalam sengketa ideologis 1965. Beberapa yang menonjol dan tahun ini memperingati ulang tahun ke-50-nya adalah CSIS, LP3ES, dan *Tempo*.

Saya lupa tahun berapa persisnya, rasanya sekitar pertengahan 70-an, saat itu saya masih tinggal di Asrama Mahasiswa UI, Dakasinapati, Rawamangun. Di asrama itu, tinggal mahasiswa UI dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan. Mahasiswa di Asrama Daksinapati juga berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia. Asrama itu memungkinkan saya bergaul dengan berbagai macam jenis dan tipe mahasiswa, dan ini sesungguhnya sebuah karunia tersendiri bagi saya.

Tentu dengan berjalannya waktu, kita memiliki lingkaran-lingkaran pertemanan sendiri tergantung selera dan minat masing-masing. Salah satu lingkaran pertemanan saya di asrama itu adalah dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari Fakultas Sastra UI, salah satunya Pamusuk Eneste, mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia. Belakangan saya tahu bahwa “Eneste” adalah singkatan dari Nasution. Mungkin, Pamusuk ingin menyembunyikan kebatakannya.

Pada suatu hari, yang saya lupa tahunnya itu, bersama Pamusuk, saya berkunjung ke rumah H.B. Jassin. Seingat saya

rumahnya ada di sebuah jalan di perkampungan yang padat penduduk, tidak jauh dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen. Ketika kami berjalan ke rumahnya, seingat saya sempat melewati rel kereta api. Dalam kunjungan itu, saya hanya ikut, sekadar menemani. Ketika duduk mengobrol di ruang tamunya, ruang itu cukup sempit karena begitu banyak barang dan buku-buku, saya hanya diam mendengarkan dua orang yang sama-sama menekuni Sastra Indonesia itu. H.B. Jassin dan Pamusuk Eneste memiliki kesamaan, yaitu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik, serius, dan nyaris tidak ada humor.

Jika saya tidak salah ingat, kunjungan saya dengan Pamusuk ke rumah H.B. Jassin ada hubungannya dengan rencana kegiatan pendidikan pers mahasiswa di UI. Bersama Pamusuk, saya ke Bandung untuk menemui Pater M.A.W Brouwer dan wartawan senior, Mahbub Djunaedi. Pamusuk kenal dengan kedua penulis ini dan lagi-lagi saya hanya menemani. Saya ingat, kami tiba di Bandung malam hari dan kami memutuskan tidur di Masjid Salman ITB karena tidak memiliki uang untuk menginap di hotel. Saya ingat ketika merebahkan badan di karpet masjid itu, ada tulisan “dilarang tidur di masjid”. Menjelang Subuh, ada yang membangunkan kami, rupanya sebentar lagi waktunya salat Subuh. Kami terpaksa bangun meskipun masih mengantuk dan berjalan keluar masjid berharap menemukan warung di sekitar kampus ITB yang sudah buka.

Di Fakultas Psikologi UI, pelajaran Filsafat merupakan pelajaran yang penting, kalau tidak yang terpenting. Pada tahun pertama, kami diajar oleh Profesor Poedjawijatna, seorang dosen sepuh yang selalu berpakaian rapi, tentang filsafat umum. Di tahun kedua, kami diajarkan filsafat manusia dan filsafat eksistensialisme oleh Pak Fuad Hassan, kemudian Profesor Surjanto. Mata kuliah ini sebelumnya diajarkan oleh Profesor Beerling dan Drijarkara. Pak Fuad Hassan selalu menarik jika memberi kuliah, uraiannya

diberikan sambil merokok dan sesekali nyeruput kopi hitamnya di gelas besar yang selalu disajikan oleh Pak Bakri dengan setia.

Masa itu, aktivitas kuliah masih menggunakan papan tulis besar dengan kapur tulis dan penghapusnya. Pak Fuad berbicara sembari menuliskan poin-poin apa yang dibicarakannya, sedikit demi sedikit, mulai dari sudut kiri atas papan tulis, mengalir begitu saja. Tidak terasa ketika kuliahnya selesai, seluruh permukaan papan tulis itu telah penuh dengan tulisannya, tidak tersisa ruang kosong sedikit pun. Saya tidak menghitung berapa batang rokok habis diisapnya.

Kuliahnya diisi dengan membicarakan karya dan pemikiran tokoh-tokoh eksistensialisme, seperti Sartre, Heidegger, Jaspers, dan Nietzsche. Lalu ketika membicarakan tentang Nietzsche, Pak Fuad memberitahu jika H.B. Jassin sedang menerjemahkan salah satu buku Nietzsche yang berjudul *Also Sprach Zarathustra*, dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Pak Fuad juga mengatakan bahwa H.B. Jassin juga sedang menerjemahkan Al-Qur'an dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ketika Pak Fuad menyinggung H.B. Jassin, sama sekali tidak terlintas apa maknanya bagi saya saat itu. Di koleksi buku saya, ada *Al-Qur'an Bacaan Mulia dan Terjemahannya*. Belum lama ini, saya juga membeli buku terjemahan *Zarathustra* yang telah terkatung-katung sekian lama meskipun akhirnya terbit, dengan pengantar dari Goenawan Mohamad.

Ketika pandemi Covid 19 memaksa kita untuk bertahan di rumah dan berusaha menyelamatkan diri dari sergapan virus ini, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah membaca buku-buku yang dibeli, tetapi belum sempat dibaca lagi dengan baik. Salah satu buku yang saya temukan dalam koleksi buku-buku saya adalah karya H.B. Jassin, *Heboh Sastra 1968*, yang diterbitkan tahun 1970. Di buku yang kertasnya sudah mulai lapuk menguning itu, ada tulisan tangan saya, rupanya buku itu saya beli tahun 1971.

Heboh sastra itu dipicu oleh munculnya cerpen “Langit Makin Mendung”, karya Kipanjikusmin, sebuah nama samaran, tidak sedikit yang menduga adalah H.B. Jassin sendiri. Akibat dimuatnya cerita pendek yang dianggap telah menghina Tuhan itu, H.B. Jassin sebagai penanggung jawab majalah *Sastra* yang memuat cerpen itu, dituntut ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan yang menghadirkan ulama terkenal saat itu, Hamka, yang dalam kesaksiannya telah membela H.B. Jassin, sebuah zaman baru ketika agama mulai merangsek ke ruang publik, tampaknya telah dimulai.

H.B. Jassin yang bernama lengkap Hans Bague Jassin dan dilahirkan di Gorontalo pada 31 Juli 1917 dan meninggal 11 Maret 2000 itu, tak pelak lagi adalah seorang intelektual publik yang legendaris. Perannya sebagai Paus Sastra Indonesia sepertinya sulit tergantikan. Buku-bukunya menandai tidak saja semangat zamannya, tetapi juga semangat masa kini dan masa depan yang harus menempatkan kemerdekaan berpikir dan kebebasan mencipta sebagai pilar peradaban bangsa yang penting.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

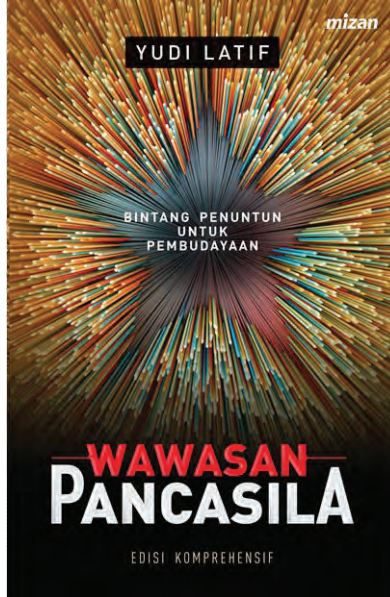


BAGIAN 4

# Indonesia dalam Ulasan

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Mizanstore (2020)

### 39.

## Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*, dan “Agama Sipil”<sup>43</sup>

Yudi Latif, selanjutnya perkenankan saya menyebutnya Yudi saja, adalah seorang intelektual publik di negeri ini yang saat ini serius menekuni tentang Pancasila. Ketekunan Yudi, yang menjadi kelebihan Yudi dari pemikir-pemikir lain yang menekuni Pancasila, adalah buah perenungannya dituangkan ke dalam teks-teks, berupa buku dan tulisan-tulisan lain yang terus diproduksinya. Di tangan Yudi, Pancasila menjadi sebuah *discourse*. *Discourse* atau diskursus memang mengharuskan adanya teks yang bisa didiskusikan sekaligus diperdebatkan secara argumentatif. Yudi berbeda dengan kebanyakan para intelektual publik lain, yang berhenti pada pernyataan-pernyataan lisan

<sup>43</sup> Tulisan ini disampaikan pada acara bedah buku “Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan” yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan, tanggal 21 Agustus 2020.

melalui *talk show*, menyampaikan pendapatnya melalui *Twitter*, *Facebook*, atau sekadar gosip di *WhatsApp Group*.

Seperti pendahulunya, dan saya menduga *role model*-nya, almarhum Nurcholish Madjid, Yudi adalah intelektual publik yang berangkat dari tradisi akademik inteligensia Muslim. Seperti halnya Nurcholis, Yudi juga pernah mondok di Pesantren Modern Gontor. Bagi saya, penamaan “pondok modern” ketika dunia santri belum seriuuh sekarang, sampai-sampai Presiden Jokowi perlu menetapkan adanya Hari Santri, menunjukkan adanya kesadaran bahwa Islam adalah sebuah agama yang bersifat kosmopolitan. Konon, di Gontor bahasa Inggris diajarkan setara dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa asli dari teks Al-Qur’an.

Ketika menulis disertasi doktornya di Australian National University, Yudi memilih sebuah topik “Genealogi Intelektual Muslim di Indonesia” (Latief, 2004), yang menurut saya penting karena dari studi untuk doktornya inilah, ia memiliki cukup bahan untuk melanjutkan eksplorasinya seputar khazanah pemikiran kenegaraan dari perspektif Islam di negerinya sendiri.

Mungkin hal ini juga yang membedakannya dengan Nurcholish Madjid, mentornya, yang memilih untuk mengupas pemikiran seorang filsuf Islam klasik yang cukup kontroversial, Ibnu Taimiyah, sebagai tesis doktornya di Universitas Chicago. Yudi mengambil jalan lain, dia memfokuskan perhatiannya pada masalah yang dihadapi bangsanya sendiri, dan dia menemukan Pancasila sebagai satu-satunya wacana (*discourse*) yang harus digelutinya secara habis-habisan. Pancasila di mata Yudi adalah air kehidupan yang dibutuhkan jika Indonesia ingin bisa tegak sebagai sebuah bangsa.

Buku Yudi, *Wawasan Pancasila*, yang sedang kita bicarakan ini, menurut hemat saya, harus ditempatkan dalam perspektif pemikiran Yudi yang terus mengeksplorasi Pancasila sebagai

*discourse*. *Wawasan Pancasila* adalah hasil pemikiran Yudi yang paling mutakhir sejak buku pertamanya, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, yang terbit tahun 2011, hampir sepuluh tahun yang lalu. Setelah buku pertama, yang bisa dibilang sebagai buku babon (*magnum opus*), terbit buku-buku baru lainnya tentang Pancasila, antara lain, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* (2014), *Revolusi Pancasila* (2015), dan lain-lain.

Buku *Wawasan Pancasila*, diberi anak judul *Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Kenyataan bahwa buku itu mulai dibuat saat Yudi menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (KP-PIP), saya bisa mengerti konteks lahirnya buku ini.

Pada lembar-lembar akhir buku ini, pada halaman 423–425, Yudi menilai bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis yang disebabkan kegagalannya dalam membudayakan Pancasila. Pancasila, menurut Yudi, terjebak pada formalisme dan verbalisme, dan absen dalam praktek kehidupan nyata. Krisis kebangsaan ini, menurut Yudi telah menjadi persoalan yang serius karena menimbulkan rasa saling tidak percaya dalam masyarakat dan berujung pada merebaknya apatisisme. Jelas, di sini, Yudi sedang berbicara tentang kondisi mental masyarakat (Latif, 2020).

Dalam suasana kegelapan inilah penggunaan metafora “bintang” dipakai oleh Yudi karena dalam suasana kegelapan itulah, sebuah bintang akan terlihat sinarnya. Ibarat para pelaut di samudra luas, bintang di kegelapan malam menjadi kompas, menjadi penuntun dan penunjuk arah ke mana kemudi harus diputar. Buku *Wawasan Pancasila*, seperti buku-buku Yudi dalam “Seri Pancasila”, merupakan eksplorasi sekaligus tawaran yang diajukan untuk keluar dari krisis kebangsaan yang dilihatnya.

Buku ini merupakan “edisi komprehensif” dari buku yang telah diterbitkan tahun 2018 dengan judul yang sama. Selain revisi

di berbagai babnya, subbab 3 tentang Pancasila sebagai “agama sipil”, menurut Yudi merupakan penambahan yang terpenting. Buku *Wawasan Pancasila* mencakup wilayah yang sangat luas. Setiap bab dalam buku ini mengundang kita untuk berpikir dan mendiskusikannya secara khusus. Dengan pertimbangan waktu, dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk membatasi komentar tentang buku ini pada isu “agama sipil” atau *civil religion* yang menurut Yudi adalah bab terbaru.

Isu ini saya anggap sangat penting dan relevan karena letak kekisruhan ideologis yang selama ini ada, disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, bermuara pada belum ditemukannya kedudukan yang tepat bagi agama, dalam hal ini Islam, di tubuh negara Republik Indonesia. Yudi, seperti pendahulunya, Nurcholis Madjid, juga para tokoh yang lain, menurut hemat saya adalah intelektual publik yang sangat menyadari dilema yang terus dihadapi oleh bangsanya ini. Dilema antara desakan yang terus hidup untuk menjadikan Islam sebagai sumber nilai utama ideologi bangsa dan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang bersifat paripurna.

Ketika memulai membicarakan tentang “agama sipil”, terlihat bahwa Nurcholish Madjid merupakan inspiratornya. Berikut adalah pendapat Nurcholish yang dikutip oleh Yudi (hlm. 121).

“Betapa pun indah dan bagusnya sebuah rumusan ideologi negara seperti Pancasila itu, namun agar berfungsi ia harus diterjemahkan ke dalam dimensi-dimensi moral dan etis yang hidup dan nyata dan memengaruhi tingkah laku rakyat dan pemerintah. Ia harus tumbuh menjadi apa yang oleh Robert N. Bellah disebut sebagai *civil religion*” (Latif, 2020).

Selanjutnya, saya kutipkan pendapat dari Yudi Latif sendiri, di halaman 123,

“Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, dan ideologi negara-bangsa Indonesia itu mengandung seperangkat keyakinan, simbol, dan nilai inti (core values), yang dapat mengin-

tegrasikan segala keragaman Indonesia ke dalam suatu komunitas moral publik. Ditilik dari sudut ini, Pancasila juga bisa disebut sebagai *civil religion* (agama sipil) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia” (Latif, 2020).

“Agama sipil” yang diwacanakan Yudi dalam buku barunya ini menurut hemat saya penting didiskusikan lebih lanjut karena Pancasila dan wawasan yang dikandungnya telah mencukupi untuk menampung konsep “agama sipil”. Pancasila dalam erudisi Yudi tidak saja telah mampu mengakomodasi, tetapi juga “menyuling” atau mengkristalisasi ideologi-ideologi yang berwatak spiritual, antara lain Islam, Kristen, atau agama-agama lainnya. Sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa saya membicarakan Pancasila di sini sebagai *discourse*, membicarakan dimensi diskursif dari Pancasila.

Buku Yudi tersebut juga merujuk pada Rousseau yang pertama kali menggunakan kata “agama sipil” sebagai “basis moral alternatif yang ‘ditinggalkan’ kekristenan karena desakan spirit pencerahan. Patut ditanyakan pada Yudi, apakah saat ini momentum yang tepat untuk mengajukan wacana Pancasila sebagai “agama sipil”? Juga, apakah cukup sepadan mengikuti jejak Bellah ketika menawarkan gagasan *civil religion* di Amerika Serikat? Meskipun dengan jelas, Yudi merujuk pada penjelasan Durkheim (ditambah sebagian pendapat Rousseau), yang menurut hemat saya masuk akal. Begitu juga, rujukannya pada Nurcholis yang melihat Negara Madinah, sebuah preseden sejarah yang juga dirujuk oleh Bellah. Terus terang, saya tetap waswas jika ajakan untuk melihat dimensi diskursif Pancasila terkait “agama sipil” ini disalahpahami oleh publik.

Saya menilai mengapa Yudi menawarkan gagasan Pancasila sebagai “agama sipil” karena sebagai intelektual Muslim, Yudi tidak menganggap bahwa penerimaan Pancasila oleh elite Islam melalui *statement* politik, seperti telah kita saksikan selama ini, jauh dari mencukupi untuk menjamin adanya kerelaan untuk

menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang benar-benar final.

Yudi sangat menyadari betapa krusialnya momen ini karena Yudi juga melihat betapa bahayanya jika klaim kebenaran agama dipaksakan dalam sebuah masyarakat yang multiagama. Betapa pun muskilnya pada saat ini untuk menjadikan Pancasila sebagai agama sipil, namun saya sependapat dengan Yudi bahwa gagasannya—yang telah melampaui zamannya, dan sesungguhnya saya juga melihat bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang ada—masih jauh untuk dapat dicapai.

Ketekunan Yudi dalam menggeluti Pancasila, antara lain, kemampuannya meramu buku-buku yang relevan untuk mendukung argumentasinya, menurut hemat saya, adalah jihadnya untuk menemukan format yang tepat dalam menempatkan Islam di negara Pancasila. Sebagai sebuah bangsa, kita harus bersyukur memiliki intelektual publik seperti Yudi dan kita harus mendukung sepenuhnya jihad yang sedang dilakukan oleh Yudi Latif.



## 40. Laksmi Pamuntjak dan *Kekasih Musim Gugur*-nya<sup>44</sup>

Buku itu lumayan tebal, hampir 450 halaman. Ini adalah novel kedua yang bisa dibilang terusan dari novel pendahulunya, *Amba* (2017). Meskipun *Kekasih Musim Gugur*, novelnya yang kedua ini dari sudut tema bercerita tentang sesuatu yang lain, tapi tokoh utamanya, Siri, kependekan dari Srikandi, adalah anak dari Amba dan Bhisma, dua tokoh utama dalam novel pertamanya. Siri, yang bapak biologisnya adalah seorang tahanan politik (tapol) dan dibuang ke Pulau Buru bersama ribuan tapol lainnya, dikisahkan meninggal di Pulau Buru. Siri baru mengetahui hal tersebut setelah dewasa. Selama itu, dia merasa bahwa bapaknya adalah Adalhard Eilers, yang berasal dari Jerman.

<sup>44</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, tanggal 23 Agustus 2020.

Jika pada novel pertamanya, *Amba*, Laksmi berhasil mengikat saya sebagai pembaca pada kisah getir korban peristiwa '65 dan diajak masuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang kelam, pada *Kekasih Musim Gugur*, kisah '65 bukan lagi menjadi *setting* utamanya, melainkan Jakarta pasca-Reformasi, yaitu ketika kebebasan tidak lagi hanya dikendalikan oleh negara, tetapi juga oleh kelompok-kelompok yang melakukan sensor atas nama moral dan agama. Selain kota Jakarta, kisah ini juga mengambil latar kota-kota dunia, terutama Berlin di tahun 2016-an (Pamuntjak, 2020).

Mungkin saya bisa menikmati novel ini karena meskipun tidak seperti Laksmi yang mengenal dengan baik sudut-sudut kota Berlin, saya beberapa kali sempat mengunjunginya, dan merasa familier dengan beberapa tempat yang disebutkan dalam novel ini. Ada semacam pesona tersendiri yang dimiliki oleh Berlin, mungkin juga karena sejarah kelamnya di bawah Nazi, juga tembok yang sebelum diruntuhkan tahun 1989, menyiratkan ironi Perang Dingin yang imbasnya meletus di tahun '65 dan telah menjadi *setting* dalam novel *Amba*. Ada semacam kesinambungan yang seperti tidak direncanakan, antara Jakarta dan Berlin. Pasca runtuhnya tembok itu, Berlin seperti remaja yang dilahirkan kembali, ada semacam gairah kehidupan kota yang tidak dimiliki oleh Tokyo, New York, London, juga Jakarta.

Jika ada yang terasa memikat dan membuat saya terus membaca novel *Kekasih Musim Gugur* ini, mungkin adalah menyergapnya semacam rasa tegang karena sengketa-sengketa psikologis interpersonal dari tokoh-tokoh utamanya yang mungkin tidak lebih dari lima orang. Siri tokoh utama; si aku yang paling banyak berkisah; Amba; Amalia, anak tirinya; Dara teman aktivis; pacar lesbiannya, Nina; Sally, agen dan promotor seni rupanya; dan Matthias dan Javier kekasih-kekasih musim gugurnya. Tentu ada tokoh-tokoh lain yang



juga penting, seperti Riaz, suaminya yang mati muda; Rumita, kakak Dara; Arif, adik Dara yang menghamili Amalia; Gardin, si politisi hipokrit; dan Mr. Kourakis, pemilik resto Yunani teman ngobrol dan langganannya di bawah apartemennya, di Berlin.

Ketegangan dan sengketa dalam hubungan interpersonal dari tokoh-tokoh novelnya ini dituliskan dengan gaya naratif, yang bagi saya terasa baru dalam sastra Indonesia. Sering kali percakapan diungkapkan dengan kalimat-kalimat pendek, sementara apa yang ada di benak pembicaranya diungkapkan dengan panjang. Dunia batin seperti mendapatkan porsi yang lebih besar dalam percakapan antara tokoh-tokoh rekaan Laksmi. Meskipun tokoh utama di novel kedua ini, Siri, tetapi bayang-bayang Amba, ibunya, terus menghantuinya, dan antara keduanya seperti menyimpan sebuah jarak interpersonal yang seperti dilumuri luka dan trauma antara ibu dan anak.

Sebenarnya, kisah ini berpusat pada kebimbangan batin Siri, si tokoh utama, perempuan Kebayoran Baru, Jakarta, yang dilahirkan awal tahun '70-an, bersekolah di Tarakanita sampai SMA, kemudian karena bapak tirinya seorang warga negara Jerman yang cukup berada, dia disekolahkan hingga ke New York untuk belajar seni rupa. Sejak kecil, dia hobi menggambar, dan jadilah dia seorang perupa yang berhasil eksis di luar negeri, tinggal di Madrid, kemudian Berlin. Pergulatannya sebagai perupa yang berasal dari dunia ketiga, dalam kancah persaingan yang tidak bisa lagi menjadikan asal-usul sebagai sesuatu yang diandalkan, diolah dengan menarik oleh Laksmi. Pengalamannya yang berhasil menerbitkan versi bahasa Inggris novel Amba, *The Question of Red*, saya kira berperan dalam mengembangkan kisah Siri dalam kancah seni rupa internasional ini.

Berbagai bumbu tentu saja telah dipakai untuk melezatkan novel ini. Bumbu yang paling penting adalah percintaan dan

adekan persetubuhan yang panas, tetapi digambarkan tanpa terasa kasar, bahkan cenderung halus. Ciuman antara dua kekasih digambarkan dengan mengesankan, seperti menyesap anggur sedikit demi sedikit sampai kemudian diam-diam mabuk. Bumbu lain yang juga penting adalah kepiawaian Laksmi dalam soal kuliner, dan pengetahuannya yang tampak luas tentang sastra, seni rupa, dan musik. Bumbu-bumbu itu diramu dengan cermat dan teliti menjadi sebuah sajian yang nikmat untuk disantap.

Jika ingin, Laksmi sebenarnya bisa bercerita tentang bagaimana Siri mengingat kisah bapak dan ibunya dengan latar peristiwa '65, yang berbagai sisinya bisa digali dan masih mampu menggetarkan, sebagai terusan dari *Amba*. Rupanya, itu tidak dilakukannya, mungkin dia merasa peristiwa '65 sudah banyak dieksplorasi penulis lain. Namun, bagaimana dia terinspirasi dan membuat sembilan imaji rupa wajah Bhisma, bapaknya, sedikit menautkannya kembali dengan masa lalu itu.

Ada perkembangan yang menarik dalam dunia tulis-menulis seputar peristiwa '65 dalam lima tahun terakhir ini. Peristiwa '65 menjadi bahan dari tidak sedikit tulisan yang dibuat berdasarkan riset yang serius, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Menariknya, tulisan yang dibuat dalam bahasa Indonesia, berupa novel, terlihat bagus, sedangkan dalam bahasa Inggris, lebih banyak ditulis oleh para akademisi asing. Novel yang kisah tokoh utamanya terlibat dalam peristiwa '65, di antara adalah *Pulang*, yang mengambil latar kota Paris, oleh Leila Chudori dan *Amba*. Buku tulisan akademisi asing, antara lain *Burried Historis* (2020) oleh John Rossa, *Killing Seasons* (2019) oleh Geoffrey Robinson, dan *The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Masa Murder* (2018) karya Jess Melvin yang menganalisis kasus 65 di Aceh.

Pemilihan nama, Siri (Srikandi), Amba, dan Bhisma, yang diambil dari nama tokoh-tokoh pewayangan adalah sebuah pilihan yang cerdas. Pembaca yang mengetahui pewayangan Jawa, yang dulu dipopulerkan dalam bentuk komik oleh R.A. Kosasih pasti sedikit atau banyak mengetahui karakter dari tokoh pewayangan itu. Mendengar nama Amba, Bhisma, atau Srikandi, pembaca akan dibawa ingatannya tidak saja tentang karakter dan kepribadian, tetapi juga sosoknya secara ragawi dari tokoh-tokoh itu. Di tangan Laksmi Pamuntjak, karakter dan sosok ragawi itu diolah menjadi tokoh-tokoh rekaannya sendiri, dan kisah pewayangan itu hanya samar-samar melintas di latar belakang ketika kita dibawa mengikuti perjalanan hidup tokoh-tokoh fiktif dalam novel Laksmi.

Kota-kota metropolitan yang menjadi latar cerita, seperti Madrid, London, New York, dan Berlin, beserta kehidupan kosmopolitan dunia seni dan senimannya, memastikan kita dibawa dalam lingkungan warga negara dunia, tempat Siri berada di dalamnya sebagai perupa di tengah pergumulan kariernya untuk bisa tampil di kancah internasional. Gaya bertutur yang seperti ulang-alik, tidak linier, tetapi terkadang membuat pembaca mengerutkan kening, paling tidak, bagi saya karena sering sedikit membingungkan, *siapa aku yang sedang berbicara*, apakah yang sedang berbicara Siri atau Dara, misalnya.

Dalam narasi percakapan antartokohnya yang tidak jarang mengungkap apa yang tersembunyi di benak bawah sadar si Aku, mengajak pembacanya untuk menyadari berbagai ketegangan yang bisa dialaminya sendiri, misalnya dalam kehidupan perkawinan dan berkeluarga. Keberanian Laksmi untuk mengungkapkan berbagai sisi dari kehidupan, yang dari luar kelihatan baik-baik saja, tetapi di dalamnya sebenarnya bergejolak, terasa kuat dalam novel ini. Juga tentang orientasi seksual tokoh-tokohnya, tanpa bermaksud untuk *show-off*,

saya kira penting karena mengungkapkan realitas kehidupan *extramarital* atau *homosexual* misalnya, yang jangan-jangan selama ini tidak sedikit dilakukan, tetapi ditutup-tutupi dengan berbagai selubung nilai-nilai moral dan agama.

Ketika kekonservatifan saat ini sedang melanda kehidupan publik kita, terbit dan terjualnya novel-novel yang ditulis oleh Ayu Utami, Leila Chudori, Intan Paramaditha, dan Laksmi Pamuntjak menimbulkan tanda tanya bagi saya, golongan pembaca mana di masyarakat yang mengonsumsinya? Dalam ranah publik yang lain, cepat diterjemahkannya buku-buku Stephen Hawking, Yuval Noah Harari, bahkan Richard Dawkins yang isinya menggedor berbagai mitos tentang agama, bahkan Tuhan, juga menimbulkan tanda tanya bagi saya, jangan-jangan realitas yang ada di masyarakat, telah jauh melampaui apa yang saat ini saya khawatirkan. Hipokrisi pastilah selalu ada dalam setiap masa dan memiliki proses sosialnya sendiri yang membentuknya, tetapi di masa ini ketika kemudahan akses informasi telah mengubah wajah dan fundamen kehidupan bersama, segala hipokrisi itu tidak mungkin lagi bisa ditutup-tutupi seperti dulu.



Sumber: Gramedia (2020b)

## 41.

### *Ketika Umat Beriman Mencipta Tuhan*<sup>45</sup>

Terus terang, saya terprovokasi oleh judulnya. Ketika masyarakat agama di negeri ini dirasa menguat konservatismenya (*conservative turn*), judul itu menjadi terasa sangat provokatif. Namun, mungkin memang itu tujuannya, yaitu agar orang tergerak untuk membaca, seperti saya. Secara kebetulan, dalam *Kompas* (Yossihara, 2020), diberitakan tentang pidato pengukuhan guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, yang isinya menyarankan agar pelajaran Agama Islam di sekolah diperbaharui. Pembaharuan itu menurutnya dibutuhkan untuk memelihara pluralitas agama, membangun harmoni, perdamaian, kerukunan, dan persatuan. Menurut Abdul Mu'ti, Pendidikan Agama Islam seharusnya tidak terbatas dalam mempelajari masalah-masalah ritual ibadah

<sup>45</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 4 September 2020.

dan muamalah dengan pendekatan klasik, tetapi juga harus dikembangkan sesuai dengan kontekstualisasi agama dengan kehidupan kekinian dan menjawab tantangan masa depan.

Keprihatinan Abdul Mu'ti tentang pengajaran agama Islam yang dinilai telah membuat pemahaman tentang Islam, dan juga tentang Tuhan yang disembah orang Islam memiliki citra atau imaji tertentu, tampaknya sangat sejalan dengan pesan utama buku yang sedang saya baca ini (*Ketika Umat Beriman Mencipta Tuhan*, Gramedia Pustaka Utama, 2020)

Buku provokatif ini ditulis oleh Syafaatun Almirzanah, yang gelarnya berderet, Prof., MA., M.Th., Ph.D., dan D.Min., yang menunjukkan begitu banyak ilmu yang telah diserap dosen UIN Sunan Kalijaga ini. John L. Esposito, profesor dari Georgetown University, pada sebuah acara yang saya tonton melalui YouTube saat memperkenalkan Syafaatun, menyebutnya sebagai akademisi hebat karena Syafaatun telah berhasil menggondol dua gelar doktor sekaligus (Rumi Forum, 2011). John L Esposito, ahli Islam yang mungkin paling terkenal dari Amerika Serikat, juga yang memberi “sekapur sirih” dari buku ini. Dalam sekapur sirih itu, saya kembali menemukan kata *Godhead*—memang agak sulit diterjemahkan—yang sebelumnya disinggung oleh penulis buku dalam “pengantar edisi baru” (tidak dijelaskan kapan dan di mana edisi lama terbit). Dalam sekapur sirih Esposito, saya juga menemukan kalimat (dalam huruf tebal),

“Tuhan dalam konsep teologi dan Tuhan yang ada dalam doktrin adalah merupakan ciptaan umat beriman dan lembaga agama, digunakan sebagai konstruksi manusia dalam bahasanya yang terbatas, untuk menjelaskan sesuatu yang tak terbatas” (Almirzanah, 2020, xv).

Tentu, Esposito menuliskan sekapur sirihnya dalam bahasa Inggris dan yang ada di buku ini pastilah terjemahannya.

Tampaknya, judul buku ini seperti menggunakan atau mendapat inspirasi dari sebagian kalimat Esposito di atas.

Masih di bagian depan, di pengantar edisi baru, saya juga menemukan bagaimana penulis buku ini merujuk pada pendapat beberapa ahli neurologi Amerika Serikat (Andrew Newberg, Mark Robert Weldman, dan Michele Shermer) ketika menjelaskan bagaimana sebuah citra atau imaji, juga dalam hal ini tentang Tuhan, secara saintifik sebetulnya diproduksi oleh proses-proses neurologis yang bersifat biologis. Pada akhir kata pengantar, dikutip pendapat dari Dorothee Solle (1995), seorang teolog Jerman.

“Tuhan yang tidak melebihi Tuhan bukanlah Tuhan. Tuhan yang terkungkung dalam suatu bahasa, dibatasi oleh definisi tertentu, dikenal dengan nama tertentu yang telah menghasilkan bentuk kendali sosio-kultural tertentu, bukanlah Tuhan tetapi telah menjadi suatu ideologi agama” (Almirzanah, 2020, xii).

Jadi, sejak dari judul, kata pengantar, dan sekapur sirih, kita dibawa untuk membedakan dua macam Tuhan, yaitu “Tuhan yang kita ciptakan sendiri” dan “Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang tak mungkin terbayangkan oleh kita”. Bagi orang Jawa, terutama yang masih menganut Agama Jawa (Kejawen), Tuhan dikatakan sebagai “*tan keno kinoyo ngopo*”, sesuatu yang tak bisa dideskripsikan, *indescribable*. Buku ini, mulai dari Bab Pendahuluan sampai Bab Kesimpulan (6 bab), kita dibawa bertamasya untuk sampai pada sebuah taraf kesadaran tentang bagaimana kita “berbicara tentang Tuhan tanpa berbicara untuk/ atas nama Tuhan”. Perjalanan tamasya itu kita alami dengan menyelam memasuki riwayat dua orang ahli mistis besar yang dinilai dan dipilih oleh penulis buku ini telah mewakili dua peradaban agama besar dunia, Ibn al Arabi (Muslim, 1165–1240) dan Meister Eckhard (Kristen, 1260–1327).

Sebagai pembaca, saya merasa bahwa penulis buku ini, seorang yang sebelum keluar negeri, telah dididik dalam pendidikan agama Islam (IAIN Sunan Kalijaga), memang seorang akademisi tulen yang telah berjalan jauh, ke Chicago, belajar di dua lembaga pendidikan teologi Kristen, yaitu Catholic Theological Union University of Chicago dan Lutheran School of Theology at Chicago sehingga meraih dua gelar doktor. Melalui penyelamannya terhadap kehidupan dan terutama karya-karya dua ahli mistis besar itu, Ibn al Arabi dan Meister Eckhard, ia menemukan bahwa hanya melalui mistik sajalah manusia bisa menemukan Tuhan yang sesungguhnya (*Godhead*), bukan Tuhan seperti yang kita citrakan, Tuhan sebagaimana diciptakan oleh umat-Nya. Namun, setelah merambah isi bab-bab dari buku ini, terus terang, judul buku ini—paling tidak bagi saya—sedikit mengecoh karena judul buku ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa pembaca nantinya akan dibawa ke persoalan dialog dan agenda (disebutnya sebagai matriks baru) untuk menjembatani persoalan hubungan Islam dan Kristen, yang menurut penulisnya telah menemui jalan buntu (Almirzanah, 2020, xxix). Namun, membaca baik-baik buku ini, memang penulis secara cerdas memilih judul yang terdengar sebagai autokritik terhadap kaum agamawan dan umat beriman (*the believers*) sekaligus mengajak pembaca melampaui batasan-batasan agama yang tidak saja dangkal, tetapi menyesatkan.

Jika melihat struktur buku ini, (mungkin aslinya sebuah disertasi atau monografi dalam bahasa Inggris, tidak ada penjelasan tentang hal ini), terutama jika melihat pembagian daftar kepustakaan yang terbagi menjadi tiga kelompok besar (literatur tentang Ibn al Arabi, literatur tentang Meister Eckhart, dan literatur umum), buku ini sebetulnya sebuah hasil dari studi kepustakaan (*literature review*). Kekuatan buku ini ada pada keluasan dan kedalaman *review* literatur yang telah ditulis dengan sangat baik sehingga membuat pembaca betul-betul diajak



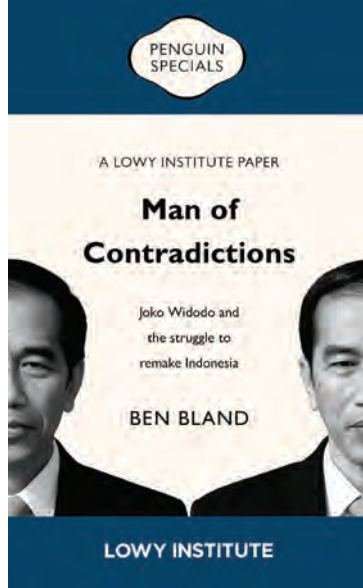
bertamasya ke sebuah keindahan dan kekayaan khazanah sejarah peradaban Islam maupun Kristen melalui dua ahli mistis besar ini.

Penemuan atau usaha menemukan sebuah persamaan antara dua ahli mistis besar itu melalui riwayat hidup dan konteks sosial-budaya tempat mereka hidup, yaitu sama-sama memilih jalan mistik sebagai cara yang harus ditempuh untuk mencapai kesadaran tentang Tuhan yang sebenarnya (*Godhead*). Hal yang kemudian menjadi menarik adalah penemuan lanjutan penulis tentang adanya sebuah keniscayaan keimanan, tidak saja yang bersifat dialogis, tetapi semacam sintesis, antara Kristen dan Islam. Penulis melalui kemampuan daya tafsirnya yang tinggi, kreatif dan imajinatif, sampai pada sebuah tawaran solusi atas ketegangan klasik antara Islam dan Kristen, baik secara teologis maupun dalam realitas sosial yang ada di masyarakat. Tentu tawaran yang dikemukakan ini harus kita sambut dengan baik karena upaya-upaya rintisan masih sangat diperlukan, tidak saja untuk mencairkan ketegangan hubungan antaragama, tetapi juga, dan menurut hemat saya, yang lebih penting adalah dalam memaknai apa itu hidup yang berketuhanan.

Apabila setelah membaca buku ini, saya, paling tidak sebagai salah seorang pembaca yang pada awalnya sangat terprovokasi oleh bunyi judul yang dipilih, masih merasa ada beberapa hal yang terasa mengganjal, seharusnya merupakan sesuatu yang wajar, tanpa mengurangi arti penting buku yang telah di-*endorsed* oleh para intelektual penting Muslim (Komaruddin Hidayat, Haidar Bagir, M. Amin Abdullah) maupun Kristen (Frans Magnis Suseno SJ, J.B. Banawiratma—penulis kata pengantar yang sangat membantu pembaca memahami posisi penulis dalam konteks studi agama). Paling tidak, ada tiga hal yang masih terasa mengganjal di benak saya. Pertama, tidakkah setelah melalui jalan mistik sekali pun, kita sesungguhnya bisa saja masih belum benar-benar keluar dari ketersungkupan tentang citra dan imaji

tentang Tuhan? Kedua, bukankah rujukan terhadap penjelasan para neurolog hanya memperkuat pendapat bahwa bayangan kita tentang Tuhan adalah produk dari proses neurologis belaka meskipun tampaknya trivial karena hanya disinggung sepintas? Bukankah ini seperti setengah membenarkan pendapat biology, Richard Dawkins, yang sangat kontroversial tentang apa yang digambarkannya sebagai *The God Delusion*?

Ketiga, mengutip pendapat Dorothee Solle (2001) bahwa Tuhan yang diciptakan oleh umatnya dan menghasilkan kendali sosiokultural tertentu, bukanlah Tuhan, melainkan menjadi suatu ideologi agama, adalah realitas sosial yang hampir selalu kita temukan dalam agama apa pun, di masyarakat mana pun? Dalam kaitan ini, saya diam-diam setuju dengan tesis dasar penulis bahwa hanya melalui jalan mistik sajalah kita secara teoretis (atau secara empiris untuk yang benar-benar mempraktikkannya) akan terhindar dari jebakan agama sebagai ideologi. Akan tetapi, saya menduga hanya segelintir orang yang bisa melakukan itu, dan itu sejalan dengan pendapat Karen Armstrong bahwa beragama sejatinya memang bukanlah sesuatu yang mudah, dan bukankah konon, Tuhan juga telah mengatakan bahwa hanya segelintir orang yang benar-benar akan mencapai surga?



Sumber: Dhyatmika (2020)

## 42. Jokowi, Sosok Penuh Kontradiksi?<sup>46</sup>

Saya agak sulit mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk *Man*, dari buku yang baru terbit *Man of Contradictions* karya Ben Bland. Tokoh, sosok, pribadi atau bahkan presiden—karena yang dibicarakan, *toh*, memang seorang presiden. Anak judul buku itu, *Jokowi and the Struggle to Remake Indonesia*, sedikit mengingatkan pada slogan kampanye Donald Trump, *to make America great again*. Aspinall (2020) dalam resensinya, agak membantah adanya kontradiksi itu. Menurutnya, Jokowi juga tipikal presiden yang sedang mewakili semangat zamannya, *Zeitgeist Man*. Jadi meskipun tidak bisa disamakan, tetapi ada kemiripan dengan presiden sezamannya, Donald Trump atau Rodrigo Duterte dari Filipina. Menurut Aspinall (2020), mereka memiliki beberapa kecenderungan, seperti kedekatannya dengan

<sup>46</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 8 September 2020.

militer, nasionalistis, dan kurang menghargai kebebasan sipil. Mungkin Aspinall ada benarnya, tetapi membaca buku Ben Bland, saya merasakan afeksi dan empatinya yang kuat pada Jokowi dan juga Indonesia. Ben Bland telah menulis dengan penuh simpati sebagai seorang tetangga yang baik, dalam bukunya yang ringkas dan padat ini.

Selain Aspinall, buku ini juga telah dirensi oleh Wahyu Dhyatmika di *Tempo* pada 6 September 2020. Tidak sekritis Aspinall, Wahyu cenderung lebih banyak mengiyakan pengamatan Ben Bland, sang penulis buku, tentang kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi (Dhyatmika, 2020). Namun, mungkin ini memang tentang cara pandang dan pilihan kata saja untuk mengartikulasikan bagaimana mendeskripsikan tokoh publik yang selalu kompleks. Meskipun saat ini ia menjadi Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, latar belakangnya sebagai wartawan, juga bisa dimengerti perhatiannya pada dimensi yang tertampil keluar daripada dimensi kepribadian yang lebih dalam. Penekanannya pada kontradiksi-kontradiksi yang diidap Jokowi memang bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya jika kontradiksi-kontradiksi itu memang diidap oleh Jokowi, lalu bagaimana dia merekonsiliasi kontradiksi-kontradiksinya karena jika tidak, bukankah berarti kebijakannya bisa menjadi *zero sum game*, atau tidak bisa *move on*?

Ada yang menarik dalam ulasan Aspinall (2020) tentang buku ini, yaitu ketika dia mengomentari bahwa interpretasi para pengamat tentang politik Indonesia sebetulnya mudah meleset, lagi-lagi dia menganalogikan Indonesia dengan Amerika Serikat. Dia mengatakan, “siapa sangka Amerika bisa seperti sekarang?”. Mungkin analogi Aspinall penting juga diperhatikan, Indonesia dan Amerika—seperti Cina dan India—adalah dua negara besar. Setajam apa pun pengamatan pengamat, sangat mungkin meleset ketika memotret Indonesia

yang serba besar dimensinya itu. Buku *Man of Contradictions* meskipun berfokus pada Jokowi, secara tidak langsung juga menilai Indonesia yang di dalamnya memiliki banyak kontradiksi dan paradoks. Bagi Ben, kontradiksi dan paradoks dari Indonesia itulah yang *embodied* dalam diri Jokowi.

Jika tidak salah, buku ini adalah buku pertama tentang Jokowi yang ditulis pengamat asing dalam bahasa Inggris. Tidak aneh jika buku ini diterbitkan oleh (dengan bantuan penerbit Penguin) Lowy Institute, sebuah *think tank* yang berkantor di Sidney, Australia, dan mungkin akan dibaca banyak orang Australia, terutama di kalangan diplomat dan pengusaha. Bagi Australia, Indonesia memang tetap negara yang penting, selain kedekatan geografis, juga karena *partner* dagang dan pasar yang penting.

Memahami tingkah laku politik presiden Indonesia, sangat penting untuk bisa memprediksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintahan yang dipimpinnya. Apalagi, sosok Jokowi yang tampil sederhana, tetapi dianggap mampu melakukan perubahan sejak menjadi wali kota Solo, melejit menjadi gubernur Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden pada tahun 2014, juga pada tahun 2019, telah menimbulkan decak kagum dan harapan menjanjikan bagi banyak pihak.

Dalam sebuah tulisan pendek saya (Tirtosudarmo, 2019d), jauh sebelum demo besar mahasiswa menentang revisi UU KPK, dan pandemi Covid-19 menyergap dan melumpuhkan kita, saya menilai Jokowi sebagai presiden yang pragmatis, tetapi visioner, sebuah pencitraan yang terdengar kontradiktif. Namun, dengan deskripsi ini, saya bermaksud menunjukkan bagaimana sebuah sifat yang tampaknya bisa berujung pada *zero sum game*, ternyata bisa berubah ketika kedua sifat yang seperti saling meniadakan itu terekonsiliasi dalam tindakan. Saat itu, saya memberi contoh gagasannya tentang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Gagasan yang dalam waktu relatif cepat mulai dilaksanakan itu

adalah bentuk tindakan pragmatis sekaligus visioner. Visi bagi Jokowi adalah sesuatu yang ada di masa depan, yang di matanya terlihat sebagai wujud konkret dan melalui perencanaan dan eksekusi—ini kata kunci bagi Jokowi—yang terukur, selangkah demi selangkah akan direalisasikan.

Gagasan memindahkan ibu kota adalah sebuah gagasan besar, sudah pasti kontroversial, dan tidak sedikit yang akan menentanginya. Ben Bland dalam bukunya, memberikan kita penjelasan yang menarik dan cukup terperinci, *the making and unmaking of Jokowi*, dan kita perlu berterima kasih kepadanya. Etnografi yang disusunnya dari banyak potongan-potongan cerita tentang perjalanan politik seorang pengusaha mebel di Solo sampai menjadi presiden, berhasil memberikan alasan mengapa terbentuk sosok—yang dalam pencitraan Ben sebagai—*A Man of Contradictions*, sosok yang penuh kontradiksi. Dengan contoh gagasannya tentang membangun ibu kota baru, saya ingin menunjukkan penilaian atau penarikan kesimpulan yang berbeda dengan Ben Bland. Etnografi Ben Bland memperlihatkan bahwa Jokowi, orang yang disimpulkan oleh Ben sebagai kontradiksi, sebaliknya dalam tafsir saya, sebagai semacam anak tangga yang harus ditapaki satu per satu sebelum sampai ke puncak. Anak tangga dari tangga besar itu dibuat sendiri oleh Jokowi. Di sini, koinidensi antara profesinya sebagai pengusaha mebel di Solo dan metafora tangga yang saya gunakan, seperti sebuah penjelas yang mudah dipahami dan masuk akal. Jokowi pada dasarnya adalah, *a no-nonsense person*.

Akumulasi pengetahuan para pengamat asing (indonesianis) tentang politik Indonesia setiap saat terus bertambah, tetapi seperti diakui sendiri oleh Ben Bland di akhir bukunya, tidak berarti analisis, atau deskripsi yang dibuat tentang politik Indonesia menjadi lebih tepat. Saya kira, para ilmuwan sosial selalu menyadari bahwa objek yang menjadi kajiannya adalah *a moving target*. Indonesia secara politik setiap saat berubah,

dan kompleksitas yang dimilikinya menjadikan seorang tokoh politik, apalagi presiden, yang setiap saat harus melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terus berlangsung. Sejak enam bulan terakhir, dan kita belum tahu sampai kapan semua kepala negara, juga Jokowi, dipaksa untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi dan politiknya menghadapi pandemi Covid-19. Remuk atau akan meningkatnya imunitas di tubuhnya, akan kita lihat bersama dalam waktu dekat ini. Jokowi masih punya empat tahun sebagai presiden, dan dalam empat tahun banyak peluang yang dia miliki untuk bermanuver. Indonesia saat ini memang kembali berada di persimpangan jalan.

Saya tidak mengetahui apakah Bagus Takwin dan Niniek L. Karim, dua psikolog sosial dari Universitas Indonesia, sudah membuat analisis kepribadian Jokowi setelah sebelumnya membuat seri analisis kepribadian para calon presiden. Saya ingat, menjelang pemilihan presiden 2014, sempat mengobrol dengan Bagus Takwin dan Niniek L. Karim. Niniek tidak menyembunyikan skeptisismenya terhadap sosok Jokowi yang menurutnya *ndeso*. Pengamatan yang sulit dibantah, apalagi jika dibandingkan dengan sosok Prabowo yang berasal dari keluarga terpandang dan kosmopolitan, bagai Bumi dengan langit. Saat itu, saya hanya mengatakan sembari bercanda ke Mbak Niniek jika pandangannya tipikal anak Menteng. Saya tidak tahu apakah persepsi Niniek L. Karim berubah setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam dua kali pemilihan presiden (2014 dan 2019). Mungkin, sudah waktunya bagi Bagus Takwin dan Niniek L. Karim menulis analisis psikologi politiknya tentang Jokowi setelah membaca buku Ben Bland yang cukup cermat ini.

Buku Ben Bland tentang sosok Jokowi yang menurutnya penuh kontradiksi itu terbit ketika pandemi Covid-19 menggempur sendi-sendi yang menopang pemerintahan Jokowi. Dalam sebuah komentar pendek, (Covid-19 dan Kepemimpinan Baru?) pandemi yang sedang melanda ini menjadi tes

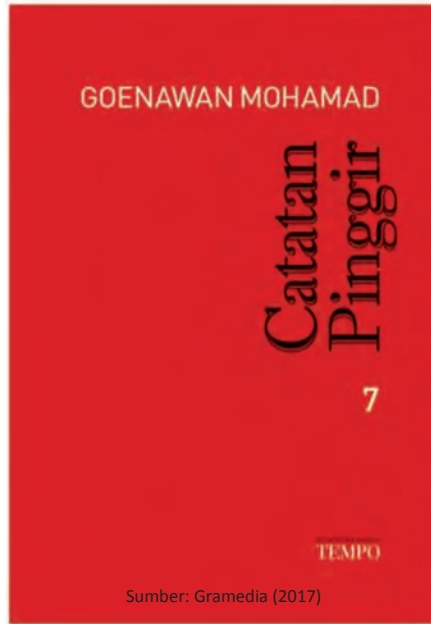
kepemimpinan para kepala daerah, para menteri, dan Presiden Jokowi sendiri. Berbagai kontradiksi yang diidap Jokowi—jika kita sepakat dengan deskripsi Ben Bland—berakibat Jokowi harus mengerahkan seluruh daya kemampuan yang dimiliki untuk membuat biduk yang bernama negara Indonesia tidak oleng dan karam di tengah badai. Sebagai nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia, Jokowi harus mengendalikan kemudi bahkan jika perlu, perlu memutar haluan untuk menyelamatkan isi kapal, tidak saja barang-barangnya, tetapi yang lebih penting adalah orang-orangnya.

Jokowi orang yang bisa melihat dan memilah masalah dalam berbagai *front* yang setiap *front* harus ditangani dengan “resources” yang berbeda. Pada tingkat yang terakhir, saya kira dia menyandarkan pada intuisi dan insting politiknya yang tajam. Menghadapi gelombang demo ketika dia ingin mengubah postur KPK sesuai dengan keinginannya meskipun semua orang menyarankan untuk menunda keputusannya, terbukti dia tetap dengan keputusannya, dan mereka yang semula menentang, seperti kehilangan langkah. Saat ini, di tengah upayanya untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang korbannya terus meningkat, saya menduga dia terus mencari cara guna meloloskan UU Cipta Kerja yang baginya penting untuk menjalankan roda ekonomi. Tentu dia bisa gagal, tetapi itulah Jokowi yang saya kira.

Dalam perspektif Ben Bland, menghadapi pandemi yang terus mengancam warga ini, Jokowi akan terlihat kontradiktif ketika dia ingin mendahulukan ekonomi, tetapi dia juga ingin menyelamatkan penduduk; keduanya bisa memiliki implikasi saling menegasikan. Namun, lagi-lagi, di sinilah menurut pendapat saya, deskripsi tentang kontradiksi agak kurang tepat dan dengan demikian, cenderung meleset dalam menjelaskan tentang realitas yang ada. Bagi Jokowi, pandemi ini meskipun berat, adalah bagian dari anak tangga yang harus ditapaki untuk menuju puncak.



Pragmatisme ekonomi, intuisi, dan insting politiknya yang kuat akan mendiktenya untuk mengeksekusi pilihan-pilihan kebijakan yang bisa saja tidak populer dan dianggap melanggar kebebasan sipil, seperti mengerahkan TNI dan Polri untuk turun menangani pandemi. Jokowi juga akan terkesan *machiavelis* ketika terus merampingkan jalan agar investasi masuk dan proyek infrastrukturnya tetap berjalan. Mungkin di sini, Ben Bland benar, Jokowi memang lebih mirip Soeharto daripada Soekarno. Jika Soekarno adalah bapak ideologinya, Soeharto adalah bapak pembangunannya. Di tangan Jokowi, tidak ada kontradiksi antara Soekarno dan Soeharto, keduanya adalah sumber inspirasinya sebagai presiden pragmatis yang visioner.



### 43. Ruslan: Membaca Caping Goenawan Mohamad<sup>47</sup>

Setiap kali menerima majalah *Tempo* edisi terbaru, secara otomatis saya membuka halaman terakhir sebelum sampul belakang. Di halaman terakhir itu, Goenawan Mohamad (GM) menulis catatan pinggirnya. Gerak refleks tangan saya itu diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun membaca *Tempo*. Ada sihir yang membuat reaksi bawah sadar terbiasa menikmati esai pendek GM sebelum membaca yang lain. Sebelum Arief Budiman wafat, dalam sebuah obrolan dengannya beberapa tahun yang lalu di Kampoeng Percik, Salatiga, dia memuji GM, sahabatnya itu, “*tidak mudah secara teratur menulis dan tulisannya selalu bagus*”.

Ketika hari-hari terasa menegangkan karena silang sengketa yang membuat suasana menjadi riuh rendah, sikap ingin tahu

<sup>47</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 26 Oktober 2020.

dalam menunggu caping itu seperti mengalami peningkatan. Begitulah ketika ruang publik dipenuhi reaksi pro dan kontra akan keputusan DPR yang dianggap kontroversial itu, diam-diam saya menunggu apa yang dikatakan GM tentang suasana yang kemudian menjadi sangat riuh itu.

Caping GM yang berjudul “Ruslan” itu, (Tempo, 25 Oktober 2020) mungkin tidak lebih dari 1000 kata, tetapi saya merasa esai itu mengungkapkan begitu banyak hal, antara lain meskipun kata ini sama sekali tidak muncul dan ini merupakan tafsir saya tentang yang tidak tersurat, yaitu tentang “rakyat”. “Rakyat” sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang saya sendiri tidak tahu berasal dari mana, dari bahasa apa, mungkinkah dari Melayu atau Arab?

Bagi saya sendiri, kata “rakyat” penuh dengan mitos, terutama mitos tentang otoritas yang mulia. Mengapa saya menyebutnya sebagai mitos karena otoritas yang dimuliakan itu sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Perhatikan kata “Majelis Permusyawaratan Rakyat”, “Dewan Perwakilan Rakyat”, atau “amanat penderitaan rakyat”. Siapa yang dimaksud dengan rakyat yang terdengar seperti penuh otoritas itu? Bukankah “rakyat” adalah sebuah kata yang sebenarnya mandul di sana. Sebuah otoritas simbolik tanpa kekuasaan nyata. Memang, seperti ada nada atau pesan sebuah perjuangan di sana, ada yang terasa heroik, ada mereka yang perlu diangkat derajatnya ketika mendengar, membaca, atau mengucapkan kata “rakyat”. Ada sesuatu yang terkesan murni, bahkan suci dalam kata “rakyat” itu. Namun, tidakkah itu hanya retorik? Sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi, sebuah fiksi, tak ada yang sungguh-sungguh nyata di sana, semacam fatamorgana. Fatamorgana yang sering kali sengaja diciptakan untuk mengelabui, untuk menutupi agenda yang tersembunyi; dengan kata lain, ada ketidakjujuran.

“Rakyat” bukanlah sekadar kata yang mewakili sebuah makna tertentu karena ia juga *a realm* untuk meminjam kosa

kata dalam bahasa Inggris. Kata “rakyat” juga seperti alat pemberi makna yang dapat melegitimasi kekuasaan agar diterima tanpa *reserve*. Namun, sebaliknya, kata itu juga dapat dipakai oleh mereka yang ingin mendelegitimasi kekuasaan yang dianggap korup dan otoriter. Apa yang terjadi pada hari-hari yang lalu dan mungkin beberapa hari ke depan, ketika ada dua pihak yang saling berhadapan, berselisih pendapat, dan sama-sama mengklaim berbuat atas nama “rakyat”, betapa muskil sebetulnya makna kata rakyat disana, dan betapa mudah tergelincir atau terpelesetnya si pengguna kata itu dalam sebuah *realm* yang sesungguhnya absurd. Tanpa menyinggung sedikit pun tentang “rakyat”, GM dalam capingnya itu sedang berbicara tentang seseorang yang konkret, seseorang yang bernama Ruslan, yang mungkin juga mengeluh, tetapi tidak menyerah dalam upayanya untuk tetap hidup dan menghidupi istri dan dua anaknya di tengah berbagai kesulitan akibat menyebarnya wabah penyakit yang memaksanya meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampungnya.

Ruslan dalam esai GM itu sama sekali tidak digambarkan sebagai representasi dari apa yang telah dimitoskan sebagai “rakyat” yang serba abstrak itu. Ruslan adalah seorang pria, mungkin berusia sekitar 50 tahun, yang oleh GM bisa jadi ingin ditampilkan sebagai contoh dari sebuah lapisan tertentu dalam masyarakat. Sebuah lapisan yang ditandai oleh karakteristik yang menunjuk pada sebuah kelas sosial dan ekonomi tertentu, mirip kaum borjuis kecil dalam tradisi kiri. GM terkesan agak mirip dengan Soekarno yang menemukan Marhaen dan kemudian menjadikannya sebagai identitas dari kelas tertentu dalam masyarakat. Namun, tidak seperti Soekarno yang berharap dari kelas itulah perubahan bisa digerakkan, GM tidak memiliki pretensi untuk menggerakkan karena baginya, Ruslan yang banyak jumlahnya itu, sudah bergerak sendiri tanpa perlu digerakkan oleh siapa pun. Bagi saya, ini sebuah pengamatan

sosial yang menarik dari GM. Saya kutipkan paragraf terakhir dari esainya sebagai berikut.

“Di sini orang seperti Ruslan, meskipun genting hidupnya, terlalu banyak untuk bisa dibasmi. Mereka bahkan tak mudah dimasukkan ke kandang besi dunia modern dan dikelola Negara. Mereka licin dan bekerja lebih keras ketimbang buruh pabrik yang dipromosikan serikat sekerja. Mereka, jutaan Ruslan, borjuis kecil kita, hanya senyap dan dengan senyap mereka buat Indonesia bergerak. Karena mereka, dibela atau tak dibela, tak mudah menyerah”.

Esai yang berjudul “Ruslan” itu diawali dengan sebuah paragraf yang bagi saya merupakan kritik tajam meskipun tidak terasa menohok, mungkin lebih tepat disebut sindiran, atau pasemon. Saya kutipkan sebagai berikut.

“Di dusunnya di Jawa Tengah, Ruslan tak punya waktu untuk berteriak. Ketika Jakarta bising dengan tiga patah kata yang dipertengkarkan—Buruh, Bisnis, Birokrasi—ia sibuk menanam porang. Dengan cangkul yang tak utuh lagi, ia gali tanah di pekarangan rumahnya. Dan, di lubang sedalam 50 senti itu ia letakkan damen buat pupuk” (Mohamad, 2020).

Dalam esai ini, GM tidak lagi “bertanya-tanya dengan suaranya yang lirih”, seperti dikatakan Th. Sumartana pada kata pengantar untuk kumpulan caping yang pertama. Akan tetapi, seperti menyatakan sebuah kesaksian, sebuah testimoni tentang kehadiran sebuah “kelas” dalam masyarakat yang selama ini tak terlihat karena riuh rendahnya kebisingan peristiwa yang membuat *semprong* dari *teplok* kita tidak lagi terang karena tertutup jelaga. GM jelas bukanlah seorang ilmuwan, namun kita keliru jika menilainya sebagai *anti ilmu*. Jutaan Ruslan yang dia lihat menunjukkan ketajaman pengamatannya tentang struktur masyarakat yang selama ini luput dari pengamatan para ilmuwan sosial.

Mungkin inilah sebuah lapisan masyarakat, atau sebuah generasi yang diam-diam terbentuk akibat tiga dekade politik masa mengambang, dua dekade politik uang, dan sekarang ditambah delapan bulan didera pandemi. Jutaan Ruslan yang tidak memiliki kemewahan seperti kita, masih bisa merasa optimis atau sebaliknya, telah menjadi pesimis, bahkan apatis. Hal yang terdengar sebagai paradoks di tengah suasana riuh rendah di gedung parlemen, di istana, di jalanan, di medsos, dan di panggung-panggung *talk show*; lapisan masyarakat inilah yang sesungguhnya telah menggerakkan Indonesia meskipun menurut GM dilakukan dalam senyap. Dengan demikian, mereka bukanlah *the silent majority*, seperti yang ditulis dalam banyak buku teks ilmu politik. Mungkin terlalu tinggi juga untuk mengenakan ungkapan *sepi ing pamrih rame ing gawe* yang lebih cocok bagi lapisan priayi jika *toh*, memang etos itu masih ada.



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia (2018)

## 44. Sejarah Intelektual, Membaca Ignas Kleden<sup>48</sup>

Ignas Kleden adalah seorang sosiolog yang sejak muda sangat terdidik dalam filsafat. Sosiologinya karena itu bukanlah yang berurusan dengan penelitian empiris, tetapi dengan dunia pemikiran yang hampir selalu filosofis. Sosiologi dan filsafatnya bukan sebagai vokasi (keahlian), tetapi sebagai alat untuk memahami sejarah pemikiran yang berkembang di dunia dan bangsanya.

Melihat riwayat pendidikan formal Ignas, kecuali S3-nya, selalu filsafat. Pertama di STF/TK (Sekolah Tinggi Filsafat/Teologi Katolik), Ledalero, sebuah lembaga untuk mendidik para calon imam Katolik yang letaknya tidak jauh dari tempat kelahirannya, Waibalun, sebuah desa di pinggir laut yang terletak

<sup>48</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 9 Januari 2021.

di jalan raya antara Larantuka dan Maumere, Flores. Ignas pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai editor di Yayasan Obor dan Prisma—di samping sebagai kolumnis yang produktif—sebelum kemudian melanjutkan studi filsafatnya (S-2) di Muenchen dan sosiologi (S-3) di Bielefeld, keduanya berada di Jerman, sebuah negeri yang filsafatnya mungkin berkembang paling subur setelah sebelumnya benih filsafat tumbuh di Yunani. Di bawah bimbingan Hans-Dieter Evers, seorang ahli sosiologi perkotaan yang juga meneliti di Indonesia, Ignas Kleden (1994) menulis disertasi tentang Clifford Geertz, ahli antropologi dari Amerika yang tesis doktornya tentang Agama Jawa. Tesis tersebut berjudul “The involution of the involution thesis: Clifford Geertz’s on Indonesia Revisited”, sebuah kritik yang mungkin terlengkap terhadap raksasa ilmu-ilmu sosial yang sangat berpengaruh itu.

Dengan ilmu, penguasaan bahasa, dan keterampilan menulis yang dimiliki, tidak sulit sebetulnya bagi Ignas untuk menjadi ilmuwan kaliber dunia dan bekerja di universitas luar negeri dengan gaji yang tinggi dan kesempatan meneliti yang nyaman. Jalan vokasi yang jadi dambaan banyak akademisi itu tidak dipilihnya. Ignas memilih bekerja di negerinya sendiri, meneliti dengan caranya sendiri dan menuliskan hasil pemikiran dan perenungannya dalam bahasa Indonesia untuk publik Indonesia.

Ignas adalah seorang pemikir-penulis yang produktif. Tulisan-tulisan lepasnya telah dikumpulkan dan terbit dalam banyak buku. Buku yang sedang saya baca ini, *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka* (Kleden, 2020), adalah kumpulan tulisannya tentang 17 tokoh politik dan kebudayaan Indonesia yang sebagian telah meninggal, kecuali empat orang, yaitu Putu Widjaya, Sutardji Calzoum Bachri, Goenawan Mohamad, dan Sardono W. Kusumo. Lainnya adalah Soekarno, Hatta, STA (Sutan Takdir Alisyahbana), Sjahrir, Tan Malaka, Soedjatmoko, Frans Seda, Gus Dur, Sultan



Hamengkubuwono, Ajip Rosidi, Asrul Sani, Mochtar Lubis, dan Pramodya Ananta Toer.

Kenapa tokoh-tokoh ini yang dipilih untuk diulasnya, Ignas menjelaskannya secara tidak langsung dalam bagian awal buku yang diberi judul “Atas Nama Apologia” dengan mengutarakan dua hal yang disebutnya sebagai kelemahan dari bukunya. Pertama adalah apologinya tentang hakikat bukunya yang lahir bukan dari niat menulis buku, tetapi menulis seorang tokoh, terutama pemikirannya, untuk sebuah acara atau penerbitan tertentu, terutama *Kompas*, *Tempo*, dan *Prisma*; tiga media cetak yang merepresentasikan panggung intelektual pasca-1965. Jadi, kelemahan pertama ini berhubungan dengan keterbatasan dan fragmentasi pemilihan tokohnya. Kelemahan kedua yang tampaknya disadari sebagai semacam dosa besar dan karena itu, apologinya panjang lebar adalah tidak satu pun tokoh yang dibahasnya perempuan. Hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ignas adalah bahwa kelemahan kedua sebetulnya turunan dari kelemahan pertama. Tanpa disadarinya, ide menulis seorang tokoh, baik yang berasal dari dirinya atau dari pihak lain yang mengundangnya untuk membicarakan tokoh tertentu, mencerminkan masih dominannya laki-laki dalam dunia pemikiran. Perempuan, memakai istilah Simone de Beauvoir, masih merupakan *the second sex*. Sebuah apologia mungkin tidak cukup karena Ignas tanpa disadari juga menjadi pantulan dari sebuah dunia yang masih menempatkan perempuan sebagai *the second sex*. Ignas memang bukan, atau berpretensi, menjadi seorang feminis.

Dalam bagian pengantar yang dimaksudkan untuk memberi konteks dari tulisan-tulisannya yang diberi judul “Intelektual dalam Sejarah: Pembuat Sejarah atau Produk Sejarah?,” Ignas memulai pengantarnya dengan mengacu pada buku Edward Said, *Representations of The Intellectuals*, 1996, namun kemudian, kita dibawa untuk memasuki relung-relung pemikiran para

pemikir lain di dunia sekaligus menyusup masuk ke dalam dunia pemikiran tokoh-tokoh Indonesia, terutama yang ingin dikupasnya. Pengantar ini (73 halaman) memperlihatkan upaya Ignas yang tidak tanggung-tanggung untuk menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri, *intelektual memproduksi atau diproduksi sejarah?* Sampai akhir, saya kira, kita sebagai pembaca tidak diberi jawaban yang otoritatif, kita harus merenungkan sendiri bahwa intelektual dan sejarah adalah dua hal yang akan selalu berhubungan secara bolak-balik. Intelektual adalah produk sekaligus pembuat sejarah.

Dalam pengantar yang panjang ini, Ignas mengakhirinya dengan mengajukan pertanyaan (*retorik?*) yang menimbulkan tanda tanya. Masihkah pertanyaan itu perlu diajukan karena jawabannya telah tersirat dalam keseluruhan narasi panjang yang telah dibuatnya, “*Apakah kaum terpelajar sekarang akan setia menjadi produk sejarah, atau tergoda untuk membuat sejarah lain yang meningkari sumpah kemerdekaan?*” Menurut saya, sudah hampir bisa dipastikan jika kaum terpelajar (Ignas tidak memakai kata intelektual), akan memproduksi sejarahnya sendiri, tanpa harus meningkari sejarah sebelumnya yang juga telah memproduksinya.

Bagian isi buku oleh Ignas dibagi menjadi dua bagian. Bagian 1: Pemikiran Politik Indonesia, mengulas Soekarno (2 tulisan), Mohammad Hatta (2 tulisan), Sjahrir (2 tulisan), Tan Malaka (2 tulisan), Soedjatmoko (1 tulisan panjang), Frans Seda (1 tulisan lumayan panjang), Gus Dur dan Frans Seda (obituari dua tokoh yang meninggal hanya selang sehari), dan terakhir Hamengku Buwono IX (semula merupakan makalah seminar dalam bahasa Inggris). Bagian 2: Pemikiran dalam Sastra dan Kebudayaan, membahas STA (Sutan Takdir Alisjahbana) (3 tulisan), Ajip Rosidi, Asrul Sani, Mochtar Lubis, dan Rendra (2 tulisan), GM (Goenawan Mohamad) dan STA, GM, Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri, Sardono W. Kusumo, Jacob Oetama (tulisan ini

berbeda dengan yang lain, sebenarnya kurang jelas siapa tokoh yang menjadi fokusnya) dan Pramoedya Ananta Toer. Cara Ignas yang membagi isi buku menjadi pemikiran politik dan pemikiran sastra dan kebudayaan, terkesan agak menyederhanakan sebuah realitas yang sesungguhnya kompleks dari kebudayaan.

Akan tetapi, itu juga kesulitan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh Ignas sebagai *ex post facto*—ketika dia harus membuat kategori dari tulisan-tulisannya yang sudah jadi, sudah berbentuk. Tulisan-tulisan itu, menurut hemat saya memang merupakan esai-esai, ada yang pendek dan ada yang panjang, mirip risalah ilmiah akademis. Sebagai esai, dia mengungkap yang objektif sekaligus subjektif, bukan sepenuhnya tulisan yang secara ketat mengikuti kaidah-kaidah akademik. Dari semua tulisan, mungkin yang paling akademik adalah mengupas Hamengku Buwono IX, sementara lainnya merupakan tulisan kreatif (*creative writing*). Esai panjang yang secara diam-diam mencerminkan sudut pandangnya yang dipengaruhi latar belakang pendidikan formalnya, filsafat dan sosiologi, di samping tentu saja tradisi belajar yang sejak kecil ditanamkan di dalam keluarganya dan jalan kehidupan yang dipilihnya sebagai seorang pemikir-penulis bebas.

Membaca buku ini, bagi saya seperti membaca Ignas sang penulis, *erudition*-nya dalam bacaan, empati terhadap tokoh yang sedang ditulisnya, keketatannya dalam berbahasa dan kadar intelektualitasnya yang sulit tertandingi, yang selalu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sendiri. Oleh Ignas, tokoh-tokoh itu ditampilkan dalam narasi yang sering kali panjang untuk menampung sebuah analisis kritis, namun jelas berangkat dari rasa simpati yang dalam. Mungkin juga bukan sebuah kebetulan jika tokoh-tokoh yang diulasnya adalah tokoh-tokoh yang pada dasarnya sangat di hormatinya. Hasilnya, sang tokoh seperti dihidupkan kembali oleh Ignas sebagai sosok dalam sejarah dengan pemikiran, kecenderungan

intelektual, keterlibatan sosial, aspirasi politik, dan ekspresi artistiknya yang utuh. Jika pun ada persoalan dari buku ini, saya kira terletak pada hakikatnya sebagai sebuah kumpulan tulisan. Meskipun saya kira dengan apologia, bukan hanya “*caveat*” yang ditempatkan di awal buku, Ignas tidak perlu lagi dikritik karena apa yang akan dikritik telah diakuinya secara jujur bahwa bukunya adalah kumpulan fragmen-fragmen yang pada dirinya melekat fragmentasi yang tak terhindarkan. Terlepas dari persoalan itu, buku *Fragmen Sejarah Intelektual* telah menampilkan sosok-sosok penting intelektual Indonesia, tidak saja merintis sebuah cabang kajian sejarah sosial politik bangsanya, tetapi juga membuka kesempatan munculnya bidang-bidang kajian yang lain, seperti psikologi politik, politik sastra, atau kajian tentang strategi kebudayaan.

Sebagai antologi yang berisi fragmen-fragmen yang memang ditulis dengan konteks dan niatnya masing-masing, menjadikan setiap tulisan dapat dinikmati sendiri-sendiri, artinya pembaca tidak perlu menyusuri tulisan dari halaman pertama hingga akhir, namun bisa meloncat dari satu tulisan ke tulisan lain. Bahkan, setiap tokoh pun oleh Ignas bisa ditampilkan dalam dua, bahkan tiga tulisan yang terpisah. STA oleh Ignas ditulis dalam tiga tulisan yang berbeda. Apakah ini memperlihatkan sebuah afinitas antara keduanya? Membaca



Sumber: Yayasan Obor Indonesia (2020)

**Gambar 9.** Sampul Buku *Fragmen Sejarah Intelektual* Karya Ignas Kleden

Buku ini tidak diperjualbelikan.

ulasan Ignas tentang STA di tulisan pertama, tidak sulit untuk melihat afinitas Ignas yang kuat terhadap STA. Pada tulisan yang dibuat untuk menyambut 100 tahun STA itu, Ignas tidak menyembunyikan rasa kagumnya.

“...STA adalah pengejawantahan suatu pandangan hidup yang serba jelas. Tak dapat disangkal bahwa dia mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang amat luas tentang berbagai bidang: ilmu bahasa, filsafat, teori kebudayaan, pendidikan, sastra, dan berbagai bidang ilmu sosial yang dijelajahnya dengan penuh gairah. Tak dapat disangkal energi yang sulit dipercaya, yang diperlihatkannya dalam menekuni berbagai bidang yang telah dipilih dan dimasukinya” (Kleden, 2020, 233).

Pada tulisan kedua yang lebih panjang untuk pengantar buku mengenai STA, Ignas seperti memulai ulasannya dengan sebuah kesimpulan.

“Begitulah, berbicara tentang dia pertama-tama bukanlah berurusan dengan kedalaman tetapi keluasan, bukan dengan kecanggihan tetapi kejelasan, bukanlah mengkaji kualitas melainkan berhadapan dengan skala dan intensitas, bukan terpesona oleh kegemilangan melainkan mengagumi kesungguhan yang tidak kepalang tanggung” (Kleden, 2020: 217).

Dalam kaitan dengan krisis yang menurut Ignas menjadi kata kunci untuk memahami pemikiran STA, menimbulkan pertanyaan, apakah krisis itu tercipta atau diciptakan oleh STA sendiri untuk mendorong kemajuan? Dalam posisi kedua itu, STA adalah tipe intelektual yang memproduksi dan bukan sekadar yang diproduksi oleh sejarah. Dengan kata lain, STA adalah orang yang meyakini sebuah rekayasa sosial untuk mencapai kemajuan dan kemodernan. Tulisan ketiga, mengulas novel-novel STA. STA wafat tahun 1994, artinya sempat hidup dalam masa kejayaan Orde Baru, tetapi dari tiga tulisan Ignas, tidak terlihat makna Orde Baru bagi STA. Bukankah Orde Baru adalah sebuah rekayasa sosial yang bisa dikatakan paling besar dalam sejarah Indonesia?

Dalam komentar pendek ini, saya hanya menyinggung sedikit tentang seorang tokoh yang dipilihnya yaitu STA, padahal, setiap tokoh dalam buku ini memiliki daya tariknya sendiri-sendiri, kontroversi dan posisinya yang krusial dalam panggung sejarah bangsanya sebagai intelektual. Tak diragukan lagi bahwa Ignas Kleden adalah satu dari sedikit pemikir-penulis yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan sosial kebudayaan bangsanya. Buku-bukunya, termasuk yang terakhir ini, memperlihatkan penjelajahan pemikirannya yang luas dan mendalam di beberapa bagian. Jika memakai cara pandang yang digunakan, tulisan-tulisannya bisa dianggap sebagai tanggapannya yang bersifat *ad hoc* terhadap isu tertentu yang dimintakan kepadanya untuk menulis atau atas kemauannya sendiri untuk memberikan komentar tentang isu tertentu yang saat itu menarik minatnya.

Dalam buku ini, berbagai isu yang dikomentarnya secara umum bisa dikelompokkan pada tiga ranah, yaitu politik, sastra, dan kebudayaan. Di awal, Ignas juga sudah menyadari bahwa ada banyak tokoh, isu, dan ranah-ranah lain yang belum disentuhnya. Isu agama, misalnya, belum menjadi ranah yang dikupasnya secara mendalam, padahal, jika melihat latar belakangnya, janaan-janaan agama adalah sebuah ranah yang paling dekat dengan hatinya. Ignas tentulah orang yang paling menyadari bahwa sebagus-bagusnya sebuah kumpulan tulisan, mengidap dalam dirinya persoalan fragmentasi dan ketidakbulatan sebagai buku yang utuh. Terlepas dari kekurangan itu, satu hal yang tampaknya menjadi ciri atau kecenderungan strategi menulisnya adalah lebih dipentingkannya *clarity*, daripada *conciseness*. Ciri atau kecenderungan itu terlihat dari upayanya untuk menjelaskan sesuatu secara terperinci dengan Pustaka yang *exhausted* karena tidak ingin pembacanya salah menafsirkan apa yang dimaksudkannya. Kata, kalimat, dan bahasa menjadi sentral dalam memahami Ignas. Ignas menulis

untuk memprovokasi pikiran, bukan untuk mengagitasi sebuah aksi.

Apakah posisi Ignas Kleden sebagai intelektual—mengggunakan istilahnya sendiri—lebih sebagai produk dari sejarah? Posisi seperti itu adalah hal yang biasa dalam sejarah intelektual, apalagi di negara yang tingkat literasi penduduknya rendah. Akan tetapi, apakah Ignas dengan tingkat *erudition*-nya yang sudah demikian tinggi akan terus dalam posisi itu? Apakah Ignas tidak ingin memproduksi sejarah? Dengan misalnya, dengan membuat buku yang sejak awal dirancang untuk menyusun sebuah teori atau strategi kebudayaan, misalnya? Keluasan cakrawala pemikiran yang dimiliki serta kedalaman daya *tilik*nya pastilah membuatnya tidak terlalu sulit untuk memilih topik yang mungkin paling diperlukan oleh dunia intelektual bangsanya. Jika ini dilakukannya, dia telah memberi jawaban terhadap pertanyaan yang diajukannya sendiri di kata pengantar bukunya yang panjang, “*Intelektual dalam Sejarah: Pembuat Sejarah atau Produk Sejarah?*”.





Sumber: Aristama (2019)

## 45. Hariman Siregar dan Malari<sup>49</sup>

Adakah, atau masih mungkinkah, sebuah perubahan besar untuk membentuk sesuatu yang baru bisa terjadi di masa depan? Goenawan Mohamad, dalam buku kumpulan esainya yang diberi judul *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi* (2004a), seperti menjawab pertanyaan itu dalam sebuah esai yang ditulisnya pada tahun 1992 yang merupakan komentar terhadap apa yang terjadi di Eropa selama hampir seabad, sejak revolusi Bolshevik 1917 dan runtuhnya Tembok Berlin 1989. Bagi Goenawan, sejak itu, tak akan ada lagi perubahan besar yang menggetarkan hati. Pada saat yang hampir sama, pandangan yang mirip, dikemukakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man* (Fukuyama, 1992). Namun, apa relevansinya dengan Indonesia ketika setelah perubahan besar yang terjadi pada tahun

<sup>49</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 15 Januari 2021.





Sumber: Berdikaribook (2021)

**Gambar 10.** Buku semiautobiografi Hariman Siregar berjudul *Menjadi Benih Perlawanan Rakyat*.

1998, banyak hal yang dijanjikan masih tidak terjadi? Lebih dari 20 tahun telah berlalu setelah peristiwa besar 1998 itu, masihkah ada harapan sebuah perubahan besar ada, atau mungkin, terjadi?

Dua hari yang lalu, seorang teman mengambil buku di Klinik Baruna, Cikini, milik Hariman Siregar yang berbaik hati memberi buku semi-autobiografinya, *Menjadi Benih Perlawanan Rakyat: Hariman Siregar, Malari 74, dan Demokrasi Indonesia* (Hasibuan dkk., 2018). Buku yang terbit tahun 2018 ini tujuh tahun

sebelumnya, terbit dengan judul *Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Versi yang baru, diedit oleh Arif Zulkifli, disertai prolog Max Lane, dan epilog Cees van Dijk. Menurut Arif Zulkifli, selain ada tambahan tulisan Cees van Dijk dalam buku yang baru ini, dihilangkan kesaksian orang-orang yang mengenal Hariman Siregar, mungkin agar sosok Hariman tampil lebih utuh tanpa tafsir dari orang-orang lain. Jadilah buku setebal hampir 400 halaman ini, sebuah kisah tentang seorang tokoh gerakan mahasiswa pasca-1966 yang ditulis dengan gaya bahasa lentur dan menyentuh dengan data-data yang cukup lengkap.

Pada bab satu dari sepuluh bab dari buku ini, diawali dengan cerita seorang tahanan politik yang dalam waktu singkat harus menanggung beban mental yang sangat berat, anak kembar yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, istri yang koma dan kehilangan daya ingat, ayah yang sakit dan meninggal, serta mertua yang juga sama-sama di penjara. Beranjak dari kisah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sedih di bab 1 itu, buku ini bergerak menarasikan kisah seorang anak yang sejak kecil dikenal sebagai anak cerdas dan nakal, yang tumbuh dalam lingkungan kelas menengah atas Jakarta, berkuliah di FKUI, dan bergaul dengan sisa-sisa pentolan PSI, termasuk bapak dan ayah mertuanya.

Hariman masuk FKUI pada tahun 1968 ketika situasi politik sudah mulai tenang. Para tokoh mahasiswa yang ikut menggulingkan Bung Karno dalam aksi-aksi tahun 1966, diangkat menjadi anggota DPR-GR jika ada yang masih melakukan aksi, protes tidak memiliki arti lagi, sebagian lainnya menerima keadaan, dan sebagian frustrasi, termasuk Soe Hok Gie yang kemudian meninggalkan Jakarta dengan beberapa kawan dekatnya, dan meninggal akhir 1969 di Puncak Semeru. Dalam suasana politik yang mulai tenang itu, Hariman tumbuh, dan terbukti baginya ketenangan politik itu semu, ada yang perlu dia suarkan, ada ketidakadilan yang membuatnya berang untuk melakukan aksi. Awal tahun 1970-an, bulan madu tentara dan mahasiswa memang mulai memudar. Suara-suara kritis mulai terdengar di sana-sini, terutama di Jakarta dan Bandung, tempat bermukim tidak sedikit para tokoh kritis itu. Korupsi di tubuh pemerintah merupakan salah satu sasaran kritik mereka.

Awal aksi Hariman ditandai dengan kemenangannya untuk menduduki jabatan Ketua DMUI, Agustus 1973, yang selama itu dikuasai oleh HMI. Hariman yang didukung oleh berbagai kelompok di luar HMI, termasuk pimpinan mahasiswa yang dibina Operasi Khusus Ali Mortopo (OPSUS) dan eksponen Grup Diskusi Universitas Indonesia (GDUI) itu mendapatkan 26 suara, sementara HMI, 24 suara. Ketatnya pertarungan memperebutkan kedudukan Ketua DMUI digambarkan dengan menarik dalam buku ini karena menunjukkan eratnya dunia politik kemahasiswaan dengan kepentingan-kepentingan politik luar kampus, bahkan nasional, sebuah fenomena yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Setelah menjabat sebagai Ketua DMUI,

Hariman Siregar bergerak dengan GDUI sebagai *think thank*-nya. Menjelang peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1973, DMUI menyelenggarakan sebuah seminar yang diisi para pembicara yang mewakili generasi 28, 45, dan 66.

Puncak acara adalah pembacaan sebuah petisi, Petisi 24 Oktober 1973, di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Teks lengkapnya adalah sebagai berikut (hlm. 72–73).

*Kami, pemuda-pemudi Indonesia, milik dan pemilik nusa dan bangsa tercinta, dari tempat terbaringnya kusuma-kusuma bangsa yang telah memberikan milik mereka yang paling berharga bagi kemerdekaan dan kekayaan bangsa Indonesia menyatakan kecemasan kami atas kecenderungan keadaan yang menjurus pada keadaan yang makin jauh dari apa yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh bangsa.*

*Bahwa dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab di hari depan, yang keadaannya akan ditentukan oleh masa kini, di mana kami, sebahagian daripadanya, merasa berkewajiban mengingatkan pemerintah, militer, intelektual, teknokrat, politisi untuk hal-hal sebagai berikut:*

- 1. Meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun suatu strategi yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi yang anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan*
- 2. Segera membebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastian dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran;*
- 3. Lembaga-lembaga penyalur pendapat rakyat harus kuat dan berfungsi serta pendapat masyarakat luas mendapatkan kesempatan dan tempat yang seluas-luasnya;*

4. *Yang paling berkepentingan akan masa depan adalah kami, oleh karena itu penentuan masa depan—yang tidak terlepas dari keadaan kini – adalah juga hak dan kewajiban kami. Kiranya Tuhan yang Maha Esa menyertai perjalanan Bangsa Indonesia.*

*Kalibata, Peringatan Sumpah Pemuda tahun 1973.*

*DEWAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA*

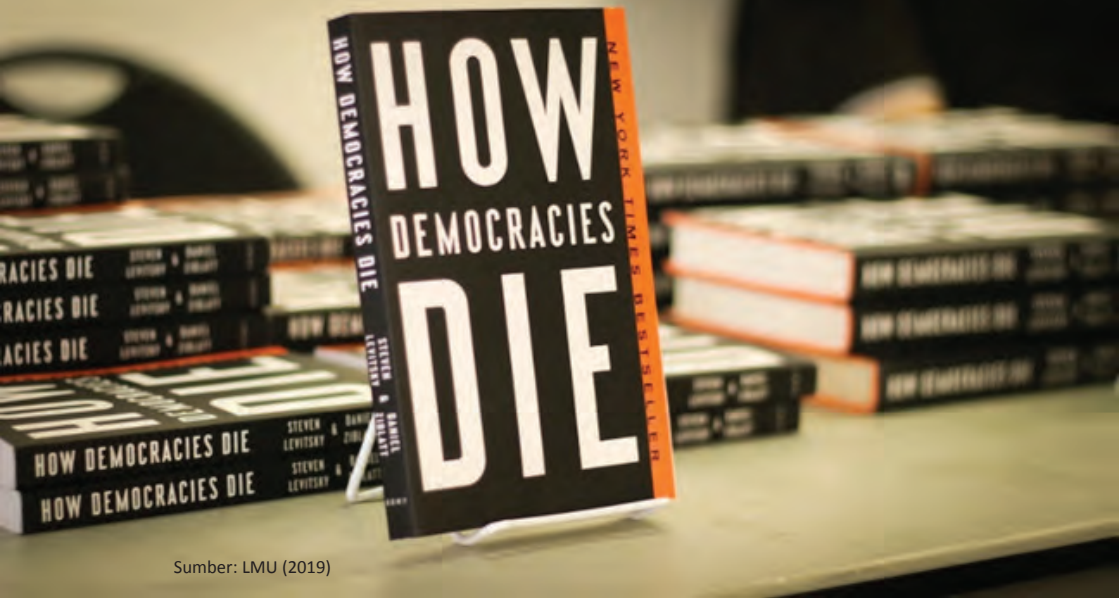
Petisi 24 Oktober 1973, saya kira, telah disusun melalui hasil diskusi dan tukar pikiran antarkonseptornya dengan sangat matang, dengan empati terhadap nasib orang banyak, serta situasi yang sedang berkembang, dikemas melalui pilihan kata-kata yang terkontrol dengan pesan dan sikap politik yang jelas. Mulai tanggal 24 Oktober 1973–15 Januari 1974, merupakan sebuah rentang waktu yang relatif pendek, tidak sampai tiga bulan. Apa yang dicemaskan oleh anak-anak muda itu benar-benar menjelma menjadi sebuah kenyataan. Setelah uraian tentang Malari (bab 3 dan 4), bab-bab selanjutnya dari buku ini mengisahkan perjalanan Hariman Siregar menjalani proses pengadilan, mendekam di penjara, dan kiprahnya yang seperti tidak kenal henti dalam arus kekuasaan yang terus diarunginya. Sebagai sebuah buku semibiografi, buku yang ditulis kembali oleh Arif Zulkifli ini telah berhasil menghadirkan seorang tokoh politik yang secara konsisten bergerak di luar jalur perpolitikan resmi dan tetap menjadi pemberang yang anti terhadap kemapanan. Prolog dan epilog yang ditulis oleh dua pengamat, Max Lane dari Australia dan Cees van Dijk dari Belanda, memberikan bobot yang penting. Jika Max Lane memberikan analisis dan komentarnya sebagai pengamat yang terlibat, Cees van Dijk menyajikan sebuah dokumentasi yang penting berdasarkan apa yang terjadi dalam proses pengadilan Hariman Siregar. Bagi saya sendiri, teks Petisi 24 Oktober 1973 mungkin memiliki posisi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

paling sentral, tidak saja dalam konteks keseluruhan buku yang sedang dibicarakan, namun isi pesannya yang bisa dianggap telah melampaui zamannya.

Paling tidak, ada tiga hal penting yang dikandung dalam teks Petisi 24 Oktober 1973 itu. Pertama, seperti telah dikemukakan di atas adalah ketepatan analisisnya terhadap keadaan dan empati yang ditunjukkannya untuk nasib orang banyak. Kedua, adalah kesadarannya yang tinggi akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari generasi muda yang harus mengambil peran secara bertanggung jawab dalam perubahan untuk mencapai tujuan bersama dan keadilan sosial bagi segenap warga negara. Ketiga, wawasannya yang menjangkau masa depan, tetapi tetap didasari oleh kesaksiannya tentang apa yang dilihatnya pada hari ini.

Petisi itu menjadi sangat relevan karena aktualitas persoalan-persoalan yang masih terus bisa dirasakan hingga hari ini, hampir setengah abad setelah teks itu dituliskan. Tampaknya, di tengah ramalan para intelektual, yaitu Goenawan Mohamad, Francis Fukuyama, juga yang lain-lain tentang tidak akan adanya perubahan besar yang menggetarkan hati, Peristiwa Malariyang menampilkan sosok Hariman Siregar dan teks Petisi yang mendahuluinya itu, menjadi bagian penting dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah lewat, yang sedang kita jalani, dan nanti yang akan datang.



Sumber: LMU (2019)

## 46. Demokrasi Ternyata Bisa Mati, Juga di Amerika Serikat<sup>50</sup>

Sebagai seorang politisi sekaligus gubernur yang memiliki gelar doktor ilmu politik, tidak aneh jika Anies Baswedan memiliki buku *How Democracies Die* (2018). Postingannya di medsos yang memperlihatkan foto dirinya duduk bersarang memegang buku yang terlihat jelas judulnya itu, segera memancing reaksi pro-kontra netizen. Foto yang diunggah pada Minggu, 22 November 2020, tidak lama setelah pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya terkait hubungannya dengan Habib Rizieq, tentulah bukan sekadar untuk pamer bahwa seorang gubernur yang sangat sibuk seperti dirinya pun bisa meluangkan waktu buat membaca. Tidak sulit juga untuk memahami pro-kontra yang kemudian merebak

<sup>50</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 19 Januari 2021.

di dunia maya itu, tanpa perlu membaca isi buku yang menjadi sumber kehebohan itu.

Ketika saya mulai membaca buku yang terbit 2018 itu, sejak kata pengantar, saya merasa buku itu ditulis dengan rasa cemas. Hanya perlu dua tahun, apa yang mereka cemaskan betul-betul menjadi kenyataan. Gedung Capitol, tempat anggota parlemen dan para senator berkantor dan bersidang, diduduki dan dirusak oleh pendukung fanatik Presiden Trump. Hari itu, 6 Januari 2021, demokrasi Amerika berada di titik nadir. Sesuatu yang tak terbayangkan bisa terjadi di negeri kampiun demokrasi. Namun, itulah yang memang terjadi. Kecemasan dua profesor ilmu politik dari universitas paling masyhur di dunia, Harvard, mendorong mereka menuliskan refleksinya bagaimana demokrasi mati. Kedua profesor yang ahli dalam perbandingan politik itu, Steven Levitsky, ahli Amerika Latin, sementara Daniel Ziblatt, ahli Eropa, mengaku sudah lama mengkaji bagaimana demokrasi di berbagai belahan dunia itu mati, tetapi tak terbayangkan, demokrasi juga bisa mati di negerinya sendiri.

Kecemasan mereka bahwa demokrasi juga bisa mati di Amerika mulai mereka rasakan ketika Trump yang terpilih sebagai presiden pada 2016, memperlihatkan kecenderungan otoriterinya. Kedua profesor itu sudah melihat gejala yang aneh, seperti Trump bisa memenangkan pemilihan presiden. Keduanya memang tahu, selain demokrasi mati karena pemerintahan yang sah di kudeta oleh militer, seperti terjadi di Chile saat Alende digulingkan Pinochet, demokrasi juga bisa mati di tangan presiden yang terpilih secara demokratis, seperti saat Hitler berkuasa, misalnya. Mereka cemas karena Trump seperti meniru Hitler. Dalam kata pengantarnya, mereka menulis, *“The tragic paradox of the electoral route to authoritarianism is that democracy’s assassins use the very*

*institutions of democracy—gradually, subtly, and even legally—to kill it”* (hlm. 11).

Fokus buku ini adalah pada proses bagaimana demokrasi dibunuh melalui proses yang legal, sering kali oleh presiden yang menang melalui pemilihan umum, seperti Hitler dan Trump. Keduanya, yang sebetulnya bukan ahli politik dalam negeri, mulai mengamati apa yang telah terjadi di negerinya. Mereka melihat bahwa masyarakat Amerika mengalami puncak pembelahan sejak terpilihnya Obama yang berkulit hitam. Proses pembelahan masyarakat Amerika itu sudah dimulai pada era ‘70-an dan ‘80-an. Sejak kemenangan Obama itu, berkembang rasa intoleran, terutama di kalangan pendukung Partai Republik yang bertekad apa pun harus dilakukan untuk membalik keadaan. Polarisasi itu merayap merasuki jiwa orang Amerika dan membelah tubuh politik mereka. Naik dan terpilihnya Trump yang didukung Partai Republik, menurut kedua penulis ini adalah akibat dari terbelahnya jiwa dan tubuh politik Amerika.

Dua tahun setelah Trump terpilih, mereka melihat bagaimana subversi terhadap demokrasi terjadi. Buku yang mereka tulis untuk publik Amerika itu ingin mengajak pembacanya menyadari proses politik apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan agar jiwa dan tubuh politik Amerika bisa utuh kembali. Sebagai akademisi dari universitas sekaliber Harvard sekali pun, semangat partisan tampaknya memang merupakan hal yang biasa. Ketika mengupas matinya demokrasi di negara lain, tidak terlihat kritiknya terhadap campur tangan negerinya di berbagai kudeta militer yang terjadi, di Chile atau di Mesir, misalnya. Juga meskipun sebagai pembaca, saya setuju bahwa Trump harus diturunkan, namun apakah standar ganda bisa diterima?

Buku ini tampaknya memang ditulis dengan niat untuk membela Amerika sebagai kampiun demokrasi. Meskipun disertai dengan banyak pustaka dan data dari cara penyajian



yang relatif ringkas (*concise*), pembagian bab-bab yang diarahkan untuk memperlihatkan sebuah proses politik yang jelas, menjadi strategi agar mudah dibaca oleh sebanyak-banyaknya publik Amerika. Buku ini, sekitar 150 halaman, ditulis dengan mengemas pesan pokoknya secara jelas dan mudah dimengerti. Dengan cara berputar dulu melalui sejarah negara-negara lain yang mengalami kematian demokrasi, kedua penulis ini kemudian kembali ke permasalahan yang sedang dihadapi Amerika. Keduanya, memang selama ini kuat dalam meneliti negara-negara lain, dan dari pengalaman negara-negara lain itulah mereka mengupas apa yang terjadi di Amerika. Sejarah politik adalah bagian penting untuk memahami apa yang terjadi hari ini. Setelah di bab satu mereka melirik sejarah politik negara-negara lain, mulai bab dua sampai bisa terpilihnya Trump (Bab 8), mereka memelototi sejarah politik negaranya sendiri. Baru pada Bab 9 (*Saving Democracy*) yang merupakan bab terakhir mereka, mulai memandu pembaca apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Kedua penulis ini menunjukkan bahwa demokrasi Amerika bukanlah sebuah kekecualian. Mereka meyakinkan publik Amerika bahwa demokrasi di Amerika bisa juga mati, seperti di tempat lain. Menariknya, kedua penulis ini berhasil menunjukkan apa yang membuat Amerika berbeda dari sejarah politik negara-negara lain. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis (*unwritten rules*) dalam politik yang membuat Amerika selama ini bisa mempertahankan demokrasinya, dan aturan tidak tertulis yang disebut dengan istilah *guardrails* inilah yang telah dilabrak oleh Trump. Publik Amerika, melalui institusi-institusi politiknya, harus mengembalikan aturan yang tidak tertulis ini jika ingin menyelamatkan demokrasi yang sedang dibunuh oleh Trump.

Menulis resep bagaimana menyelamatkan demokrasi dua tahun sebelum lambang demokrasi Amerika Gedung Capitol dirangsek oleh mob pendukung fanatik Trump, sebenarnya mencerminkan sebuah analisis yang jika dilihat dari perspektif

hari ini, sedikit berbau *self-fulfilling prophecy*. Apa yang mereka cemaskan dua tahun yang lalu, terbukti menjadi kenyataan. *The political saga*, menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden pada 20 Januari 2021 nanti, belumlah usai. Trump, menurut berita, mengatakan tidak ingin menghadiri pelantikan Biden.

Aturan-aturan tidak tertulis (*unwritten rules*) apa yang menurut kedua penulis buku ini memiliki peran sangat penting guna mem-*backup* sistem *check and balance* politik yang tertulis dalam konstitusi Amerika? Hal pertama, menurut mereka adalah *mutual toleration*, yaitu saling menghargai antara dua pihak yang sedang bersaing dan menerima pihak lain sebagai rival yang *legitimate*. Hal kedua adalah *forbearance*, yaitu ide bahwa politisi harus mengendalikan diri untuk tidak setiap kali menggunakan hak prerogatifnya. Norma untuk bersikap toleran dan pengendalian diri inilah yang telah berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi Amerika dan meredam dorongan untuk saling berkelahi sampai mati yang terbukti dalam sejarah, telah menjadi pembunuh demokrasi di berbagai negara di dunia.

Amerika di bawah Trump menunjukkan demokrasi telah mati, atau nyaris mati. Kemenangan Joe Biden yang terus ingin didelegitimasi oleh Trump, tetapi gagal, mengacu pada tesis utama buku ini, bisa disimpulkan bahwa demokrasi terselamatkan karena publik Amerika dan institusi-institusi politiknya bisa lolos dari *litmus test* yang harus dilaluinya. Aturan-aturan yang tidak tertulis, terbukti di saat-saat terakhir bisa dibangkitkan kembali untuk menyelamatkan demokrasi yang nyaris mati terbunuh oleh presidennya sendiri. Lantas, kira-kira, pelajaran penting apa yang bisa dipetik dari buku ini untuk publik Indonesia? Kita jelas bukan Amerika yang memiliki sejarah politik panjang dan memiliki aturan-aturan tidak tertulis yang bisa membentengi demokrasi dari kematian. Namun, sebagai bangsa, kita seharusnya juga memiliki aturan-aturan tidak tertulis di luar dasar negara

dan konstitusi kita yang memperlihatkan sikap toleran dan kemampuan mengendalikan diri untuk ingin menang sendiri.

Pengalaman pergantian kekuasaan yang relatif aman melalui pemilihan umum selama 20 tahun terakhir, tampaknya menjauhkan spekulasi potensi perubahan politik melalui kudeta. Artinya, potensi pembunuhan demokrasi justru akan berlangsung melalui proses legal. Berkaca pada pengalaman Amerika, dan mengacu pada tesis buku ini, tidak ada cara lain agar demokrasi tidak mati terbunuh selain memperkuat sikap toleran, yaitu dengan menghilangkan kebiasaan ingin menang sendiri.



Sumber: Kleden (2018) dan Tempo (2021b)

## 47. Menyandingkan Ignas Kleden dengan Goenawan Mohamad<sup>51</sup>

Arief Budiman dalam esainya yang indah “Esai tentang Esai” di Majalah *Sastra Horizon*, Juli 1966, menulis:

“Bersama puisi orang-orang diajak menuju pada kehidupan nilai-nilai subyektif. Bersama ilmu orang diajak kepada hidup yang praktis. Bersama esai orang diajak kepada kehidupan yang menggejala secara sederhana dalam diri seorang manusia nyata. Itulah esai. Dalam menilainya kita harus menempatkannya pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan kodratnya. Dinilai dengan norma-norma puisi, dia adalah puisi yang tanggung – puisi yang kurang dihayati secara intens/ pathos. Dinilai dengan norma-norma ilmu, dia adalah ilmu yang setengah-setengah, suatu studi

<sup>51</sup> Tulisan ini dibacakan pada webinar yang diselenggarakan oleh Penerbit Buku Obor untuk mendiskusikan buku Ignas Kleden “Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka”, Rabu 27 Januari 2021.

pendahuluan yang masih kabur perumusan konsep-konsepnya; masih bercampur-baur dengan perasaan-perasaan subyektif dari penulisnya yang dibiarkan hidup dan terus terasa mengganggu bagi seorang sarjana”. (Budiman, 1996).

Dari pengamatan saya yang terbatas, saat ini, Ignas Kleden (IK) dan Goenawan Mohamad (GM) adalah dua esais terbaik kita. Keduanya menulis berbagai isu tentang seni, ilmu, politik, dan agama. Belum lama ini, saya membaca dua buku yang merupakan kumpulan esai mereka, yaitu *Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka* (Kleden, 2020) dan *Ketika Revolusi Tak Ada Lagi* (Mohamad, 2005). Melalui dua buku kumpulan tulisan ini, saya menyandingkan kedua penulisnya, dan menikmati tulisan-tulisan keduanya dengan pemahaman tentang esai, seperti dikatakan Arief Budiman di atas, tanpa bermaksud membandingkannya secara ketat dan sistematis. Mungkin, tulisan ini sekadar sketsa daripada sebuah lukisan yang utuh dan selesai. Saya adalah pembaca yang berusaha menilai esai, mengikuti anjuran Budiman (1966), “*Dengan norma-norma esai, dia akan tampil dengan segala kesegaran perhiasan-perhiasan dirinya, bagai bunga yang bangga ketika mekar pagi hari.*”

Meskipun penerbitan kedua buku itu terpaut 15 tahun, tetapi jika dilihat waktu esai-esai itu terbit sebagai tulisan lepas, bisa dikatakan semasa, antara tahun 1966–2011, sekitar setengah abad setelah kejatuhan Soekarno. Pada buku GM, tulisan tertua (Saini KM) diterbitkan tahun 1966 dan yang terakhir (Pramoedya) tahun 2000. Sementara itu, rentang waktu terbit tulisan Ignas, dari 1996 (Frans Seda) dan yang terakhir 2011 (Pramoedya). Rentang waktu tulisan GM adalah 33 tahun, sementara IK adalah 15 tahun. Buku IK, *Fragmen Sejarah Intelektual...*, berisi 27 tulisan yang dibagi menjadi dua kelompok (politik dan seni), sementara buku GM, *Ketika Revolusi Tak Ada Lagi*, berisi 32 tulisan yang pengelompokannya terasa lebih longgar dibandingkan dengan cara pengelompokan dalam buku IK.

Secara kebetulan, kedua buku kumpulan tulisan ini memiliki fokus yang sama, yaitu membicarakan sosok-sosok intelektual dengan karya dan pemikirannya. Tidak seperti buku IK yang memang dimaksudkan untuk mengupas tokoh—meskipun juga tidak sepenuhnya, seperti pada tulisan “Surat buat Siapa Saja” (Mohamad, 2004b) dan “Jurnalisme Fakta dan Jurnalisme Makna: Wartawan dan Kebudayaan” (Kleden, 2001)—pada buku GM terdapat beberapa esai yang tidak menjadikan tokoh sebagai pokoknya, misalnya tulisan yang dikelompokkan di bagian terakhir tentang “seni dan pasar”. Jika ada tokoh di sana, misalnya Joko Pekik atau Gundala, tokoh itu bukan pokok karena yang ingin ditampilkan adalah *setting* dan konteksnya, dalam hal ini tentang seni dan pasarnya.

Dilihat dari sudut tokoh politik yang menjadi pokok, buku IK memperlihatkan jumlah yang lebih banyak (Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Gus Dur, dan Frans Seda), sementara dalam buku GM hanya satu (Sjahrir). Penulis sastra dan seni, pada buku IK (Pramoedya, Mochtar Lubis, GM, Asrul Sani, Soetardji C. Bachri, STA, Rendra, dan Sardono W. Kusumo), pada buku GM (Pramoedya, Umar Kayam, Saini KM, Sapardi Djoko Damono, Radhar Panca Dahana, Joko Pekik, Amir Hamzah, Hartojo Andangdjaja, Trisno Sumardjo, dan Subagjo Sastrowardjo). Namun, di bagian dua kumpulan tulisannya, GM membicarakan beberapa pemikir Indonesia (Soedjatmoko, STA, dan Kartini) yang disamakan dengan esainya tentang pemikir-pemikir Barat, seperti Camus, Heidegger, Nietzsche, Breght, dan Marx. Bagian satu dalam buku GM, selain Ketib Anom, dibicarakan pula Pramoedya, Umar Kayam, Iqbal, Nurcholish Madjid, dan Sjahrir. Dalam subjudul “Ketib Anom dan Pintu Menuju Tuhan”, refleksi GM tentang iman dan institusi agama merupakan sebuah tema yang absen di buku IK.

Absennya pemikiran tentang agama dan sosok intelektual perempuan dalam buku IK menyisakan sebuah pertanyaan besar

tentang sejauh manakah perhatian IK tentang isu agama dan perempuan. IK merupakan seorang esais yang berangkat dari dunia intelektual yang kurang lebih akademik, sementara, GM adalah seorang esais yang berangkat dari dunia jurnalisme yang lebih eksploratif. IK, dalam mengemukakan pikiran-pikirannya, memiliki strategi dan struktur yang lebih sistemis, sementara GM cenderung antistruktur dan antisistem (dikatakan juga oleh IK dalam tulisannya tentang GM, namun tulisan ini tidak disertakan dalam buku IK). Mungkin, latar belakang pendidikan formal ikut menentukan di sini. IK memakai metodologi yang cenderung saintifik, sedangkan GM cenderung intuitif dan mengikuti panggilan rasa hatinya. GM sejak muda telah terbiasa mengekspresikan rasa ingin tahunya melalui puisi, sementara IK terbiasa menyalurkan rasa ingin tahunya melalui analisis. Filsafat, bagi IK, adalah bagian dari metode analisisnya, sementara bagi GM, filsafat adalah bagian dari pemuas kerinduannya akan sesuatu yang tak terjangkau. Bagi keduanya, bahasa adalah jalan darmanya.

Distingsi antara IK dan GM, dua esais terbaik kita saat ini, juga tampak terlihat dari tradisi asal mereka. IK berasal dari Flores yang Kristen Katolik, sementara GM berasal dari Jawa yang Islam-pesisiran. Keduanya menyerap Barat dengan tapis dari tradisi yang melatarbelakanginya. IK bisa dibilang luluh dalam Barat yang datang bersama kekristenan, sementara GM mampu menegosiasi Barat dengan kejawaannya yang Islam. Mungkin, ini juga yang membuat IK lebih cocok dengan STA (terlihat dari tiga tulisannya tentang STA di bukunya) yang juga luluh dalam Barat, dibandingkan, misalnya dengan Soedjatmoko yang seperti GM, menggenggam tradisi Jawa yang membuatnya tidak luluh dengan Barat.

Tulisan panjang IK tentang Soedjatmoko memperlihatkan kedekatan keduanya meskipun IK tetap memperlihatkan sikap kritis terhadapnya. Bagi saya, Soedjatmoko memiliki tema tertentu

yang selalu muncul dalam tulisan-tulisannya, IK menyebutnya sebagai tema otonomi dan kebebasan. Dibandingkan dengan Soedjatmoko, IK seperti belum memiliki tema tertentu dalam tulisan-tulisannya. Hal yang juga menarik adalah bagaimana Pramoedya, seorang Jawa yang lebih Barat dari Soedjatmoko dan GM, ditatap oleh IK dan GM. Dalam buku IK, hanya ada satu tulisan panjang tentang Pram yang ditatap dari tetraloginovel *Burunya*, sementara dalam buku GM ada tiga esai tentang Pram. Selain dari esai tentang Pram, tatapan IK tentang Jawa bisa dilihat juga dari tulisan panjangnya tentang HB IX dan Sardono W. Kusumo, seorang penari Jawa klasik yang tidak hanya berhasil membawa koreografinya ke tingkat dunia, tetapi juga bagaimana dia mengolah Jawa bersama tradisi-tradisi nusantara lainnya. Bagi IK, kebudayaan, termasuk Jawa adalah gejala yang harus dianalisis dengan ilmu Baratnya, sementara bagi GM Jawa adalah bagian dari dirinya dalam bernegosiasi dengan Barat.

Menyandingkan IK dan GM, melalui dua buku kumpulan tulisannya yang berbicara tentang pokok dan tokoh (meminjam istilah *Tempo*), terlihat bahwa IK memang berniat untuk menempatkan tokoh-tokohnya dalam apa yang disebutnya sebagai sejarah intelektual, sementara GM tidak memiliki niat seperti itu. Kumpulan tulisan GM tidak dipertautkan dengan sebuah tema tertentu meskipun judul “Ketika Revolusi Tak Ada Lagi” tentu bisa ditafsirkan mengandung maksud tertentu. Namun, sekadar pertanyaan iseng, bagaimana menempatkan Ketib Anom dan Gundala dalam tema revolusi itu? Pemilihan judul memang selalu problematik dalam sebuah kumpulan tulisan. Saya merasa, kata “sejarah” dalam judul buku IK cukup mengganggu. Sejarah mengandaikan adanya empiris dan kronologi, dan karena itu memerlukan *rigorousness*. Akan tetapi, ini memang pilihan IK yang memiliki kecenderungan analitis, dengan perhatian yang tidak cukup besar terhadap data-data empiris. Ketika membahas Tan Malaka yang tidak memiliki pustaka, misalnya, pada studi



Harry A. Poeze yang lima jilid bukunya telah diterbitkan oleh Obor.

IK juga sama sekali tidak menyinggung buku tebal karya Dhaniel Dhakidae tentang cendekiawan dan kekuasaan, yang merupakan kajian terkuat sejauh ini tentang peran intelektual di zaman Orde Baru. Namun, pertanyaannya, apa yang membuat esai-esai IK dan GM menjadikan mereka sebagai esais terbaik kita saat ini? Ketika saya menggunakan kata “*kita*” di sini, jelas saya melakukan sebuah ketidakadilan. Saya secara subjektif telah melakukan klaim terhadap sesuatu yang harus diperdebatkan ketepatannya. Namun, usaha saya dalam menulis esai, merupakan sesuatu yang pada dasarnya bersifat subjektif. Sekian, terima kasih.



## 48. Telah Selesaikan Proses Kristenisasi Itu?<sup>52</sup>

Buku baru Nusantara Institute berjudul *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi* (2020) yang disunting oleh Izak Y.M. Lattu dan Tedi Kholiludin, seperti mengandaikan bahwa proses pengkristenan di berbagai komunitas di Nusantara telah selesai. Buku sebelumnya, *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi* (Qurtuby & Kholiludin, 2020) yang melihat islamisasi, juga mengandaikan telah selesainya proses pengislaman itu. Dalam *review* terhadap buku *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi* (Qurtuby & Kholiludin, 2020) dan *Agama dan Kepercayaan Nusantara* (Qurtuby & Kholiludin, 2019), saya mempertanyakan asumsi atau pengandaian telah selesainya proses pengislaman atau islamisasi, dan sekarang dengan buku baru ini,

<sup>52</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, tanggal 25 April 2021

muncul proses pengkristenan atau kristenisasi (Tirtosudarmo, 2021).

Sayangnya, Nusantara Institute sebagai lembaga yang menerbitkan buku-buku, yang menurut hemat saya penting, tidak menjelaskan asumsi atau pengandaian yang digunakan. Mungkin juga, bentuk terikat *pasca*-yang digunakan, tidak dimaksudkan secara ketat bahwa proses pengislaman atau pengkristenan yang terjadi itu telah benar-benar selesai, seperti berbagai proses perubahan sosial lainnya yang juga terus berlangsung tanpa ada titik henti. Jika kita memang melihat islamisasi atau kristenisasi yang akan dibahas di sini sebagai proses sosial yang terus berlangsung, pertanyaannya adalah bagaimana masa depan proses yang sedang berlangsung ini?

Dalam sebuah kolom di Majalah *Tempo* yang berjudul “Salahkah Jika Dipribumikan?” (Wahid, 1983), yang terbit hampir empat puluh tahun lalu, Gus Dur secara berani dengan bahasa yang ringkas, jelas, dan lugas, sudah mempertanyakan apa yang dia katakan sebagai “proses formalisasi Islam”, yang dia sebut juga sebagai proses “arabisasi”, yang bagi Gus Dur menjadi pertanda jika Islam sedang tercerabut dari lokalitas yang semula mendukung kehadirannya di belahan Bumi ini. Dalam esai yang tajam ini, Gus Dur mengajak kita untuk menyadari perlunya memupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan kita sendiri dalam mengembangkan kehidupan beragama Islam di negeri ini.

Gus Dur menyadari bahwa penggunaan istilah “pribumisasi Islam”, sebetulnya kurang tepat, tetapi dengan jujur, dia mengatakan belum menemukan kata yang tepat. Gus Dur enggan menggunakan kata “domestikasi” karena kata ini dianggapnya berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengebirian pendirian. Di bagian akhir kolomnya, Gus Dur menulis sebagai berikut.

“Yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan ‘Quran Batak’, dan ‘Hadis Jawa’. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan ‘bentuk luar’-nya. Salahkah kalau Islam ‘dipribumikan’ sebagai manifestasi kehidupan?” (Wahid, 1983).

Buku *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Kristenisasi* kembali menunjukkan niat Nusantara Institute untuk menyajikan hasil-hasil studi tentang proses “pribumisasi” dan “domestikasi” Kristen di Nusantara. Kata “pribumisasi” dan “domestikasi”, berbeda dengan Gus Dur, saya sengaja pakai serentak. Tanpa mengacu sepenuhnya pada Gus Dur, “pribumisasi” saya artikan sebagai proses adaptasi sekaligus resistensi dari komunitas lokal, saat agama baru itu masuk, sedangkan “domestikasi” saya maksudkan sebagai proses dominasi dan hegemoni yang dilakukan oleh pembawa agama baru ke dalam komunitas-komunitas lokal, saat agama baru itu ingin dimasukkan.

Dengan menggunakan konsep “pribumisasi dan domestikasi” ini, saya mencoba membaca buku yang disunting oleh Izak Y.M. Lattu, seorang ahli teologi Kristen dan Tedi Koliludin, seorang ahli teologi Islam. Tulisan-tulisan terpilih yang disajikan dalam buku ini meskipun telah menunjukkan adanya variasi yang kaya dari masuknya agama Kristen ke berbagai komunitas di Nusantara, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan apa yang terjadi antara lain karena tidak ada satu pun yang membicarakan pengalaman komunitas-komunitas Dayak di Kalimantan yang tidak saja telah dikristenkan, tetapi juga diislamkan dan dihindukan, atau apa yang terjadi di Papua, sebuah wilayah yang saat ini menjadi lokus yang sedang dikontestasikan oleh Kristen maupun Islam. Tulisan-tulisan yang tersaji dalam buku ini, juga baru mengulas kristenisasi yang dilakukan oleh Kristen Protestan, dan tidak ada yang mengulas bagaimana kristenisasi

yang dilakukan oleh Kristen Katolik— mungkin akan diterbitkan dalam buku tersendiri di masa mendatang, semoga.

Cukup menarik melihat komunitas yang menjadi wilayah kajian karena memperlihatkan mayoritas wilayah berada di luar Jawa, seperti Rote (NTT), Lease (Maluku), Toraja (Sulsel), Minahasa, (Sulut, 2 tulisan), Bitung (Sulut), Tolaki (Sulteng), Boti, Timor (NTT), Sidorejo, Kediri (Jatim), GKJ (Jawa), dan Batak (Sumut). Berbeda dengan masuknya Islam yang berhubungan dengan migrasi para pedagang, terutama dari India dan Cina, kedatangan Kristen sangat erat kaitannya dengan proses kolonisasi oleh bangsa-bangsa Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika—dalam kasus Indonesia, terutama Portugis dan Belanda. Baik Islam maupun Kristen adalah agama-agama yang dikenal sebagai agama ekspansif karena keyakinan para misionarisnya bahwa mereka harus menyelamatkan umat manusia yang dianggap belum beradab melalui ajaran agama yang dibawanya.

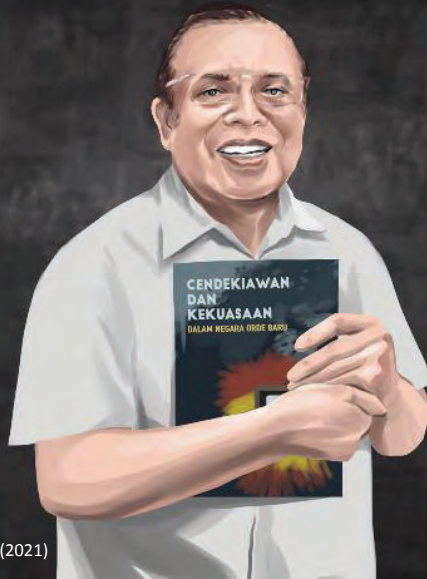
Dalam hal ini meskipun penilaian bahwa kristenisasi berlangsung bersamaan dengan proses penaklukan dan penjajahan, sulit dibantah juga peran Islam sebagai kekuatan resistan terhadap perluasan kristenisasi di Nusantara. Beberapa studi di Sulawesi memperlihatkan bagaimana Belanda mendorong kristenisasi di wilayah tengah Sulawesi untuk mencegah ekspansi Islam yang kuat bergerak dari selatan (Roth, 2005). Pemerintah kolonial dan para misionaris Kristen menghadapi realitas bahwa mereka harus mencari wilayah-wilayah di Nusantara yang penduduknya belum mengalami islamisasi. Selain di pulau-pulau wilayah Nusantara bagian timur yang belum dimasuki Islam, seperti Rote dan Lease, mereka harus masuk ke wilayah pedalaman karena umumnya wilayah pesisir sudah lebih dulu diislamkan. Toraja, Tolaki, dan Batak, mungkin contoh bagaimana kristenisasi harus mencari penduduk di wilayah pegunungan yang sering terisolasi dan belum dimasuki oleh misionaris Islam.

Sebagai peneliti yang telah mendalami interaksi antara para pembawa agama Kristen dan komunitas-komunitas lokal yang telah memiliki agama lokalnya masing-masing, uraian yang terungkap dalam setiap bab mencerminkan pemahaman yang cukup terperinci tentang proses adaptasi dan resistansi yang terjadi. Pengkristenan atau kristenisasi memperlihatkan dinamika lokal yang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, begitu pun dengan bentuk-bentuk ritual kekristenan yang dihasilkan dari interaksi itu. Buku ini menjadi menarik karena setiap penulis memilih “*angle*” nya masing-masing dan memperlihatkan besarnya variasi hasil akhir kristenisasi. Pertanyaan besarnya adalah apakah kristenisasi itu telah selesai? Pertanyaan ini menjadi penting karena setiap kristenisasi di sebuah komunitas yang terpencil sekali pun, tidak dapat dilepaskan dari proses sosial-politik yang berlangsung di masyarakat luas.

Setelah kekuasaan otoriter Orde Baru berkurang, seperti yang kita ketahui, muncul kebangkitan agama-agama lokal dan komunitas-komunitas adat yang selama ini telah menerima kehadiran agama-agama besar secara terpaksa. Sebagai contoh, di pulau Sumba, saat ini muncul kembali semangat untuk menghidupkan Marapu sebagai agama lokal yang selama ini harus menerima agama Katolik. Kemenangan gerakan masyarakat sipil mendukung diakuinya agama-agama lokal yang tecermin dari diakuinya eksistensi mereka melalui pencantuman dalam kolom agama di KTP, tentulah berimbas pada sikap berbagai komunitas lokal yang selama ini hidup dalam bayang-bayang penaklukan dan dominasi agama-agama resmi. Lagi-lagi dalam konteks seperti ini, menjadi goyah adanya anggapan bahwa kristenisasi, islamisasi, atau hinduisasi yang terjadi di masyarakat, sebagai dibayangkan, telah final.

Penerbitan buku-buku tentang proses perubahan dalam sistem kepercayaan atau agama dalam pengertian yang luas di

berbagai komunitas di kepulauan Nusantara, seperti yang telah dirintis oleh berbagai lembaga pengkajian, seperti Nusantara Institute, CRCS-UGM, serta tak terhitung lembaga-lembaga lain, baik di universitas maupun di LSM-LSM yang bergerak di bidang ini, patutlah dihargai dan didukung. Secara akademis, banyaknya publikasi hasil penelitian tentang dimensi sosial penting ini, menjadi bukti bahwa pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan Indonesia tidak lagi didominasi oleh peneliti-peneliti asing, seperti pada masa lalu. Nusantara Institute telah menjadi perintis terdepan dari kesadaran akan perlunya kajian akademis yang tidak saja menjunjung tinggi kaidah-kaidah ilmiah, tetapi sekaligus memberikan perspektif yang lebih holistik dan emansipatif, terutama dalam memberikan empati dan rekognisi pada aspirasi-aspirasi masyarakat lokal yang selama ini terpaksa harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan di luar kepentingan komunitas mereka sendiri.



Sumber: Sarulina (2021)

## 49. Dari Cendekiawan dan Kekuasaan ke *Unfinished Nation*<sup>53</sup>

Baru saja, saya menyelesaikan sebuah tulisan atas permintaan teman yang sedang menyunting buku untuk mengenang Daniel Dhakidae (DD) yang belum lama ini wafat. Saya memilih mengulas bukunya yang berjudul *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (2003). Buku ini merupakan karya monumentalnya, tidak sampai lima tahun setelah lengsernya Soeharto, yang oleh DD disebut “simbol utama neofasisme militer”. DD meyakini pentingnya cendekiawan dalam proses perubahan sosial-politik. Dalam negara Orde Baru, menurut DD, cendekiawan telah luluh dalam kekuasaan dan kehilangan peran kritisnya. Dalam teks yang lebih dari 800 halaman itu, DD menulis dengan teliti, menggunakan pengalaman dan

<sup>53</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, tanggal 20 Mei 2021.



pengetahuannya bertahun-tahun sebagai edior Prisma, salah satu lembaga cendekiawan yang hidup bersama Orde Baru. DD secara hilir-mudik menemukan paralelisasi dan koinidensi dari peristiwa masa kini dan masa lalu, menekankan dimensi diskursif dengan perspektif *Foucaultdian*.

Selain menunjukkan dua kekuatan yang menjadi represif hegemonik, yaitu militer dan agama, DD juga menunjukkan telah lahirnya kelompok cendekiawan kritis yang membentuk Partai Rakyat Demokratik (PRD). Meskipun pada tanggal 27 Juli 1996, PRD ikut terbunuh dalam penyerangan tentara ke markas PDIP. Semangat perlawanan mereka terus menyala sampai lengsernya Soeharto pada 23 Mei 1998. Di kalimat terakhir bukunya, DD tidak menyembunyikan optimisme,

“...secara perlahan-lahan proses pengambilalihan wacana baru terjadi sambil mengubah dan selangkah demi selangkah menghancurkan wacana politik kekuasaan dan kekuasaan politik Orde Baru” (Dhakidae, 2003).

Max Lane, di *cover* belakang bukunya yang baru diterbitkan ulang dengan judul *Ingatan Revolusi, Aksi Massa dan Sejarah Indonesia* (Lane, 2014), dideskripsikan oleh Edward Aspinall, rekan senegaranya sebagai berikut,

*“Kesepakatan para sarjana ilmu politik pengamat Indonesia ditandai oleh ketidakpercayaan pada kemungkinan perubahan revolusioner ataupun kemampuan transformatif dari kelompok-kelompok tertundukkan”.*

Pada studi politik Indonesia di Australia, kita lantas menemui sedikit sekali perbedaan pendapat mengenai dinamika dasar dari politik Indonesia, sifat dasar masyarakat atau arah dari transformasi demokratis yang sebaiknya dijalani. Namun, Max Lane merupakan satu-satunya penulis Australia ahli Indonesia yang berdiri di luar kesepakatan para ahli tadi. Edward Aspinall, sekarang profesor ilmu politik di Australian

National University (ANU), dibimbing oleh Harold Crouch ketika menulis disertasi doktornya tentang peran mahasiswa dalam menjatuhkan rezim Soeharto.

Aspinall (2005) yang disertasi doktornya kemudian terbit dengan judul *Opposing Soeharto: Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*, jelas bukan seseorang yang hanya mengetahui Indonesia di kulitnya. Jika ada yang tidak diketahuinya secara cukup tentang Max Lane, mungkin karena jam terbangnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan Max Lane dalam mempelajari Indonesia. Aspinall bisa dibilang “anak kemarin sore”, dibandingkan dengan ML yang sudah sejak tahun 1970-an aktif mendukung kelompok-kelompok progresif di Indonesia.

ML adalah generasi ahli Indonesia yang bisa dikatakan meneruskan tradisi Rex Mortimer yang menulis buku berdasarkan disertasinya, yang dibimbing Herbeth Feith, *Indonesian Communism under Soekarno* (Mortimer, 2011). Meskipun deskripsi Aspinall agak berlebihan ketika mengatakan “Max Lane merupakan satu-satunya penulis Australia ahli Indonesia yang berdiri di luar kesepakatan...”, tentu ada benarnya. Saya mengenal ML sejak awal tahun 1980-an di Jakarta, saat masih menjadi diplomat di Kedutaan Australia, dan kemudian di ANU setelah diberhentikan karena menerjemahkan buku Pramoedya Ananta Toer.

ML adalah orang asing yang sejak awal bersimpati pada gerakan kiri di Indonesia dan bergabung dengan gerakan yang menentang rezim militer Soeharto. Ketika di ANU, tidak mengherankan jika dia memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan ahli-ahli Indonesia di Australia kala itu, seperti Jamie Mackie dan Harold Crouch, yang kemudian menjadi guru para ahli Indonesia di ANU, seperti Edward Aspinall dan Marcus Mietzner.

Pada awal tahun 1980-an, tidak ada ahli Indonesia yang membayangkan, atau dengan istilah Aspinall “...kesepakatan para sarjana ilmu politik pengamat Indonesia ditandai oleh ketidakpercayaan pada kemungkinan perubahan revolusioner...” dari kemungkinan akan tumbang rezim Orde Baru. Pemerintah Australia, seperti umumnya pemerintah negeri-negeri yang tergabung dalam Blok Barat, mendukung rezim Soeharto dan memberi bantuan dalam berbagai bidang, antara lain melalui pemberian beasiswa untuk mendidik para ahli guna memperkuat teknokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah universitas terbesar yang didirikan oleh pemerintah Australia, ANU menjadi *think tank* untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Australia. ANU menjadi pusat berkumpulnya para ahli Indonesia hampir di semua bidang ilmu-ilmu sosial, dengan dua yang paling berpengaruh, yaitu ekonomi dan politik. Tak hanya itu, tetapi juga antropologi, sosiologi, geografi, demografi, dan sejarah. ANU menjadi laboratorium penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan pendidikan pascasarjana.

Sebagai negara tetangga terdekat dengan jumlah penduduk besar dan potensi kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia segera menjadi fokus berbagai penelitian di ANU. Di bidang ekonomi, dapat dilihat peran Heinz Arndt, seorang ahli ekonomi yang menaruh perhatian besar pada pembangunan di Indonesia. Selain mengarahkan murid-muridnya untuk meneliti berbagai aspek penting dari perkembangan ekonomi yang mendukung pembangunan rezim Orde Baru, Heinz Arndt juga merintis berdirinya “Indonesia Project” yang salah satu kegiatannya adalah menerbitkan *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES), dan telah menjadi jurnal berpengaruh dalam bidang ekonomi. Setiap kali terbit, BIES selalu memulai dengan laporan triwulan perkembangan ekonomi Indonesia yang menjadi pustaka penting

bagi para teknokrat ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Widjojo Nitisastro.

Hubungan antara ANU, khususnya kelompok Heinz Arndt dengan Indonesia, juga terjalin melalui kerja samanya dengan CSIS. Salah satu ahli ekonomi CSIS adalah Panglaykim, kolega dekat Heinz Arndt. CSIS atau Center for Strategic and International Studies—yang berulang kali disebut sebagai “the Center” oleh Daniel Dhakidae dalam bukunya *Cendekiawan dan Kekuasaan*—. CSIS adalah lembaga cendekiawan yang menurut DD dibentuk untuk mendukung rezim neofasis militer Soeharto.

Buku Max Lane, aslinya dalam bahasa Inggris, diterbitkan oleh Verso dengan judul *Unfinished Nation: Indonesia Before and After Soeharto* (2008). Versi Indonesia buku ini terbit dengan judul *Bangsa yang Belum Selesai*. Buku ini diterbitkan ulang pada 2021 dengan judul *Unfinished Nation: Ingatan Revolusi, Aksi Massa dan Sejarah Indonesia* (2014). Dalam edisi kedua ini, Max Lane dalam kata pengantarnya, menulis,

“Edisi kedua berbeda dengan edisi *Bangsa yang Belum Selesai* dengan adanya tiga bab tambahan. Dua dari tiga ini menyoroti perkembangan dan evolusi pelaku perubahan yaitu gerakan aksi massa demokratis di periode Orde Baru, terutama menyoroti perkembangan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sampai awal tahun 2000an. Satu bab lainnya berisi wawancara antara penerbit Djaman Baroe dan saya tentang situasi pergerakan pada saat itu” (Lane, 2014).



Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bekasi (2017)

**Gambar 11.** Sampul Depan Buku *Unfinished Nation*

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DD dan ML memiliki persamaan dalam melihat PRD sebagai kelompok anak muda yang memberikan harapan bagi perubahan politik masa depan Indonesia. ML melalui bukunya, menunjukkan pentingnya “ingatan revolusi” dan “aksi massa” dalam sejarah Indonesia dan percaya bahwa masa depan Indonesia hanya mungkin berubah jika lahir gerakan massa yang cukup kuat untuk melakukan perubahan (Lane, 2021). Dengan mengambil contoh PRD, DD dan ML melihat bahwa lahirnya cendekiawan kritis dan partai massa yang progresif, bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Dalam kaitan inilah, buku DD dan ML menjadi sangat penting untuk dibaca karena menunjukkan sebuah argumentasi sekaligus semacam *roadmap* untuk merintis jalan perubahan itu.

Ketika saat ini ada sebuah kesepakatan dari menurunnya demokrasi di Indonesia, DD dan ML akan memberikan resep yang sangat berbeda dibandingkan kebanyakan ilmuwan ataupun pengamat politik Indonesia lainnya. Meskipun ada cara menganalisis yang berbeda, baik DD maupun ML melihat bahwa untuk merintis jalan perubahan, cendekiawan kritis harus mampu melihat paralelitas dan koinsidensi beserta kontradiksi-kontradiksinya dari sejarah panjang politik bangsa Indonesia. Pada buku DD, paralelitas dan koinsidensi antara peristiwa masa kini dan masa lalu diperlihatkan dalam dimensi diskursifnya, sedangkan pada buku ML, kesinambungan sejarah itu diperlihatkan secara etnografis-empiris. Mungkin, dalam konteks memandang sejarah ini, DD lebih cenderung mengikuti perspektif gurunya, Ben Anderson yang menjelaskan bangsa sebagai komunitas yang terbayangkan (*imagined communities*), sementara ML, seperti terlihat dalam beberapa tulisannya, menolak dengan tegas Ben Anderson yang dalam penilaiannya mengabaikan realitas empiris dalam pembentukan sebuah bangsa.

Bagi ML, kesadaran yang didasarkan oleh pemahaman yang tepat dari realitas empiris dari politik inilah yang perlu dikembangkan di kalangan anak-anak muda agar dapat disusun strategi perjuangan yang bersifat kritis dan progresif. Pada bagian akhir buku, yang merupakan wawancara dengan dirinya pada 2011, ML mengkritik keras pandangan yang selalu melihat kemunduran bangsa Indonesia sebagai akibat pihak asing atau kuatnya penetrasi neoliberalisme. Pandangan seperti ini akan mengaburkan siapa sebetulnya musuh utama kemunduran bangsa. Bagi ML, musuh itu harus dicari dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri, melalui pemahaman kritis terhadap sejarah politik Indonesia. Membaca buku DD dan ML menjadi penting karena dasar pijak untuk melakukan perubahan telah mereka tunjukkan agar kita keluar dari jebakan asumsi keliru yang tampaknya memang telah menjadi kecenderungan umum.



Sumber: LIPI (2014)

## 50. *LIPI in Memoriam*<sup>54</sup>

Pada 1 September 2021, sebuah lembaga riset yang bernama LIPI diakhiri hidupnya karena telah berlangsung pelantikan pejabat teras Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga baru yang dibentuk Presiden Jokowi untuk menaungi semua lembaga riset milik pemerintah. Dalam struktur organisasi BRIN itu, LIPI akan dilebur dengan lembaga-lembaga lain dengan mandat yang baru. Bongkar pasang dalam organisasi penelitian pemerintah memang bukan hal yang baru. Oleh karena itu, kelahiran BRIN juga bukan sesuatu yang aneh.

Pada setiap masa, penguasa ingin menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana memperkokoh kedudukannya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesian Institute of Science, yang sebelumnya bernama Majelis Ilmu Pengetahuan

<sup>54</sup> Artikel ini dimuat pada laman [www.kajanglako.com](http://www.kajanglako.com) rubrik Akademia, 6 September 2021

Indonesia (MIPI), dibentuk hanya dengan SK Presiden dan memang sejatinya adalah lembaga yang bersifat sementara.

Menurut sejarahnya, LIPI dibentuk sebagai “embrio” atau cikal-bakal dari apa yang nantinya diharapkan sebagai *Indonesian Academy of Science* yang “prestigious”, seperti halnya *American Academy of Science* atau *Chinese Academy of Science*. “Embrio” itu ternyata tidak pernah berhasil bertransformasi menjadi lembaga yang dicita-citakan. “Embrio” itu seperti ditakdirkan mengukir namanya sendiri dalam jagad sejarah ilmu pengetahuan di negeri pascakolonial yang bernama Indonesia ini. Dalam kancah pergaulan internasional, LIPI telah disetarakan, bahkan sering diterjemahkan sebagai *Indonesian Academy of Science*.

LIPI yang dibentuk tahun 1967 adalah lembaga yang menghimpun hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan, mulai dari politik sampai biologi. Oleh karena itu, LIPI sebetulnya merupakan lembaga yang memanggul misi tidak ringan. Kesementaraan statusnya dan tidak kunjung munculnya mukjizat yang mentransformasinya menjadi lembaga permanen yang bisa menjadi lambang supremasi ilmu pengetahuan di negeri bekas jajahan ini, memperlihatkan kegagalan negara dalam menjadikan ilmu pengetahuan pilar utama yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti dijanjikan oleh konstitusi negara. Dalam posisi kesementaraan yang kemudian seperti menetap, itulah peran yang sudah dimainkan LIPI, dan dalam sejarah harus dinilai kontribusinya.

Sekelumit sejarah LIPI yang ingin saya ceritakan di sini didasarkan semata-mata oleh pengalaman sebagai peneliti yang mulai bekerja pada tahun 1980 dan pensiun pada tahun 2017. Pertama kali masuk, saya menjadi peneliti di Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas), salah satu lembaga di bawah LIPI yang tugasnya melakukan riset di bidang ekonomi dan sosial.



Selain Leknas, ada pula Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN). Pada tahun 1986, Leknas dibubarkan dan penelitiannya, bersama peneliti LRKN-LIPI yang juga dibubarkan, ditempatkan ke dalam empat pusat penelitian baru yang bernaung di bawah kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK). Keempat pusat itu adalah Pusat Penelitian Politik, Pusat Penelitian Ekonomi, Pusat Penelitian Penduduk, dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB). Mulai tahun 1986–1998, saya ditempatkan sebagai peneliti di Pusat Penelitian Penduduk. Tahun 1998, saya dipindahkan ke Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, hingga pensiun pada tahun 2017.

Sebagai sebuah lembaga milik pemerintah, para peneliti yang bekerja di LIPI otomatis adalah pegawai negeri yang lingkup kerjanya telah diatur oleh pemerintah. Namun, berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya, peneliti LIPI seperti memiliki gaya atau karakter yang tersendiri. Mungkin, gaya dan karakter yang berbeda itu juga dimiliki oleh mereka yang bekerja sebagai akademisi di universitas atau lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah lainnya.

Apakah gaya dan karakter yang saya katakan tersendiri itu? Gaya atau karakter yang saya maksud berkaitan dengan statusnya sebagai akademisi, yaitu mereka yang berkiprah dalam dunia ilmu pengetahuan, saat kebebasan akademis melekat dalam status itu. Kebebasan akademis adalah sebuah kebebasan yang diperlukan oleh peneliti atau akademisi untuk menjalankan kerja-kerja penelitian atau kerja-kerja akademis, terutama dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

LIPI sesuai dengan namanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menempatkan ilmu pengetahuan pada tempatnya yang tertinggi. Ilmu pengetahuan adalah sebuah wilayah tempat siapa pun yang bekerja di dalamnya terikat pada kaidah-kaidah yang mengatur domain atau ranah ilmu pengetahuan. Kaidah-kaidah

itu berupa prinsip-prinsip saintifik (*scientific principles*) yang bersifat universal. Universalitas prinsip-prinsip saintifik inilah yang tidak jarang harus bertabrakan dengan aturan-aturan sebagai pegawai negeri yang motonya “abdi negara”.

Di dalam prinsip-prinsip saintifik yang bersifat universal itu, sebuah prasyarat yang harus ada adalah penggunaan akal sehat (*common sense*) dan berpikir kritis (*critical thinking*). Tanpa adanya prasyarat itu, kerja-kerja penelitian atau kerja-kerja akademis yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak mungkin dijalankan dengan baik.

Ketika seorang ahli biologi bekerja di dalam laboratoriumnya, tidak ada alasan satu pun yang dapat merintanginya untuk menjalankan kerja ilmiah. Di dalam laboratorium itu, semua aturan yang membatasinya sebagai pegawai negeri harus ditanggalkannya. Satu-satunya aturan yang harus dipatuhinya adalah kaidah-kaidah yang mengatur dalam domain atau ranah ilmu pengetahuan, yaitu prinsip-prinsip saintifik yang bersifat universal. Prinsip universalitas yang dipraktikkan seorang ahli biologi dalam laboratoriumnya menjadi problematik ketika dipraktikkan oleh seorang ahli ilmu sosial yang laboratoriumnya adalah masyarakat.

Berbeda dengan laboratorium seorang peneliti biologi yang bisa kedap terhadap lingkungan luar, laboratorium seorang ahli ilmu sosial sulit untuk bisa dipisahkan dengan dunia luar. Seorang peneliti ilmu sosial memiliki keterbatasan untuk bisa mengontrol agar masyarakat yang ditelitinya tidak lalu-lalang dan berhenti berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.

Objektifitas sebagai jargon dalam ilmu pengetahuan sesungguhnya menjadi makin muskil ketika ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (*humaniora*) makin berkembang dan dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dunia pascakolonial (*post coloniality*) dan makin merangseknya globalisasi dalam setiap sudut planet yang dihuni

oleh masyarakat, yang dari luar tampak seperti terisolasi sekali pun.

Leknas-LIPI, selain LRKN-LIPI, adalah sayap ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang menjadi tempat berkuprah para ilmuwan yang menjadi peneliti di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Leknas-LIPI, yang direktur pertamanya adalah Widjojo Nitisastro, tidak dapat dilepaskan dari situasi politik peralihan setelah terjadinya peristiwa 1965. Naiknya Widjojo Nitisastro, guru besar di FEUI yang bersama rekan-rekannya, seperti Emil Salim, Ali Wardhana, Mohamad Sadli, dan Subroto dididik di berbagai universitas di Amerika Serikat, terutama di Universitas Berkeley. Sebagian mahasiswa ini mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation, dan setelah pulang, menandai munculnya elite akademia baru yang membawa ideologi baru bernama modernisasi. Setelah peristiwa 1965 dan Indonesia menjadi bagian dari blok Barat dalam Perang Dingin (*Cold War*), terbukalah kesempatan bagi para ahli ilmu sosial dan ekonomi penganut modernisasi ini untuk memainkan perannya. Oleh karena itu, bisa dimengerti jika Leknas-LIPI di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro, menghimpun para ahli ilmu sosial dan ekonomi untuk menunjang strategi pembangunan nasional Orde Baru.

Koentjaraningrat, seorang antropolog dari UI yang ikut bergabung di Leknas bisa dijadikan contoh melalui bukunya yang berjudul *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (1993). Buku ini menjelaskan berbagai bentuk mentalitas yang dapat menghambat pembangunan. Selain Koentjaraningrat, bisa juga disebutkan peran dua sosiolog penting saat itu yang bergabung di Leknas, yaitu Harsya Bachtiar, lulusan Harvard dan Selo Sumardjan, lulusan Cornell.

Perubahan orientasi mulai terjadi ketika tahun 1970-an, generasi baru ilmuwan sosial memperkuat Leknas, seperti Taufik Abdullah (Cornell), Alfian (Wisconsin), Thee Kian Wie

(Wisconsin), dan Melly G. Tan (Berkeley), semuanya lulusan universitas terkenal di Amerika Serikat. Situasi politik yang makin represif dari penguasa Orde Baru mendorong lahirnya generasi ilmuwan kritis, juga di Leknas. Tahun 1970-an, ditandai oleh munculnya kritik terhadap pilihan pembangunan Orde Baru yang dianggap hanya menguntungkan segelintir elit, didominasi modal asing, dan tidak partisipatif.

Generasi peneliti Leknas sebelumnya, seperti Widjojo Nitisastro, Koentjaraningrat, dan Selo Sumardjan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mendukung pembangunan, sebaliknya, generasi Taufik Abdulah, Thee Kian Wie dan Melly G. Tan, mempertanyakan arah dan jalannya pembangunan. Akibat sikap kritisnya, Taufik Abdullah dicopot dari jabatannya sebagai direktur Leknas, begitu juga dengan Thee Kian Wie dan Melly G. Tan yang sempat mendapatkan sanksi administratif meskipun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus melakukan penelitian.

Setelah reorganisasi LIPI di tahun 1986, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu LIPI beberapa kali dicoba dilakukan, baik melalui pengiriman peneliti untuk belajar di luar negeri maupun melalui berbagai proyek bantuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi di dalam tubuh LIPI. Setelah itu, pada periode 1990-an, lingkungan politik nasional berubah bersamaan dengan makin berperannya kelompok teknolog yang mulai menggeser para teknokrat. Munculnya Habibie yang memimpin Kementerian Riset dan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengubah *langgam* orientasi kebijakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan lebih menekankan pada aspek teknologi. Inilah era munculnya jargon “Widjojonomics vs Habibienomics”.

Dalam masa kepemimpinan Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi, berbagai lembaga baru dibentuk, antara lain Dewan Riset Nasional (DRN) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

(AIPI). Sementara itu, LIPI yang pada awalnya diharapkan menjadi “embrio” dari *Indonesian Academy of Science*, dibiarkan hidup dalam posisi sementara yang menjadi menetap itu. Pada tahun 1990-an ini, upaya untuk meningkatkan mutu penelitian, misalnya diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai Riset Unggulan Terpadu (RUT) yang supervisinya langsung dilakukan oleh peneliti-peneliti senior yang tergabung dalam Dewan Riset Nasional. Saya dan beberapa rekan dari LIPI juga terlibat dalam kegiatan penelitian skema RUT ini.

Musim berganti, arah angin politik juga berganti. Setelah tahun 1996,, pemerintah Orde Baru makin memperlihatkan keretakan-keretakan dari dalam dan gelombang aksi protes mulai bermunculan menentang dominasi pemerintahan Soeharto yang makin represif. Sebagai peneliti sosial yang laboratoriumnya adalah masyarakat, peneliti-peneliti sosial di LIPI tidak kedingin dari apa yang terjadi di luar gedung LIPI. Apalagi, secara fisik, para peneliti sosial LIPI menempati Gedung Bundar Widya Graha LIPI yang terletak di segitiga emas pusat kekuasaan politik dan ekonomi negeri ini. Gelombang demonstrasi, mahasiswa, maupun kelompok-kelompok lainnya, yang biasanya diarahkan ke gedung MPR/DPR di Senayan atau ke Istana Presiden di Merdeka Barat, selalu melewati jalan Gatot Subroto, tempat Gedung Widya Graha LIPI berada.

Keterlibatan para peneliti sosial dalam gerakan protes terhadap pemerintah Orde Baru dalam periode ini tidak lagi sekadar dalam bentuk tulisan, namun dalam bentuk yang lebih nyata, turun ke jalan. Sekelompok peneliti muda dari Pusat Penelitian Politik LIPI, seperti Ikrar Nusa Bhakti, Hermawan Sulistyono, dan Samsudin Haris membuat surat terbuka meminta Soeharto turun sebagai presiden. Mungkin, inilah pertama kalinya peneliti yang notabene adalah pegawai negeri, melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada kepala negaranya.

Setelah Soeharto jatuh pada tahun 1998 dan digantikan oleh Habibie, kemudian oleh Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono, dan saat ini Jokowi, LIPI hidup dalam masa yang disebut sebagai masa Reformasi. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itu, cukup banyak kiprah peneliti LIPI yang harus dicatat dalam sejarah. Ketika Gus Dur menjadi Presiden, Pak Taufik Abdullah yang pernah mendapatkan sanksi karena ikut menandatangani Surat Keprihatinan pada tahun 1978 bersama Thee Kian Wie dan Melly G. Tan, diangkat sebagai Kepala LIPI. Gus Dur juga mengangkat A.S. Hikam, peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI sebagai Menristek dan Ketua BPPT yang pernah dijabat Habibie. Tidak tanggung-tanggung, Gus Dur juga mengangkat Mohamad Sobary, peneliti di PMB sebagai Direktur Kantor Berita Nasional Antara.

Ada harapan pada saat itu bahwa ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk dikembangkan karena ada kesan selama ini LIPI selalu didominasi oleh ilmu-ilmu alam dan teknologi. Namun, harapan itu saya kira tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan. Mungkin karena status LIPI yang memang serba tanggung, yaitu lembaga sementara yang ditakdirkan menetap.

Ketika Profesor Anggoro Jenie dari UGM menggantikan Pak Taufik Abdullah sebagai Kepala LIPI, diperkenalkan sebutan profesor riset bagi peneliti senior LIPI. Menurut Anggoro Jenie, di Cina, misalnya istilah profesor riset sudah biasa dipakai. Apakah penambahan embel-embel gelar profesor riset memiliki pengaruh secara substansial kepada kualitas LIPI, terus terang saya tidak tahu.

Ketika Jokowi baru saja memenangkan Pilpres tahun 2014, saya, Suwarsono (PMB), Syamsuddin Haris, dan Irene Gayatri dari Pusat Penelitian Politik, berinisiatif menemui Jokowi untuk meminta beliau memberikan kuliah umum di LIPI sekaligus

mengingatkan bahwa LIPI berada di tangan beliau karena dibentuk berdasarkan SK Presiden.

Saat itu, Jokowi masih belum dilantik sebagai presiden dan masih menempati kantor Gubernur DKI. Saya ingat, saat itu kami pagi-pagi sudah berada di ruang tunggu. Presiden Jokowi pagi itu dijadwalkan mendarat dari Solo dan langsung ke kantor. Dalam pertemuan itu, kami jelaskan tentang LIPI dan maksud kedatangan kami mengundang beliau ke LIPI. Beliau saat itu banyak mendengarkan, hanya mengucapkan beberapa kalimat selain mengucapkan terima kasih atas undangan itu.

Pada 16 September 2014, Jokowi datang ke LIPI. Ruang auditorium LIPI penuh sesak oleh peneliti dan staf administrasi LIPI yang ingin melihat dan mendengarkan kuliah umum Presiden Jokowi. Sebelum Jokowi tiba, saya masih ingat bersama Suwarsono berkomunikasi dengan Eko Sulisty, staf khusus Jokowi yang meminta kira-kira Jokowi harus berbicara apa nanti. Melalui SMS, kami menyampaikan beberapa point yang menurut kami perlu disinggung oleh Jokowi dalam kuliah umumnya.

Saya kira, Jokowi memang baru mengetahui sedikit tentang LIPI, juga tentang riset dan ilmu pengetahuan. Namun, dari kuliah umum yang singkat di LIPI itu, sudah nampak kecenderungannya dalam melihat arti riset dan ilmu pengetahuan. Salah satu yang saya ingat dari ucapan Jokowi saat itu adalah, semacam tantangan bagi para peneliti, “Mampukan peneliti LIPI melalui risetnya membuat padi tumbuh jadi 3 meter dan bisa panen 4 kali dalam setahun”.

Musim berganti dan politik berubah, juga nasib LIPI di masa pemerintahan Jokowi. Saya kira, Jokowi yang menginginkan lembaga-lembaga riset, seperti LIPI, harus diintegrasikan agar penggunaan anggaran pemerintah, bisa lebih efisien dan tujuan riset yang dalam perspektifnya, harus menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi masyarakat.

Apa yang diinginkan Presiden Jokowi secara metaforis digambarkannya sebagai “padi yang tingginya 3 meter dan dapat dipanen 4 kali setahun”. Ketika akhirnya setelah proses yang cukup panjang BRIN dibentuk, dan Dr. Laksana Tri Handoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala LIPI diangkat sebagai Kepala BRIN, dalam dugaan saya, ideologi ilmu pengetahuan dan teknologi yang pragmatis ala Jokowi-lah yang mendasarinya. Dalam kaitan ini, saya melihat telah terjadinya pergeseran perspektif dalam menempatkan ilmu pengetahuan antara LIPI dan BRIN.

Sejak pensiun dari LIPI tahun 2017, bagi saya, LIPI memang telah menjadi sejarah, tetapi sejak 1 September 2021, sejarah itu memang telah benar-benar berakhir. Dalam pelantikan pejabat teras BRIN itu, kolega muda saya di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, Profesor Riset Najib Burhani, Ph.D., dilantik sebagai pelaksana tugas Organisasi Riset (OR) yang kira-kira akan menaungi riset-riset di bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora). Sebuah babak baru dalam sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia dimulai, dan pada saat yang sama, kita harus mengucapkan selamat tinggal pada LIPI. *In memoriam LIPI, rest in peace.*







# Epilog 1. Kecendekiaan, Pandemi, dan Masa Depan Bangsa

## **Thung Ju Lan**

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)

Membaca 256 halaman tulisan Mas Riwanto yang diberi judul *Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi*, kita diperkenalkan dengan pribadi sang penulis yang berlatar belakang Jawa, menekuni bidang kependudukan, khususnya migrasi, belajar dari berbagai sosok intelektual yang dikaguminya dan selalu dihantui oleh persoalan bangsa yang kompleks. Berbeda dengan Ibnu Nadzir yang memulai prolognya dengan pandemi untuk melihat kecendekiaan dan masa depan bangsa (Pandemi, Kecendekiaan, dan Masa Depan Bangsa), dalam tulisan ini, saya akan bertolak dari kecendekiaan untuk melihat pandemi dan masa depan bangsa. Bagi saya, kecendekiaan adalah suatu kecerdasan yang diasah untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang rumit.

Melalui kaca mata kependudukan, khususnya tentang migrasi penduduk yang dikembangkannya selama beberapa

dekade, penulis melihat adanya fenomena “*forced migration*” pada manusia Indonesia di masa pandemi. Pendapat tersebut sangat menarik, sayangnya tidak dielaborasi lebih jauh. Migrasi penduduk dapat terjadi dari satu area ke area lain, tetapi juga bisa terjadi ketika ada perubahan orientasi pekerjaan dalam skala besar. Seperti kita tahu, pandemi telah menyebabkan kegiatan ekonomi di lokasi-lokasi tertentu terhenti karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Akan tetapi, kita juga melihat berputarnya ekonomi perdagangan *online* yang mengandalkan pekerja transportasi, seperti ojek *online* ataupun jasa pengiriman.

Jika penulis cenderung menyoroti “polarisasi kelas” yang makin nyata akibat adanya pandemi, sepertinya ada beberapa persoalan lain yang perlu dibahas lebih lanjut. Pertama, apa yang bisa kita katakan terkait perubahan jasa transportasi ojek yang semula mengangkut manusia, menjadi jasa pengiriman barang? Apakah itu artinya ada penurunan status bagi pekerja ojek *online*? Mungkin bisa diilustrasikan sebagai berikut.

Ketika mengangkut penumpang, ada interaksi yang humanis antara pengemudi ojek dengan penumpang yang bisa menarik simpati penumpang, dan secara tidak langsung bisa meningkatkan pendapatan pengemudi. Namun, walaupun ada tip yang diberikan dalam jasa pengiriman barang, momen berinteraksi sepanjang perjalanan menjadi tiada.

Bahkan, ada cerita tentang target mereka per hari yang memaksa mereka bekerja sampai larut malam. Mungkin, hal inilah yang dimaksud oleh penulis sebagai “*forced migration*”, yaitu hari ini, pengemudi ojek *online* telah berubah menjadi bagian dari infrastruktur transportasi yang mekanik/*non-human* yang makin melelahkan.

Kedua, berbicara tentang ‘*disruption of tradition*’ semasa Lebaran, saat penduduk dipaksa berkomunikasi *online* dan bukan tatap muka seperti sebelum-sebelumnya, penulis belum

mengkaitkannya dengan perubahan sosial yang terjadi dalam hubungan keluarga. Migrasi mendorong keluarga luas di pedesaan menjadi keluarga-keluarga batih di perkotaan, tetapi ikatan keluarga dipertahankan melalui kunjungan-kunjungan hari raya. Apa yang terjadi ketika kunjungan-kunjungan tersebut makin berkurang yang berakibat pada berkurangnya keintiman antaranggota keluarga? Bagaimana keluarga akan mampu bertahan dalam gempuran persoalan jika di masa depan hanya keluarga-keluarga batih yang ada dan saling berjauhan? Di masa lalu, jaring pengaman sosial bagi keluarga batih di perkotaan banyak didapat dari dukungan keluarga luas di pedesaan. Jadi, bagaimana jika dukungan tersebut makin sulit diharapkan karena interaksi sosial yang makin jarang dan bahkan cenderung ‘terputus’ karena pandemi? Ketakutan tertular sepertinya mulai berpengaruh pada hubungan kekeluargaan (khususnya keluarga luas), pertemanan, maupun hubungan kerja.

Ketiga, penulis berbicara pandemi sebagai *wakeup call* tentang perlunya kepemimpinan gaya baru yang *visioner*. Sayangnya, *visioner* seperti apa yang dimaksud, tidak begitu jelas. Terlebih dengan kehidupan yang makin mengglobal dan kompleks, sepertinya sulit untuk mengharapkan munculnya seorang pemimpin *visioner*. Bukan Indonesia saja yang mengalami krisis kepemimpinan jika pola kepemimpinan yang diidealkan masih terfokus pada kepala negara. Cerita dari Amerika dan Eropa mencerminkan hal ini. Sesungguhnya, hal ini juga dipahami oleh penulis sendiri ketika ia menuliskan tentang Jokowi sebagai *man of contradictions*, yang bisa diartikan bahwa paradoks dari Indonesia embodied pada Jokowi yang merupakan “*a no-nonsense person*”. Pandemi memperlihatkan bahwa pragmatisme Jokowi tidak bisa menyelamatkannya dari pro dan kontra Covid-19 yang ada di masyarakat.

Fenomena umum yang muncul hari ini di berbagai bidang kehidupan adalah kolaborasi. Jadi, barangkali kita sudah harus

mulai mempertanyakan sejauh mana kita bisa mengandalkan “seorang” pemimpin, bahkan untuk kasus lokal sekali pun? Bukankah lebih baik berkolaborasi dengan konsep Ki Hadjar Dewantara tentang *Ing Ngarso Sung Tulodo* (memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya), *Ing Madyo Mbangun Karso* (di tengah-tengah, membangkitkan atau menggugah kemauan atau niat), *Tut Wuri Handayani* (mengikuti dari belakang dan memberikan dorongan moral atau dorongan semangat) karena setiap orang bisa melakukannya tanpa harus menjadi seorang pemimpin.

Tiga isu di atas mungkin, seperti dikatakan penulis, bukan hal baru, tetapi terkait dengan persoalan struktural yang sudah ada sejak tahun 1970-an, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Akan tetapi, persoalannya tidak hanya diakibatkan oleh adanya 5 (lima) bias yang dikemukakan penulis karena selain *urban bias*, *Java bias*, *migrant bias*, *remittance bias*, dan *racial bias*, ada *individual bias* yang dilupakan ketika berbicara tentang masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih komunal, khususnya di Indonesia bagian tengah dan timur. Kondisi ini, seperti dijelaskan oleh penulis, dilatarbelakangi oleh adanya mitos-mitos tentang kesatuan (NKRI harga mati), yang mematikan persatuan, tentang pertumbuhan (*economic growth*) yang menafikan pemerataan, tentang keharmonisan yang mengabaikan peminggiran (*non-conflict sensitive*), tentang demokrasi yang mengesampingkan kedaulatan rakyat (demokrasi prosedural, bukan substansial), serta tentang negara hukum yang mengabaikan martabat kemanusiaan. Akan tetapi, pada praktiknya tidak hanya lima mitos politik itu yang menimbulkan berbagai persoalan di negeri ini, seperti dikatakan sendiri oleh penulis, ada pula politik migrasi yang salah kaprah karena berusaha ‘menghentikan migrasi’, bukan ‘mengatur’ sebagaimana seharusnya.

Namun, kita juga harus mempertanyakan apa yang dimaksud penulis dengan ‘mengatur migrasi’ di sini? Jika yang dimaksud

adalah upaya menghentikan migrasi di masa pandemi, seperti halnya pengaturan juga ditujukan untuk mengurangi polarisasi kelas yang disorotinya. Akan tetapi, sejauh mana pengaturan itu mungkin? Jika kita kembali pada persoalan mendasar di negeri yang selama ini diabaikan, kita cenderung *historical amnesia*, sebagaimana dikemukakan penulis dalam tulisannya tentang Hersri Setiawan. Dalam hal amnesia sejarah tersebut, kita tidak saja berbicara tentang pertarungan memperebutkan sejarah masa lalu (*sufferings* 1965, sejarah Lekra) di ruang publik yang makin terbuka, melainkan juga sejarah kontemporer (sejarah Orde Baru) yang telah menyingkirkan dan membungkam jutaan orang, termasuk para cendekiawan yang, menurut penulis, “telah luluh dalam kekuasaan dan kehilangan peran kritisnya”. Hari ini, di mana mereka? Seperti yang bisa kita lihat, kegagalan transmigrasi, persoalan *human trafficking*, konflik sumber daya dan kerusakan lingkungan, serta berbagai persoalan lain, seperti halnya telah menjadi isu yang terpinggirkan selama pandemi ini. Bahkan, seperti dikatakan penulis, hari ini, Jokowi dan Anies Baswedan memungkirkan banjir sebagai ‘bencana ekologis’ ketika mengatakan banjir akibat curah hujan yang besar.

Pencarian penulis terhadap persoalan kebangsaan dan masa depan Indonesia sesungguhnya baru dimulai di halaman 61, ketika ia menyatakan bahwa “pelaku berganti tetapi ideologi tidak”. Artinya, kita perlu kembali pada persoalan struktural yang diamatinya telah berlangsung sejak tahun 1970-an, tentang adanya “proses yang sumber-sumber kekuatannya berada di luar kuasa kita”, terutama kekuatan kapitalisme dan ekonomi pasar, untuk mendomestikasi, menaklukkan, dan mengeksploitasi komunitas-komunitas tempatan. Ditambah pula dengan adanya konstruksi rasis terhadap budaya dan orang-orang di wilayah yang dianggap ‘*frontiers*’, terbelakang dan primitif, seperti Dayak dan Papua sehingga harus diganti dengan budaya Indonesia yang lebih beradab dan modern.

Untuk membahas masalah mendasar kebangsaan yang dimaksud penulis, kita bisa membaginya menjadi tiga bagian, sesuai dengan usulannya bahwa di masa depan kita memerlukan (1) reorganisasi kekuasaan politik; (2) restrukturisasi perekonomian; dan (3) rekonstruksi sosial. Berbicara tentang reorganisasi kekuasaan politik, penulis menunjuk pada adanya ‘*insecure feeling*’ oleh elite bangsa ini yang tampak dengan selalu dihidupkannya ‘hantu komunisme’ atau yang disebutnya sebagai pewarisan sejarah (*historical legacy*), sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai ‘*a portable political device*’. Persoalannya bukan pada komunisme itu sendiri, melainkan pada elite bangsa ini yang tidak bisa melepaskan diri dari perasaan ‘*insecure*’ tersebut. Namun, perasaan *insecure* seperti apa dan mengapa, sepertinya diperlukan sebuah kajian yang mendalam.

Mungkin, kita belum benar-benar keluar dari kolonialisme, feodalisme, dan fasisme yang pernah menguasai negeri ini. Pendapat ini hanya sebuah pemikiran intuitif yang masih harus dibuktikan secara akademis. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa bagian ini terkait erat dengan masalah kepemimpinan *visioner* yang dibicarakan penulis. Jika benar para pemimpin kita ‘*insecure*’, jangankan *visioner*, untuk memimpin kita hari ini pun sesungguhnya sangat problematik.

Dalam hal merestrukturisasi perekonomian, sayangnya tidak banyak hal terkait ekonomi yang dikemukakan penulis, kecuali kritiknya mengenai “*oxymoron* tentang kelas menengah Indonesia yang meningkat” dan “ketika GNP per kapita dijadikan ukuran kemakmuran”. Hal yang menarik perhatian saya adalah tulisannya tentang Ruslan terkait Catatan Pinggir Goenawan Mohamad, yaitu tentang “borjuis kecil yang bergerak dengan senyap” dan “mereka buat Indonesia bergerak”. Siapakah mereka? Mungkin kita perlu melihat kehidupan secara lebih puitis untuk dapat mengidentifikasi napas kehidupan yang selalu hadir pada

bangsa ini sehingga kita bisa cukup optimis tentang masa depan bangsa.

Pada tulisan ini, yang paling ingin saya kupas adalah tentang usul terakhirnya, yaitu rekonstruksi sosial. Mungkin, hal ini yang paling dekat dengan pemikiran saya sendiri, dan yang saya temukan berserakan di dalam kumpulan karya Mas Riwanto ini. Kita bisa mulai dengan tulisannya tentang Jakob Oetama yang mempertanyakan ‘siapakah kita, mengapa sebagai bangsa terasa cair?’. Jelas, ada yang salah dengan bangsa ini dan perlu diperbaiki. Tulisan penulis tentang “Pragmatisme, Proyekisme dan Berhala-Berhala itu” memperjelas hal ini, terutama terkait dengan “*suffering*” sebagai pengalaman penderitaan eksistensial orang Papua. Pernyataannya tentang “ada yang membusuk dalam darah di tubuh kita” memperkuat pendapatnya tentang penyakit yang diderita bangsa ini, yaitu “*corrupted mind*” (pikiran yang terkolonisasi sehingga menderita kelumpuhan sistemik dan *inertia*). Hal ini ditunjukkan pula dengan kritiknya kepada Nadiem Makarim yang terperangkap oleh birokrasi patrimonial dalam tulisan “persekongkolan membunuh akal sehat”.

Melanjutkan pembacaan kita tentang ide rekonstruksi sosial penulis, kita bisa merasakan keagumannya terhadap Yudi Latif yang berbicara tentang pengerdilan atau pemfosilan (verbalisme dan formalism) Pancasila sebagai mitos dan petunjuk praktis, tentang genealogi intelektual Muslim di Indonesia dan politisasi Islam yang diresponsnya dengan “*Islam yes, partai Islam no*”. Sepertinya, dalam hal ini, ada kesamaan pemikiran antara Mas Riwanto dan Yudi Latif tentang perlunya ideologi atau nilai-nilai luhur yang bisa menjadi fondasi bangsa. Artinya, rekonstruksi sosial yang diusulkannya perlu mengacu pada Pancasila sebagai ‘*civil religion*’ (dimensi moral dan etos yang hidup dan nyata), sebagaimana dipaparkan oleh Yudi Latif, seorang ‘pakar Pancasila’ yang memang telah mendalaminya selama bertahun-tahun.



Di luar penerimaannya terhadap Pancasila, penulis sepertinya kesulitan mencari jawaban yang lebih praktis bagi ‘penyakit’ yang diderita bangsa ini. Melalui tulisannya tentang “Gerak, Suara, dan Rupa”, yang mungkin terinspirasi lagu *The Seekers*., penulis menempatkan dirinya seperti seorang seniman yang terinspirasi secara *serendipity*, yaitu sebuah peristiwa kebetulan yang sering kali menentukan dalam eksplorasi atau proses pencarian pengetahuan yang baru. Dalam hal ini, penulis percaya bahwa seni dan ilmu perlu dipertautkan, sama seperti mitos dan religi atau sejarah dan bahasa yang perlu digandengkan satu sama lain. Dari sini, kita bisa melihat eksplorasinya kepada konsep Tuhan sebagai yang tak terbayangkan atau *indescribable*; kepada kekristenan dan komunitas lokal Nusantara, serta kebangkitan agama-agama lokal; kepada masa lalu terkait peristiwa Malari dan peran Hariman Siregar; kepada pemaparan Ignas Kleden dan Goenawan Mohamad terkait sosok-sosok intelektual dan karya pemikiran mereka; dan kepada ide ‘demokrasi bisa mati’ yang dibunuh lewat proses legal karena dilabraknya aturan tidak tertulis (*guardrails*). Semuanya itu mengerucut pada dua kekuatan yang diidentifikasi penulis sebagai sangat represif, yaitu militer dan agama.

Pada akhirnya, pencarian penulis sepertinya bermuara pada “Dari Cendekiawan dan Kekuasaan ke *Unfinished Nation*’ yang mengangkat pentingnya cendekiawan dalam proses perubahan sosial-politik. Menurut penulis, untuk masa depan Indonesia, diperlukan gerakan massa atau partai massa yang progresif, serta cendekiawan kritis yang “mampu melihat paralelitas dan koinsidensi beserta kontradiksi-kontradiksinya dari sejarah panjang politik bangsa Indonesia”.

Pertanyaan utamanya mungkin “bagaimana cendekiawan-cendekiawan kritis bisa mencari jalan keluar dari kekuatan-kekuatan represif tersebut?” Pertanyaan penulis yang berangkat dari kecendekiawannya ini perlu menjadi “gerakan

intelektual” yang lebih besar dan luas karena kecendekiaan tidak pernah menjadi milik seseorang tanpa penempaan dan pengasahan secara bersama-sama dengan cendekiawan lainnya.

Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa *Mencari Indonesia 3: Esai-Esai di Masa Pandemi*, membantukita memahami kegelisahan seorang intelektual ketika dihadapkan dengan persoalan bangsa yang kompleks, terlebih ketika permasalahannya bersifat sosio-psikologis. Ketiga usulan di atas bisa menjadi jargon politis yang sulit diimplementasikan karena “bagaimana kita menyembuhkan ‘*corrupted mind*’” seperti yang membutuhkan pencarian yang lebih serius melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu. Memang benar, diperlukan peran cendekiawan, tetapi pertanyaan lanjutannya adalah cendekiawan seperti apa? Dan apakah cendekiawan yang dimaksud bisa ditemukan di Indonesia hari ini, terutama jika kita ingat bahwa Orde Baru telah meluluhkan mereka sehingga kehilangan peran kritisnya? Mungkin, *Mencari Indonesia 4* bisa diarahkan untuk menemukan cendekiawan-cendekiawan kritis yang diperlukan bagi proses perubahan sosial politik bangsa ini.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



## Epilog 2. Sebuah Pencarian Tiada Henti

### **Elvira Rumkabu**

Akademisi Universitas Cendrawasih Papua

*Metafor Mencari Indonesia* dalam judul buku ini membangkitkan rasa penasaran saya, kenapa penulis lebih ingin “mencari” daripada “memahami”, “memikirkan” atau “menemukan kembali” Indonesia? Bagaimana sebenarnya gambaran “Indonesia” yang sedang dicari oleh penulis? Rasa penasaran ini mendorong saya untuk mencari tahu pengalaman penulis dalam mencari Indonesia, khususnya di masa pandemi ini.

Kemampuan dalam mendiskusikan pertanyaan yang ‘penting, tepat, dan mendasar merupakan kekuatan dalam proses pencarian tersebut. Memformulasikan pertanyaan yang tepat, membantu kita menalar dengan analitik karena memberikan ruang untuk mengeksplor argumen, asumsi, isu, konklusi, alasan, bukti, fakta, bahasa, dan membantu mengidentifikasi letak kesalahan berpikir, manipulasi, ataupun tantangan bagi pemikiran kritis kita. Hal ini membuat kita mampu mengembangkan fondasi solid dalam membuat keputusan apa yang hendak kita terima dan yang hendak

kita tolak. Penulis bertanya untuk memaknai (*to understand*) dan mengevaluasi (*to evaluate*) kebijakan, isu, ataupun fenomena tertentu, serta mencari penyelesaiannya (*settlement*).

Penulis mengantarkan kita untuk memaknai pandemi tidak hanya sebagai situasi, tetapi juga instrumen yang mengekspos kebobrokan dalam sistem. Pembatasan mobilitas bukan hanya soal fisik, tetapi juga jarak sosial yang makin eksplisit antara mereka yang memiliki *privilege* dan mereka yang tersisih. Pandemi juga menelanjangi bias kelas dalam struktur sosial yang berdampak langsung pada penanganan dan penyebaran Covid-19. Kita juga diajak untuk memikirkan kembali, apakah kerangka kebijakan yang ada sudah tepat dalam melindungi dan memberikan keadilan di tengah ketimpangan struktural selama masa pandemi.

Sebagai seorang pemikir yang solutif, penulis menawarkan 3R, yakni reorganisasi kekuasaan, rekonstruksi sosial, dan restrukturisasi perekonomian. Ketiganya terdengar sebagai resep manjur dalam mengatasi persoalan pandemi yang bersifat struktural menuju pemulihan sosial dan ekonomi di masa mendatang. Hanya, bagaimana inisiatif ini akan dilaksanakan, serta kendala dan kondisi apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya, menjadi pertanyaan penting yang harus dieksplor penulis ke depannya.

Keleluasaan penulis dalam bertanya dan berefleksi, menunjukkan kemerdekaannya sebagai seorang intelektual yang sensitif pada persoalan-persoalan mendasar. Dalam sebuah diskusi daring, penulis pernah mengatakan “kita harus melepaskan topeng kesopanan untuk bebas berpikir”. Sekat-sekat yang mengolonialisasi dan mem-*framing* “apa yang harus dipikirkan”, perlu dihancurkan karena satu-satunya yang menandakan kita ada adalah berpikir. Di titik ini, kita dipaksa keluar dari zona nyaman untuk mempertanyakan kembali “bias dan ketimpangan”, “ketakutan-ketakutan elusif”, “mitos politik

dan kekuasaan”, “Pancasila dan ketakutan”, “hantu komunisme”, “kristenisasi”, “pragmatisme”, “kebebasan akademik”, dan “rasisme” dalam proses pencarian Indonesia.

Menariknya, berbagai diskusi ini diletakkan dalam sebuah perjalanan dalam memaknai keindonesiaan yang tampaknya belum selesai. Dalam imajinasi saya, Indonesia yang dicari adalah sebuah tujuan atau rumah aman dengan jaminan terhadap kedaulatan untuk berpikir, berefleksi, mengkritisi, bertindak, dan mempertanyakan hal-hal yang sifatnya mendasar bagi kehidupan bersama. Indonesia juga adalah sebuah rumah besar dalam menjamin kemanusiaan dan keadilan bagi warganya. Sebagai sebuah proses, mencari Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proyek bersama (*common project*) yang inklusif dan menuntut peran serta semua orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Indonesia. Akan tetapi, sudah sejauh mana proses pencarian kita untuk menemukan Indonesia?

Sebagai seorang scholar, perempuan, dan Papua, saya adalah representasi entitas tersisih karena berbagai konteks konflik dan kekerasan. Dalam proses refleksi ini pun saya bertanya, “Apakah saya juga sedang mencari Indonesia yang sama seperti penulis? Apakah kita berpijak di titik yang setara dan sama dalam mencari Indonesia?” Untuk mencari Indonesia, haruslah berangkat dari refleksi tentang siapa diri saya di dalam Indonesia, serta bagaimana Indonesia menerima dan memaknai diri, identitas dan keberadaan saya selama kita hidup bersama. Di sinilah letak paradoks itu.

Ragam identitas seharusnya tidak menjadi masalah karena perbedaan itu menyatukan, seperti ungkapan *bhinneka tunggal ika*. Akan tetapi, situasinya lebih kompleks daripada sekadar diversitas. Marginalisasi sistemik, rasisme, kekerasan dan pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial ekonomi telah memberikan makna bagi identitas Indonesia dan Papua. Penindas-tertindas, master-budak, penjajah-terjajah, adalah

gambaran relasi hierarkis antara keduanya. Dalam bentuk paling ekstrem, Papua dilihat sebagai sebagai *state of imagination* yang dianggap menawarkan kerangka hidup bersama yang lebih adil dan berdaulat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Mencari Indonesia haruslah dimulai dengan menyoal siapa kita dalam konstruksi Indonesia. Perasaan memiliki (*sense of belonging*) menjadi Indonesia adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu, upaya, kesabaran, dan konsistensi dalam merekonsiliasi pengalaman dan tujuan bersama. Oleh karena itu, mendorong terbentuknya kekitaan dapat dimulai dengan membangun *trust*, menegosiasikan masa lalu, dan juga menunjukkan komitmen kuat untuk hidup bersama secara setara dan berkeadilan.

Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan memberikan apresiasi kepada penulis, Pak Riwanto, yang menginspirasi saya dan lebih banyak lagi cendekiawan untuk berpikir dengan bebas dan merdeka, menginterupsi guna menunjukkan mana yang benar atau salah, dan terus berdialektika guna mencari *framework* bagi kehidupan bersama. Dari Pak Riwanto, saya belajar bahwa menulis adalah ruang aman untuk *healing*, menyuarakan yang terpinggirkan, merepresentasikan diri, membongkar yang mendasar, tetapi dianggap tabu, dan juga sebagai ruang refleksi kritis dalam mencari apa yang kita anggap berharga dan patut diperjuangkan.



## Daftar Pustaka

- 15 Minutes Metro TV. (2020, 3 Juni). *Selamat menempuh normal baru* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/TMG3ruJvRwE>
- 2p2play. (2019, 14 Januari). Unidentified people wearing mouth mask against air smog pollution with PM 2.5 walking on street at Chatuchak District in Bangkok City, Thailand. *Shutterstock*. <https://www.shutterstock.com/imagephoto/bangkok-thailand-january-14-2019-unidentified-1286643355>
- Adam, A. W. (2018, Juli 26). Dampak G30S setengah abad histografi gerakan 30 September 1965 [Presenter]. Orasi Pengukuhan Profesor Riset LIPI. Auditorium Utama LIPI, Jakarta.
- Afadlal, Irewati, A., Mashad, D., Zaenuddin, D., Purwoko, D., Turmudi, E., Hisyam, M., & Sihbudi, R. (2004). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. LIPI Press.
- Agriesta, D. (2020, 4 Juli). Ruang isolasi penuh, ratusan pasien positif covid-19 di Jayapura jalani karantina mandiri. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/04/22514561/ruang-isolasi-penuhratusan-pasien-positif-covid-19-di-jayapura-jalani?page=all>
- Almirzanah, S. (2020). *Ketika umat beriman mencipta Tuhan*. Gramedia Pustaka Utama.



- Ariawan, I., Riono, P., Farid, M. N., & Jusril, H. (2020, 12 April). Pemodelan COVID-19 Indonesia: *Apa yang terjadi jika mudik?* [https://www.fkm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-Indonesia-siapmudik-0412\\_3pm-min.pdf](https://www.fkm.ui.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19-Indonesia-siapmudik-0412_3pm-min.pdf)
- Aristama (2019). Hariman Siregar: Kembali ke UUD 1945 Asli Bukan Berarti Mati [Gambar]. *RMOL*. <https://rmol.id/amp/2019/02/06/377592/hariman-siregar-kembali-ke-uud-1945-asli-bukan-berarti-demokrasi-mati>
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia* [Disertasi, Stanford University]. Stanford University Press.
- Aspinall, E. (2020, 31 Agustus). Zeitgeist's man. *Inside Story*. <https://insidestory.org.au/zeitgeists-man/>
- Aspinall, E., & Berensch, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Assontwocm. (2021, 18 Agustus). Mengulas pusat internasional untuk migrasi dan Kesehatan [Gambar]. *Association for Network Care*. <http://www.associationfornetworkcare.com/mengulas-pusat-internasionaluntuk-migrasi-dan-kesehatan/>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (t.t) Membumikan nilai-nilai Pancasila tangkal ancaman radikalisme [Gambar]. *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*. <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/416/membumikan-nilai-nilaipancasila-tangkal-ancaman-radikalisme.html>
- Bambina, A. (2020). Coronavirus in China. Novel coronavirus, people in white medical face mask. Concept of coronavirus quarantine illustration. Seamless pattern [Gambar]. *Shutterstock*. <https://www.shutterstock.com/image-illustration/coronavirus-china-novel-people-white-medical-163615653>

- Benda, H. J. (1958). *The crescent and rising sun: Indonesian Islam under Japanese occupation*. Bandung: N.V.Uitgeverij W. Van Hoeve.
- Berdikaribook. (2021). Menjadi benih perlawanan rakyat [Gambar]. *Bukalapak*. <https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/sejarah/1a2h4q6jual-menjadi-benih-perlawanan-rakyat>
- Bland, B. (2020). *Man of contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia*. Penguin.
- BNA Photographic. (1970). [President Suharto arrives at Ypenburg] [Foto]. *Alamy Stock Photo*. <https://www.alamy.com/president-suharto-arrives-atypenburg-president-suharto-behind-him-his-wife-siti-hartini-tien-and-queenjuliana-right-prince-bernhard-date-september-3-1970-location-the-hague-thenetherlands-the-netherlands-ypenburg-zuid-holland-keywords-queenspresidents-state-visits-airfields-personal-name-berhard-prince-juliana-queennetherlands-soeharto-image341305110.html>
- Budiman, A. (1966, Juli). Esai tentang esai. *Sastra Horison*.
- Buka, I. (2020, 30 Desember). Tenaga medis satu puskesmas positif, Kota Gorontalo zona merah [Gambar]. *Gorontalo Post*. <https://gorontalopost.jawapos.com/news/cover-story/30/12/2020/tenagamedis-satu-puskesmas-positif-kota-gorontalo-zona-merah/>
- Burhani, A. N., (2020, Agustus 27). *Agama, kultur (In)toleransi dan dilema minoritas di Indonesia* [Presentasi]. Orasi Pengukuhan Profesor Riset LIPI. Auditorium Utama LIPI, Jakarta. YouTube. [https://youtu.be/nJn7aX\\_u90E](https://youtu.be/nJn7aX_u90E).
- Cak Nur society. (2018, 12 September). *Haul Cak Nur ke #13 #OrasiBudaya|Yudi Latif* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/YDWbazEERNc>.
- Chandra, S. (2013). *Mortality from the Influenza Pandemic of 1918-19 in Indonesia*.

- Carey, P. (2007). *The power of prophecy: Prince Dipanagara and the end of an older Java, 1785—1885*. KITVL Press.
- Carey, P. (2012). *Kuasa ramalan: Pangeran Diponegoro dan akhir tatanan lama di Jawa, 1785—1888* (Penerj. Simbolon, T. P.). Penerbit KPG.
- CNBC. (2020, 28 Juli). *What's next for the U.S. economy: Paul Krugman* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=h75kO1uPHo0>
- CSIS Indonesia. (2021, 16 Agustus). *Pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CUX0-E4wo00>
- Davidson, J. (2018). *Indonesia: Twenty years of democracy (Elements in politics and society in Southeast Asia)*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108686518.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dhyatmika, W. (2020, 29 Agustus). Resensi buku: Jokowi, man of contradictions. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/buku/161321/resensibuku-jokowi-man-of-contradictions>
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. (2017, 7 Juli). Max Lane unfinished nation [Gambar]. *Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi*. <https://basipda.bekasikab.go.id/berita-unfinished-nationresensi-buku.html>
- Dylag, J. (2018, 4 Februari). People crossing street in Vienna [Gambar]. *Unsplash*. Diakses melalui <https://unsplash.com/photos/PMxT0XtQ--A>
- Effendy, B. (2020, Mei 26). Komunisme, siapa takut? *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-10880-post-komunisme-siapa-takut.html>.
- Elisabeth, A., Pamungkas, C., Widjojo, M. S., & Blegur, S. (2005). *Agenda & potensi damai di Papua*. LIPI Press.

- ELSAM. (2020, 21 Desember). Berhala-berhala infrastruktur: potret dan paradigma pembangunan papua di masa otsus [Gambar]. *Elsam*. <https://elsam.or.id/berhala-berhala-infrastruktur-potret-dan-paradigma-pembangunan-papua-di-masa-otsus/>
- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge University Press.
- Eme Freethinker [@eme\_freethinker]. (2020, 29 Mei). No words. #icantbreathe #sayhisname #saymyname #georgefloyd #justiceforgeorgefloyd #blacklivesmatter [Gambar]. Instagram. Diakses melalui <https://www.instagram.com/p/CAxVd7TCZj6/>
- Faizasyah, T. (2020, 13 Juli). Decoupling global movement for equality with a call for separatism in Papua. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/13/decoupling-global-movement-for-equality-with-a-call-for-separatism-in-papua.html>
- Fauzia, M. (2020, 2 Juli). Selain Indonesia, ada 6 negara lain yang naik “kelas” menurut Bank Dunia. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2020/07/02/181010726/selain-indonesia-ada6-negara-lain-yang-naik-kelas-menurut-bank-dunia?page=all>
- Feith, H. (1980). Repressive-developentalist regime in Asia: Old strengths, new vulnerabilities. *Prisma*, 19, pp. 39–55.
- Feith, H. (1980). Repressive-developentalist regime in Asia: Old strengths, new vulnerabilities. *Prisma*, 19, pp. 39–55.
- Firmansyah, M. J. (2020, 4 Mei). Larangan Mudik, 10 Ribu Kendaraan Coba Terobos Perbatasan. *Tempo*. <https://metro.tempo.co/read/1338455/laranganmudik-10-ribu-kendaraan-coba-terobos-perbatasan/full&view=ok>
- FOKAL UI. (2020, 20 Mei). *Kebangkitan nasional manusia Indonesia memaknai new normal* [Webinar].
- Fukuyama, F. (1992). *The End of History and The Last Man*. Free Press.

- Getty Images. (t.t). [Communist - the color speaks] [Gambar]. *Getty Images*. <https://www.gettyimages.ae/detail/photo/communist-the-color-speaks-royaltyfree-image/163737618>
- Gischa, S. (2021, 8 Februari). Biografi Mohammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama [Gambar]. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/08/193330869/biografimohammad-hatta-wakil-presiden-indonesia-pertama>
- Gramedia Pustaka Utama [@bukugpu]. (2019, 28 Februari). #bukurekomendasi pekan ini | Korupsi - Melacak arti, menyimak implikasi | Penulis: B. Herry Priyono | Detail buku [http://bit.ly/BR2019\\_0227#bukugpu](http://bit.ly/BR2019_0227#bukugpu) [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/bukugpu/status/1100957160144429056?lang=ga>
- Gramedia. (2017, 3 April). Catatan pinggir 7 [Gambar]. *Gramedia Digital*. <https://ebooks.gramedia.com/books/catatan-pinggir-7-i>
- Gramedia. (2020a, 20 Juli). Kekasih musim gugur [Gambar]. *Gramedia Digital*. <https://ebooks.gramedia.com/books/kekasih-musim-gugur>
- Gramedia. (2020b, 29 Maret). Ketika umat beriman mencipta tuhan [Gambar]. *Gramedia Digital*. <https://ebooks.gramedia.com/books/ketika-umat-berimanmencipta-tuhan>
- Gromico, A. (2019, 23 September). Penyebab demo mahasiswa hari ini dan respons Jokowi soal RUU KUHP [Gambar]. *Tirto.id*. <https://tirto.id/penyebabdemo-mahasiswa-hari-ini-dan-respons-jokowi-soal-ruu-kuhp-eiAV>
- Hakim, A. L. (2015, 19 Juli). Papua lebih damai alinya, tak seperti komentar dunia maya [Gambar]. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/ariflukman/55abcc8e4023bd9e050a80be/papualebih-damai-aslinya-tak-seperti-komentar-dunia-maya>

- Halim, D. (2020, 5 Juli). Update 5 Juli: 1.607 kasus baru covid-19, Jatim catat kenaikan tertinggi. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/17094401/update-5-juli-1607kasus-baru-covid-19-jatim-catat-kenaikan-tertinggi?page=all#page2>
- Hardiyanti, E. Y. (2020, 9 September). Hari ini Jakob Oetama, tokoh pers pendiri Kompas Gramedia wafat [Gambar]. *Katolikana*. <https://www.katolikana.com/2020/09/09/hari-ini-jakob-oetama-tokoh-pers-danpendiri-kompas-gramedia-wafat/>
- Hartana, A. (2021, 8 Juli). “Oesapa”, pohon lontar di balik lagu doa “Panyuwunan”. [Gambar]. *Sesawi.net*. <https://www.sesawi.net/oesapa-pohonlontar-di-balik-lagu-doa-panyuwunan/>
- Hasibuan, A., Zulkifli, A., Daulay, A. H., & Rizal, Y. (2018). *Menjadi benih perlawanan rakyat: Hariman Siregar, Malari '74 dan demokrasi Indonesia*. (Zulkifli, A, Ed.). Djaman Baroe.
- Hasibuan, I., Airlambang, & Rizal, Y. (2011). *Hariman dan Malari: Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing*. Q-Communication.
- Hatta, M. (1954). *Beberapa fasal ekonomi: Djalan ke ekonomi dan koperasi*. Perpustakaan Perguruan Kementrian PP dan K.
- Helmore, E. (2021, 25 Juli). Yep, its bleak, says expert who tested 1970s end-of-the-world prediction. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/25/gaya-herrington-mit-study-the-limits-to-growth>
- Himpisi Jaya. (2017, 12 Maret). Sambutan Dr. Johannes A.A. Rumeser, M.Psi, Psi, acara pisah sambut [Gambar]. *Himpisi Jaya*. <http://himpisijaya.org/sambutan-dr-johannes-aa-rumeser-m-psi-psi-acarapisah-sambut/>
- Hisyam, M. (2001). *Caught between three fires, The Javanese pangulu under the Dutch colonial administration 1882–1942*. INIS.

- Hisyam, M. (t.t.) About Muhamad Hisyam [Gambar]. *Wordpress.com*. Diakses pada 22 Oktober 2021. <https://muhhisyam.wordpress.com/about/>
- Howstreet. (2020, 23 Maret). Under cover of covid-19 scare banksters will take control of all assets [Gambar]. *Howstreet*. <https://www.howstreet.com/2020/03/undercover-of-covid-19-scare-banksterswill-take-control-of-all-assets/>
- Humain, A. (2020, 9 Januari). Bahas banjir bersama Anies, Jokowi: Jakarta bukan daerah yang berdiri sendiri [Gambar]. *Tiktak.id*. <https://www.tiktak.id/bahas-banjir-bersama-anies-jokowi-jakarta-bukandaerah-yang-berdiri-sendiri.html/2>
- Ingleson, J. (1982) Mohammad Hatta, cendekiawan, aktivis dan politikus. *Prisma*, 1, pp. 61–74.
- Izak, Lattu, & Kholiludin. (Ed.) (2020). *Agama & budaya Nusantara pasca Kristenisasi*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press. <https://elsaonline.com/>
- Jassin, H. B. (1968). *Angkatan 66: Prosa dan puisi*. Gunung Agung.
- Jassin, H. B. (1970). *Heboh sastra 1968*. Gunung Agung.
- Kahin, G. (1980). In memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980). *Indonesia*, 30, pp. 113-119, 1980.
- Katadata Indonesia. (2020, 3 Februari). *Luhut Binsar Pandjaitan: Boosting Indonesia's investment* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/q6BnfStlaio>
- Kedisiplinan penentu keberhasilan. (2020, 31 Mei). *Kompas*. <https://ebooks.gramedia.com/id/koran/kompas/31-may-2020>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018, 22 Maret). Ignas Kleden: kementerian agama merepresentasikan hubungan agama dan negara [Gambar]. *Kementerian Agama Republik Indionesia*. <https://kemenag.go.id/read/ignas-kleden-kementerian-agamamerepresentasikan-hubungan-agama-dan-negara-j7940>

- Ki Demang Sokowaten. (2013, 24 Agustus). *Medang Heritage Society Yogya TV Part 02* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QIN96OnUVI>
- Kleden, H. Y. (2018, 20 Mei). Kepada Kakak Ignas Kleden (proficiat 19 Mei 1948-19 Mei 2018) [Gambar]. *Lantern*. <https://indonesianlantern.com/2018/05/20/kepada-kakak-ignas-kledenproficiat-19-mei-1948-19-mei-2018/>
- Kleden, I. (1994). *The involution of the involution Thesis: Clifford Geertz's studies on Indonesia revisited*.
- Kleden, I. (2001). *Jurnalisme fakta dan jurnalisme makna: Wartawan dan kebudayaan. fragmen sejarah intelektual: Beberapa profil Indonesia merdeka (397-415)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kleden, I. (2020). *Fragmen sejarah Intelektual: Beberapa profil Indonesia merdeka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koch, A. (2020). [Ilustrasi COVID-19] [Gambar]. *Pixabay*. <https://pixabay.com/illustrations/corona-world-vaccination-virus-5366769/>
- Koentjaraningrat, R. M. (1993). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*.
- Kurniawan, W. (2019, 21 Oktober). Gojek CEO quits to join Indonesian cabinet, replacements named [Gambar]. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-president-gojek-idUSKBN1X00B>
- Lane, M. (2008). *Unfinished nation: Indonesia before and after Suharto*. Verso.
- Lane, M. (2014a). *Bangsa yang belum selesai*. Djaman Baroe.
- Lane, M. (2014b). *Ingatan revolusi, aksi massa dan sejarah Indonesia*. Djaman Baroe.
- Lane, M. (2021). *Ingatan revolusi, aksi massa dan sejarah Indonesia*. Djaman Baroe.



- Latif, Y. (2004). *The Muslim intelligentsia of Indonesia: A genealogy of its emergence in the 20th century*. [Disertasi, The Australian National University]. Open Research Library. <https://doi.org/10.25911/5d7635934da2b>
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang penuntun untuk pembudayaan*. Mizan.
- Lestari, D. A. (2021, 15 Maret). Mendikbud Nadiem Makarim ingin Candi Borobudur jadi cagar budaya kelas dunia [Gambar]. *Sigermedia.com*. <https://www.sigermedia.com/read/sm-2621/mendikbud-nadiem-makarim-ingin-candi-borobudur-jadi-cagar-budaya-kelas-dunia>
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown
- Li, T M. (2007). *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Indonesia (The will to improve: Governmetalilty, development, and the practice of politics* (Santoso, H. dan Semedi, P., penerj). Marjin Kiri.
- Li, T. M. (2016). Governing rural Indonesia: Convergence on the project system. *Critical Policy Studies*, 10(1), 79–94. <https://doi.org/10.1080/19460171.2015.1098553>
- LIPI. (2014, 24 Agustus). Selamat ulang tahun, LIPI! [Gambar]. *LIPI*. <http://lipi.go.id/berita/single/Selamat-Ulang-Tahun-LIPI/9492>
- LMU. (2019, 17 Oktober). How democracies die. LMU Bellarmine College of Liberal Arts [Gambar]. *LMU.edu*. <https://bellarmine.lmu.edu/levitsky/>
- Lotulong, G, (2020, 11 November). AP II rekayasa lalu lintas untuk alternatif ke Bandara Soekarno-Hatta [Gambar]. *Kompas.com*. <https://travel.kompas.com/read/2020/11/10/121833827/ap-ii-rekayasa-lalulintas-untuk-alternatif-ke-bandara-soekarno-hatta>
- Mackie, J. A. C. (1980). Integrating and centrifugal factors in Indonesian politics since 1945. *Indonesia: the Making of*

- a Nation*, 2, 669-84. Research School of Pacific Studies, Australian National University.
- McVey, R. (1996). Building behemoth: Indonesian construction or the NationState. Dalam S. L. Daniel dan M. Ruth (Ed.). *Making Indonesia: Essays on modern Indonesia in honor of George Mc T. Kahin*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program
- MetroTV. (2020, 4 Juni). DKI Jakarta, perpanjangan PSBB atau new normal? [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=qFB9feWSgQg>
- Mizanstore. (2020, 23 Agustus). Wawasan pancasila – Ed komprehensif bintang penuntun untuk kebudayaan [Gambar]. Mizanstore Digital. [https://mizanstore.com/wawasan\\_pancasila\\_-\\_ed\\_69647#tab-2](https://mizanstore.com/wawasan_pancasila_-_ed_69647#tab-2)
- Mohamad, G. (2004a). *Setelah Revolusi Tak Ada Lagi*. Pustaka Alvabet
- Mohamad, G. (2004b, 22 Agustus). Surat buat siapa saja. *Tempo*. <https://www.rakyat.id/esai/surat-buat-siapa-saja/>
- Mohamad, G. (2005a). *Ketika revolusi tak ada lagi*. Pustaka Alvabet.
- Mohamad, G. (2005b). Pramoedya. Dalam *Ketika Revolusi Tak Ada Lagi*. (8–28). Pustaka Alvabet.
- Mohamad, G. (2005c). Saini KM. Dalam *Ketika Revolusi Tak Ada Lagi*. ((23–27). Pustaka Alvabet.
- Mohammad, G. (2005d). Seni dan pasar. Dalam *Ketika revolusi tak ada lagi*. (427–455). Pustaka Alvabet.
- Mohammad, G. (2020, 17 Oktober). Ruslan. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/catatan-pinggir/161670/catatan-pinggirgoenawan-mohamad-ruslan>
- Mohamad, G. (2021, 31 Juli). Catatan pinggir tentang filsafat dan sajak Toeti Heraty. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/>

catatan-pinggir/163785/catatanpinggir-tentang-filsafat-dan-sajak-toeti-heraty

- Mortimer, R. (2011). *Indonesian communism under Sukarno: Ideologi dan politik 1959-1965* [Disertasi]. Pustaka Belajar.
- Noer, D. (2018). *Biografi politik: Mohamad Hatta dan Orde Baru (Jilid 3)*. Penerbit Buku Kompas.
- Nuraini, Wahyuni, S., Windiarto, T., Oktavia, E., & Karyono Y. (2016). *Profil penduduk Indonesia hasil SUPAS 2015*. Badan Pusat Statistik.
- Nusantara Institute. (2020, 4 Desember). Agama & budaya nusantara pasca kristenisasi [Gambar]. *Nusantara Institute*. <https://www.nusantarainstitute.com/agama-budaya-nusantara-pascakristenisasi/>
- Octaviani, P. R. (2021, 1 Februari). Kemendikbud putuskan rektor USU terpilih tidak lakukan plagiat. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/381687/kemendikbud-putuskan-rektorusu-terpilih-tidak-lakukan-plagiat>
- Pabottingi, M. (2021). Ke mana kita merdeka. *Kompas*.
- Pambudy, N. M., & Khoiri, I. (2009). *Optimisme kemerdekaan Taufik Abdullah*. <http://lipi.go.id/berita/optimisme-kemerdekaan-taufik-abdullah/3658>
- Pamungkas, C. (2020, 27 Agustus). *Rekonstruksi pendekatan dalam kajian Konflik di Asia Tenggara: Kasus Indonesia, Thailand, Filipina dan Myanmar*. Orasi Penguukuan Profesor Riset LIPI. Auditorium Utama LIPI, Jakarta. YouTube. [https://youtu.be/nJn7aX\\_u90E](https://youtu.be/nJn7aX_u90E)
- Pamuntjak, L. (2017). *AMBA*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pamuntjak, L. (2020). *Kekasih musim gugur*. Gramedia Pustaka Utama.

- Pramodhawardani, J. (2020, Juli 16). Melihat Papua dengan mata data. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/07/16/melihat-papua-dengan-mata-data>
- Prasetyo, W. A. (2018, 27 Juli). Luhut Pandjaitan: Jangan selalu salahkan pemerintah terdahulu. [Gambar]. *Lokadata.id*. <https://lokadata.id/artikel/luhutpandjaitan-jangan-selalu-salahkan-pemerintah-terdahulu>
- Prass Production. (2021, 24 April). *Lokakarya transformasi sosial budaya melalui seni berbasis heritage* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/5JQpV85CZrw>
- Priyono, H. (2018). *Korupsi: Melacak arti, menyimak implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Qurtuby & Kholiludin. (Ed.) (2019). *Agama & kepercayaan Nusantara*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press. <https://elsaonline.com/>
- Qurtuby & Kholiludin. (Ed.) (2020). *Agama & budaya Nusantara Pasca Islamisasi*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press. <https://elsaonline.com/>
- Rahadian, A. S., dan Handayani, T. (2020). *Kependudukan dan pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rashid Kapadia. (2018, 15 Mei). *Yuval Noah Harari on vipassana, reality, suffering, & consciousness* [Video]. YouTube. [https://youtu.be/i1\\_YhlXiuxE](https://youtu.be/i1_YhlXiuxE)
- Rendra, W. S. (1974). Aku mendengar suara. Dalam W. S. Rendra. *Potret pembangunan dalam puisi*. Pustaka Jaya. (Buku diterbitkan tahun 1980).
- Robinson, R. & Hadiz, V. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The Politics of oligarchy in an age of markets*. Routledge Curzon. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-01048-6>.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Allen & Unwin.

- Rossa, J. (2020). *Buried histories: Anticomunist massacres of 1965—1966 in Indonesia*. The University of Wisconsin Press.
- Rousseau, J. J. (2014). *The social contract*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Roth, D. (2005). Lebenstraum in Luwu: Emergent identity, migration and access to land. *Bijdragen*, 161(4), 485–516.
- Rumi Forum. (2011, 16 November). *Syafaatun Almirzanah-When Mystic Masters Meet | Rumi Forum* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/-sHu9DqEuSA>
- Said, E. (1996). *Representation of the intellectuals*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- Salihara Arts Center. (2020, 8 Juli). *Memuliakan desa setelah pandemi*. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/T18fyoueYrg>
- Saluang, S. (2019). *GWR jali merah dari berbagai tuturan biografis Gunawan Wiradi*. Yayasan Penerbit Obor Indonesia.
- Sarulina, B. (2021, 11 April). Refleksi intelektualitas daniel dhakidae [Gambar]. *Historia*. Diakses melalui <https://historia.id/politik/articles/refleksiintelektualitas-daniel-dhakidae-P740E/page/1>
- Satria, T. (2006, 10 November). Herry Priyono dan filsafat yang terlibat [Foto]. *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/obituari/162180/obituari-herry-priyono-pengajar-filsafat-yang-memprovokasi-dan-menganjurkan-filsafat-yang-terlibat>
- Science Badan Riset dan Inovasi Nasional [@science\_BRIN]. (2020, 27 Agustus). Dalam orasi berjudul “Agama, Kultur (In)Toleransi, dan Dilema Minoritas di Indonesia” Ahmad Najib Burhani memaparkan empat rekomendasi untuk mengatasi problematika dan dilema minoritas di Indonesia [Tweet]. Twitter. [https://twitter.com/science\\_BRIN/status/1298864151297630210](https://twitter.com/science_BRIN/status/1298864151297630210)

- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state*. Yale University Press.
- Seblat, R. (2020, 18 Agustus). Mengenang Bisri Effendy: Sang guru yang mendadak pergi [Daring]. *Alif.id*. [alif.id/read/rs/mengenang-bisri-effendy-sangguru-yang-mendadak-pergi-b232099p/](https://alif.id/read/rs/mengenang-bisri-effendy-sangguru-yang-mendadak-pergi-b232099p/)
- Septiawan, W. (2020, 13 November). Jangan paksakan orang rimba Jambi tinggal di perumahan [Gambar]. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/767769/jangan-paksakan-orang-rimbajambi-tinggal-di-perumahan>
- Serikat Petani Indonesia. (2010, 21 September). Gunawan Wiradi [Gambar]. *SPI*. <https://spi.or.id/saatnya-petani-bersatu/attachment/3/>
- Setiawan, H. (2021). *Dari dunia dikepung jangan dan harus*. Sekolah mBROSOT, Kunci Forum, dan Kolektif Belajar.
- Social Movement Institute [@suluhpergerakan]. (2019, 6 Januari). Hesri Setiawan jangan menyerah waktu belum tiba. Matahari dan bintang menantimu untuk mendengarkan cerita-cerita tentang semangatmu melawan dan bertahan hidup di pulau Buru. Mari kita doakan agar beliau cepat sembuh dan dapat kembali beraktifitas seperti biasa. [Tweet]. Twitter. <https://twitter.com/suluhpergerakan/status/1081748714274734081>
- Sölle, D. (2001). *The silent cry: Mysticism and resistance*. Fortress Press.
- Suarez, J. D. (2015). Criticar es signo de pobreza emocional [Gambar]. *Rincon de la Psicología*. <https://rinconpsicologia.com/criticar-signo-pobreza-emocional/>
- Sularto, S. T. (2020, 12 Oktober). Humanisme Soedjatmoko, Widjojo, dan Jacob Utama. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/10/12/humanisme-soedjatmokowidjojo-dan-jakob-oetama/>

- Sularto, S. T. (2021, 24 April). Hesri Setiawan melawan amnesia. [Gambar]. *Kompas.id*. [https://www.kompas.id/baca/buku/2021/04/24/hesri-setiawanmelawan-amnesia/?utm\\_source=headtopics&utm\\_medium=news&utm\\_campaign=2021-04-24](https://www.kompas.id/baca/buku/2021/04/24/hesri-setiawanmelawan-amnesia/?utm_source=headtopics&utm_medium=news&utm_campaign=2021-04-24)
- Supri, A. (2020, 16 Juli). Covid-19 sebabkan kemiskinan di pedesaan meningkat [Foto]. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qdjogl428/covid-19-sebabkan-kemiskinandiperdesaan-meningkat>
- Supriatma, M. (2020, 3 Juli). Rasisme terhadap bangsa Papua itu nyata. *Suarapapua*. <https://suarapapua.com/2020/07/03/rasisme-terhadap-bangsapapua-itu-nyata/>
- Suratno, J.B. (1991, 27 Oktober). Mendikbud Fuad Hassan: Kita Harus Mencatat Sejarah Kita Sendiri [Gambar]. *Kompas*. <https://jelajah.kompas.id/perjalanan-pinisi-ammana-gappa/baca/mendikbud-fuad-hassan-kita-harus-mencatat-sejarah-kita-sendiri/>
- Suryawan, I. N. & Fahrizka, M. A. (Ed.). (2020). *Berhala-berhala infrastruktur: Potret dan paradigma pembangunan Papua di masa otsus*. Penerbit Elsam.
- Tedjabayu. (2020). *Mutiara di padang ilalang*. Komunitas Bambu.
- Tempo. (2021a, 16-22 Agustus). Khusus Hari Kemerdekaan. *Tempo*
- Tempo. (2021b, 30 Juli). Buku-buku karya Goenawan Mohamad tentang politik, filosofi, dan sastra [Gambar]. *Tempo*. <https://seleb.tempo.co/read/1489063/buku-buku-karya-goenawan-mohamadtentang-politik-filosofi-dan-sastra>
- Thee, K. W. (Ed.). (2003). *Recollections: The Indonesian economy, 1950s-1990s*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Tirtosudarmo, R. (2012, 19 Juni). Papua and problem of structural injustice. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/>

news/2012/06/19/papuaand-problem-structural-injustice.html

- Tirtosudarmo, R. (2017, 29 September). Peneliti LIPI, Dedi S. Adhuri: Marjinalitas dan dampak pembangunanancam orang rimba Jambi. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-443-post-peneliti-lipi-dedi-s-adhurimarjinalitas-dan-dampak-pembangunan-ancam-orang-rimba-jambi.html>
- Tirtosudarmo, R. (2019a, 11 Mei). Memindahkan ibukota: Revolusioner visioner. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-8155-post-memindahkanibukota-revolusioner-visioner---.html>
- Tirtosudarmo, R. (2019b, 16 Desember). Sucoro. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9724-post-sucoro.html>
- Tirtosudarmo, R. (2019c, 18 November). Gunarti. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-9558-post-gunarti.html>
- Tirtosudarmo, R. (2019d, 2 Desember). Pangendum tampung. *Kajanglako*. <http://kajanglako.com/id-9644-post-pangendum-tampung.html>
- Tirtosudarmo, R. (2020a). Kebebasan akademis: Antara kepentingan nasional dan akal sehat. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12186-post-kebebasanakademis-antara-kepentingan-nasional-dan-akal-sehat.html>
- Tirtosudarmo, R. (2020b, 16 Desember). Suko Bandiyono, mentor penelitian migrasi di LIPI yang sederhana. *Kajanglako.com*. <https://kajanglako.com/id12193-post-suko-bandiyono-mentor-penelitian-migrasi-di-lipi-yangsederhana.html>
- Tirtosudarmo, R. (2020c, 25 Mei). Itiningsih. *Kajanglako.com*. <https://kajanglako.com/id-10871-post-itiningsih---.html>
- Tirtosudarmo, R. (2020d, 4 Juni). PSBB a forced migration dan siapa normal baru. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/>



id-10939-post-psbb-a-forcedmigration-dan-untuk-siapa-normal-baru-.html

- Tirtosudarmo, R. (2021a). Jawa, Islam dan Nusantara: Memposisikan agama dalam keragaman budaya. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture. II* (1), 113–125.
- Tirtosudarmo, R. (2021b). Persekongkolan membunuh akal sehat: Renungan untuk Nadiem Makarim. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12252-postpersekongkolan-membunuh-akal-sehat-renungan-untuk-nadiemmakarim.html>
- Tirtosudarmo, R. (2021c). Slamet Imam Santoso. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12259-post-slamet-iman-santoso.html>
- Tirtosudarmo, R. (2021d, 13 Maret). Hersri, trauma, dan amnesia sejarah. *Kajanglako*. <https://kajanglako.com/id-12277-post-hersri-trauma-dan-amnesiasejarah.html>
- Tirtosudarmo, R. (2022, 2 Januari). Fuad Hassan. *Kajalangko*. <http://kajanglako.com/id-12885-post-fuad-hassan.html>
- Tribun News. (2020, 14 September). Selama PSBB Jakarta, Kapal Dishub hanya untuk warga Ber-KTP Kepulauan Seribu dan petugas [Gambar]. *Tribunnews.com*. <https://m.tribunnews.com/metropolitan/2020/09/14/selamapsbb-jakarta-kapal-dishub-hanya-untuk-warga-ber-ktp-kepulauan-seribu-danpetugas?page=all>
- Tsing, A. L. (2004). *Friction: An ethnography of global connection*. Princeton University Press.
- Tudor, H. (1972). *Political myth*. Macmillan Publishers Limited. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-01048-6>
- UKSW Live Events. (2021, 16 Agustus). *Mengawal Republik: Pilihan politik, resiko dan prospek masa depan* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pgbiz5o3Za8>

- Ulummudin. (2019, 13 November). H.B Jassin: kritikus sastra yang menerjemahkan Al-Quran. [Gambar]. *Islami.co*. <https://islami.co/h-b-jassin-kritikus-sastra-yang-menerjemahkan-al-quran/>
- Wahid, A. (1983, 16 Juli). Salahkah Jika Dipribumikan? *Tempo*. <https://majalah.tempo.co/read/kolom/45872/salahkah-jika-dipribumikan>
- Weber, M. (2000). *Etika Protestan dan semangat kapitalisme* (Priyasudiarja, Y., Penerjemah). Surabaya: Pustaka Prometheus. (Karya orisinal diterbitkan 1958).
- Winters, J. (1996). *Power in motion: Capital mobility and the Indonesian state*. Cornell University Press
- Winters, J. (2021, 17 Februari). *Reflections on oligarchy, democracy, and the rule of law in Indonesia* [Presenter]. Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ke-75. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. YouTube. <https://youtu.be/BaJVX7zju5M>
- Wiryamartana, I.K. (1982). Menyambut terbitnya Old Javanese-English Dictionary. *Basis*, November, 402-409.
- Wiryamartana, I. K. (2014). Cara pikir Jawa dalam sastra suluk: Panduan pembacaan. Dalam I.K. Wiryamartana, *Sraddha - Jalan Mulia: Dunia Sunyi Jawa Kuna*. SDU Press.
- Wiryamartana, I. Kuntara (2016). *Sraddha-jalan mulia: Dunia sunyi Jawa Kuna*. Sanata Dharma University Press.
- Wood, G. (2021, Desember). The next decade could be even worse. *The Atlantic*. Diakses dari <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/12/can-history-predict-future/616993/>
- Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (2020). Sampul buku *Fragmen sejarah intelektual: Beberapa profil Indonesia Merdeka*. <http://obor.or.id/Fragmen-Sejarah-Intelektual-Ignas-Kleden>

- Yossihara, A. (2020, 2 September). Jadi Guru Besar, Sekum Muhammadiyah tawarkan pembaruan pendidikan agama. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2020/09/02/jadi-guru-besarsekum-muhammadiyah-tawarkan-pembaruan-pendidikan-agama/>
- Zizek, S. (2020). *Pandemics! Covid-19 shakes the world*. ORBooks. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190630577.013.30>
- Zoetmulder, P. J. (1995). *Pantheism and monism in Javanese Suluk literature*. (Riklefs, M. C., Penerj.). National Library of Australia.



## INDEKS

- Abdul Mu'ti 256, 257  
Adalhard Eilers 250  
Afro-American 35, 36, 37, 38  
Agama Sipil ix, 244  
Agastya Rama Listya 61  
Ahmadiyah 110, 124  
Ali Moertopo 181, 190  
Anas Saidi 166  
Andrew Newberg 258  
*a new normality* 88  
Anis Baswedan 51, 52, 53, 54,  
55  
Antariksa 166  
Anthony Giddens 201  
Aspinnal 263  
Asrul Sani 166, 276, 277, 297
- Bagus Takwin 266  
Bambang Dwiatmoko 58
- Banawiratma 260  
Ben Bland 262, 263, 265, 266,  
267, 268  
Bernadinus Herry Priyono  
200  
Bisri Effendy 96, 164, 167,  
168, 352  
Bob Elson 108, 149  
Budiman Sudjatmiko 32, 83,  
189  
Bulletin of Indonesian Eco-  
nomic Studies 310  
Bung Karno 70, 73, 108, 118,  
119, 215, 237, 238, 285
- Cahyo Pamungkas 123  
Clifford Geertz 162, 275, 346  
CSEAS 169, 170  
*Cyber war* 89

- Daniel Dhakidae 81, 83, 166,  
173, 183, 202, 307, 311
- Dayak Meratus 143
- Dedi Adhuri 166, 223
- Dorothee Solle 258, 261
- Edi Masinambow 157, 165,  
170, 171, 174
- Edi Swasono 185
- Edward Aspinall 308, 309
- Elias Jan Bonai 118
- Elvira Rumkabu 141, 142, 335
- Emha Ainun Najib 166
- Emil Salim 71, 73, 75, 140,  
318
- Ernst Cassirer 57, 61
- Fadjar Ibnu Thufail 166
- Forced migration 30, 31
- Ford Foundation 166, 318
- Frans Kaisiepo 118
- Frans Magnis Suseno 260
- Fuad Hassan 216, 217, 218,  
219, 220, 239
- Ganjar Pranowo 90
- George Floyd 6, 34, 37, 119
- Goenawan Mohamad 4, 82,  
166, 170, 183, 236, 240,  
269, 275, 277, 283, 288,  
295, 296, 330, 332, 354
- GOLKAR 102
- Gunawan Wiradi 155, 187,  
188, 352, 353
- Gus Dur 115, 116, 165, 177,  
275, 277, 297, 302, 303,  
321
- Hamengku Buwono 277, 278
- Hariman Siregar 190, 283,  
284, 286, 287, 288, 332,  
345
- Henk Meijer 167
- Henk Schulte Nordholt 47
- Hermawan Sulistyono 166, 320
- Hersri 210, 211, 212, 213, 214,  
215, 329, 356
- How Democracies Die 289
- Ignas Kleden 7, 173, 274, 275,  
279, 281, 282, 295, 296,  
332, 346
- Jabodetabek 15, 17, 23, 26, 32
- Jakob Oetama 179, 180, 181,  
182, 183, 184, 331, 344
- Jaleswari Pramodhawardani  
120
- Java bias 104, 328
- Jeffrey Winters 149
- John L. Esposito 257
- Jokowi 21, 25, 29, 41, 44, 64,  
65, 88, 89, 90, 110, 140,  
145, 153, 154, 156, 192,  
245, 262, 263, 264, 265,  
266, 267, 268, 314, 321,  
322, 323, 327, 329, 342,

- 344, 345  
 Jo Rumeser 7, 189, 191, 192  
 Jumardi Putra 168
- Kalimantan Timur 74, 264  
 Kapitalisme 144  
 Kebebasan akademik 129, 131  
 Khofifah 90  
 Komaruddin Hidayat 260  
 konflik sosial 10, 30, 124, 125,  
 126  
 Kristenisasi 301, 303, 346
- LEKRA 214  
 LIPI 314, 315, 316, 318, 319,  
 320, 321, 322, 323
- Makmuri Soekarno 166  
 Malari ix, 190, 191, 283, 284,  
 287, 332, 345  
 M. Amin Abdullah 260  
 Mark Robert Weldman 258  
 Marthin Luther King 37  
 Max Lane 80, 81, 284, 287,  
 308, 309, 311, 342  
 Michele Shermer 258  
 Mitos politik 108, 109, 110  
 Mobilitas Penduduk vii, xvi,  
 14  
 Mochtar Pabottingi 3, 80, 84,  
 154, 166, 172, 174, 183  
 Mohamad Sadli 139, 181, 318
- Mohamad Sobary 165, 166,  
 171, 180, 321  
 Mudik 343  
 Muhammad Azka Fahriza  
 141, 143  
 Muridan Widjojo 166
- Niniek L. Karim 266  
 NKRI Harga Mati 109, 135  
 Nurcholish Madjid 113, 115,  
 116, 245, 247, 297
- Oey Hiem Hwie 211  
 OPSUS 285  
 Orang Rimba 49, 50  
 Orde Baru 6, 22, 71, 74, 76,  
 77, 80, 102, 103, 104,  
 106, 108, 109, 110, 111,  
 112, 115, 122, 124, 130,  
 140, 141, 142, 150, 153,  
 154, 155, 177, 180, 181,  
 183, 190, 195, 206, 211,  
 214, 280, 300, 305, 307,  
 308, 310, 311, 318, 319,  
 320, 329, 333, 342, 349  
*Oxymoron* 40, 42, 45
- Pancasila 74, 113, 114, 115,  
 116, 117, 145, 183, 244,  
 245, 246, 247, 248, 249,  
 331, 332, 337, 340, 347  
 Pandu Riono 23, 53, 54

- Parni Hadi 166
- Partai Rakyat Demokratik (PRD) 32, 83, 308, 311
- Paul Krugman 37, 38, 341
- Pemikiran Politik Indonesia 277
- Pepera 105, 136
- Perang Dingin 72, 99, 101, 115, 237, 251, 318
- Peter Carey 151
- Petisi 24 Oktober 286, 287, 288
- Politik migrasi 24, 26, 27
- Pramoedya Ananta Toer 276, 278, 309
- PSBB vii, xi, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 326, 349, 355, 356
- Rhenald Kasali 33
- Richard Dawkins 255, 261
- Ridwan Kamil 90
- Risma 90
- Rizal Ramli 166
- Romo Mangun 166
- Saung Swara 58, 59, 60, 62
- Sedulur Sikep 49, 50
- Singgih Susilo Kartono 46, 47
- Slamet Iman Santoso 149
- Soedjatmoko 176, 180, 182, 183, 184, 190, 275, 277, 297, 298, 299, 353
- Soeharto xi, xvii, 16, 73, 102, 108, 109, 110, 142, 155, 160, 166, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 237, 268, 307, 308, 309, 310, 311, 320, 321, 366
- Soe Hok Gie 189, 190, 191, 285
- Stephen Hawking 255
- Subagio Sastrowardojo 164
- Suko Bandiyono viii, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 355
- Sutamat Aribowo 166, 167
- Sutan Takdir Alisyahbana 275
- Suwarsono 166, 321, 322
- Syafaatun Almirzanah 257, 352
- Syafii Maarif 115
- Taufik Abdullah viii, 7, 169, 177, 178, 318, 319, 321, 350
- Tedjabayu 211, 213, 214, 354
- Teknokrasi 44, 216
- Teuku Faizasyah 120, 121
- Thee Kian Wie 139, 170, 172, 175, 176, 177, 318, 319, 321
- Thung Julan 166
- Todung Mulya Lubis 82, 166
- Tomy Firman 47

Urang Kanekes 49  
Vaksinasi 147

Wahyu Dhyatmika 263

Widjojo Nitisastro 102, 139,  
155, 180, 182, 195, 311,  
318, 319

Yando Zakaria 167

Yudi Latif ix, 113, 114, 115,  
116, 117, 202, 244, 247,  
249, 331, 341

Yuval Noah Harari 142, 215,  
255, 351



Buku ini tidak diperjualbelikan.



## BIODATA PENULIS



**Riwanto Tirtosudarmo** memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1979, dan gelar doktor dalam bidang demografi sosial dari *Research School of Social Sciences*, Australian National University, Canberra, Australia, pada tahun 1990. Dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah, pada tahun 1952, dan mulai bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1980.

Tahun 1980–1986 sebagai peneliti di Pusat Penelitian Penduduk, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas-LIPI); tahun 1986–1998 di Pusat Penelitian Kependudukan dan Ketenagakerjaan (PPT-LIPI); tahun 1998 hingga pensiun tahun 2017 di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI). Semenjak pensiun ia mendedikasikan diri sebagai peneliti sosial independen.

Beberapa buku yang ditulisnya, antara lain *Dari Riau sampai Timor-Timur: Demografi-Politik Pembangunan di Indonesia* (Sinar Harapan, 1996), *Mencari Indonesia: Demografi Politik*

*Pasca Soeharto* (LIPI Press, 2007), *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial* (LIPI Press, 2010), *From Colonization to Nation- State: The Political Demography of Indonesia* (LIPI Press, 2013), *On the politics of migration: Indonesia and Beyond* (LIPI Press, 2015), *The Politics of Migration: Indonesia and Beyond* (Springer, 2018), dan *From Colonization to Nation- State: The Political Demography of Indonesia* (Revised edition, Springer, 2022).

Buku ini adalah edisi revisi dari seri ketiga *Mencari Indonesia* yang sebelumnya telah diterbitkan pada 2019. Edisi revisi ini diterbitkan melalui program akuisisi Penerbit BRIN agar menjangkau khalayak pembaca yang lebih luas.

Sebagaimana tecermin dalam judulnya, seri ketiga ini berisi esai-esai yang ditulis pada masa pandemi Covid-19, yang tidak hanya merupakan isu kesehatan belaka, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial, ekonomi dan politik. Komentar-komentar penulis sebagai cendekiawan sosial yang menaruh perhatian khusus pada migrasi penduduk, dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan mengenai pelbagai isu sosial yang muncul saat pandemi, yaitu Papua, hantu komunisme, rekayasa sosial, kebebasan akademis dan isu-isu lain yang menjadi keprihatinan kita bersama.

Buku ini, yang ditulis berdasarkan perspektif seorang intelektual dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks saat pandemi, diharapkan dapat menjadi literatur tidak hanya kalangan peneliti, akademisi dan kalangan yang menaruh minat khusus pada isu sosial dan politik bangsa, tetapi juga menjadi bacaan yang menginspirasi masyarakat umum.

Selamat membaca!

# MENCARI INDONESIA 3

*Esai-Esai Masa Pandemi*



Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN**  
**Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah**  
Gedung B.J. Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: 0811-8612-369  
E-mail: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
Website: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)

DOI: 10.55981/brin.434



ISBN 978-623-7425-62-5



9 786237 425625

Buku ini tidak diperjualbelikan.